

Milik Departemen P dan K  
Tidak diperdagangkan

# SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH JAWA TIMUR



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN  
KEBUDAYAAN DAERAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perpustakaan  
Direktorat Perlindungan dan  
Pembinaan Peninggalan  
Sejarah dan Purbakala

# Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN  
DAERAH  
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1977/1978

PERPUSTAKAAN  
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan  
Peninggalan Sejarah dan Curbakala

---

NO. INDUK *2071 a Hadiah*

---

TGL. *1 Maret 1984.*

## PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Ensiklopedi Musik/Tar Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survei lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat

disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K di Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permu-seuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Surabaya Propinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Jawa Timur.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:
  1. Heru Sukadri K.
  2. Ny. Umiati RA
6. Tim penyempurnaan naskah di Pusat yang terdiri dari:
  - Konsultan/Anggota:
    1. Prof. Dr. I.B. Mantra
    2. Dr. Astrid S. Susanto
    3. Abdurrachman Surjomihardjo
    4. A.B. Lopian
  - Ketua : Sutrisno Kutoyo
  - Sekretaris : M. Soenjata Kartadarmadja
  - Anggota :
    1. Anhar Gonggong
    2. Mardanas Safwan
    3. Surachman
    4. Muchtaruddin Ibrahim
    5. Masjkuri
    6. Sri Sutjiatiningsih
7. Editor : Sutrisno Kutoyo
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

**Pemimpin Proyek Penelitian dan  
Pencatatan Kebudayaan Daerah,**

**Bambang Suwondo**

**NIP 130117589**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
PENDAHULUAN .....	1
A. Tujuan Penelitian .....	1
B. Masalah .....	2
C. Ruang Lingkup .....	3
D. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian .....	3
E. Hasil Akhir .....	5
<b>BAB I KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE - 19.</b>	<b>6</b>
A. Pemerintahan .....	6
B. Sosial Budaya .....	9
1. Pendidikan .....	9
2. Seni Budaya .....	13
C. Kehidupan Ekonomi .....	13
D. Perkembangan alam pikiran dan kepercayaan .	19
<b>BAB II KEADAAN DAERAH DARI TAHUN ± 1900 - 1928</b>	<b>22</b>
A. Pengaruh politik etika di daerah .....	22
B. Kegiatan masyarakat yang relevan dengan ataupun yang merupakan embrio dari ke- bangkitan nasional di daerah Jawa Timur ...	33
C. Interaksi di daerah Jawa Timur dengan berdirinya partai/organisasi .....	41
1. Budi Utomo .....	41
2. Sarekat Islam .....	48
3. Indische Partij .....	57
4. Muhammadiyah .....	66
5. Taman Siswa .....	71
6. Organisasi Kepemudaan .....	77

7.	Partai Komunis Indonesia .....	83
8.	Gerakan Perburuhan .....	92
9.	Nahdatul Ulama .....	97
10.	Gerakan Wanita .....	102
11.	Partai Nasional Indonesia .....	107
D. Keadaan di daerah sekitar Perang Dunia I (1914 - 1918) dan pendirian Volksraad .....		
1.	Sikap Pemerintah Hindia Belanda .....	113
2.	Keadaan Masyarakat (Sosial-Ekonomi, Pendidikan, Budaya, dan Agama) .....	115
3.	Hubungan dengan Volksraad .....	119
4.	Anggota Volksraad yang mewakili Daerah (Biografi Ringkas) .....	123
5.	Dewan-dewan (Raad) yang berdiri di Daerah .....	126
E. Perjuangan di daerah Jawa Timur .....		
1.	Interaksi dengan Pemogokan-pemogokan di Sekitar tahun 1923 .....	129
2.	Interaksi dengan Pemberontakan tahun 1926/1927 .....	134
3.	Sikap Masyarakat terhadap Azas Non-koperasi dan koperasi terhadap Pemerintahan Hindia Belanda .....	138
4.	Interaksi dengan permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) .....	143
5.	Interaksi dengan Sumpah Pemuda .....	149
6.	Kegiatan Masyarakat pada berbagai bidang kehidupan: Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama .....	153
BAB III. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 - 1942 .		
A. Pengaruh politik pemerintah Hindia Belanda pada tahun ± 1930 .....		
		161

1.	Politik keras terhadap gerakan Non-kooperasi .....	161
2.	Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie) .....	169
B.	Depresi Ekonomi di daerah .....	172
C.	Interaksi terhadap kepartaian /organisasi ....	183
1.	PNI Bru .....	183
2.	Partindo .....	185
3.	Partai Sarekat Islam Indonesia .....	187
4.	Parindra .....	189
5.	GAPI .....	193
6.	MIAI .....	195
7.	Petisi Sutardjo .....	196
8.	Gerakan Indonesia Berparlemen .....	198
D.	Keadaan di daerah menjelang keruntuhan pemerintahan Hindia Belanda dan Kedatangan tentara Jepang .....	205
1.	Sikap Pemerintah Hindia Belanda .....	205
2.	Keadaan Masyarakat (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama) .....	206
3.	Sikap Masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda .....	212
4.	Keadaan Pemerintah Hindia Belanda pada saat terakhir .....	213
E.	Kedatangan pasukan pendudukan Jepang ...	219
1.	Propaganda Jepang yang terasa di daerah .....	219
2.	Waktu kedatangan Pasukan Jepang ....	220
3.	Sikap Jepang terhadap Aparatur Pemerintah Belanda .....	221
4.	Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia.	223
5.	Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang.	230

PENUTUP .....	234
CATATAN KAKI HALAMAN .....	235
DAFTAR TATANAM/ISTILAH .....	259
DAFTAR BACAAN .....	269

## PENDAHULUAN

### A. TUJUAN PENELITIAN

Ketetapan MPR-RI. No. IV/MPR/71, Departemen Penerangan Republik Indonesia, halaman 62, antara lain telah menunjukkan adanya peningkatan usaha pembinaan dan pemeliharaan Kebudayaan Nasional untuk memperkuat kepribadian Bangsa, kebangsaan Nasional dan kesatuan Nasional, termasuk menggali dan memupuk kebudayaan daerah sebagai unsur-unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada Kebudayaan Nasional.

Sejarah sebagai suatu bukti masa lampau yang memberi gambaran tentang berbagai usaha yang dapat ditempuh suatu bangsa dan masyarakat dalam pertumbuhan serta perkembangan, yang terikat kepada faktor ruang dan waktu.

Maka dari itu sudah sewajarnya kalau buku "*Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, 1974/1975 - 1978/1979*", Buku ke III, Departemen Penerangan Republik Indonesia, halaman 201, dengan tegas menentukan bahwa aspek sejarah yang mencari asal-usul dan memperlihatkan proses perkembangan, serta aspek struktural mendapatkan perhatian yang utama. Dengan usaha ini diharapkan akan bertambahnya pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaannya, yang akan lebih memantapkan strategi dan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian jelaslah, bahwa Sejarah dapat memantapkan strategi dan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Akibatnya pada tahun anggaran 1976/1977 Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah dengan bantuan dari Tim Peneliti Daerah Jawa Timur telah berhasil menggarap lima aspek kebudayaan daerah Jawa Timur, yang antara lain termasuk ke dalamnya aspek Sejarah Daerah Jawa Timur. Hasil penggarapan aspek Sejarah Daerah Jawa Timur itu berupa laporan tentang pencatatan dan penelitian secara pokok-pokok dan garis besar yang memerlukan penggarapan lebih lanjut; berupa penulisan tematis yang akan berfungsi sebagai pendalaman dan pelengkapan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas dan mengingat urgensi serta batas yang sangat singkat dan pembiayaan yang sangat

terbatas, maka kegiatan penelitian ini berupa pencatatan dan pengumpulan data Sejarah Daerah Jawa Timur dalam Zaman Kebangkitan Nasional". Adapun kegiatan penelitian ini terutama ditujukan untuk melengkapi perbendaharaan data sejarah pada khususnya dan data kebudayaan pada umumnya dari Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, serta untuk melengkapi data sejarah Nasional dan memantapkan konsep-konsep yang bergayutan (*relevant*).

## B. M A S A L A H

Kebangkitan Nasional merupakan sebagian dari perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang penting, karena dasar-dasar dari kenegaraan dan kebudayaan Indonesia dimantapkan pada zaman itu ( $\pm$  1900 – 1942). Perjuangan Kebangkitan Nasional itu sendiri terjadi di seluruh daerah Indonesia termasuk di daerah Jawa Timur, dengan berbagai corak dan ragamnya. Maka itu diperlukan penelitian tentang sejarah Zaman Kebangkitan Nasional di daerah-daerah, termasuk di daerah Jawa Timur, secara lebih luas dan terperinci untuk lebih mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai zaman-zaman sesudahnya, yaitu: zaman Pendudukan Jepang dan zaman Kemerdekaan. Selain daripada itu, pengetahuan yang lebih luas dan terperinci tentang sejarah zaman Kebangkitan nasional di daerah-daerah akan menunjang penyusunan sejarah Nasional, terutama periode 1900–1942 secara lebih lengkap.

Dalam periode sejarah kebangkitan nasional, medan sejarah daerah Jawa Timur ternyata telah menghasilkan tokoh-tokoh pejuang dan peristiwa-peristiwa sejarah yang menentukan jalannya sejarah perjuangan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Belanda. Dr. Sutomo (lahir di desa Ngepeh–Nganjuk), H.O.S. Tjokroaminoto (lahir di kawedanan Kleco – Madiun), E.F.E. Douwes Dekker (lahir di Kabupaten Pasuruan), Ir. Sukarno (lahir di kota Surabaya) adalah tokoh-tokoh Jawa Timur yang mempunyai peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda. Sarekat Islam yang pusatnya semula berada di kota Surabaya merupakan organisasi politik penyebar ide yang bersifat nasionalistis–demokratis–relegius dan ekonomis. "*Indonesiasche Studie Club*" yang lahir di kota Surabaya adalah organisasi kaum intelektual yang menyebar luaskan dan melaksanakan ide kesatuan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Peristiwa "*interinsulaire-dag*" (Hari Nusantara; tgl. 12 Juli 1925

yang berlangsung di gedung perlindungan Pelajar Jl. Sulung kota Surabaya, adalah salah satu usaha untuk menggadang persatuan nasional Indonesia; sedangkan peristiwa "Konggres Indonesia Raya", yang berlangsung di Gedung Nasional Indonesia Jl. Bubungan, Surabaya (tgl. 2 Januari 1932) adalah salah satu usaha Bung Karno untuk mempersatukan Partindo dan PNI-Baru. Pendek kata dalam zaman kebangkitan Nasional di Jawa Timur banyak peristiwa sejarah yang tidak sedikit artinya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda. Walaupun peristiwa-peristiwa semacam itu telah ada yang diungkapkan dalam buku-buku sejarah Nasional Indonesia, namun penjelasan yang lebih luas dan terperinci tentang sejarah zaman kebangkitan Nasional di daerah Jawa Timur itu belum pernah ada. Mengingat betapa pentingnya andil Jawa Timur dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama periode kebangkitan Nasional itu, maka sudah sewajarnya kalau penelitian yang berupa pencatatan dan pengumpulan data sejarah daerah Jawa Timur dalam Zaman Kebangkitan Nasional ini dilakukan.

### C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan ketentuan dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen P dan K, ruang lingkup penelitian ini meliputi Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Tingkat Satu Jawa Timur yang terjadi dalam kurun waktu antara  $\pm$  1900–1942 yang mencakup segi-segi kehidupan pemerintahan, kenegaraan, masyarakat, ekonomi, seni budaya dan agama/kepercayaan.

### D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

Sebagai ternyata dalam karya ini, pencatatan dan pengumpulan data sejarah tidak selamanya tanpa dibubuhi pendapat atau penafsiran, walaupun dalam acuan yang terbatas. Dilihat dari segi metodologinya, dapatlah dikatakan bahwa masalah pengujian dan pengolahan data menjadi fakta sejarah belum digarap secara memuaskan. Katakanlah dalam taraf sekarang barulah sampai tingkat memilih data, yang kebanyakan dari sumber sekunder, sehingga dalam hal ini sukar sekali menghindarkan diri dari penyeritaan tafsiran yang mengubah data tersebut sebagai verita Sejarah.

Dalam menyusun tulisan ini penyusunan telah terikat kepada

sistematika yang harus diikuti. Meskipun demikian, dalam memenuhi kerangka sistematika itu, sudah barang tentu penyusun tidak selalu memperoleh datanya. Berhubung terbatasnya waktu yang digunakan dan sangat kurangnya biaya yang tersedia, dalam menyusun karya ini, penyusun lebih menitik beratkan penggunaan metoda pengumpulan data perpustakaan (*libarary research*). Dalam hal ini penyusun banyak mendapat bantuan dari perpustakaan jurusan Sejarah FKIS—IKIP Surabaya, perpustakaan Museum Daerah Jawa Timur "Tantular" dan perpustakaan Kantor Koordinator Perintis Kemerdekaan Daerah Jawa Timur. Walaupun demikian, untuk melengkapi sumber-sumber tertulis yang telah tersedia, dalam batas jangkauan pembiayaan yang ada, penyusun juga berusaha mengumpulkan data dari beberapa daerah di Jawa Timur, yang di antaranya dari kabupaten Surabaya, Malang dan Madiun.

Akhirnya sejumlah kitab petunjuk tentang metodologi sejarah, seperti yang tercantum pada daftar sumber, telah banyak membantu penyusun dalam menyusun data sejarah daerah Jawa Timur Zaman Kebangkitan Nasional seperti dalam bentuknya sekarang ini.

Sebagai suatu pencatatan sejarah daerah periode ± 1900—1942, kiranya data yang terdapat dalam karya ini, dapat merupakan usaha rintisan guna penulisan sejarah yang sebenarnya.

Sesuai dengan ketentuan dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, maka sistematika laporan ini akan tersusun sebagai berikut :

**1. Pendahuluan.**

Mengetengahkan tentang tujuan penelitian, masalah, ruang lingkup dan pertanggungjawaban ilmiah prosedur penelitian.

**2. Keadaan di daerah pada akhir abad ke-19.**

Mengemukakan tentang pemerintahan, sosial-budaya, kehidupan ekonomi dan perkembangan alam fikiran dan kepercayaan.

**3. Keadaan di daerah dari tahun ± 1900—1928.**

Menampilkan tentang pengaruh politik etika di daerah, kegiatan masyarakat yang bergayutan (relevan) dengan ataupun yang merupakan embrio dari kebangkitan nasional di daerah

interaksi di daerah dengan berdirinya partai/organisasi, keadaan daerah sekitar Perang Dunia I (1914–1918) dan pendirian *Volksraad* dan akhirnya mengetengahkan tentang perjuangan di daerah.

4. Keadaan di daerah dari tahun 1928 – 1942.

Mengetengahkan tentang pengaruh politik Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun ± 1930, depresi ekonomi di daerah, interaksi terhadap kepartaian/organisasi, keadaan di daerah menjelang keruntuhan pemerintahan Hindia Belanda dan kedatangan pasukan pendudukan Jepang.

E. HASIL AKHIR

Naskah ini aslinya digarap oleh suatu Tim Penyusun di Jawa Timur yang mengikuti kerangka seperti yang ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penilaian oleh para tenaga ahli, dan Tim dari Pusat maupun daerah. Hasil penilaian tersebut dijadikan landasan untuk pekerjaan penyempurnaan dan editing.

Pada pekerjaan editing diarahkan pada segi-segi kebahasaan dan pendekatan. Kebahasaan diperhatikan hal-hal seperti ejaan, istilah dan keterbacaan. Pada pendekatan di perhatikan asas negio-sentris.

Naskah ini merupakan laporan dari usaha pencatatan dari kesejarahan periode kebangkitan Nasional di Jawa Timur. Naskah ini hendaknya dipandang sebagai usaha perintisan untuk pencatatan kesejarahan selanjutnya yang lebih sempurna.

## BAB I KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19

### A. PEMERINTAHAN

Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur) resmi bubar dan menyerahkan segala kekuasaan, angkatan perang, hutang-piutang dan daerahnya kepada Raja Belanda. 1). Kemudian pemerintahan digantikan oleh pemerintah Belanda (Republik Bataaf) sejak tanggal 1 Januari 1800, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Siberg sampai dengan tahun 1804. Sistem pemerintahan masih mirip sekali dengan sistem VOC. Baru pada tahun 1804 dikeluarkan suatu pedoman yang disebut *Charter* yaitu semacam peraturan yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah harta benda dan tanah jajahan. *Charter* berjalan di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Wiesel yang memerintah tahun 1804 - 1808. Disebabkan Inggris saat itu menguasai India, dikhawatirkan akan menjalar ke Indonesia, maka Belanda menggantikan penguasa di Indonesia yang dianggap lebih mampu yakni Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang memerintah tahun 1808 - 1811. 2).

H.W. Daendels yang merasa dipercaya untuk mengemudikan pemerintahan ini menjaga kemungkinan-kemungkinan adanya serangan dari Inggris, maka dia mendirikan pabrik senjata di Gresik demi kepentingan persenjataannya. Demikian juga angkatan perangnya diperkuat dengan membangun pangkalan angkatan laut di Surabaya. 3). Pada awal pemerintahan H.W. Daendels agak baik dibanding dengan masa VOC, contohnya: sistem peradilan yang sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian, saat ini mendapat perhatian yang sangat baik. Di satu segi H.W. Daendels berhasil, tetapi di segi lain kurang diperhatikan, terutama terhadap raja-raja di Jawa dia sangat benci. Hal ini sebetulnya menyalahi instruksi yang diberikan oleh raja Belanda kepadanya, yakni supaya berbuat baik kepada raja-raja di Indonesia. Akibat dari tingkah H.W. Daendels, maka timbullah kekacauan, pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia. Ini semua diketahui oleh Raja Belanda, maka H.W. Daendels

ditarik dan digantikan oleh Gubernur Jenderal J.W. Janssens pada tahun 1811. 4).

Malang bagi Gubernur Jenderal J.W. Janssens, sebab dia memerintah pada saat situasi dan kondisi setempat sudah rusak. Sehingga pada saat pendaratan ekspedisi Lord Minto pada tanggal 4 Agustus 1811 J.W. Janssens tidak mampu bertahan lagi akhirnya menyerah dengan menandatangani kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811, yang isinya sebagai berikut:

1. Seluruh Jawa diserahkan kepada Inggris.
2. Semua serdadu menjadi tawanan dan semua pegawai yang mau kerjasama dengan Inggris, dapat memegang jabatannya terus.
3. Semua hutang piutang Pemerintah Belanda yang dulu, tidak akan ditanggung oleh Inggris. 5).

Dengan telah ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang, secara hukum kekuasaan Belanda di Indonesia (Jawa) beralih kepada kekuasaan Inggris.

Pemerintahan di Jawa bukannya dipegang oleh Lord Minto tetapi diangkatlah Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal, yang berarti kekuasaan tertinggi tetap di Calcutta (India). Sebagai kepala angkatan perang untuk Jawa diangkat Mayor Jenderal Gillespie sebagai pendamping Raffles. 6).

Walaupun Gillespie sebagai pendamping Raffles, tetapi kenyataannya dia bahkan bersaing, hingga akhirnya ketika Raffles melakukan penjualan tanah guna menambah keuangan pemerintah, merupakan kesempatan yang baik bagi Gillespie untuk menuduh Raffles, bahwa dia memperkaya diri sendiri. Akibatnya pada tahun 1816 Raffles diganti oleh John Fendall. Disamping itu, dengan adanya Konvensi London tahun 1814 yang isinya sebagai berikut:

1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda.
2. Jajahan-jajahan Belanda seperti Sailan, Koloni Guyana, tetap di tangan Inggris.
3. Cochin (di pantai Malabar) diambil oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

Dengan melihat isi daripada Konvensi London tersebut

jelas, bahwa Inggris tidak menyetujui adanya kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu maka pada tahun 1816 John Fendall menyerahkan kembali kekuasaan Indonesia kepada Belanda. 7).

Pada tahun 1816 - 1826 Komisaris Jenderal Baron Van der Capellen memegang tampuk pemerintahan di Indonesia. Dia inilah yang pertama kali secara formal membentuk Karesidenan dan Kabupaten di pulau Jawa. Karesidenan di pulau Jawa berdasarkan *Staats-blad* (Lembaran Negara) tahun 1819 Nomor 16, berjumlah 20 sebagai berikut:

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. Banten     | 11. Yogyakarta         |
| 2. Jakarta    | 12. Surakarta          |
| 3. Bogor      | 13. Jepara dan Juana   |
| 4. Priangan   | 14. Surabaya           |
| 5. Karawang   | 15. Pasuruan           |
| 6. Cirebon    | 16. Besuki             |
| 7. Tegal      | 17. Banyuwangi         |
| 8. Pekalongan | 18. Madura dan Sumenep |
| 9. Semarang   | 19. Rembang            |
| 10. K e d u   | 20. Gresik 8)          |

Menurut keterangan Staatsblad (Lembaran Negara) tersebut, pembagian Karesidenan menjadi 20 tidak diikuti dengan pembagian Kabupatennya kecuali hanya satu Karesidenan yakni Pasuruan dibagi menjadi 3 Kabupaten ialah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangil dan Kabupaten Malang. Tetapi dari ketetapan dalam Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 9 Mei 1820 Nomor 6 menetapkan tentang gelar dan pangkat para Bupati (*Regent*) di Pulau Jawa sebagai berikut:

1. Gelar para Bupati (*Regent*) adalah Raden Adipati, Raden Tumenggung, Raden Mas Ingabehi. Semua gelar ini dianugerahkan oleh Gubernur Jenderal.
2. Bupati yang bergelar Raden Adipati, di daerahnya akan ditempatkan tentara dan pos-pos tentara di bawah seorang komandan yang berpangkat Letnan Kolonel.
3. Bupati yang bergelar Raden Tumenggung, di daerahnya akan ditempatkan tentara dan pos-pos tentara di bawah seorang komandan yang berpangkat Mayor.
4. Bupati yang bergelar Raden Mas Ingabehi, di daerah-

nya akan ditempatkan tentara dan pos-pos tentara di bawah seorang komandan yang berpangkat Kapten. 9).

Keluarnya suatu ketetapan Pemerintah Belanda tanggal 9 Mei 1820 Nomor 6, agak tidak masuk akal kalau kabupaten yang dibentuk hanya satu Karesidenan saja. Jadi mungkin sekali pembentukan kabupaten dalam waktu yang tidak bersamaan.

Perlu diketahui bahwa peraturan-peraturan atau susunan pemerintahan yang ditrapkan di Indonesia oleh Van der Capellen adalah disesuaikan dengan kerajaan Belanda dan dikeluarkan oleh Raja Belanda dengan nama *Koninklijk Besluit* (Surat Keputusan Kerajaan) 10).

Disebabkan adanya Revolusi Pebruari 1848 di Perancis, mengakibatkan berubahnya dasar kenegaraan Belanda, maka Undang-undang yang berlaku untuk Negara atau daerah jajahan pun mengalami perubahan. Pada tahun 1854 *Koninklijk Besluit* dirubah menjadi *Reglement op het beleid der Regering in Ned Indie*, yang biasanya disingkat dengan R.R. 11).

Pada tahun 1903 R.R. diubah lagi menjadi Undang-undang Desentralisasi. Sebagai pemecahannya pada tahun 1929 Jawa Timur dibentuk menjadi 32 kabupaten. 12) Demikian seterusnya, selama suatu daerah masih tergantung kepada daerah lain atau masih dijajah, maka peraturan atau Undang-undang yang sehubungan dengan kenegaraan selalu berubah-ubah menurut situasi dan kondisi daerah yang menguasai/menjajah.

## B. SOSIAL BUDAYA.

### 1. Pendidikan

Pada abad ke-19 semangat nasional rakyat Indonesia mulai tumbuh. Mereka sadar bahwa rakyat yang dijajah martabatnya sangat rendah dibanding dengan yang menjajah, atau si penjajah. Rakyat Indonesia mulai sadar bahwa hanya dengan pengetahuan/pendidikan yang tinggi serta kecerdasan berpikir yang tinggi, dapat mengetahui taktik dan strategi politik penjajah, yang dapat dipergunakan untuk melumpuhkannya. Bertepatan dengan mulai adanya kesadaran dari rakyat Indonesia ke arah pendidikan ini, ada seorang Gubernur Jenderal yang bernama J.J. Rochussen (1845 - 1851) mengadakan perjalanan keli-

ling pulau Jawa untuk mengumpulkan bahan sehubungan dengan akan dibentuknya sekolah bumiputera. Berdasarkan atas usul Rochussen kepada Menteri Jajahan Belanda, maka dikeluarkanlah keputusan raja pada tanggal 30 September 1848 dengan ketetapan bahwa pemerintah setiap tahun boleh mengeluarkan uang Hindia sebanyak F. 25.000,- untuk memenuhi keperluan pembiayaan sekolah bumiputra, yang akan mendidik calon pegawai bumiputra. Setahun kemudian didirikanlah sekolah bumiputra yang pertama di kota Jepara dan Pasuruan. 13).

Setelah itu mulailah muncul sekolah-sekolah di Jawa, antara lain tahun 1851 berdiri Sekolah Dokter Jawa di Surabaya. 14). Mulai saat itu banyak sekolah yang dibangun, tetapi sebagian besar hanya untuk anak-anak Belanda, dan kalau anak Jawa hanya anak-anak bangsawan saja. Jenis mata pelajaran yang diberikan pun berbeda, demikian juga guru yang memberikan pelajaran. Hal yang demikian ini dapat kita lihat pada tabel tersebut di bawah ini :

Jenis mata pelajaran

Sekolah kelas I (Jumlah kelas 5)	Sekolah kelas III (Jumlah kelas 3)
Membaca	Membaca
Menulis	Menulis
Berhitung	Berhitung
Ilmu Bumi	
Sejarah	
Ilmu Alam	
Menggambar	
Ilmu Ukur	

Guru-guru yang mengajar

Sekolah kelas I (Jumlah kelas 5)	Sekolah kelas III (Jumlah kelas 3)
Sebagian besar dari Sekolah-sekolah Guru	Pegawai-pegawai yang sudah tidak terpakai, kadang-kadang pegawai

Walaupun sekolah yang berdiri itu masih tingkat sekolah rendah, tetapi sudah merupakan suatu kemajuan dalam bidang pendidikan, yang terus akan dikembangkan.

Disebabkan pendidikan dirasa sudah tambah berkembang, maka pada tahun 1866 didirikanlah Departemen Pengajaran, Ibadat dan Kerajinan. 16) Dengan demikian pengembangan pendidikan sudah mulai tampak. Lebih-lebih lagi pada waktu masuknya golongan Liberal dengan keluarnya Undang-undang Agraria pada tahun 1870, golongan Liberal di negeri Belanda mulai menggugat pengetrapan politik pemerasan tanah jajahan oleh pemerintah Belanda, yang mana di dalamnya terselip pula tuntutan perbaikan pendidikan bumiputra Indonesia. 17).

Akibat gugatan golongan Liberal tersebut timbullah gagasan untuk mengadakan perubahan dalam bidang pendidikan tetapi juga untuk orang-orang di tanah jajahan.

Akhirnya gagasan tersebut betul-betul direalisasi, dengan dikeluarkanya surat keputusan raja pada tahun 1871. 18).

Untuk perluasan pendidikan diperlukan banyak sekali guru bumiputra. Dengan demikian yang harus dibuka dahulu adalah sekolah guru yang disebut *Kweekschool*.

Di Jawa Timur *Kweekschool* pertama dibuka di kota Probolinggo pada tahun 1875. 19) Di kota ini juga terdapat *Hoofdenschool* yang mendidik anak-anak Indonesia pada pelajaran lebih lanjut dan lebih tinggi daripada yang diberikan di sekolah-sekolah bumiputra umumnya. Pelajaran bahasa Belanda dapat diperoleh secara mendalam. Sekolah ini merupakan sekolah yang mendidik khusus calon-calon pegawai.

Perkembangan lebih lanjut, pada tahun 1875 di Surabaya dibuka sekolah HBS (*Hoogere Burger School*) yaitu Sekolah Menengah Lanjutan khusus untuk mendidik masyarakat koloni Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Mata pelajaran serta nilai ijazahnya sama dengan sekolah HBS di Negeri Belanda. Di tanah jajahan Hindia Belanda sekolah HBS di Surabaya tergolong sekolah menengah yang tertua. 20).

Walaupun di beberapa tempat serta bermacam jenis pen-

didikan sudah diberikan, tetapi disebabkan yang dapat masuk sekolah tersebut hanya orang-orang tertentu atau beberapa gelintir manusia saja, maka pada tahun tersebut 90% masyarakat Indonesia masih buta huruf. Hal ini antara lain juga disebabkan karena biaya sekolah mahal sekali. 21).

Disebabkan sangat sulitnya untuk masuk sekolah yang sebetulnya merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pihak Gereja (Zending dan misi) tidak mau ketinggalan. Jadi mereka disamping menyebarkan agama juga mendirikan sekolah umum sehingga di Ambon dan Jawa pada tahun 1877 dan 1897 sudah banyak memasukkan murid-murid baik laki-laki maupun perempuan dengan perbandingan sebagai berikut:

Tahun	Ambon		Jawa, Batak dan daerah-daerah lain	
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	perempuan
1877	3162	2384	12.498	25
1897	?	2573	24.732	301

Dalam bidang bahasa, pada tahun 1864 pihak pemerintah membuka kesempatan kepada pegawai rendahan bumiputra untuk menempuh ujian bahasa Belanda, yang disebut *Klein Ambtenaar Examen*, disingkat KE. Bagi pegawai rendahan bumiputra hal itu dirasakan penting sekali karena ijazah KE memberikan keuntungan material dan kesempatan untuk maju dalam karier. Pada waktu itu Mr. J.A. van der Chijs yang giat berusaha untuk memajukan dan menyebabkan bahasa Belanda melalui pendidikan. 23).

Namun demikian pihak zending dan misi menginginkan lebih dari itu. Pada tahun 1905 mereka mengusulkan, untuk sekolah *Kweekschool* yang didirikan di Amboina, bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa perhubungan yang menggantikan bahasa Malayu, bagi daerah Maluku.

Usul ini setelah dipelajari oleh Mr. J.A. van der Chijs ternyata ditolak dengan alasan bahwa bahasa Belanda tidak dapat didesakkan kepada penduduk, untuk dipergunakan sebagai ba-

hasa penghubung, sebagai ganti bahasa yang telah ada, kecuali atas keinginan dari kalangan penduduk itu sendiri.

Demikian maka usul zending tersebut ditolak. 24) Bagi daerah Jawa Timur, hal ini belum dapat dikemukakan sebab data yang berhubungan dengan hal tersebut belum diketemukan. Yang jelas pendidikan di Jawa Timur berkembang terus, hingga abad ke-20 nanti banyak didirikan bermacam-macam jenis pendidikan.

## 2. *Seni Budaya.*

Pada abad ke-19 keadaan masyarakat Jawa khususnya serta Indonesia pada umumnya, masih terlalu gelap untuk memikirkan ke arah seni budaya. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan mental maupun fisik masa VOC yang masih terasa. Diteruskan lagi masa pemerintahan Belanda dan Inggris, yang semuanya ini tidak lepas dari kekerasan, dengan tujuan tentu saja untuk mematikan kreativitas bangsa Indonesia. Sedangkan pengembangan mengenai pendidikan baru saja dirintis, ataupun masih terbatas pada kalangan atas yaitu bangsawan dan golongan orang-orang mampu saja, jadi rakyat jelata masih jauh untuk memikirkan seni budaya tersebut. Maka dari itu wajar apabila aktivitas seni budaya hanya berkisar dan berlingkar dalam kalangan istana raja-raja saja, dengan segala macam variasinya. 25).

Jadi jelas bahwa di kalangan rakyat jelata belum ada aktivitas yang menonjol mengenai masalah seni budaya. Bagi lingkungan istana raja-raja disebabkan para raja dan pejabat tinggi yang lain dari kerajaan masih aktif, misalnya menjadi Bupati dan sebagainya, maka mereka masih sempat memikirkan seni budaya. Walaupun mungkin hanya mempertahankan sekitar kehidupan seni budaya pada masa lampau saja.

## C. KEHIDUPAN EKONOMI

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan atau yang memerintah suatu daerah, biasanya berpengaruh juga terhadap kehidupan ekonomi. Pada masa VOC, disebabkan awal berdirinya secara formal sesungguhnya sebagai badan perniagaan, tetapi kemudian mengubah fungsinya menjadi lebih luas yakni ikut dalam bidang politik, maka ekonomi di daerah juga ba-

nyak terpengaruh oleh situasi perdagangan. 26). Sehingga pada abad ke-19 tepatnya tahun 1799 permintaan kopi sampai mencapai 6.000 ton. Akhirnya menjelang pemerintahan Daendels yakni pada tahun 1805 persediaan kopi habis.

Mulai pemerintahan Daendels penanaman kopi disebar-kan lagi sampai ke Jawa Timur. Bahkan daerah Malang mulai dibuka perusahaan perkebunan besar (*grootte cultuur*), dan terbukti daerah Malang baik sekali untuk ditanami kopi. 27).

Walaupun hasil kopi di Jawa Timur tersebut cukup baik, tetapi apa boleh buat sebab pada akhir pemerintahan Daendels, blokade Inggris terhadap Belanda demikian kuatnya, sehingga ekspor kopi lumpuh. 28) Tetapi rupanya Daendels memang orang yang ulet di dalam memperjuangkan segi ekonomi. Sehingga jikalau satu jalur mengalami kesulitan, dan mengubah dari jalur lain antara lain dengan jalan sebagai berikut:

1. Mencari penghasilan dengan jalan mempergunakan sistem *Contingenten* yaitu pembayaran pajak *in natura*, atau keharusan membayar pajak tidak dengan uang.
2. Penjualan tanah-tanah yang luas kepada orang-orang partikelir. Daerah Panarukan dan Probolinggo dibeli orang Cina bernama Han Ti Ko.
3. Mengeluarkan uang kertas dengan jaminan penjualan tanah-tanah tersebut. Jadi rakyat harus menjual tanahnya, kemudian dibayar dengan uang kertas yang dikeluarkannya.
4. Mengadakan monopoli dalam penjualan beras dan mengadakan pinjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap berada. Penolakan pinjaman berarti hukuman.
5. Pegawai-pegawai Belanda yang semula giat melakukan perdagangan kini diberantas.
6. Para bupati yang pada dasarnya ingin disingkirkan oleh Daendels, diperkecil yakni hanya dengan menggaji sebagai pegawai negeri. 29). Dengan tindakan-tindakan tersebut di atas yang mana Daendels tidak membedakan baik itu bangsa yang dijajah maupun orang-orang Belanda, maka akibatnya dia dibenci oleh

seluruh masyarakat. Akibatnya bidang ekonomi rusak (merosot).

Kesempatan semacam ini dipergunakan oleh Inggris yang memang sudah lama menunggunya, sehingga pada tahun 1811 ekspedisi Inggris di bawah Lord Minto melakukan peperangan hanya dalam waktu satu setengah bulan, Belanda sudah mengalami kekalahan total. 30) Jadi mulai saat ini secara formal Indonesia berada di bawah pemerintahan Inggris.

Demikianlah nasib Indonesia berpindah dari satu penjajah lain, yang pada dasarnya masing-masing mempunyai tujuan yang sama, yakni pengembangan ekonomi di Eropa. Keuntungan itu dapat diperoleh baik disebabkan karena daerah jajahan itu dapat menjadi pemusatan (pendatang) modal, atau karena daerah jajahan itu menyediakan bahan mentah, atau karena membuka pasaran maupun mendatangkan kesempatan untuk melakukan penanaman modal. 31).

Jelasnya Indonesia merupakan daerah yang sangat menguntungkan bagi kaum penjajah. Hal ini terbukti dari adanya ekonomi rakyat yang ternyata pemerintah jajahan tetap saja menindas. Tindakan Inggris terhadap ekonomi sebagai berikut:

1. Pemerintah mengadakan monopoli garam di Madura, pembuatan arak dan lain-lain, yang kesemuanya ini mendatangkan hasil yang sangat besar bagi pemerintah jajahan.
2. Sistem Contingenten dan penyerahan wajib yang diadakan oleh Belanda diganti dengan sistem pajak tanah. Dasar hukum, pajak tanah ini menurut Raffles ialah:  
Bahwa dahulu tanah-tanah ini adalah milik raja. Rajaraja itu kemudian menyerah kepada Inggris, maka dengan sendirinya tanah-tanah itu jatuh ke tangan Inggris. Rakyat dahulu menyewa tanah itu kepada raja dengan membayar sewanya berupa *upeti*, maka sekarang sewa tanah itu diganti menjadi: *pajak tanah*.
3. Karena Raffles juga kekurangan uang, maka ia pun meniru Daendels yaitu menjual tanah Ciasem, Tegalaru (Jawa Barat), kepada orang-orang partikelir. Tetapi disamping itu ia membeli kembali tanah-tanah partikelir di Panarukan dan Probolinggo yang

dahulu dijual Daendels. Pembelian kembali tanah yang dahulu dijual Daendels (tanah partikelir) ini disebabkan adanya kerusuhan rakyat di daerah tersebut akibat adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pemilik tanah partikelir tersebut. Untuk menghindari hal itu, maka atas kebijaksanaan Raffles tanah tersebut dibeli kembali. 32).

Dengan dilakukannya penjualan tanah tersebut mengakibatkan adanya tuduhan dari Gillespie yang dikemukakan kepada pemerintah Inggris, bahwa Raffles akan memperkaya diri sendiri. 33). Hal ini diterima oleh Inggris, akhirnya dengan keluarnya Konvensi London tahun 1816 berakhirilah kekuasaan Inggris di Indonesia.

Kembali bumi Indonesia dikuasai oleh Belanda, yang pada tahun 1830 yakni masa pemerintahan Johannes van den Bosch mulai lagi melaksanakan sistem Tanam Paksa, sehingga urusan hasil bumi menjadi semakin ramai. 34). Pokok-pokok peraturan Tanam Paksa antara lain sebagai berikut:

1. Akan dibuat suatu perjanjian dengan rakyat, tentang pemberian sebagian dari tanah pertaniannya (sawah), untuk ditanami dengan tumbuhan yang berguna bagi pasar Eropa.
2. Tanah yang diberikan oleh penduduk tidak lebih dari  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari semua tanah pertanian dari suatu desa.
3. Tenaga yang dipergunakan untuk menanam tumbuhan tersebut, tidak akan lebih dari tenaga yang dipergunakan untuk menanam padi.
4. Tanah yang diberikan itu akan dibebaskan dari *Land Rente* (pajak tanah).
5. Hasil dari tanaman yang diserahkan kepada pemerintah, jika harganya ditaksir melebihi pembayaran *Land-Rente*, kelebihanannya akan diberikan kepada penduduk.
6. Salah tumbuh akan ditanggung oleh pemerintah, jika kesalahan itu tidak disebabkan karena rakyat kurang rajin di dalam mengerjakannya. 35).

Kalau melihat dasar peraturan Tanam Paksa tersebut kelihatannya tidak memberatkan rakyat. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan tanah, tenaga, waktu dan hasil dari tanaman yang sesuai dengan kehendak pemerintah Belanda, tanpa mendapat imbalan yang sesuai. Hasil bumi tersebut kemudian dikirim ke Eropa melalui pelabuhan Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Pacitan. 36).

Pelabuhan tersebut bertambah ramai, terutama dengan keluarnya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1870, yang berisi tentang kebijaksanaan pemerintah Belanda mengenai status milik tanah rakyat (bumiputra) Indonesia dan status penggunaan tanah oleh orang-orang partikelir. Yang dimaksud dengan orang-orang partikelir ialah para kapitalis asing (penanam modal asing). 37) Atas dasar ini maka para kapitalis asing mulai menanamkan modalnya di Indonesia pada beberapa bidang usaha misalnya perkebunan, pertambangan, pengangkutan dan lain-lain.

Dengan mulai banyaknya para kapitalis asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, maka akibatnya perkebunan Indonesia mulai berkembang. Misalnya coklat. Sebelum tahun 1870 masih mendatangkan/impor biji-biji coklat dari luar Jawa antara lain Ambon (Maluku), Ternate, Minahasa. Tetapi akhirnya sesudah tahun 1870 sudah tidak mengimpor lagi. 38).

Pada mulanya pohon coklat ditanam di Jawa hanya sebagai perhiasan pekarangan rumah-rumah pejabat tinggi (komponi), kemudian tanaman itu dikembangkan di perkebunan partikelir. Baru pada tahun 1880 di Jawa Timur tanaman coklat mulai dibudidayakan atau diperkebunkan. Jenis coklat yang ditanam di Jawa ialah jenis coklat Criollo. Para pengusaha perkebunan berpendapat, bahwa tanaman coklat perlu ditanam bercampur dengan tanaman lain. Kemudian mulai diusahakan adanya tanaman pala dan kapok di antara tanaman coklat. Demikian juga tanaman lada, koka dan kemukus, ditanam di sepanjang tepi jalan dan batas-batas kebun, sedangkan tanaman koka ditanam sebagai pelindung angin 39). Perlu ditambahkan bahwa tanaman serta produksi kopi yang pada awal abad ke-19 maju dengan pesatnya di Jawa Timur, ternyata tidak tahan lama. Sebab pada akhir abad ke-19 tepatnya pada tahun 1888 mengalami kemunduran yakni ketika kopi Afrika kemudian kopi Liberia diserang penyakit daun (*hemileiavastatrix*),

kopi jenis tersebut dihapus. Jadi perkebunan kopi pada saat itu umumnya mengalami nasib yang menyedihkan. Baru setelah diketemukan jenis kopi yang baik yaitu kopi Robusta (*robust* = tegap kuat), maka kopi ini ditanam pula di antara coklat, sebab kekurangan persediaan lapangan. Tanaman tumpang sari yang demikian itu, akibatnya mudah sekali terserang hama atau penyakit. Sedangkan tanaman coklat jenis criollo ini justru sangat peka terhadap hama. Sehingga pada tahun 1900 budidaya coklat hampir mengalami kemusnahannya, terutama oleh karena adanya serangan hama *Helopeltis* dan *Cacao-mot* (*Acrocercrops Cramerella*). Menguntungkan sekali bahwa budidaya coklat masih dapat dipertahankan, dengan didirikannya Balai Penyelidikan Khusus untuk Budidaya Coklat di bawah pimpinan Dr. L. Zethner pada tahun 1901/1902. 40).

Penanaman modal asing yang ditujukan atau diusahakan pada perkebunan besar, selain kopi dan coklat masih ada lagi yakni tebu. Tebu dibuat gula, semula hanya merupakan usaha rakyat secara kecil-kecilan saja, yakni digiling dengan alat yang hanya ditarik dengan tenaga hewan (lembu, kerbau), jadi bukan mesin. Pengusaha kecil ini biasanya bangsa Cina dan hanya dikerjakan di pekarangan masing-masing, sifatnya industri rumah (*home industry*). Kemudian setelah adanya modal asing (sesudah tahun 1870), transportasi mulai berjalan dengan lancar, terutama antara Surabaya - Pasuruan - Malang. Pada tahun 1879 hubungan kereta api antara Malang - Surabaya dibuka, maka mulai saat itu pabrik-pabrik gula muncul meramaikan sepanjang jalan kereta api tersebut. Perkembangan selanjutnya, produksi gula mencapai puncak kemegahannya baru pada tahun 1900. 41).

Dari seluruh pulau Jawa, Pasuruan merupakan daerah tebu yang paling besar pada waktu itu. Seperlima (33.600 bau) dari areal tebu di seluruh Jawa (17.500 bau) berada di Pasuruan. Oleh karena itu pada tahun 1900 didirikan suatu *Proefstation*. Tebu (tempat penyelidikan dan percobaan tebu) di Pasuruan. Dengan demikian hasil tebu tersebut besar sekali sehingga pajak yang masuk ke pemerintah juga besar, bahkan merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara. Tanpa pajak dari industri gula, keuangan negara akan kacau. Maka apabila pemimpin-pemimpin atau pemilik-pemilik pabrik gula (*suiker baronen*) ini besar sekali kekuasaannya atau pengaruhnya terha-

dap pemerintah, bukan merupakan suatu hal yang janggal. Jadi *ondernemers-bond* (gabungan pengusaha-pengusaha) Belanda yang saat itu merajai ekonomi Indonesia. 42).

Dengan besarnya penghasilan tebu ini bagi pemerintah Belanda sangat menguntungkan, tetapi bagi rakyat Indonesia si pekerja pada perkebunan serta pabrik tebu sangat menderita sebab semuanya itu dilaksanakan oleh rakyat secara paksa (tanaman paksa). Sehingga wajar apabila pada tahun 1833 terjadi perlawanan dan huru-hara di perkebunan tebu Pasuruan. Bahkan tidak di Pasuruan saja terjadi huru-hara tetapi juga di beberapa tempat di Indonesia. 43).

Sayang sekali bahwa perlawanan dari rakyat Indonesia ini tidak begitu dipedulikan oleh pemerintah Belanda.

Baru kemudian setelah hadirnya 2 (dua) orang tokoh Humanis Belanda yakni Eduard Douwes Dekker seorang pamong Praja dan sastrawan serta Baron van Hoevel seorang pendeta dan politikus, pemerintah Belanda mulai memperhatikan. Tantangan kedua orang ini terhadap Tanam Paksa berdasarkan atas prinsip etika perikemanusiaan. Kemelaratan yang luar biasa akibat adanya sistem tersebut, dirasakan sebagai suatu perbuatan yang tidak mempunyai perikemanusiaan. Oleh karena itu kedua orang tersebut memprotes adanya pelaksanaan Tanam Paksa tersebut, baik melalui karangan-karangan dalam bukunya maupun melalui parlemen di negeri Belanda. Kedua orang inilah yang merupakan perintis dari politik etika, yang kemudian mendapat formulasi yang jelas pada permulaan abad ke-20.

#### D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN.

Abad ke-19 mencatat adanya kegiatan pendidikan di Jawa Timur, di samping itu berkembang pula penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1827, seorang Belanda peranakan yang bernama C.L. Coolen mendapat sebidang tanah di desa Ngoro dari pemerintah jajahan. Di kalangan masyarakat desa, ia sangat populer, dan antara tahun 1845 - 1850 merupakan periode penting dalam penyebaran agama Kristen di Jawa Timur. Pusat penyebaran yang pertama dari agama Kristen ini sebenarnya di desa Wiyung - Surabaya yang dipelopori oleh Emde, yang pekerjaan sehari-hari sebagai tukang arloji. Ia membentuk perkum-

pulan orang-orang saleh Surabaya dengan nama Perkumpulan Pembantu Pekabaran Injil Surabaya. Pada tahun 1843, di gereja Protestan Surabaya berhasil dibaptiskan 35 orang. Pada tahun 1845 tercatat 220 orang yang berhasil dibaptiskan. 44).

Pangkal penyebaran agama Kristen bermula di desa Wiyung Ngoro dan Sidokare, Sidoarjo. Di antara pelopor orang-orang Jawa yang beragama Kristen ada tiga serangkai yakni Singotruno dengan nama baptisnya Jacobus, Paulus dan Matius Nipp. Ketiga orang inilah yang meletakkan dasar Gereja Jawi Wetan yang berpusat di Majawarna. 45)

Seperti halnya di Surabaya, maka pada tahun 1855 di Malang terdapat seorang pekabar Injil, yang usahanya baru berhasil pada tahun 1920, dengan perkembangan yang sangat pesat. Di kota inilah terdapat Jemaah Kristen di kalangan orang Jawa di Jawa Timur. Di situ berkembanglah sekolah-sekolah dan rumah sakit Kristen. Adapun perkembangan gereja Kristen di Jawa Timur, garis besar ikhtisarnya sebagai berikut:

1. Tahun 1830 - 1848 adalah masa permulaan Gereja itu, sebelum masuknya usaha pekabaran Injil.
2. Tahun 1849 - 1931, perkembangan gereja itu dengan bimbingan pekabaran Injil.
3. Mulai tahun 1931, gereja Kristen Jawa Timur berdiri sendiri. 46).

Sementara itu perkembangan agama Islam dengan sistem dakwahnya menunjukkan adanya suatu kegiatan, terutama di pusat-pusat pondok pesantren di seluruh Jawa Timur.

Sejalan dengan usaha dari para peng-Injil, dibukalah sekolah-sekolah yang dipelopori oleh para peng-Injil ini. Pada bagian kedua abad ke-19 di Probolinggo dan Malang didirikan sekolah-sekolah guru, sekolah tukang. 47). Sekolah-sekolah ini tingkatannya dapat disamakan dengan pendidikan menengah. Sekolah-sekolah tersebut sudah barang tentu mengajarkan ilmu pengetahuan seperti di Eropa. Sekolah-sekolah inilah yang sedikit banyaknya mendorong bagi kehidupan intelektual. Untuk menunjang penyebaran agama Kristen, di Kediri pernah diusahakan untuk membuka sekolah Pendeta yaitu Sekolah Theologis, tetapi gagal dan baru berhasil pada tahun 1925. Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Malang pada tahun 1928. Dari periode ini tidak banyak catatan tentang kegiatan

an intelektual, kecuali mulai timbul usaha-usaha mendirikan sekolah-sekolah menurut model di negeri Belanda yang telah dirintis oleh pemerintah jajahan, walaupun usaha itu tidak memadai dengan kebutuhan untuk memajukan kecerdasan yang sesungguhnya.

## BAB II

### KEADAAN DAERAH DARI TAHUN + 1900 – 1928

#### A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH

Pada tahun 1901 Ratu Belanda telah melontarkan suatu pernyataan bahwa "negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Indonesia."<sup>48)</sup> Pernyataan tersebut merupakan proklamasi haluan politik kolonial baru yang akan berlaku di tanah jajahan Hindia Belanda (= Indonesia). Tujuan pokok politik kolonial baru ini adalah memperhatikan kemajuan dan perkembangan penduduk serta bukan memperhatikan pengolahan tanah.<sup>49)</sup> Dengan demikian secara teoritis "sistem eksploitasi diganti dengan politik pengajaran yang maju (= *enlightened*).<sup>50)</sup> Orientasi baru itu terkenal dengan bermacam-macam nama seperti *Ethis* (= Etika), politik Kemakmuran atau politik Asosiasi. Demikianlah kenyataannya bahwa politik kolonial baru itu bukanlah hadiah dari Ratu Belanda tetapi hasil pergolakan politik (dari kaum Etis dan kaum Asosiasi) yang terjadi pada masa itu di negeri Belanda.<sup>51)</sup>

Pergolakan politik itu nampak dalam pertengahan abad ke-19, yang berupa perlawanan terhadap pengetrapan politik kolonial konservatif di Hindia Belanda. Politik konservatif, yang bertujuan bahwa eksploitasi tanah jajahan bagi negara induk dan yang secara konsekwen ditrapkan di Indonesia itu berupa sistem Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel*.

Sistem tersebut dapat dianggap sebagai legalisasi oleh pemerintah kolonial terhadap segala macam penindasan. Sehingga hasil finansial *Cultuurstelsel* ini bagi Nederland sangat memuaskan. Antara tahun 1831 dan 1877 perbendaharaan negara Belanda telah menerima dari daerah koloni (= Indonesia) sebesar 823 juta *gulden*.<sup>52)</sup> Sistem ini tidak hanya membawa hasil besar bagi pemerintah, akan tetapi juga mendorong untuk memajukan perdagangan dan pelayaran Belanda. Nederland menempati kembali posisinya sebagai pusat penjualan bahan mentah dari daerah tropis dan besar. Armada dagangannya menjadi nomor tiga di seluruh dunia. Selanjutnya sistem itu memperkaya juga pengusaha-pengusaha pabrik, pedagang-pedagang dan lain-lainnya, yang mengakibatkan mulai tumbuhnya modal perdagangan dan modal industri swasta.

Fakta ini membawa akibat yang jauh dalam politik kolonial sesudah tahun 1850. Penyehatan yang pesat di dalam lapangan ekonomi disertai dengan lahirnya partai liberal menimbulkan oposisi yang gigih terhadap politik kolonial konservatif pada umumnya dan *Cultuurstelsel* pada khususnya.<sup>53)</sup>

Yang berkuasa pada waktu itu ialah faham, bahwa tanah jajahan adalah tempat mengeduk kekayaan demi keuntungan (= Batig saldo = Batig Slot) itu juga hanya dipergunakan untuk pembangunan negeri Belanda di antaranya untuk membuat jaringan jalan kereta api, membuat jalan, gedung-gedung kediaman dan bangunan-bangunan umum yang megah-megah. Rakyat (pribumi) Indonesia tidak memperoleh bagian apa-apa.<sup>54)</sup>

Sistem Tanam Paksa tersebut memaksa para petani untuk menyerahkan hasil tanaman wajib yang beroreintasi kepada bahan dagangan yang laku di pasar luar negeri. Tanaman wajib itu antara lain berupa : tebu, kopi tembakau, nila, kapas dan kayu manis. Hasil tanaman wajib itu harus dikumpulkan dan ditimbun di salah satu pelabuhan, yang kemudian untuk diekspor. Di Jawa Timur kota pelabuhan yang dimaksud ialah Pasuruan dan Surabaya. Akibat dari kebutuhan itu, maka jalan-jalan raya mulai dibangun dan muncul pula pabrik-pabrik yang didirikan oleh orang-orang partikelir (Cina).<sup>55)</sup> Sedangkan bagi rakyat Jawa Timur di samping mendapat beban seperti tersebut di atas juga diwajibkan kerja "rodi" (bekerja tanpa bayar). Sehingga beban yang diletakkan di punggung rakyat oleh sistem Tanam Paksa itu sangat berat. Karena itu, banyak pula membawa kematian dan pemusnahan sebagian penduduk daerah tertentu. Akibatnya pada tahun 1833 rakyat Jawa Timur mengadakan perlawanan dan huru-hara di perkebunan tebu Pasuruan.<sup>56)</sup>

Perlawanan semacam itu sering terjadi di mana-mana di pulau Jawa. Namun, karena perlawanannya masih bersifat sporadis, maka satu per satu perlawanan tersebut dapat dipatahkan. Perlawanan terhadap sistem Tanam Paksa itu ternyata tidak hanya muncul dari kalangan rakyat Indonesia, tetapi juga dari kaum Humanis Belanda (E. Douwes Dekker dan Baron van Hoevel) dan dari kaum Kapitalis Belanda serta didukung oleh kaum Liberalis Belanda. Kaum Kapitalis Belanda berjuang keras untuk menghapus Tanam Paksa di Indonesia dengan tujuan untuk menyalurkan modalnya yang telah mencapai kejenuhan di negeri Belanda. Partai Liberal di negeri Belanda dengan gigih memperjuangkan kehendak

kaum Kapitalis itu. Akhirnya, pada tahun 1870 perjuangan penghapusan Tanam Paksa di Parlemen Belanda berhasil dengan dikeluarkan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria 1870) dan kemudian disusul dengan keluarnya *Agrarisch Besluit* (1870).

Kedua peraturan tersebut merupakan dasar hukum bagi pemerintah (Belanda) untuk memberikan tanda-tanda di Indonesia kepada orang-orang partikelir (kapitalis swasta) dengan hak-hak yang bermacam-ragam seperti : *eigendom*, *opstal*, *erfpacht* dan lain-lain.<sup>57)</sup> Sehingga sejak tahun 1870 itu di Indonesia berlaku politik kolonial liberal atau politik pintu terbuka (*Opendeur-politiek*), yang membawa akibat Indonesia terbuka bagi masuknya modal asing (Belanda, Amerika, Inggris, Jepang, Belgia dan lain-lainnya).

Modal asing tersebut tertanam dalam sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti : karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah, minyak dan sebagainya. Akibatnya bermunculanlah perkebunan-perkebunan dan industri besar di Jawa Timur, yang membawa akibat makin meningkatnya hubungan antara kota Malang – Surabaya. Muncullah usaha pembuatan jalan kereta api Surabaya – Malang (1875) dan Kalisat – Banyuwangi (1901)<sup>58)</sup> yang diikuti munculnya pabrik-pabrik gula di sepanjang jalan kereta api tersebut.

Industri gula tersebut ternyata mencapai puncak kemegahannya setelah tahun 1900.<sup>59)</sup> Pasuruan pada waktu itu (1900) merupakan daerah tebu yang paling utama di seluruh Jawa. Maka dari itu pada tahun 1900 di Pasuruan didirikan suatu *proefstation* (tempat penyelidikan dan percobaan tebu). Juga di Malang, sebagai daerah kopi yang baik, pada tahun itu juga didirikan *proefstation* Kopi di Kalibakar (Ampel Gading) dan di Jambuwat (sumberpucung).

Sebenarnya penanaman tebu pada jaman Belanda itu selamanya bersifat paksaan. Pada jaman Tanam Paksa paksaan itu dilakukan secara terang-terangan, sedangkan pada jaman Liberal (sesudah berlakunya politik pintu terbuka) paksaan itu dilakukan secara halus melalui pimpinan pangreh praja setempat. Para pemilik pabrik gula (*zuiker baronen* = raja-raja gula) sangat besar pengaruhnya dan kekuasaannya terhadap pemerintah Belanda. Hal itu disebabkan karena uang yang dibayarkannya sebagai pajak merupakan bagian terbesar pendapatan negara. Tanpa pajak dari industri gula dan perkebunan kopi ini maka keuangan negara akan

kacau. *Ondernemers Bond* (gabungan pengusaha-pengusaha Belanda) yang merajai Indonesia.<sup>60</sup>) Maka dari itu bukan hanya lurah ataupun bupati, bahkan residen pun tunduk kepada *Zuikerbaronen* ini. Seorang Asisten Wedana (Camat) yang berani menentang seorang administratur pabrik pasti ditindak dan dipindahkan oleh pemerintah Orang desa yang tidak mau menyewakan tanahnya untuk penanaman tebu tidak akan diberi air irigasi. Mereka yang mau menyewakan tanahnya diberi sebegitu banyak uang muka, sehingga setelah uang sewanya habis (untuk dihambur-hamburkan : untuk selamatan, tandakan dan sebagainya, yang dengan sengaja diadakan oleh pabrik, maka mereka terpaksa menyewakan lagi untuk musim yang akan datang.<sup>61</sup>)

Dalam proses produksi yang semakin maju itu, bangsa Indonesia tidak memegang peranan apa-apa, kecuali menyewakan tanah dan tenaganya secara murah.

Meskipun dalam politik liberal ditekankan perlindungan terhadap kaum pribumi, namun dengan sistem ekonomi yang diperjuangkannya ada kecenderungan untuk menghambat perkembangan masyarakat Indonesia. Perusahaan kapitalis semestinya terdorong dalam perkembangannya ke arah perekonomian keuangan yang membawa akibat juga perluasan kondisi hidup. Sistem produksi kolonial tidak menghendaki perkembangan hidup rakyat yang akan mengakibatkan tuntutan lebih banyak terhadap modal kolonial yang menyelenggarakan sistem produksi itu. Di sini faktor yang sangat menguntungkan, ialah adanya tenaga yang murah. Sudah barang tentu kepentingan modal ialah adanya akumulasi dengan mementingkan penyelenggaraan produksi yang semurah-murahnya. Akumulasi modal dalam perkebunan yang sangat besar mungkin dilaksanakan kalau tenaga yang murah itu dipertahankan, bahkan dikatakan bahwa "keuntungan itu didapat dari perbudakan yang terbuka." Sehingga meskipun secara resmi diwajibkan ada kontrak antara pengusaha dan petani, dalam prakteknya tidak ada jaminan bagi kepastian hukum petani pada waktu itu. Keuntungan mengalir ke Negeri Belanda dan juga bunga dari modal yang ditanam dalam perusahaan perkebunan dan pertambangan. Tidak ada pemakaian modal untuk mempertinggi taraf kehidupan serta perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya.<sup>62</sup>) Untuk dapat mengetahui gambaran berapa besar keuntungan yang mengalir ke Negeri Belanda antara tahun 1876 sampai dengan 1905, Drs. J.B.A.F.

Mayor Polak telah mengemukakan daftar ekspor rata-rata dalam setahun sebagai berikut : surplus ekspor rata-rata dalam setahun :  
dari th. 1876 s/d 1880 51 juta gulden.  
dari th. 1881 s/d 1885 47 juta gulden.  
dari th. 1886 s/d 1890 55 juta gulden.  
dari th. 1891 s/d 1895 44 juta gulden.  
dari th. 1896 s/d 1900 57 juta gulden.  
dari th. 1901 s/d 1905 78 juta gulden.

Dibandingkan dengan hasil *Cultuurstelsel* yang rata-rata 22 juta *gulden* setahun, nampak dengan jelas bahwa surplus ekspor lebih hebat.<sup>63)</sup> Hal yang demikian itu menimbulkan pikiran kaum kapitalis Belanda yang menanamkan modalnya di bidang perdagangan, perkapalan dan industri di Belanda.

Kaum kapitalis yang menanamkan modalnya di bidang perdagangan, perkapalan dan industri di Nederland, dengan sendirinya menginginkan pula Indonesia sebagai daerah pemasaran hasil-hasil industrinya. Kondisi yang sangat diperlukan bagi pemasaran hasil industri tersebut ialah adanya daya beli yang kuat bagi penduduk pribumi. Daya beli rakyat pribumi menjadi kuat kalau mereka mengenyam kemakmuran dan menerima upah yang lebih tinggi. Berdasarkan kepentingan itulah, maka sejak sekitar tahun 1865, mereka telah melancarkan propaganda agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pribumi diperhatikan. Gerakan perbaikan nasib rakyat pribumi ini ternyata mendapat dukungan dari kaum Agama, kaum sosialis dan kaum etis. Mereka memiliki idee dasar yang bersamaan tentang politik kolonial, yakni menyisihkan sistem eksploitasi dan menitik beratkan pada kesejahteraan rakyat. Idee itu juga dirumuskan dengan kata-kata : "adalah menjadi kewajiban moral bagi orang Belanda untuk mengangkat penduduk pribumi." Salah seorang bicara dari kaum Etis yang terkemuka adalah Van Deventer (Mr. Conrad Th. van Deventer).<sup>64)</sup>

Pada tahun 1899 van Deventer telah menulis sebuah artikel dalam majalah "*De Gids*", yang berjudul "*Een Ereschuld*" (= Hutang Budi = Hutang Kehormatan). Dalam tulisannya itu dijelaskan bahwa bangsa pribumi (= Indonesia) dengan susah payah telah memberikan keuntungan bagi Nederland yang jumlahnya jutaan rupiah (187 juta *gulden*). Adalah wajar kalau uang tadi dianggap sebagai hutang yang harus dikembalikan kepada mereka dengan "*memajukan dan memperbaiki nasib rakyat pri-*

*bumi (= Indonesia)*". Caranya yang praktis ialah melalui : *Irigasi, emigrasi dan Edukasi*. Cara ini terkenal dengan nama : ..triloginya van Deventer"

Perjuangan kaum kapitalis di Nederland, kaum agama, kaum sosialis, kaum humanis dan kaum etis tersebut ternyata tidak sia-sia. Terbukti pada tahun 1901 raja Belanda telah mengumumkan haluan politik kolonial baru yang kemudian terkenal dengan sebutan politik – Etis (*Ethische Politiek*), yang menggunakan tiga sila sebagai sembojannya, yaitu : "Irigasi, Emigrasi dan Edukasi.<sup>65)</sup> Sebagai idee, "triloginya Van Deventer yang berdasarkan "kewajiban moral orang Belanda terhadap perbaikan nasib rakyat Bumiputra" itu memang baik. Akan tetapi dalam realisasinya, Pemerintah Hindia Belanda menerima idee tersebut untuk disesuaikan dengan kepentingan kaum kapitalis yang menanamkan modalnya di Indonesia (Hindia Belanda), yang beranggapan bahwa Indonesia adalah daerah untuk mengambil keuntungan (*winstge-west*).

Demikianlah, masalah irigasi juga diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi yang dipentingkan dalam penyelenggaraannya bukan untuk rakyat melainkan untuk keperluan perkebunan (tebu dan lain-lainnya). Sejak tahun 1885 oleh pihak pemerintah telah dibangun secara besar-besaran bangunan irigasi Brantas dan Demak, seluas 96.000 bau; pada tahun 1902 diperluas menjadi 173.000 bau. Menurut rencana tahun 1890 akan dibangun irigasi seluas 427.000 bau selama 10 tahun, akan tetapi pada tahun 1914 hanya terlaksana 93.000 bau. Namun pembangunan itu bukan untuk kesejahteraan rakyat Bumiputra. Karena dalam penanaman tebu banyak terjadi tekanan dari kepala daerah untuk menyewakan tanah, pengerahan tenaga kerja dan dalam pembagian air kebun-kebun tebu didahulukan.<sup>66)</sup> Akibatnya hasil sawah rakyat makin berkurang dan akhirnya hampir tak cukup makan. Pada tahun 1878 sampai tahun 1887, hasil padi pulau Jawa rata-rata 60.400.000 pikul setahun. Dalam tahun 1914 sampai tahun 1923 meningkat sampai 78.880.000 pikul setahun, artinya bertambah dengan 23%. Tetapi sementara itu tambah penduduk di dalam masa itu telah 80%. Hasil tiap bahu sawah yang ditanami susut, dari 25,1 pikul jadi 23,6 pikul, artinya berkurang 6%. Sedangkan kerusakan tanaman tiap tahun meningkat dari 4,5% sampai 7,23%.

Sebab-sebab kemunduran hasil itu banyak sekali. Tetapi yang terutama ialah : "Makin majunya perusahaan-perusahaan tanah

kepunyaan orang Eropa, di daerah-daerah yang tanahnya menjadi milik bersama desa (*communaal grondbezit*) dengan andil silih-berganti. Hak milik tanah itu tidak boleh dijual kepada orang lain, sedangkan petani daerah industri itu tidak mendapat kesempatan luas untuk mengerjakan sawahnya, mereka tidak dapat menge-nyam keuntungan daripada tanah yang seharusnya diperbaiki dan dirabuk, sehingga penghasilan petani secara perseorangan makin mundur. Di daerah pabrik gula pengusaha asing bisa menyewa tanah yang seluas-luasnya, karena tanah-tanah itu memang menja-di milik bersama. Dengan hal yang demikian yang sepatutnya menghasilkan 8 sampai 10 pikul sebau, akan sukar didapatkan lagi, karena tanah-tanah itu telah disewakan kepada pabrik gula.<sup>67)</sup>

Dengan demikian terjadilah proses penciptaan tanah yang di-kerjakan atau dimiliki oleh petani dan muncullah golongan buruh tani serta dengan makin cepatnya pertumbuhan penduduk meng-akibatkan munculnya golongan petani buruh, yang semakin tidak memiliki tanah. Mereka hanyalah mencari kehidupan dengan mengupahkan tenaga mereka kepada pemilik tanah ataupun kepa-da perkebunan. Berdasarkan survai yang diadakan pada tahun 1926 ternyata daerah Besuki mempunyai jumlah prosentase bu-ruh-tani yang sangat tinggi, kemudian disusul daerah Surabaya dan Madura (yang agak rendah, dan yang paling rendah prosentasenya adalah daerah Madiun, Kediri serta Pasuruan. Tetapi dari tahun ke tahun ada kecenderungan untuk menaik pada setiap daerah. Pada tahun 1905 diperkirakan bahwa di seluruh Jawa ada kira-kira 5,3% atau 341.110 petani yang dapat dikategorikan ke dalam buruh-tani atau petani bukan pemilik tanah.<sup>68)</sup>

Dengan makin menciutnya tanah pertanian, makin banyak-nya buruh-tani yang tak punya tanah dan makin cepatnya kepa-datan penduduk membawa kecenderungan bagi kaum tani untuk menggantungkan kehidupannya kepada perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik; serta mempermudah mereka untuk berpindah tempat. Keadaan yang demikian itu sangat menguntungkan bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk melaksanakan emigrasi sesuai dengan kehendak mereka.

Penduduk di Jawa dan Madura pada tahun 1865 berjumlah 14 juta dan pada tahun 1900 telah berlipat dua. Daerah yang su-bur tanahnya makin menjadi padat penduduknya. Di daerah itu pada umumnya sudah tidak ada lagi tanah kosong, bahkan tanah persawahan juga digunakan untuk penanaman tanaman ekspor, se-

perti, tebu, tembakau dan lain-lainnya. Dalam abad ke-19 pernah terjadi emigrasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubungan dengan perluasan tanaman tebu. Perusahaan gula ini memberi mata pencarian baru di daerah di mana perkembangan penduduk lebih cepat dari perluasan tanah pertanian. Dari tahun 1885 sampai tahun 1900 penduduk bertambah 30%, sawah pengairan hanya bertambah 5,7%, tanah pertanian 16%. Sedangkan pada tahun 1901 dengan dibukanya jalan kereta api yang menghubungkan Kalisat dan Banyuwangi telah merupakan salah satu pendorong bagi migrasi dari Jawa Tengah ke Ujung Jawa sebelah timur yang masih kosong. Sedangkan di daerah perkebunan kopi di Besuki banyak orang dari Madura yang mendapatkan tempat baru. (termasuk di Panarukan dan Bondowoso). Juga di kabupaten Kraksaan (Karesidenan Malang), orang-orang dari Madura mendapatkan tempat baru.

Selain perpindahan intern tersebut, untuk memenuhi kebutuhan kuli-kuli di perkebunan-perkebunan luar Jawa (terutama di Sumatra Timur = Deli), Pemerintah Hindia Belanda juga menyelenggarakan emigrasi keluar Jawa. Daerah Madura, Kediri dan Madiun di Jawa adalah merupakan daerah yang melepaskan emigran-emigran ke daerah lain.<sup>69)</sup>

Demikianlah, dengan adanya emigrasi para pengusaha terpenuhi akan kebutuhannya tenaga buruh-tani untuk keperluan perkebunan ataupun pabrik gula. Selain daripada itu, dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan dan makin luasnya urusan administrasi pemerintahan membutuhkan banyak tenaga yang terdidik. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik itu jumlah sekolah yang menghasilkan calon pegawai pangreh praja, pegawai di perusahaan dan di perusahaan harus diperbanyak. Pendidikan gaya Barat harus dikembangkan, bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah kolonial, tetapi juga seperti yang dikatakan oleh van der Prijs : "*Untuk membentengi Belanda dari "volcano Islam."*"<sup>71)</sup> Namun demikian untuk perluasan pengajaran itu diperlukan tenaga guru Bumiputra. Oleh karena itu perluasan pengajaran itu harus disertai dengan pembukaan sekolah guru Bumiputra. Demikianlah pada tahun 1849 di kota Pasuruan didirikan sekolah negeri Bumiputra (*Inlandsche School*) yang pertama kali di Jawa Timur. (Dalam perkembangan lebih lanjut antara tahun 1849 – 1852 telah didirikan 20 buah sekolah Bumiputra masing-masing di tiap ibukota Kare-

sidenan. Ketika itu di Indonesia telah ada 30 buah sekolah rendah Belanda atau *Europeesche Lagere School* (= ELS.). Tujuan pendidikan untuk mendidik calon pegawai murahan. Muridnya berasal dari anak golongan priyayi atau anak pegawai, seperti : anak bupati, wedana, jurutulis, mantri atau kepala desa. Bangunan sekolahnya biasanya berada di halaman Kabupaten. Untuk memenuhi tenaga guru pada tahun 1875 di Probolinggo didirikan sekolah guru Bumiputra (Kweek School = KS.), yang merupakan sekolah guru Bumiputra yang pertama di Jawa Timur.<sup>72)</sup>

Pada tahun 1863 dan 1864 Pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik pengajaran liberal, yang memungkinkan anak-anak Bumiputra dan Cina memasuki sekolah-sekolah Belanda serta membuka semua jabatan negeri bagi setiap orang yang memenuhi syarat tanpa memperhatikan keturunan dan bangsa. Muncullah sistem ujian pegawai rendah (*Klein-ambtenaars examen*) dan ujian pegawai menengah (*Groot-ambtenaarsexamen*). Dan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang dapat berbahasa Belanda, pada tahun 1875 di kota Probolinggo didirikan "Sekolah Menak" atau Hoofdenschool, yang pada tahun 1900 ditingkatkan dan diganti nama baru OSVIA (= *Opleidingschool voor Inlandse Ambtenaren*).<sup>73)</sup> Sehubungan dengan itu pula pada tahun 1875 itu di kota Surabaya berdiri HBS. (= *Hogere Burger School*), yang dalam perkembangannya lebih lanjut telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia.<sup>74)</sup> Selanjutnya dalam tahun 1893 keluarlah *Indisch Staatsblad* No. 125, yang membagi sekolah-sekolah Bumiputra menjadi dua bagian : (1). Sekolah-sekolah kelas I, khusus untuk anak-anak kaum priyayi dan kaum terkemuka (aristokrasi) dan (2). Sekolah-sekolah kelas II, bagi anak-anak rakyat. Pembagian tersebut berdasarkan atas adanya anggapan, bahwa masyarakat Indonesia itu mempunyai dua kebutuhan yang ada di lapangan pendidikan. Lapisan atas membutuhkan pengajaran yang dapat membawanya ke arah *kemajuan*, sedangkan lapisan rendah merasa *cukup* dengan sekolah rendah yang sangat sederhana.<sup>75)</sup>

Dengan demikian jelaslah, bahwa menurut pendirian tersebut di atas rakyat pada umumnya tidak perlu mendapat bimbingan untuk mencapai kemajuan. Tetapi setelah politik kolonial berlandaskan politik Etis, pengajaran rakyat pedesaan mulai mendapat perhatian. Dengan berlakunya politik Etis, Pemerintah Hindia Belanda menganggap tugas pokok di lapangan pendidikan: "mem-

berikan pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia, sesuai dengan kebutuhannya." Akibatnya pada tahun 1907, atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz, didirikan sekolah-sekolah desa, yang pada hakekatnya hanya memberantas buta huruf. Selain dari pada itu di dalam sekolah rendah Belanda (ELS) diadakan kursus tambahan yang disebut "Kursus MULO" (1903) yang pada tahun 1914 menjadi sekolah menengah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Sedangkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat atas prakarsa Bupati Ngawi, RMT. Oetoyo (baca : Utoyo), di Ngawi muncul "Sekolah Kerajinan Rumah", yang memberikan pelajaran mengukir dan menganyam (1904). Ketika itu di Mojowarno telah ada Sekolah Pertukangan yang didirikan oleh Zending pada tahun 1893. Sedangkan Sekolah Pertukangan yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda baru muncul di Surabaya pada tahun 1909. Selanjutnya di Surabaya muncul pula sekolah malam yang disebut *Burgerlijk Avondschoot*. Di bidang pengajaran tinggi, sekolah Dokter Jawa yang didirikan di Jakarta tahun 1851 masih merupakan sekolah mantri cacar, pada tahun 1902 ditingkatkan menjadi seni akademi dengan nama STOVIA (= *School tot opleiding van Indische arts* = Sekolah Dokter Bumi-putra = Sekolah Dokter Hindia). Sekolah semacam itu kemudian didirikan pula di Surabaya pada tahun 1913 dengan nama NIAS (*Nederlands Indische Artsen School*).<sup>76)</sup> 145)

Dari uraian di atas nampak dengan jelas, bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan adanya tenaga terdidik pemerintah Hindia Belanda mengintroduksi sistem pendidikan Barat di Indonesia dengan penuh keraguan dan dikembangkan dengan amat lamban di kalangan penduduk. Seperti di Muangthai, Malaysia dan kolonikoloni lain di Asia Tenggara yang diperintahkan oleh bangsa asing, pendidikan di usahakan pertama-tama dengan maksud melatih orang muda pribumi untuk tugas administratif yang berada di bawah tingkat pengambilan keputusan. Dengan perkataan lain, sistem pendidikan kolonial itu sebenarnya bermaksud melatih penduduk pribumi untuk menjadi jurutulis dan tugas lain yang lebih rendah dan tidak diharapkan untuk nanti bisa berfikir bebas. Maka dari itu sudah sewajarnya kalau pemerintah Hindia Belanda menggariskan suatu politik, yang menentukan bahwa pendidikan rakyat, terutama bagi rakyat di pedesaan dan bagi kelas-kelas rendah di pemukiman kota, tetap terbatas hanya sampai sekolah dasar yang lamanya tiga atau lima tahun. Sekolah dasar tujuh tahun de-

ngan memakai bahasa belanda sebagai bahasa pengantar, dibuka di kota-kota dan terutama sekali untuk anak-anak para pegawai Belanda yang setia.<sup>77)</sup> Lulusan yang terbaik dari sini dan yang bisa dibiayai oleh orang tuanya di Jawa Timur boleh melanjutkan ke sekolah OSVIA atau ke sekolah HBS. Sesudah itu lanjutannya tidak ada lagi. Memang tujuan dari HBS untuk mempersiapkan para siswa agar mereka langsung dapat diterima di perguruan di Nederland.<sup>78)</sup> namun kecuali syarat bagi penduduk pribumi untuk memasuki HBS sangat berat, juga kalau sudah lulus biaya untuk melanjutkan ke Nederland tidak terjangkau oleh orang biasa (pada tahun 1900 hanya ada 5 orang maksimum Bumiputra di Nederland. Akibatnya sampai tahun 1900 hanya beberapa orang pribumi saja yang memasuki sekolah tersebut. Namun demikian jumlah pelajar pribumi yang masuk HBS dari tahun ke tahun bertambah pula. Hal ini dapat kita lihat dari daftar kemajuan jumlah pelajar HBS yang pernah dikemukakan oleh Bernhard Dahm, sebagai berikut :

**Komposisi pelajar HBS sekitar tahun 1900.<sup>79)</sup>**

Tahun	Murid Eropa	Murid Timur Asing	Murid Indonesia
1885	352	6	2
1890	335	—	5
1895	558	3	4
1900	549	4	13
1905	677	16	36

Dengan demikian jelaslah, bahwa politik pendidikan Pemerintah Hindia Belanda berusaha membatasi adanya penduduk pribumi yang dapat berfikir secara bebas. Namun demikian latihan berfikir rasional sedikit banyaknya mulai digalakkan. Sehingga, terlepas dari kemauan Pemerintah Hindia Belanda, produk dari pendidikan formal sekuler tersebut menimbulkan kelompok sosial pribumi baru, yaitu kelompok intelektual. Kelompok intelektual inilah yang kemudian menyadari keterbelakangan penduduk pribumi-pribumi di Hindia Belanda. Kelompok ini pula yang kemudian menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan demi kemajuan dan

emansipasi penduduk pribumi. Dan kelompok ini pula yang menginsafi betapa pentingnya wadah persatuan dan kesatuan demi perbaikan nasib bangsanya. maka dari itu tidak mengherankan, kalau di sekitar tahun 1900 di Indonesia pada umumnya dan di Jawa pada khususnya timbul kegiatan masyarakat untuk mencapai kemajuan demi perbaikan nasib bangsanya.

## B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN EMBIRO DARI KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH JAWA TIMUR

Dari keseluruhan uraian tersebut dahulu nampak adanya suatu kenyataan, bahwa pelaksanaan politik kolonial Etis yang dibarengi dengan politik pintu terbuka di Jawa Timur menimbulkan proses perubahan sosial dan pemiskinan rakyat pedesaan (= kaum tani). Meluasnya estate partikelir atau *onderneming tebu* yang membawa komersialisasi pertanian, pajak dan sewa tanah yang tidak terpikul dan mengakibatkan penciutan tanah pusaka, masuknya uang dalam ekonomi sederhana yang menambah jumlah kaum buruh-tani, itu semua merupakan faktor-faktor yang menimbulkan penciutan daerah hidup dan pemiskinan kaum tani. Hal itu terjadi karena kenyataan adanya benturan dengan kebudayaan Barat yang datang di daerahnya, maka dari itu timbullah kebencian terhadap dominasi asing. (= *Xenophobia*).

Keadaan yang makin dirasakan memburuk menyebabkan mereka menolak tatanan baru yang sama sekali berlainan dan sesuai dengan alam perasaan dan fikiran mereka. Kebencian terhadap tatanan dan kultur asing inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat untuk mengadakan gerakan protes massa tani.<sup>80)</sup> Gerakan protes kaum tani ini ada yang bersifat pasif dan lebih berorientasi kepada kerokhanian atau kebakaran (*other worldly orientation*), tetapi ada pula yang bersifat agresif, radikal, revolusioner yang berorientasi kepada keduniawian (*this worldly orientation*). Gerakan protes yang pertama tidak perlu menimbulkan konfrontasi terhadap penguasa; mereka cukup bertapa, mengasingkan diri dan menyerahkan segala sesuatunya kepada takdir (*praedestination*) atau melakukan pemboikotan secara diam-diam (*lijdelijk verzet*), misalnya gerakan Samin di Blora. Sedangkan gerakan protes yang kedua berusaha menumbangkan yang sedang berkuasa untuk mempertahankan atau mengembalikan tata dan nilai tradisional (sekretaris atau revivalistis).<sup>81)</sup> Dalam

keadaan demikian massa tani menantikan kepemimpinan yang dapat mewujudkan aspirasinya. Berbicara soal kepemimpinan, dalam masyarakat pribumi pada waktu itu ada tiga kelompok sosial pribumi yang bersaing dalam memperebutkan pengaruh di antara penduduk Indonesia, yaitu : kelompok aristokrat tradisional, kelompok Islam dan kelompok intelektual.<sup>82)</sup>

Kelompok aristokrat tradisional, adalah anggota keluarga besar raja yang lama kelamaan berkembang menjadi suatu dinasti yang dilembagakan. Suatu dinasti kekuasaan seperti itu dapat diintegrasikan sedemikian kuatnya dalam masyarakat setempat, sehingga akar-akarnya menembus sampai ke seluruh jaringan lembaga sosial. Stratifikasi penduduk, sistem nilai dan norma dan perangkatan adat ke biasanya diatur sedemikian rupa sehingga mereka selaras dan sesuai dengan posisi yang paling tepat untuk dinasti yang memerintah. Mereka bahkan menjadi standar sistem keyakinan kultural yang memaklumkan raja sebagai mata rantai yang mutlak di antara dunia manusia dan kekuatan-kekuatan kosmologis yang memerintah alam semesta. Sistem semacam itu telah bertahan secara sosial dan kultural dalam menghadapi perubahan-perubahan besar di bidang politik atau di bidang lain. Bahkan dalam jaman pemerintahan Hindia Belanda sistem tersebut dipertahankan dalam suatu politik pemerintah tidak langsung, dan dikontrol olehnya agar supaya merekalah yang memerintah penduduk. Oleh karena kelompok aristokrat tradisional ini di bawah kontrol yang ketat dari Pemerintah Hindia Belanda, maka sangat kecil kemungkinannya bagi rakyat tani untuk mendapatkan kepemimpinan dari golongan ini yang dapat mencetuskan aspirasinya.

Kelompok kedua meliputi para pemimpin agama Islam. Karena lebih dari 95% penduduk menganggap dirinya Islam, maka kader-kader Islam mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pendapat rakyat tani. Meskipun agama dunia itu ditimpakan begitu saja ke atas sistem kepercayaan pribumi yang ada, namun berkat proses saling pengaruhi yang lama kedua unsur itu telah diintegrasikan secara padu dan sekarang agama itu menjadi bagian integrasi dari kebudayaan setempat. Atas dasar inilah prestise dan pengaruh pada pemimpin agama terhadap penduduk telah dilembagakan. Proses pelembagaan itu terus menerus dimantapkan antara lain lewat sosialisasi dalam keluarga, lewat jalan pendidikan dan pembinaan agama di langgar, madrasah, pondok dan pesan-

tren. Betapa besar daya tarik pondok pesantren bagi rakyat, dapat kita lihat pada jumlah murid pondok pesantren Tegalsari Kabupaten Ponorogo (Madiun) pada tahun 1877 telah mencapai 252 orang. Maka dari itu tidak mengherankan, bahwa Pemerintah Belanda berusaha menghalangi perkembangan pondok-pondok pesantren tersebut dengan jalan membentuk "Priesterraden" yang bertugas mengawasi pengajaran di pesantren-pesantren (1882) dan mengeluarkan peraturan bagi orang yang akan mengajar harus minta ijin lebih dahulu (1905)<sup>83</sup>). Sebaliknya dari pihak pengikut Islam sendiri ada usaha menghalangi pengembangan agama Kristen yang dibawa oleh Pemerintah Belanda, dengan melancarkan agitasi bahwa pemerintah kolonial dipandang pemerintah orang kafir yang harus ditentang dengan gerakan perang sabil. Pandangan yang demikian itu bertemu dengan pandangan rakyat tani yang menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah kekuasaan yang merusak tata-masyarakat tradisional, yang harus ditentang dengan gerakan nativistis, milenaristis atau gerakan Ratu Adil. Harapan akan datangnya Ratu Adil (Jawa) ternyata dapat bertemu dengan harapan akan datangnya Imam Mahdi (Agama Islam). Timbullah di sekitar tahun 1900 gerakan-gerakan mesianis di Jawa pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya:<sup>(84)</sup> yang dipimpin oleh para pemimpin Islam (Kyai). Di Jawa Timur pada permulaan abad ke-20 gerakan protes semacam itu pernah terjadi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Nganjuk, yang terkenal dengan peristiwa Gedangan (1903) dan peristiwa Bendungan (1907).

Demikianlah kiranya ketika masyarakat di daerah Sidoarjo sedang mengalami kegelisahan sosial karena makin meluasnya "onderneming gula," datanglah Kyai Kasan Mukmin yang kemudian berhasil mengadakan perserikatan rahasia di desa Sementara (termasuk Kabupaten Sidoarjo). Kyai Kasan Mukmin berasal dari Desa Gotak (Pesantren dekat Muntilan, Jawa Tengah) dan pernah *me-guru* kepada Kyai Krapyak (guru tarekat dari Pesantren di Pekalongan) serta guru-guru dari pesantren : di Plotegan (Mojokerto), di Tirem (Mojokerto) dan pesantren terkenal di Surabaya yaitu pesantren Sidoresmo, yang diasuh oleh Haji Muhammad Tair. Berkat didikan dari Kyai Krapyak ia mulai meyakini ajaran "Ramalan Joyoboyo" tentang adanya Ratu Adil. Maka dari itu setelah segala persiapan dipandang cukup, pada tahun 1903 ia mulai menyatakan diri sebagai orang yang telah menerima *wisik* dan menganggap dirinya inkarnasi dari Imam Mahdi, yang mendapat tugas untuk

membangun suatu kerajaan baru di Jawa.

Ia berkhotbah bahwa suatu perang suci harus diproklamkan untuk melawan Pemerintah Belanda. Kemudian ditentukan bahwa pemberontakan itu akan dimulai pada hari Minggu tanggal 29 Mei 1903, tetapi kemudian diajukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 1903, bertepatan dengan hari "gerebeg Maulud" Gerakan Kasan Mukmin itu ternyata mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan penduduk desa tetangganya, yaitu desa-desa : Damarsi (Haji Abdulgani), Kurek, Wagir (Kyai Wagir) dan Keboan pasar (termasuk kepala desanya). Ditentukan bahwa pemberontakan akan dimulai dari desa Keboanpasar. Demikianlah setelah mereka melakukan upacara suci (*ritual*) untuk pembersihan umum, membagi-bagikan jimat kekebalan dan penyucian senjata serta mengibarkan bendera tiga warna (putih-biru-putih) yang disertai pita daun pisang kering (= lambang ketidak-suburan) di tengah sawah sebelah utara desa Keboanpasar, maka pada jam 10.00 (tanggal 27 Mei 1903) 100 orang pengikut Kyai Kasan yang berpakaian putih bergerak untuk memberontak. Wedana dan lurah Gedangan dapat ditawan, namun kemudian mereka dapat meloloskan diri. Dan hanya atas bantuan militer dari Surabaya, Bupati Sidoarjo dapat memadamkan pemberontakan tersebut. Kyai Kasan Makmin mati terbunuh, 40 orang meninggal dunia dan 83 orang dapat ditawan.<sup>85</sup>).

Gerakan protes rakyat perdesaan yang dipimpin oleh seorang tokoh agama (Islam) semacam itu ternyata juga dijumpai di daerah Kabupaten Nganjuk (desa Bendungan, kawedanan Brebek), yang dipimpin oleh Kyai Dermojoyo.

Kyai Dermojoyo dilahirkan di desa Gebog, sebuah desa dekat Kudus dan nama kecilnya Bagus Talban. Di desa Bendungan itu ia termasuk orang kaya dan terkenal sebagai "dukun," "guru petanen", "guru ngelmu" (mistik) dan ahli "Primbon". Sehingga di situ ia sangat berpengaruh terhadap masyarakat desa dan mempunyai banyak hubungan dengan para "priyayi" (= Pegawai pangreh praja"), yang tertarik akan "ngelmu" (= ajaran tentang mistik). Dalam hidupnya ia pernah "berguru" kepada pondok pesantren yang diasuh oleh : Haji Tuan Sanap, Haji Dulkamit, Kyai Bardogi, Haji Dulwahab, Haji Sayang, Haji Mohammad Umar (guru terkenal pesantren Sidocermo, Surabaya) dan Kyai Kasanbesari. Kyai Kasanbesari inilah rupanya yang mengajarkan tentang "Ramalan Joyoboyo" dan harapan akan datangnya *Ratu Adil*. Sehingga pada suatu ketika ia dalam mimpinya merasa menerima suatu

*sahyu* yang mentakdirkan ia menjadi Ratu Adil. Impian-impian para pengikut Kyai Dermojoyo kemudian memperkuat kedudukan Dermojoyo sebagai Ratu Adil dan bahkan mengangkat anak lakinya sebagai Putra Mahkotanya. Demikianlah pada bulan Januari 1907 Dermojoyo memproklamasikan dirinya sebagai Ratu Adil yang akan menentang musuh-musuhnya, para pengikutnya yang setia diangkat sebagai komandan-komandannya, dengan keyakinan bahwa mereka akhirnya akan mendapat kemenangan. Kepada para pengikutnya selalu diindoktrinasikan suatu kepercayaan, bahwa Togog dan Semar (tokoh mistik yang memiliki "tirta wilayat" atau banyu suci penghidupan akan datang untuk membebaskan rakyat. Kepercayaan inilah yang memberikan kekuatan dan semangat yang luar biasa bagi para pengikut Dermojoyo dalam menghadapi musuhnya.

Atas dasar informasi dari mata-mata pemerintah, maka pada tanggal 29 Januari 1907 Bupati Nganjuk, Wedana Warujayeng dan penjabat-penjabat lokal lainnya mengerahkan agen polisi lokal untuk mengepung rumah Dermojoyo. Sebaliknya para pengikut Dermojoyo menyerang pejabat-pejabat pemerintah dan memaksa mereka untuk meletakkan jabatannya. Akibatnya di antara mereka banyak yang terluka, termasuk Asisten Residen dan Wedana Brebek. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat dipadamkan setelah mendapat bantuan militer dari Surabaya. Delapan belas pemberontak mati, termasuk Dermojoyo dan anak-anaknya. Sembilan terluka dan 49 ditawan.

Laporan dari para pejabat tentang peristiwa Bendungan itu, ada yang menganggap bahwa peristiwa tersebut hanyalah peristiwa lokal, seperti peristiwa-peristiwa gerakan petani sebelumnya. Namun ada pula yang membuat teori, bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu sekongkolan dari suatu bangsa yang luas di mana para aristokrat ikut mengambil bagian. Akibatnya Prajakusumo (ex Wedana Kertasana) dan juga Bupati Pasuruan patut dicurigai. Jaringan persekongkolan semacam itu terdapat pula dalam pemberontakan di Banyuwangi, Kediri Selatan dan Madiun, di mana para priyayi menjalin hubungan dengan para tokoh dan lembaga agama, misalnya dengan Kyai Mohammad Rawi di Banyuwangi dan dengan pesantren Cepaka.<sup>86)</sup>

Dari uraian tersebut di atas nampak dengan jelas, bahwa pada permulaan abad ke-20 sebagai akibat pelaksanaan politik Etis dan perluasan modal asing di Jawa Timur menimbulkan kegelisahan

sosial dalam masyarakat pedesaan. Kegelisahan sosial tersebut disebabkan adanya perubahan sosial sebagai akibat benturan tatanan dan kultur asing terdapat tatanan dan kultur tradisional setempat yang makin terdesak. Timbullah gerakan protes tradisional (masa tani) terhadap Pemerintah Belanda yang membawa tatanan dan kultur asing tersebut. Benturan dengan tatanan dan kultur asing itu ternyata mengakibatkan disorganisasi masyarakat tradisional yang mulai kehilangan orientasi hidupnya. Justru disorientasi yang disebabkan oleh perubahan sosial itu mendorong serta membuat masyarakat tradisional cenderung untuk melancarkan gerakan yang manapun mengembalikan keadaan semula. Dalam keadaan demikian muncullah tokoh agama Islam (guru atau Kyai) yang merealisasi potensi gerakan protes tradisional tersebut dalam bentuk kekerasan dengan tujuan-tujuan mesianistis dan berorientasi kepada nilai-nilai agama. Dengan demikian jelaslah, bahwa gerakan protes tradisional yang terjadi di Jawa Timur pada permulaan abad ke-20 itu lebih menonjol latar belakang nilai-nilai keagamaannya dari pada faktor-faktor sosial, politik dan faktor ekonominya. 87)

Namun demikian potensi protes tradisional, yang merupakan "arus bawah" peristiwa-peristiwa politik itu, setelah kelompok intelektual memakai organisasi modern sebagai sarana perjuangannya, sangat menentukan dalam menyusun strategi perjuangannya.

Munculnya kelompok intelektual itu sebenarnya merupakan akibat, yang tidak dikehendaki oleh Pemerintah kolonial, dari suatu produk pendidikan formal sekuler atau sistem sekolah Barat. Tujuan pelebaran jaringan sekolah di Hindia Belanda semula agar supaya pemerintah kolonial mendapatkan tenaga bagi keperluan administrasi dan terjalinnya hubungan kultural yang erat dan abadi antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda. Maka dari itu dapatlah dikatakan, bahwa tujuannya untuk mengimbangi proses pelebaran sistem birokrasi (=kepegawaian). Hal itu berarti membuka kesempatan bagi para individu yang berasal dari masyarakat lapisan bawah untuk menjadi pegawai (rendahan) pangrehpraja. Menjadi pegawai pangrehpraja berarti mereka telah memasuki dunia "Priyayi". Terjadilah mobilisasi sosial vertikal, yang mana anggota masyarakat lapisan bawah mempunyai kesempatan menembus masyarakat lapisan atas.

Perluasan kelas pegawai oleh pemerintah kolonial semacam itu berarti ancaman bagi para pegawai lama yang semula hanya

bertopang kepada kebanggaan keturunan (=aristokrat) akibatnya, untuk mempertahankan legitimasinya atau pengesahannya mereka harus menuntut pengajaran Barat pula. Karena pelebaran jaringan sekolah ternyata sangat menentukan kemajuan anggota masyarakat Bumiputra, maka permulaan abad ke-20 itu biasanya dianggap sebagai "Jaman Kemajuan". Sekolah di samping membawa kemajuan di bidang status sosial dan status kepegawaian, juga membawa kemajuan di bidang cara berfikir.

Diterimanya dan dijadikannya sekolah sebagai salah satu syarat bagi mobilitas sosial adalah kelanjutan dari tradisi yang mengagumkan keunggulan ilmu. Di sekolah-sekolah "Belanda" telah memperkenalkan pada murid-murid, yang berasal dari berbagai latar belakang budaya tradisional dan beberapa golongan masyarakat, suatu pola berfikir yang sama, yaitu berfikir secara rasional dalam menanggapi lingkungannya. Sehingga sekolah sistem Barat itu dapat menjadikan para terpelajar sebagai bagian dari dunia intelektual yang kosmopolit. Demikianlah kiranya sekolah modern (=sistem Barat) itu telah berfungsi sebagai katalisator bagi terwujudnya dua elite, yaitu : birokrat modern dan intelektual. 88)

Dari bangku sekolahan, dengan membaca buku-buku (perpustakaan), dengan membaca majalah atau pun harian-harian, kaum terpelajar Bumiputra mempunyai kesempatan untuk mengetahui ide-ide dari para tokoh berfikir Barat yang menjadi landasan dan pendorong gerakan dinamis dari masyarakat dunia modern. Begitu pula kaum terpelajar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah dunia tentang perjuangan bangsa dalam proses memperbaiki nasibnya. 89) Sehingga perbandingan antara kemajuan dunia Barat dengan keterbelakangan Hindia Belanda (=Indonesia) dalam jaman kolonial itu membuka hati nurani para cendekiawan dan kaum terpelajar Bumiputra untuk memikirkan nasib bangsanya.

Muncullah tokoh perintis kemajuan wanita Indonesia R.A. Kartini, yang secara individual telah menyatakan cita-cita yang berdasarkan "Kesadaran Kebangsaan" (*national bewustzijn*) 90) Cita-cita tersebut terkumpul dalam buku "*Door duisternis tot Licht*" dan bentuk perwujudannya antara lain berupa berdirinya sekolah Gadis di halaman Kabupaten Jepara dan Rembang. Sejak saat itu mulailah masa baru bagi dunia pendidikan kaum wanita Bumiputra di Indonesia. Selanjutnya berturut-turut berdirilah

sekolah yang sejenis dengan kepandaian putri di kota Jakarta, Bandung, *Madiun*, Bogor, *Malang*, Cirebon, *Surabaya*, Surakarta, dan Rembang. Namun R.A. Kartini tidak dapat melihat semua hasil usahanya, karena pada tanggal 17 September 1904 beliau berpulang ke *Rahmatullah*. 91)

Walaupun R.A. Kartini telah tiada, namun adik-adiknya (Rukmini, Kartinah dan Sumatri) tetap berjuang untuk menyebar luaskan cita-citanya. Ketiga putri Jepara itu kemudian menyebar surat edaran dengan semboyan "Jawa Maju" (*Java Vooruit*), Th. 1904). Disarankan dalam surat edaran itu agar supaya kaum wanita mendirikan perkumpulan atas kekuatan sendiri dan hendaknya menerbitkan "Majalah" sebagai gelanggang perjuangan untuk tugas suci, yaitu : "Mengangkat derajat Bangsa", 92) Di samping kelompok putri Jepara itu, pada waktu itu masih ada lagi dua kelompok lain, yaitu kelompok Bupati dan kelompok Paku Alaman, yang merupakan titik pusat dalam jaringan cita-cita kemajuan Jawa. Yang termasuk kelompok Bupati antara lain : bupati Tuban, Temanggung, Jepara, Demak, Karanganyar dan Kutoarjo. Sedangkan yang termasuk kelompok Paku Alam ialah Pangeran Notodiredjo (Ketua BU yang kedua) nanti, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mas Atmodirono dan seorang arsitek di Semarang. 93) Ketiga kelompok inilah yang semula mempropagandakan cita-cita "mengangkat derajat bangsa (*Jawa*), dengan melalui kemajuan pendidikan dan pengajaran".

Pada waktu itu telah tumbuh keyakinan pada Dr. Wahidin Sudirohusodo, bahwa kepada lapisan bawah masyarakat di Jawa perlu diberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Dua soal yang mengikat hati sanubarinya, yaitu perluasan pengajaran dan menamakan kesadaran nasional. Untuk mencapai tujuan itu perlulah terlebih dahulu dibentuk sebuah dana belajar atau *studiefonds*, terutama bagi mereka yang karena kurang mampu tidak dapat meneruskan pelajarannya. Untuk mencapai cita-citanya, maka pada tahun 1906 dr. Wahidin Sudirohusodo mulai menjalankan kampanye di kalangan priyayi, di pulau Jawa.

Sementara itu di Asia telah terjadi suatu peristiwa yang dapat membangkitkan semangat "Kebangunan Nasional Asia". Peristiwa tersebut berupa kemenangan Jepang (=bangsa Asia) terhadap Rusia (=bangsa Barat) dalam peperangan di Tsusina (= Port Arthur) tahun 1900. Peristiwa itu menyadarkan kaum terpelajar Bumiputra, bahwa bangsa Asia (kaum kulit berwarna)

tidak selamanya kalah atau lebih rendah dari bangsa Barat (kaum kulit putih). Timbullah rasa harga diri bangsa Asia (= *Asiatisch Reveil* yaitu Kebangunan Asia). Kenyataan ini rupanya menambah keyakinan dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dan termasuk golongan priyayi rendah, bahwa kepada lapisan bawah masyarakat di Jawa perlu diberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Dan soal yang mengikat hati sanubarinya, yaitu perluasan pengajaran dan menanamkan kesadaran nasional. Untuk mencapai tujuan itu perlulah terlebih dahulu dibentuk sebuah dana belajar atau studiefonds, terutama bagi mereka yang karena kurang mampu tidak dapat meneruskan pelajarannya. 94) Kenyataan itu pula rupanya yang menimbulkan gagasan dalam benak para pelajar STOVIA yang merupakan kelompok keempat, tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan rakyat, terutama rakyat kecil, 95) paduan antara dua gagasan tersebut menimbulkan suatu tindakan yang berupa pembentukan organisasi modern dengan nama "BOEDI OETOMO" (baca : Budi Utomo).

## C INTERAKSI DI DAERAH JAWA TIMUR DENGAN BERDIRINYA PARTAI/ORGANISASI

### 1. *Budi Utomo*

Dalam rangka untuk mempropagandakan cita-citanya, seorang pensiunan dokter Jawa yang berasal dari desa Mlati di kaki gunung Merapi Yogyakarta, pada tahun 1906 dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan perjalanan keliling pulau Jawa untuk mengunjungi para priyayi atau para pejabat tinggi ataupun rendah pribumi. Menurut pemberitahuan surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* (selanjutnya disingkat BN) tahun 1908 usaha dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut telah mendapat simpati di kalangan pegawai bumiputra di Banten, Betawi (= Jakarta), Bandung, Cirebon, Banyumas, Semarang, Kedu, Yogya dan Solo. Di Jawa Timur usahanya kurang mendapat dukungan, karena fitnah yang dilancarkan sebuah surat kabar di Surabaya, bahwa ia terlibat kerusuhan di Gedangan dan Yogya. Karena fitnahan itulah ia tak dapat memasuki beberapa karesidenan di Jawa Timur. 96) Walaupun hasil kampanyenya tidak sebagaimana yang diharapkan tetapi hasilnya ada juga, seperti di daerah Jawa Tengah sendiri sejak

itu terbuka kemungkinan adanya kerjasama di antara pejabat pribumi. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk "Dana Pelajar". Dalam perjalanan kampanye itu pada akhir tahun 1907, dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan Sutomo, pelajar STOVIA, di Jakarta. Pertemuan yang memperbincangkan nasib rakyat itu ternyata berpengaruh besar pada diri Sutomo. 97)

Sutomo, kalau di Surabaya terkenal dengan panggilan kesayangan *Pak Tom* atau *Mas Tom*, berasal dari desa Ngepeh, kabupaten Nyanyuk (lahir tanggal 30 Juli 1888) anak dari seorang guru desa yang bernama R. Suwadji. Kemudian ayahnya pindah pekerjaan di Pangreh Praja (B.B. = *Binnenlands Bestuur*) dan akhirnya menjadi Wedana di Maospati, Madiun. Waktu kecil namanya R. Subroto, tetapi setelah mendapat kesulitan ketika akan memasuki Sekolah Rendah Belanda (*Europeesche Lagere School*) di Bangil, maka ia diaku anak oleh pamannya (R. Ardjodipuro) yang pada waktu itu menjadi mantri guru dan diganti namanya R. Sutomo. Dengan demikian ia dapat memasuki Sekolah Rendah Belanda (ELS) 98) Setelah lulus dari Sekolah Rendah Belanda di Bangil itu, maka pada tanggal 10 Januari 1903, ketika masih berumur 15 tahun, Pak Tom bersama dengan 13 orang kawannya mencatatkan diri masuk STOVIA di Jakarta. Kawan-kawannya itu berasal dari berbagai Daerah. Di antara teman-temannya yang dekat terdapat nama : Gumbrek, M. Suwadji. M. Gunawan Mangunkusumo, Moh. Saleh dan M. Suleiman. 99) Adapun pada masa antara tahun 1900 - 1910 di STOVIA setiap tahunnya terdapat jumlah pelajar, yang menurut pembagian daerah asalnya adalah sebagai berikut ; (100)

Jawa	antara 90	sampai	111
Sumatra	antara 10	sampai	32
Ambon	antara 2	sampai	17
Menado	antara 8	sampai	18
Timor	antara 0	sampai	2
Belanda	antara 0		
Cina	antara 0		

Dengan melihat daftar tersebut di atas jelaslah, bahwa para pelajar dari beberapa suku dan beberapa daerah Indonesia dapat bertemu; sehingga kesadaran kekeluargaan antar suku di sana lebih hidup dari pada di sekolah yang mendidik para guru (*Kweek*

*school*) ataupun para pangrehpraja (OSVIA), yang biasanya hanya menerima siswa-siswa dari daerah provinsinya. Suatu perbedaan penting selanjutnya antara STOVIA dan OSVIA ialah, bahwa para siswa dari OSVIA mempunyai masa depan yang lebih cerah dari pada para siswa dari STOVIA. Para siswa dari OSVIA yang berasal dari putra-putra golongan priyayi tingkat atas itu setelah lulus dapat mengharapkan dirinya untuk masuk kantor-kantor pemerintah dengan kedudukan yang baik. Di sana mereka dapat mengenyam gaji yang besar dan memperoleh kesempatan kenaikan tingkat yang baik serta kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Sedangkan para siswa STOVIA kebanyakan berasal dari golongan priyayi rendah seperti, guru sekretaris, inspektur polisi, bangsawan miskin dan kepala desa tertentu. Oleh golongan priyayi tingkat atas para lulusan STOVIA dipandang sebagai "Mantri-Cacar" dan termasuk golongan priyayi rendah. Mereka hanya menerima gaji 70 *gulden* (= rupiah) sebulan, yang berarti separoh dari gaji lulusan OSVIA' dan kalau bepergian dengan kereta api atas biaya negara mereka hanya dibenarkan menggunakan kelas III (bukan kelas II); dengan demikian mereka disamakan dengan kuli-kuli dan tahanan-tahanan. (101)

Latar belakang keadaan sosial tersebut di atas tentunya mengundang perasaan yang tidak puas dengan keadaan dan menimbulkan ide-ide yang revolusioner di kalangan siswa STOVIA. Dan karena lulusan dari para siswa yang berasal dari priyayi rendah itu kemudian banyak berkecimpung dalam memelihara kesehatan rakyat, maka tidak mengherankan kalau kemudian timbul gagasan-gagasan untuk memperbaiki nasib "*wong-cilik*". Maka dari itu sudah sewajarnya kalau cita-cita dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut kemudian mudah diterima oleh para pelajar STOVIA, walaupun mengalami perubahan. Setelah tujuan yang semula hanya akan mendirikan suatu dana belajar diperluas jangkauannya, maka dibentuknyalah suatu wadah persatuan dalam bentuk perserikatan dengan Anggaran Dasar (= organisasi); yang atas usul Suradji diberi nama "BUDI UTOMO". (102) Peristiwa tersebut terjadi dalam rapat para pelajar STOVIA di bawah pimpinan Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908, di ruang anatomi gedung STOVIA, Gang Manyar (Sekarang Jl. Dr. Abdulrahman Saleh no. 26), Weltevreden (Jakarta). Pendirian organisasi tersebut dapat dilaksanakan, karena situasinya memang

memungkinkan.

Sebagai kelanjutan pelaksanaan politik Etika di Hindia Belanda, pada tanggal 20 Desember 1904 telah berlaku Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatie-wetgeving*); yang membuka kemungkinan-kemungkinan untuk wilayah seberang lautan atau "*Overzeesche Gewesten*" (di Hindia Belanda) untuk membentuk badan-badan pemerintahan desentralisasi di daerah-daerah. Undang-undang itu membuka kemungkinan pembentukan dewan perwakilan yang terbatas, yang disebut "*gewestelijke en plaatselijke raden*" termasuk "*Gemeenteraden*" yang pertama berdasarkan "*Locale Raden Ordonnantie*" 1905 (Ind.S.No. 181). Walaupun perwakilan terbatas daripada penduduk (dewasa itu) masih bermayoritas *Nederlands*, namun untuk menyusun perwakilan itu terpaksa larangan ketat berdirinya perhimpunan politik dalam R.R. (*Regeerings Reglement*) pasal 111 dulu itu perlu diperlonggar. Kelonggaran R.R. pasal 111 inilah yang memberi kesempatan berdirinya organisasi Budi Utomo. (103)

Tentang latar belakang yang lebih mendalam sebelum lahirnya Budi Utomo itu, dapatlah kita baca surat edaran Budi Utomo di Weltevreden (= Jakarta), yang ditandatangani oleh Suwarno (I) sebagai sekretaris, sebagai berikut :

"Sudah sejak lama, pelajar-pelajar STOVIA di Weltevreden, telah membicarakan gagasan bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil .... kami berpendapat, untuk mempropagandakan maksud itu langsung kepada orang-orang muda, yang hidup di bawah tekanan yang sama seperti kami sendiri. Tak ada satu yang lebih penting daripada anjuran untuk menunjukkan rasa cinta kepada rakyat di antara orang-orang yang sama berpikir seperti kami, di antara teman seperjuangan di sekolah pertanian dan kehewanian di Bogor, pelajar-pelajar di "*Hoofden School*" di Bandung, Magelang dan *Probolinggo*, sekolah guru di Bandung, Yogyakarta dan *Probolinggo* dan "*Burger Avond School*" di *Surabaya*.

Dari mereka itu kami mengharapkan pengertiannya .... dan sebagai pemimpin-pemimpin yang akan datang dari rakyatnya, mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan negeri dan penduduknya ...."

(104)

Dari surat edaran tersebut di atas nampak dengan jelas, bahwa dalam mempersiapkan berdirinya organisasi Budi Utomo para penggerakannya tidak hanya mencari dukungan dari para pelajar STOVIA tetapi juga dari para pelajar sekolah pertanian, sekolah guru dan sekolah menak di Jawa Barat, Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Dukungan tersebut rupanya diberikan dengan jalan mengirimkan wakil-wakilnya ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan peresmiar Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. (105) Untuk mempropagandakan pendiriannya, organisasi pelajar Budi Utomo ini kemudian membuat surat edaran yang ditujukan kepada segala lapisan penduduk Bumiputra dengan memakai bahasa Jawa, Melayu dan bahasa Belanda. Adapun pendirian dari organisasi pelajar Budi Utomo ini antara lain : "*Jangka pendek akan menyatukan penduduk Bumiputra dan jangka panjang akan membentuk organisasi umum di Jawa*" ("*Algemeen Javasche Bond*"), dengan adanya suatu pesaudaraan nasional ("*Nationale Broederschap*), yang tidak memandang perbedaan ras, jenis kelamin dan kepercayaan. Sebagai tujuannya dinyatakan secara samar-samar dalam bentuk semboyan : "*Hindia Maju*" ("*Indie Vooruit*"). (106)

Dari pendirian Budi Utomo tersebut nampak dengan jelas, bahwa para pelajar STOVIA, sebagai pendiri Budi Utomo yang pertama, dalam mengungkapkan cita-citanya atau tujuan akhirnya tidak memakai istilah "Jawa Maju" (*Java Vooruit*) seperti yang telah dipakai oleh ketiga putri Jepara; akan tetapi mereka memakai istilah "Hindia Maju" (*Indie Vooruit*). Juga dalam mengungkapkan jangkauan organisasi Budi Utomo mereka tidak memakai istilah "*een Algemeen Javaansche Bond*" (= suatu perserikatan umum orang Jawa) atau dalam bahasa Inggrisnya : "*General Javanese Union*" atau "*the all Javanese Union*", tetapi mereka mempergunakan istilah "*een Algemeen Javasche Bond*" ("suatu perserikatan umum di Jawa") atau dalam bahasa Inggrisnya "*General Union in Java*". Dengan demikian jelaslah bahwa semula berdirinya Budi Utomo tidak hanya merupakan suatu organisasi perserikatan kebudayaan (orang) Jawa, melainkan merupakan suatu organisasi untuk umum di Jawa. Memang semula jangkauan gerakannya akan terbatas pada penduduk pulau Jawa dan pulau Madura, tetapi kemudian meluas untuk penduduk Hindia (= Indonesia) seluruhnya, tanpa memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan kepercayaan. Hal itu berarti

adanya suatu usaha untuk membuat suatu wadah persatuan bagi seluruh penduduk (Bumiputra) di Hindia Belanda (= Indonesia). Usaha semacam itu tentunya berlandaskan kepada pola berfikir Indonesia-sentris yang mengatasi pola berfikir *regio-centris* (kedaerahan) atau *ethno-centris* (= kesukuan). Pola berfikir Indonesia-sentris inilah yang membawa kebangkitan "Nasionalisme-Indonesia", yang dalam kelakuan manusia menimbulkan sikap nasionalistis Indonesia. Sikap nasionalistis Indonesia dalam bentuk permulaannya atau "Sikap protonasionalistis Indonesia" itu nampak pada sikap para pemimpin pelajar STOVIA pada awal berdirinya Budi Utomo (dari bulan Mei s/d Oktober 1908). (107)

Gagasan para pendiri organisasi pelajar Budi Utomo tersebut, di Jawa Timur, ternyata mendapat persetujuan dan mendapat pengikut pada lembaga sekolah menak (*Hoofden School*) dan lembaga sekolah guru (*Kweek School*) di Probolinggo, serta lembaga sekolah umum sore (*Burger Avond School*) di Surabaya. Sehingga pada tahun 1908 itu juga berdirilah organisasi Budi Utomo cabang Probolinggo dan cabang Surabaya : (108) yang dalam perkembangan selanjutnya muncul pula Budi Utomo cabang Nganjuk. (109) Adapun pendiri Budi Utomo cabang Surabaya ialah H.O.S. Tjokroaminoto, yang pada waktu itu menjadi siswa Sekolah Umum Sore (*Burger Avond School*). (110) Sedangkan di Jawa Barat kemudian muncul Budi Utomo cabang Bogor dan di Jawa Tengah berdiri Budi Utomo cabang Yogya I, Yogya II serta cabang Malang, tanpa memberi tahu para pendirinya. Sudah barang tentu sambutan yang demikian itu akan memberikan rasa syukur para pendirinya, bahkan pada tahun 1908 itu juga telah direncanakan akan melangsungkan kongresnya yang pertama di Yogyakarta.

Demikianlah antara tanggal 3 s/d 5 Oktober 1908 di Yogyakarta berlangsung kongres Budi Utomo yang pertama kali, yang oleh surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* dianggap sebagai kongres nasional yang pertama kali diadakan secara modern di Indonesia. Pada saat itulah pimpinan Budi Utomo beralih dari tangan generasi muda kepada generasi yang lebih tua yang terutama terdiri dari para priyayi rendahan. Pada waktu itu nampak pula adanya dua aliran faham yang berbeda dalam tubuh organisasi Budi Utomo. Disatu pihak menghendaki agar

supaya keanggotaannya hanya terbatas pada para ambtenaar terpelajar saja dan bergerak dalam bidang kebudayaan dan bidang sosial, terutama dibatasi sampai urusan pelajaran sekolah. Di pihak lain berkehendak supaya haluan organisasi menuju ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, yang menuntut agar nasib seluruh rakyat mendapat perhatian. Pihak yang pertama didukung oleh golongan tua dengan Dr. Radjiman Wedyodipuro (kelak Wedyodiningrat) sebagai pemukanya. Pihak kedua dikemukakan oleh golongan muda dengan dr. Tjipto Mangunkusumo dan Surjodiputro sebagai juru bicaranya. (111)

Setelah perdebatan yang panjang tentang corak Budi Utomo, maka Pengurus Besar memutuskan untuk membatasi jangkauan gerakannya kepada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilih oleh karena itu ialah bidang pendidikan dan kebudayaan. Karena kebanyakan penduduknya ialah golongan priyayi rendah, maka dapat difahami mengapa Budi Utomo menganggap perlu perluasan pendidikan Barat. Pengetahuan bahasa Belanda mendapat prioritas pertama, karena tanpa bahasa itu seseorang tidak dapat mengharapkan kedudukan yang layak dalam jenjang kepegawaian kolonial. Dengan demikian, maka Budi Utomo cenderung untuk memajukan pendidikan bagi golongan priyayi dari pada bagi penduduk Bumiputra pada umumnya. Sasaran Budi Utomo berubah dari "kemajuan untuk mempertahankan penghidupan" menjadi "kemajuan secara serasi". Hal itu menunjukkan pengaruh golongan tua yang moderat dan golongan priyayi yang lebih mengutamakan jabatannya. Dengan demikian, maka sikap "protonasionalistis" dari para pemimpin pelajar yang kentara pada awal berdirinya Budi Utomo, kini terdesak ke belakang.

Setelah dua pemimpinnya yang berbeda pendapat dengan anggota Pengurus Besar, yaitu dr. Tjipto Mangunkusumo dan Surjodiputro, berhenti dari badan pengurus (Oktober 1909), maka Pengurus Besar Budi Utomo tersebut menjadi lebih seragam. Setelah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada Budi Utomo sebagai badan hukum (...1909), maka diharapkan organisasi itu akan melancarkan aktivitasnya secara luas. Tetapi segera Budi Utomo menjadi lamban, yang sebagian disebabkan kesulitan keuangan. Lain dari pada itu para bupati telah mendirikan organisasi sendiri ("Sedio Muljo" th.1911), para pemuda

STOVIA dan anggota lainnya berhenti sebagai anggotanya karena kecewa terhadap jalan yang telah ditempuh Budi Utomo. (112) Walaupun pada akhir tahun 1909 Budi Utomo telah mempunyai cabang 40 tempat dengan jumlah anggota lebih kurang 10.000 orang, namun perkembangan selanjutnya usaha Budi Utomo makin lama makin merosot. Bahkan Budi Utomo semakin kehilangan kedudukan monopolinya setelah muncul organisasi nasional lainnya, seperti: Sarekat Islam, yang beraliran nasionalisme demokratis dengan dasar agama; *Indische Partij* yang beraliran Indisch-nasionalisme radikal dan Muhammadiyah yang beraliran keinginan mengadakan pengajaran modern berdasarkan agama serta kebangsaan di luar politik. (113)

Ketiga organisasi nasional tersebut ternyata menarik unsur-unsur yang tidak puas untuk keluar dari Budi Utomo. Demikianlah H.O.S. Tjokroaminoto, yang semula sebagai pendiri Budi Utomo cabang Surabaya, juga meninggalkan organisasi tersebut dan ikut serta mendirikan organisasi baru dengan nama Sarekat Islam.

## 2. *Sarekat Islam*

Lain daripada organisasi Budi Utomo yang berorientasi kepada kaum atasan, maka Sarekat Islam sejak berdirinya diarahkan ke rakyat jelata, Sarekat Islam yang semula bercorak sosial-ekonomis dengan semangat kebangsaan dan keagamaan sebagai dasar pendorongnya, (114) itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari gerakan Sarekat Dagang Islam yang berada di kota Solo perkumpulan Sarekat Dagang Islam ini berdiri, karena umat Islam ingin bersatu menentang adanya persaingan dagang yang hebat dari bangsa Cina, yang masa itu bangkit bergerak karena kemenangan dr. Sun Yat Sen di Cina, dan kecondongan pemerintah kolonial menganak-emaskan mereka.

Karena peranan golongan Cina di Hindia Belanda dalam bidang perdagangan perantara makin besar dan pemerintah kolonial sangat memerlukan tenaganya untuk mempertahankan monopoli perdagangannya, maka pada permulaan abad ke-20 golongan Cina telah menduduki status sosial sebagai golongan menengah. Dengan tujuan untuk memajukan perdagangan dan kedudukannya (status sosialnya) dalam masyarakat, maka pada tahun 1901 golongan Cina telah mendirikan perserikatan dagang yang terkenal dengan sebutan "*Sing Hwee*"; (115) yang kemu-

dian pada tahun 1902 muncul pula organisasi dagang Cina "*Tiong Hoa Hwee Koan*". Pada tahun 1911 organisasi ini telah berkembang ke seluruh kota-kota di Hindia Belanda (= Indonesia), di mana kegiatannya bukan hanya dalam bidang perdagangan saja, akan tetapi juga mempunyai kegiatan atau politik dengan pemerintah negeri leluhurnya (= Cina). (116)

Aktivitas golongan Cina tersebut rupanya merangsang para pedagang Arab dan Indonesia di Jakarta untuk mengadakan perserikatan dagang. Sehingga pada tahun 1905 lahirlah perserikatan pedagang Arab dan Sumatra dalam suatu Organisasi yang bernama "*Jam Yat Khair*", yang menekankan kepentingan agama dan ekonomi. Hal itu juga merangsang R.M. Tirtoadisurjo, untuk mempersatukan para pedagang Bumiputra dalam wadah organisasi yang lebih luas. Demikian pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisurjo, seorang pedagang lulusan OSVIA dan terkenal sebagai "bapak press Indonesia", mendirikan *Syarekat Dagang Islamiyah*, di Jakarta sebagai saingan terhadap "*Siang Hwee*". (117) Tujuan perhimpunan tersebut ialah hendak memajukan pedagang penduduk Bumiputra. Menurut pengertian orang Betawi (= orang Jakarta) pada waktu itu, yang dimaksud dengan orang "Islam atau "*Selam*" itu adalah orang Bumiputra pada umumnya. Maka dari itu Dr. N. Adriani menamakan Sarekat Dagang Islamiyah itu dengan "*Inlandsche Handels Vereniging*" (Persekutuan Dagang Bumiputra). (118) Dua tahun kemudian (1911) R.M. Tirtoadisurjo bersama-sama dengan Syech Ahmad Badjened telah mendirikan lagi sebuah persekutuan dagang yang lainnya, terutama saudagar batik dari Laweyan di kota Solo yang bernama Wirjowikoro (baca : Wiryowikoro) (yang terkenal dengan sebutan Haji Samanhudi).

Pada waktu itu (kira-kira dalam tahun 1911) di kota Solo telah ada suatu perhimpunan dagang "*Kong Sing*" yang anggotanya terdiri dari para pedagang Cina dan para pedagang Jawa. Persekutuan antara kedua golongan pedagang itu menjadi retak setelah para pedagang Cina, yang mendapatkan monopoli perdagangan dari pemerintah kolonial, mempermainkan harga penjualan bahan batik dan setelah para saudagar Cina menjadi angkuh karena pengaruh kemenangan gerakan Dr. Sun Yat Sen di negara Cina. Untuk menyaingi para pedagang Cina itu, maka Haji Samanhudi kemudian mengundang R.M. Tirtoadisurjo ke Solo. Terbentuklah "*Sarekat Dagang Islam*" di Solo Cabang Bogor

yang berdasarkan prinsip koperasi. Sebagai terompet guna meluaskan propagandanya diterbitkan surat kabar "Sarotomo" di Yogya dan R.M. Tirtoadisurjo sebagai pimpinan redaksinya. Tetapi kemudian timbul perselisihan antara Haji Samanhudi dengan R.M. Tirtoadisurjo, sehingga Haji Samanhudi pada bulan Mei 1912 terpaksa mencari orang baru yang mampu menyusun anggaran dasar organisasinya. Oleh karena itu ia lalu meminta bantuan kepada seorang terpelajar Bumiputra yang bekerja pada perusahaan dagang di Surabaya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto (baca: Umar Said Tjokroaminoto; kemudian terkenal dengan H. (Haji) O.S. Tjokroaminoto (119)

Di beberapa kampung di kota Surabaya, pada bulan Maret 1912, telah banyak penduduk Bumiputra yang menjadi anggota Sarekat Dagang Islam. Oemar Said Tjokroaminoto yang bertempat tinggal di kota Surabaya dan telah menjadi kecewa karena Budi Utomo menjadi organisasi priyayi, mulai memperhatikan gerakan Sarekat Dagang Islam tersebut. Perhatiannya makin meningkat ketika ia dikunjungi oleh tiga orang propagandis Sarekat Dagang Islam dari Solo dan menginap di rumahnya (semula di kampung Peneleh kemudian di Plampitan). Setelah mempelajari tujuan dari organisasi tersebut, akhir Oemar Naid Tjokroaminoto menjadi anggota Sarekat Dagang Islam dan pada tanggal 13 Mei 1912 mendapat undangan ke Solo dari Haji Samanhudi. Ia bersama-sama dengan R. Tjokrosoedarmo kemudian berangkat ke Solo dan di situ ia diserahi tugas untuk mendapatkan pengakuan badan hukum (*rechtspersoon*) bagi Sarekat Dagang Islam. Sekembalinya dari Solo, R. Tjokrosoedarmo adalah menjadi kawan Oemar Said Tjokroaminoto bermusyawarah di Surabaya, terutama tentang keputusan-keputusan yang sudah diambil di Solo. (120)

Sementara itu, pada bulan Agustus 1912, di kota solo terjadi keributan-keributan yang ditimbulkan oleh para anggota Sarekat Dagang Islam. Mereka telah mengorganisasi pemogokan buruh di onderneming Krapyak kepunyaan negeri Surakarta; dan mereka telah berhasil mengadakan pemboikotan terhadap para agen batik Cina. Oleh karena tindakan tersebut oleh pemerintah kolonial setempat dipandang membahayakan ketertiban umum, maka Residen Solo lalu mengeluarkan surat putusan (*besluit*) larangan (*Schorsing*) bagi Sarekat Dagang Islam. *Schorsing* tersebut berlaku dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 26

Agustus 1912.

Maksud pemerintah Hindia Belanda untuk membatasi aksi Sarekat Dagang Islam hanya di daerah Surakarta saja, ternyata tidak berhasil. Gerakan Sarekat Dagang Islam di Solo rupanya merembes juga sampai ke Jawa Timur. Di kota Surabaya terjadi ketegangan antara orang-orang Bumiputra dengan para pedagang Cina. Beberapa tindakan telah diambil terhadap toko-toko Cina. (121 a) Aksi tersebut makin memuncak dengan disahkannya akte notaris tentang Anggaran Dasar (Statuten) Sarekat Dagang Islam gaya baru. Demikianlah pada tanggal 10 September 1912 di hadapan Notaris B. ter Kuile di Surabaya, oleh Oemar Said Tjokroaminoto sebagai wakil dari 11 orang lainnya di Solo yang berserikat dengannya (Mas Haji Samanhudi, 5 orang saudagar batik lainnya, 4 pegawai kasunanan dan 1 orang swasta), telah dibuat Anggaran Dasar (*statuten*) Sarekat Dagang Islam yang baru. (120 b) Anggaran Dasar baru itu telah mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Kristalisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam itu adalah atas prakarsa Oemar Said Tjokroaminoto, dengan politiknya yang tajam, yang terutama diarahkan kepada kolonial Belanda. (121) Anggaran Dasar yang baru itu telah menggariskan tujuan Sarekat Islam, antara lain sebagai berikut :

- a. memajukan kemauan dagang.
- b. menolong anggota-anggota yang mendapat kesusahan, bukan karena salahnya sendiri dan tidak dengan sengaja, (ini memperkuat rasa persatuan).
- c. memajukan kecerdasan, budi-pekerti dan keperluan penghidupan orang Bumiputra, (ini sudah menuju kepada rakyat).
- d. menghilangkan pikiran yang menyalahi Agama Islam dan memajukan perikehidupan menurut jalan Agama itu. (122).

Di samping itu di dalam anggaran dasar yang baru itu masih tetap memberikan kemungkinan, untuk mendirikan cabang-cabang baru dengan anggota sekurang-kurangnya berjumlah 50 orang dan statusnya di bawah pimpinan Pengurus Besar. Haji Samanhudi menjadi ketua Pengurus Besar yang pertama dan Oemar Said Tjokroaminoto menjadi komissarisnya. (122 a)

Di Surabaya kemudian muncul cabang Sarekat Islam yang

diketahui oleh Oemar Said Tjokroaminoto sendiri (September 1912). Pengurusnya disusun dengan lengkap, semuanya bekerja dengan aktif; sehingga dalam tempo dua bulan sudah lebih dari 2.000 orang anggotanya. Propaganda di seluruh Jawa Timur berjalan dengan cepat, sehingga Sarekat Islam menjalar kemana-mana. Namun Oemar Said Tjokroaminoto, pada waktu itu menjadi sebutan umum di mana-mana, terutama di dalam kota Surabaya. Penduduk Surabaya memuji-mujinya sebagai seorang pemimpin yang gagah berani dan sakti. (123)

Bagi gerakan arus bawah (massa tani) dengan istilah magisreligius telah menggambarkan Oemar Said Tjokroaminoto sebagai "Ratu Adil" atau "Raja Jawa" yang akan membawa kembali ke jaman keemasan. (124)

Sedangkan sikap Oemar Said Tjokroaminoto yang menganggap semua orang sama derajat termasuk orang Belanda dan para pejabat sikapnya yang tegas dan tak malu-malu, oleh sementara pengikutnya dikaitkan dengan gambaran tokoh pewayangan : "Gatotkaca" dari "Sarekat Islam". (125) Rakyat memang tertarik kepadanya, sehingga mereka berduyun-duyun datang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Sarekat Islam. Rumah Oemar Said Tjokroaminoto siang malam, ramai mendapat kunjungan rakyat.

Sementara itu reaksi mulai timbul dari pemerintah kolonial. Sarekat Islam cabang Kepanjen (dalam daerah Malang), mulai difitnah. Buku-buku Sarekat Islam di sana dirampas oleh polisi Malang. Sebagai pemimpin Sarekat Islam yang bertanggung jawab, Oemar Said Tjokroaminoto terpaksa berhadapan dengan polisi. Berbagai macam tuduhan dan dakwaan dari pelbagai fihak ditimpakan terhadap organisasi tersebut, tetapi dengan tangkas dan bijaksana oleh Oemar Said Tjokroaminoto satu demi satu semua tuduhan dan dakwaan itu ditolak.

Di tengah-tengah hujan fitnah terhadap Sarekat Islam itu, Oemar Said Tjokroaminoto dengan niat yang bulat akan mengadakan Kongres Sarekat Islam yang pertama di kota Surabaya. Kongres Sarekat Islam yang pertama itu, dengan menyampaikan kepada khalayak ramai segala maksud dan tujuan pergerakan Sarekat Islam tersebut.

Demikianlah pada tanggal 26 Januari 1913 dilangsungkan Kongres Sarekat Islam yang pertama di kota Surabaya, di bawah pimpinan Oemar Said Tjokroaminoto, yang mendapat kunjungan

beribu-ribu bahkan puluhan ribu orang. Pada waktu itu belum ada larangan untuk mengadakan rapat di tempat yang terbuka, sehingga rapat samodra tersebut dapat dilangsungkan di Kebun Binatang yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan Kebun Raja atau "*Stadstuin*" (di sekitar Kantor Pos Besar Surabaya sekarang), suatu tempat yang mungkin baru kali itu rakyat menginjak rumputnya. Pada waktu itu belum ada penguat suara (*microphone*), jadi dengar atau tidak dengar mereka datang ke sana untuk menunjukkan rasa simpatinya terhadap gerakan tersebut. Konggres Sarekat Islam pertama yang merupakan rapat samodra itu, telah menggambarkan betapa besarnya pengaruh gerakan Sarekat Islam di kalangan masyarakat dan telah memperlihatkan pula betapa eratnya persatuan dan peserikatan persaudaraan ummat yang seagama; sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh gerakan Sarekat Islam. Nampak kebangunan dan persatuan ummat, sebagai pembaharuan jiwa dan pertukaran ruh, keinginan yang kuat untuk melepaskan diri daripada cengkeraman ruh perhambaan. Puluhan ribu manusia yang menghadiri medan Konggres, dengan sikap yang sadar akan harga kemanusiaannya di Tanah Airnya yang sudah sedemikian lama tunduk di bawah pemerintahan bangsa asing.

Dalam Konggres tersebut Oemar Said Tjokroaminoto telah menunjukkan tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat, seperti yang termaktub dalam *Regeerings-Reglement* ayat 55 yang berbunyi : "*De bescherming der Inlandsche bevolking tegen willekeur, van wien ook, is een der gewichtigste plichten van den Gouverneur-Generaal.*"

(Melindungi penduduk Bumiputra daripada perbuatan sewenang-wenang dari siapa pun juga, adalah salah satu daripada kewajiban Gubernur Jenderal yang terpenting). (126)

Dengan demikian rakyat yang semula hanya tahu merasa-rasai tetapi belum pandai mengeluarkan suara; rakyat yang mempunyai kewajiban, tetapi tidak mempunyai hak sebagai rakyat, mulai dibukakan hati sanubarinya untuk mengetahui hak mereka.

Di dalam Konggres tersebut, atas usul Oemar Said Tjokroaminoto, telah ditetapkan suatu susunan organisasi Sarekat Islam, sebagai berikut :

"Perhimpunan Sarekat Islam ialah suatu organisasi yang mempunyai daerah segenap Hindia-Timur (Indonesia) : yang boleh

menjadi anggota yaitu sekalian orang Islam, yang terkenal baik adat kelakuannya. Di tiap-tiap tempat yang dianggap cukup banyaknya anggota, bolehlah didirikan suatu cabang (*afdeeling*), yang memilih Pengurusnya masing-masing. Tiap-tiap cabang (*afdeeling*) dibagi menjadi beberapa ranting (*kring*), tiap-tiap ranting dibagi menjadi anak ranting (*groep*). Sekalian cabang (*afdeeling*) di Jawa Barat dan di pulau Sumatra dan pulau kecil-kecil didekat Sumatra, mendirikan suatu Departemen, yang diberi nama Departemen Sarekat Islam Jawa Barat dan dipimpin oleh Pengurus Besar/Pusat (*Hoofdbestuur*) Sarekat Islam Jawa Barat. Sekalian cabang (*afdeeling*) di Jawa Tengah dan di pulau Borneo Kalimantan mendirikan Departemen Sarekat Islam Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Pengurus Besar (*Hoofdbestuur*) Sarekat Islam Jawa Tengah. Sekalian cabang (*afdeeling*) di Jawa Timur dan di pulau Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan seterusnya ke arah Timur, mendirikan Departemen Sarekat Islam Jawa Timur yang dipimpin oleh Pengurus Besar/Pusat (*Hoofdbestuur*) Sarekat Islam Jawa Timur. Segenap Organisasi Sarekat Islam Hindia-Timur itu dikemudikan oleh suatu komite bernama "Centraal Comite Sarekat Islam Hindia Timur", yang berkedudukan di Surakarta. Yang semula menjadi Ketuanya adalah Haji Samanhudi dan Oemar Said Tjokroaminoto menjadi Wakil ketuanya. Selain dari pada itu Oemar Said Tjokroaminoto juga menjadi Ketua Pengurus Besar (*Voorzitter Hoofdbestuur*) Sarekat Islam Jawa Timur. (127)

Amat sederhana susunan organisasi Sarekat Islam pada tingkat permulaan itu. Tetapi sungguh pun demikian yang terpenting terletak pada usaha kebangkitan kesadaran nasional yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, sebagai langkah pertama untuk menindas dan semangat kedaerahan (*provinciealisme*) yang senantiasa dijadikan senjata oleh pemerintah kolonial akan memecah belah rakyat Indonesia. Dan lebih penting pula artinya, bahwa Sarekat Islam telah ikut serta merintis meletakkan dasar-dasar yang memungkinkan rakyat Indonesia di kemudian hari mencapai kesadaran nasional (*nationaal-bewust*) dan kesadaran bernegara (*staats-bewust*)

Kota Surabaya sebelum Sarekat Islam berdiri penduduknya senantiasa bermusuhan satu sama lain. Di antara kampung yang satu dengan yang lain, timbul pertikaian yang mengandung bibit-bibit permusuhan. Rakyat jelata tidak diperkenankan

memakai pakaian yang serupa dengan pakaian para priyayi (= menak). Entah ada peraturan yang melarangnya atau tidak, itu tidak jelas. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa rakyat pada umumnya takut memakai sandal, selop, sepatu, celana (pantalón) dan sebagainya. Tetapi setelah Sarekat Islam berdiri, ibarat cendawan tumbuh di kampung-kampung, nampaklah perubahan yang serentak, perubahan yang meliputi jasmani dan rokhani ummat Islam penduduk Bumiputra. Perasaan permusuhan berganti dengan persaudaraan yang erat lahir bathin, timbul rasa percaya-mempercayai dan hormat-menghormati, timbul rasa kasih sayang, rasa persaudaraan yang berhikmat. Sesudah Konggres tersebut kaum Sarekat Islam mengubah pakaiannya dengan memakai celana dan sepatu, setidak-tidaknya memakai sandal atau selop.

Gerak organisasi Sarekat Islam di Surabaya bertambah nyata, teristimewa setelah masuknya Wonosudirdjo ke dalam Sarekat Islam ranting Maospati Surabaya. Wonosudirdjo yang juga terkenal dengan nama W. Wondoamiseno tersebut ternyata di kemudian hari menjadi orang yang penting dalam pergerakan Sarekat Islam. (128)

Ibarat banjir, di sana-sini berdirilah cabang-cabang Sarekat Islam di seluruh Indonesia. Anggota organisasi tersebut tiap tahun makin meningkat jumlahnya. Sampai sejauh mana proses peningkatan keanggotaan organisasi Sarekat Islam di pulau Jawa antara tahun 1912 sampai dengan tahun 1914, dapatlah kita periksa dari tabel di bawah ini :

Tabel II. Keanggotaan SI, di Jawa, 1912-1914 (129)

April 1912 (Sarekat Dagang Islam)	4.500
Agustus 1912	66.000
Desember 1912 (Sarekat Islam)	93.000
April 1913	150.000
April 1914	366.913

Makin meluasnya keanggotaan Sarekat Islam itu berarti makin menambah besarnya pengaruh para pemimpinnya terhadap rakyat hal itu oleh pemerintah kolonial dikhawatirkan akan mengurangi gezag kewibawaan daripada alat-alat pemerintah

terutama dari Pangreh Praja. Berdasarkan atas kekhawatiran itulah, maka permohonan Pengurus Sarekat Islam untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum ("rechtspersoon") dari perkumpulan Sarekat Islam ditolak oleh Pemerintah Belanda. Penolakan itu dimuat dalam keputusan Gubernur Jenderal tanggal 30 Juni 1913. Tetapi di dalam keputusan tersebut dijelaskan, bahwa yang ditolak menjadi badan hukum itu Sarekat Islam seluruhnya sebagai satu perkumpulan, sedangkan cabang-cabangnya sebagai perkumpulan-perkumpulan sendiri-sendiri, masing-masing diakui sebagai perkumpulan badan hukum Sarekat Islam lokal. Tentunya ini salah satu manifestasi daripada sifat Pemerintah jajahan yang lazim disebut politik : "*Verdeel en heers*" (*divide et impera* = memecah dan memerintah). Walaupun demikian para pemimpin Sarekat Islam menerima pula keputusan tersebut sehingga cabang-cabang Sarekat Islam kemudian meminta pengesahan badan hukum untuk menjadi Sarekat Islam Daerah (= lokal). Dalam tahun 1914 di Indonesia telah ada 56 Sarekat Islam Daerah.

Dengan tujuan untuk memajukan dan membantu para Sarekat Islam Daerah, untuk mengadakan dan memelihara perhubungan serta untuk membantu kerjasama diantara mereka, maka pada tahun 1915 di Surabaya didirikan Cenral Sarekat Islam (CSI). Central Sarekat Islam ini keanggotaannya bukan terdiri dari para anggota secara perseorangan (individual), tetapi terdiri dari organisasi-organisasi Sarekat Islam Daerah. Central Sarekat Islam atau Sarekat Islam Sentral itu oleh pemerintah Hindia Belanda diakui sebagai badan hukum dengan keputusan tanggal 18 Maret 1916. Pengurus pertama Central Sarekat Islam itu terdiri dari Oemar Said Tjokroaminoto sebagai ketuanya, Abdul Muis dan Haji Gunawan sebagai wakil ketuanya, sedangkan Haji Samanhudi sebagai ketua kehormatan. (130)

Dari uraian tersebut di atas nampak dengan jelas, bahwa berbeda dengan organisasi Budi Utomo yang berorientasi kepada masyarakat lapisan atas, maka Sarekat Islam lebih berorientasi kepada rakyat umum. Jangkauannya meliputi seluruh penduduk Bumiputra yang beragama Islam di wilayah Hindia Belanda. Sedangkan organisasi Sarekat Islam ini merupakan gerakan yang bersifat *nationalistisch democratisch - religieus - economisch*. Selain daripada itu, pada tahun 1912 itu juga di Hindia Belanda (= Indonesia) muncul pula organisasi politik yang jangkauan-

nya juga meliputi penduduk Hindia Belanda yang mengaku Hindia Belanda sebagai tanah airnya. Organisasi tersebut bernama Indische-Partij.

### 3. *Indische Partij*

Setelah kita tinjau perkembangan gagasan yang menandai adanya kebangunan kesadaran nasional dan kebangunan revolusioner bersifat kerakyatan yang berjiwa Islam, maka sebagai fase ke tiga di dalam perkembangan sejarah pergerakan nasional pada awal pertumbuhannya lahir konsep yang bercorak politik seratus persen dan program nasional yang meliputi pengertian nasionalisme modern. Organisasi pendukung gagasan revolusioner nasional itu ialah *Indische Partij* yang didirikan pada tanggal 6 September 1912 di Bandung. Organisasi ini sebenarnya ingin menggantikan sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan di Indonesia pada tahun 1898. Perumus gagasan itu ialah E.P.E. Douwes Dekker yang kemudian terkenal dengan nama Danudirdja Setyabudhi.

Ernest Francois Eugen (E.F.E.) Douwes Dekker adalah cucu-kemenakan dari Eduard Douwes Dekker, yang terkenal dengan nama samaran Multatuli dalam karya tulisannya "Max Havelaar", karena E.F.E. Douwes Dekker cucu dari saudara laki-laki Multatuli yang bernama Jan Douwes Dekker. Jan Douwes Dekker ini adalah seorang penanam kopi di Jawa Timur. (131) E.F.E. Douwes Dekker adalah seorang Belanda, ibunya seorang Indo (Jerman dan Jawa) dari Pekalongan, dan ia dilahirkan pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan (Jawa Timur). Ia memulai masa remajanya di Pasuruan dan setelah lulus sekolah HBS, di Jakarta ia bekerja pada suatu perkebunan kopi di Sumber Duren di gunung Semeru Jawa Timur. Pada saat itulah perasaannya yang kuat terhadap keadilan dan kemanusiaannya mendapat ujian yang begitu berat. Ia selalu siap membela kepentingan kaum buruh sawomatang (Bumiputra). Tetapi atasannya R. Jasse, berpendapat bahwa dia "tidak selalu memperhatikan batas yang tepat" dalam pergaulannya dengan kaum pekerja. Itu sudah cukup menjadikan suatu alasan bagi atasannya untuk memberhentikannya, walaupun dengan surat keterangan yang baik.

E.F.E. Douwes Dekker sekarang menjadi laboran dan setelah itu ahli kimia pada pabrik Gula Pajarahana, dekat Kraksaan (Pasuruan). Di sini ia juga tidak bisa menahan dirinya ketika ia

melihat adanya kecurangan pada pembagian air irigasi antara kebun tebu dan sawah penduduk. Tuan Administrateur menjelaskan padanya untuk "Tidak mencampuri hal-hal yang tidak ada sangkut paut dengan dirinya". Hal itu menjadi sebab ia diberhentikan dari pekerjaan. Kemudian ia menjadi penganggur di Surabaya. Namun ketika di Afrika Selatan terjadi perang antara Tranvaals Boer (petani Transvaal di Afrika Selatan) dengan Inggris, ia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan yang membantu para petani Transvaal sampai tahun 1905 ia kembali ke Jakarta. Di Jakarta ia terjun dalam bidang kewartawanan dan berhasil menjadi pemimpin redaksi surat kabar "*Bataviaasch Nieuwsblad*", bersama-sama pemimpin redaksi lainnya seperti Zaalberg. Tetapi karena terjadi perselisihan paham dengan Zaalberg, ia kemudian meninggalkan *Bataviaasch Nieuwsblad* dan pindah ke Bandung untuk menerbitkan majalah tengah bulanan sendiri yang bernama "Het Tijdschrift" (1910). Bahkan kemudian menerbitkan surat kabar harian "*De Express*" pada tanggal 1 Maret 1912 majalah dan harian tersebut ternyata mempunyai peranan penting sebagai media massa untuk menyampaikan ide dan propaganda *Indische Partij*. (132)

Ketika berada di Jakarta ternyata E.F.E. Douwes Dekker banyak bergaul dengan para pelajar STOVIA, seperti Tjipto Mangunkusumo (1899 - 1905), Suwardi Surjaningrat (1903 - 1909), Suwarno dan lain-lainnya. Pergaulan yang erat kemudian menimbulkan cita-cita yang sehaluan, yaitu memperbaiki nasib rakyat dengan mendirikan organisasi umum dengan adanya suatu persaudaraan nasional, yang tidak memandang perbedaan ras, jenis kelamin dan kepercayaan. Cita-cita semacam itu kemudian menjadi dasar strategi perjuangan organisasi pelajar Budi Utomo (20 Mei sampai dengan 5 Oktober 1908) yang bertujuan "Hindia Maju" (*Indie Vooruit*) dan juga dijadikan dasar strategi perjuangan organisasi politik *Indische Partij*, yang bersemboyan "*Indie voor Indiers*" (Hindia untuk orang Hindia). Di samping itu rupanya mereka sependapat untuk mengadakan organisasi yang berbau politik dengan tujuan Hindia Merdeka. (133) Maka dari itu tidak mengherankan, bahwa setelah Konggres Budi Utomo yang pertama di dalam tubuhnya terdapat dua aliran yang berbeda. Aliran kebudayaan dan sosial yang didukung oleh golongan tua dan aliran politik yang didukung oleh golongan muda yang dipelopori oleh para pelajar atau alumni pelajar STOVIA.

Demikianlah, ketika Pengurus Besar Budi Utomo mengadakan rapat di Yogyakarta tanggal 9 September 1909, dr. Tjipto Mangunkusumo, sebagai wakil kaum muda, mengajukan usul supaya Budi Utomo memperluas keanggotaannya, yakni membuka pintunya bagi "*Indiers*" (Anak Hindia, yaitu semua orang yang lahir, hidup, mati dan dikubur di tanah Hindia atau Indonesia). Usul tersebut sudah jelas mengandung unsur politik. Usul tersebut dengan gigih ditolak oleh pemuka aliran kebudayaan, dr. Radjiman Widyodipuro (kelak Widyodiningrat). Akibatnya pada bulan Oktober 1909 dr. Tjipto Mangunkusumo keluar dari Budi Utomo dan hidup di Solo sebagai dokter swasta. (134) Namun demikian ketika pada tahun 1911 di daerah Malang berjangkit penyakit pes (= sampar) yang membawa korban manusia sebanyak 2.000 orang, (135) dengan dasar rasa perikemanusiaan dan berbekal idealismenya, dr. Tjipto Mangunkusumo mendaftarkan diri sebagai dokter sukarelawan yang pertama kali.

Demikianlah pada tahun 1911 (1910), ketika para dokter bangsa Eropa banyak yang menolak untuk dikirim ke Malang, dr. Tjipto Mangunkusumo terjun ke daerah wabah itu untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Malang. Di situ ia menemukan seorang bayi yang orang tuanya telah meninggal terkena penyakit pes. Sebagai kenang-kenangan bayi tersebut diberi nama Pes-jati (baca : Pes-yati) yang mengikutinya sampai akhir hidupnya. Tetapi sayang, jiwa dr. Tjipto Mangunkusumo yang selalu mendambakan kebebasan itu menimbulkan perselisihan dengan seorang kontrolur yang selalu ingin mencampuri pekerjaannya. Perselisihan itu sedemikian besarnya sehingga tidak ada jalan lain daripada salah seorang harus dipindahkan. Sudah barang tentu si orang Jawa yang harus dikalahkan, walaupun dengan secara diam-diam ia akhirnya dibenarkan. Dr. Tjipto Mangunkusumo mendapat surat pemindahannya dengan pernyataan yang biasa, yakni bahwa pemerintah merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Tetapi kemudian pada bulan Januari 1912 namanya telah tercatat bersama-sama dengan beberapa dokter Eropa lainnya untuk mendapat anugerah bintang jasa kerajaan sebagai "*Ridder in de orde van Oranje Nassau*", yang realisasinya diberikan pada bulan Agustus. Tetapi kemudian bintang jasa tersebut dikembalikan, ketika permintaannya sebagai dokter sukarelawan untuk menolong penderitaan rakyat Surakarta

dari wabah pes, ditolak.

Selagi dr. Tjipto Mangunkusumo memberantas wabah-pes itu tidaklah lupa ia mendirikan sebuah perkumpulan bernama *Raden Ajeng Kartini Club* di Malang. Di sini nama Kartini dipakai sebagai lambang kesadaran dan cita mulia, pembangkit kehidupan rakyat yang tertidur berabad-abad lamanya. Adapun pembentukan *Club* tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan tenaga-tenaga pelajar dan bersama-sama mereka membicarakan soal-soal yang mengenai nasib rakyat. Tenaga-tenaga pelajar yang biasanya tenggelam dalam alam jabatan-jabatan pemerintah dipengaruhi dengan soal-soal nasional. Pemuda dr. R.Sutomo yang baru saja lepas dari STOVIA dan ikut bekerja dengan pembasmian wabah-pes ini, duduk pula dalam *Raden Ajeng Kartini Club* di Malang itu. Walaupun demikian, rupanya perkumpulan ini tidak memberikan kepuasan kepada dr. Tjipto Mangunkusumo. Akibatnya, ketika ia bertemu dengan E.F.E. Douwes Dekker di Surabaya (September 1912) dalam sebuah rapat propaganda *Indische Partij*, perkumpulan *Kartini Club* itu ditinggalkannya dan ia masuk menjadi anggota *Indische Partij*; yang sesuai dengan cita-citanya (136) 41; SM. 162)

Demikianlah mulai tanggal 15 September 1912 E.F.E. Douwes Dekker beserta dua orang temannya (Brunsveld van Hul-ten dan van dar Poel) mengadakan perjalanan mengunjungi beberapa kota di Jawa dengan tujuan untuk mempropagandakan pendirian organisasi politiknya (*Indische Partij*) yang baru didirikan pada tanggal 6 September 1912 di Bandung. Organisasi politik *Indische Partij* itu didirikan atas prakarsa E.F.E. Douwes Dekker setelah ia gagal membawa dua organisasi golongan Indo-Eropa, "*Indische Bond*" dan "*Insulinde*", ke arah gerakan oposisi terhadap pemerintah. (137)

Sudah sejak lama di Bandung ada organisasi Indo-Eropa, yaitu organisasi *Indische Bond* yang berdiri tahun 1899 (1898) dan organisasi *Insulinde* yang berdiri tahun 1907.

Kedua organisasi tersebut bertujuan untuk mengangkat derajat golongannya (= peranakan Indo) dalam lapangan sosial-ekonomis dan menjalin perserikatan dengan Nederland tanpa memisahkan diri dari negara induk. (138)

Pada waktu itu golongan peranakan (= Indo) Belanda memang sedang memperjuangkan perbaikan nasibnya. Kedudukan dan nasib mereka dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan kedu-

dukan dan nasib penduduk Bumiputra (priyayi rendahan). Indo yang melarat banyak dijumpai di kota-kota Jakarta (Kemayoran), Semarang (Karangbidara) dan di Surabaya (Kerambangan). Oleh karena itu pemerintah-pemerintah lalu membentuk suatu panitia, yang diwajibkan memeriksa sebab-sebab timbulnya kesukaran itu. Panitia itu dinamakan "*Pauperisme-Commissie*" (= Panitia Kemiskinan). (139) Begitu pula para Belanda totok (asli) memandang para Indo adalah golongan yang lebih rendah dari mereka. Pandangan semacam itu pernah diungkapkan dalam suatu Bulletin yang dikeluarkan oleh "*Bond van Geneesheeren*" (Ikatan para Dokter) pada bulan September 1912. Dalam Bulletin tersebut para dokter Belanda asli telah mencela maksud pemerintah untuk mendirikan Sekolah Dokter yang ke dua (NIAS) di Surabaya yang terbuka untuk segala bangsa. Hal itu disebabkan antara lain karena bangsa Indo yang hina tidak patut kalau menjadi Dokter. (140)

Dalam menanggapi masalah tersebut pucuk pimpinan *Indische Bond* (Zaalberg) tetap berpendirian untuk menerima adanya perhubungan dengan kolonial. Di dalam lingkaran perhubungan itu, kehidupan bangsa Indo akan berbahagia, asal pemerintah dan orang-orang Eropa yang ada di lapisan atas, suka bekerja sama untuk menolongnya, demikianlah kata mereka. Tetapi tanggapan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh E.F.E. Douwes Dekker (Indo kelahiran Pasuruan).

Dalam pidatonya di depan para anggota *Indische Bond* yang berjudul "*Aansluiting tussen blank en bruin*" (= Gabungan kulit putih dengan kulit sawo) pada tanggal 12 Desember 1911, E.F.E. Douwes Dekker telah membangunkan semangat bangsa Indo supaya berontak dan melepaskan diri dari pemerintah Kolonial. Oleh karena jumlah Indo sedikit, maka mereka harus menggabungkan diri kepada bangsa Bumiputra (= Indonesia) dan berjuang bersama-sama dengan mereka. Dalam perjuangan bangsa Indo harus menjadi pelopor. (141)

Pidato tersebut rupanya dapat mempengaruhi beberapa anggota *Indische Bond*, sehingga timbullah tindak lanjut dengan membentuk Panitia Tujuh yang mempersiapkan berdirinya suatu organisasi baru yang lebih segar. Panitia Tujuh tersebut terdiri dari : J.R. Agerbeek, J.D. Brunveld van Hulten, G.P. Charli, E.C.I. Couvreur, E.F.E. Douwes Dekker, J. van der Poel dan R.H. Teuscher. Pada tanggal 6 September 1912 di bawah pim-

pinan E.F.E. Douwes Dekker Panitia Tujuh menyelenggarakan suatu rapat di Bandung, yang mendapat kunjungan yang luar biasa. Pada saat itulah terbentuk perhimpunan baru yang diberi nama *Indische Partij*.

Setelah perhimpunan itu berdiri, para pendirinya segera bergerak. Demikianlah pada tanggal 15 September 1912 tiga tokoh penting *Indische Partij* (E.F.E. Douwes Dekker, Brunveld van Hulten dan van der Poel) mulai mengadakan perjalanan keliling untuk kepentingan partainya. Mereka mendatangi kota-kota Jogja, Madiun, Surabaya, Semarang Pekalongan, Tegal dan Cirebon. Di semua kota yang dikunjungi diadakan rapat-rapat yang selalu dihadiri oleh ribuan orang dari pelbagai perhimpunan seperti Indulinde, Sarekat Islam, Budi Utomo, *Kartini Club*, Mangunhardjo dan perhimpunan *Tonghwa Hwee Kwan*. Di tujuh kota itu *Indiesche Partij* membentuk cabang-cabangnya. Program pembentukan organisasi politik itu sudah lama dilontarkan dalam majalah "*Het Tijdschrift*" dan dalam surat kabar "*De Express*", maka dari itu azas *Indische Partij* yang sangat luas dan menyangkut kepentingan orang yang tinggal di Hindia Belanda, secara menarik simpati rakyat (Indonesia). Redaktur-redaktur surat kabar "Jawa Tengah" di Semarang dan "Tjahaja Timoer" di Malang menyokong berdirinya *Indische Partij*. Begitu pula di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur gagasannya mendapat sokongan. Di Bandung ia mendapat dukungan dari Suwardi Surjaningrat dan Abdul Muis yang pada waktu itu telah menjadi pimpinan Sarekat Islam cabang Bandung. (143) Di Surabaya E.F.E. Douwes Dekker bertemu degnan teman lamanya dr. Tjipto Mangunkusumo yang pada waktu itu telah mendirikan *Kartini Club* di Malang. Tukar pikiran antara kedua tokoh tersebut, mengakibatkan masuknya dr. Tjipto Mangunkusumo ke dalam *Indische Partij*. Demikianlah pada bulan Nopember 1912 dr. Tjipto Mangunkusumo ditarik ke Bandung untuk menjadi redaktur harian "*De Express*" bersama-sama dengan Suwardi Surjaningrat (kelak Ki Hajar Dewantoro). Selanjutnya bagi mereka yang tidak dapat masuk perhimpunan Budi Utomo, karena ia bukan berkebudayaan Jawa, dapat diterima di *Indische Partij*; barang siapa segan turut bergerak dalam Sarekat Islam karena ia bukan Muslim, mendapat kesempatan bergerak secara leluasa dalam *Indische Partij*. Begitu pula para anggota golongan progresif Budi Utomo yang tidak puas dalam

tindakan organisasinya dengan mudah mencari kepuasan politik di dalam *Indische Partij*. Sedangkan para anggota Sarekat Islam yang menghendaki gerakan revolusioner akan terpenuhi kehendaknya bila masuk *Indische Partij*.

Sedemikian besar simpati penduduk Hindia Belanda terhadap *Indische Partij*, sehingga dalam waktu empat bulan saja telah dapat dibentuk 25 cabang dengan jumlah anggota 5.775 orang. Sedangkan *Indische Partij* cabang Surabaya pada waktu itu telah memiliki anggota 827 orang (cabang Semarang 1.375 Jakarta 809 dan Bandung 740). (144)

Setelah perjalanan propaganda berakhir (3 Oktober 1912) dan cabang-cabang *Indische Partij* mulai bermunculan, maka pada tanggal 25 Desember 1912 diadakan permusyawaratan wakil-wakil *Indische Partij*. Dalam permusyawaratan itu tersusunlah Anggaran Dasar dan pengurus *Indische Partij*. Susunan pengurusnya seperti berikut, ketua : E.F.E. Douwes Dekker; wakil ketua : dr. Tjipto Mangunkusumo; panitra : J.G. van Ham; bendahara : G.P. Charli; pembantu : J.R. Agerbeek dan J.D. Brunveld van Hulsten. Sebagai lambang partai dibuat bendera berwarna hitam. Warna hitam ada yang menafsirkan sebagai warna kulit *Indier*, tetapi ada pula yang menafsirkan sebagai warna berkabung karena tanah air belum merdeka. Pada penjuru kanan atas terdapat jalur-jalur triwarna (hijau - merah - biru). Warna merah melambangkan semangat keberanian partai; warna biru melambangkan kesetiaan Hindiaputra terhadap tanah airnya; warna hijau melambangkan tujuan yang akan dicapai, yakni kemakmuran. Demikianlah *Indische Partij* itu dalam tindakannya akan menunjukkan semangat keberanian, terdorong oleh kesetiaan kepada tanah air Hindia, guna mencapai kemerdekaan yang diharapkan membawa kemakmuran bagi semua rakyat yang tak berdaya akibat penindasan. Panji catur warna itu memang menjadi pegangan dalam perjuangan partai yang bersifat revolusioner itu. (146) Program revolusioner yang bersifat nasional tersebut nampak dengan jelas di dalam pasal-pasal anggaran dasarnya, yang antara lain dalam pasal 2 menyatakan : "Tujuan *Indische Partij* ialah untuk membangunkan patriotisme semua *Indiers* (= Hindiaputra) terhadap Tanahair, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan (= hak politik nasional) untuk memajukan tanah air "Hindia" dan untuk

mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.” (147)

Dengan demikian jelaslah, bahwa *Indische Partij* berdiri di atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia sebagai perumahan nasional (*national home*) semua orang keturunan Bumiputra, Belanda, Cina, Arab dan sebagainya, yang mengakui Hindia sebagai tanahair dan kebangsaannya. Faham ini pada waktu itu dikenal sebagai *Indisch Nationalisme* (= Nasionalisme Hindia), yang kemudian hari melalui Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia menjadi *Indonesisch Nationalisme* atau Nasionalisme Indonesia. Pasal ini pulalah yang menyatakan *Indische Partij* sebagai Partai Politik yang pertama di Indonesia. Bahwa *Indische Partij* adalah suatu partij yang radikal juga dinyatakan oleh E.F.E. Douwes Dekker, bahwa didirikannya partai itu adalah merupakan ”Penantangan perang dari fihak budak kolonial yang membayar belasting kepada kerajaan penjajah, penyaur pajak.” (148)

Sikap tegas *Indische Partij* sebagai organisasi politik yang radikal menimbulkan reaksi tegas dari fihak pemerintah Belanda. Akibatnya ketika pada tanggal 7 Januari 1913 pengurus organisasi itu mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum, Gubernur Jenderal pada tanggal 4 Maret 1913 mengeluarkan keputusan penolakan, dengan alasan karena perkumpulan itu berdasarkan politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum, menurut kehendak pasal 111 R.R. (*Reglement op het beleid der Regeering van Nederlands-Indie*) harus dilarang mendirikannya. Juga setelah fihak pimpinan *Indische Partij* mengadakan audiensi kepada Gubernur Jenderal Idenburg dan diubahnya pasal 2 anggaran dasar, yang disesuaikan dengan tujuan perkumpulan ”Insulinde” yang telah diakui sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*), *Indische Partij* tetap ditolak dengan surat keputusan pemerintah tanggal 11 Maret 1913.

Karena *Indische Partij* sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, maka pada tanggal 31 Maret 1913 pucuk pimpinannya mengambil keputusan untuk membubarkan partai tersebut. Pesan terakhir E.F.E. Douwes Dekker kepada para anggotanya, agar supaya mereka pindah ke dalam perkumpulan Insulinde dengan berbekal jiwa *Indische Partij*. Ia menyadarkan kepada para bekas anggotanya, bahwa sikap pemerintah yang telah dialami itu memberi kenyataan, bahwa kita membutuhkan suatu

organisasi nasional, yang harus berdaya upaya hendak mencapai persamaan derajat untuk seluruh bangsa Hindia (*Indiers*), dan persiapan-persiapan yang nyata untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air. (149)

Walaupun *Indische Partij* telah dibubarkan, namun para pemimpin yang setia (E.F.E. Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjadinigrat) terus mengumandangkan cita-cita mereka melalui surat kabar "*De Express*". Bahkan ketika pemerintah kolonial bermaksud akan merayakan ulang tahun ke - 100 tahun kemerdekaan Negeri Belanda di Hindia Belanda dengan menarik biaya dari rakyat, mereka membentuk "Komite Bumiputra". Komite ini nanti akan memberikan ucapan selamat kepada ratu, yang di dalamnya juga dianjurkan mencabut pasal 111 R.R. dan segera mengadakan suatu Parlemen Hindia. Di samping itu Suwardi Surjadinigrat, salah seorang pemimpin Komite, telah mengeluarkan sebuah brosur yang kemudian dimuat secara lengkap dalam surat kabar "*De Express*" dengan judul "*Als ik eens Nederlander was*" (Kalau saya seorang Belanda). Isi pokoknya tidak menyetujui adanya perayaan tersebut dan dalam kalimat terakhirnya menyebutkan : "Beri dahulu bangsa yang terjajah itu kemerdekaannya, baru kemerdekaan kita sendiri". (150) Tulisan tersebut kemudian disusul dengan karangan dr. Tjipto Mangunkusumo yang berjudul "*Kracht of Vrees?*" (Kekuatan atau Ketakutan ?) dan diikuti dengan tulisan E.F.E. Douwes Dekker yang berjudul : "*Onze Helden : Tjipto Mangunkusumo en R.M. Suwardi Surjanigrat*" (= Pahlawan kita : Tjipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Surjanigrat) (151) Kegiatan Komite yang diprakarsai oleh tokoh "Tiga Serangkai" penggerak *Indische Partij* tersebut rupanya dipandang berbahaya oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, atas dasar pasal 48 R.R. Gubernur Jenderal Idenburg menjatuhkan hukuman internir (18 Agustus 1913) yang kemudian diubah menjadi hukuman externir (27 Agustus 1913) atau hukuman pembuangan ke negeri Belanda terhadap "Tiga Serangkai" tersebut. Demikianlah pada tanggal 6 September 1913, E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Surjanigrat dan dr. Tjipto Mangunkusumo meninggalkan Hindia Belanda (Indonesia) berangkat ke negeri Belanda.

E.F.E. Douwes Dekker dicabut putusan pembuangannya pada bulan Agustus 1917, Suwardi Surjanigrat pada bulan Juli tahun kemudian dan dr. Tjipto Mangunkusumo pada bulan Juli

1914. (152) Setibanya di Hindia Belanda, dr. Tjipto tetap bergerak di bidang politik, yang kemudian menjadi anggota PNI. Sedangkan E.F.E. Douwes Dekker dan Suwardi Surjaningrat kemudian terjun ke bidang pendidikan. Mereka masing-masing mendirikan sekolah "*Ksatrian Instituut*" dan sekolah Taman Siswa" yang berarti memperkuat barisan sekolah Swasta yang telah dirintis oleh sekolah Muhammadiyah.

#### 4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi gerakan pemurnian Islam di Indonesia (Jawa) yang pertama kali mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. (153).

Gerakan kebangkitan Islam mulai nampak pada sekitar abad ke - 14, yang ditandai dengan munculnya gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berfikir dan cara hidup umat Islam. Gerakan semacam itu oleh Ibn Taimiyah (1263 - 1328) disebut "*Muhyi atsaris Salaf*", yakni membangkitkan ajaran-ajaran lama, yang diajarkan oleh para sahabat Rasul dan Tabi'in. Di sini yang ditonjolkan ialah ajaran Imam Ahmad Ibn Hambali, yang senantiasa gemar mempraktekkan ijtiha dan anti kemusyrikan serta bid'ah. Pedoman satu-satunya yang dipakai ialah Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu aliran ini ada yang menamakan aliran atau faham Salaf atau aliran Reformasi Islam. Pendirian (Syech Ahmad) Ibn Taimiyah (ulama dari Damsyik) itu disokong penuh dan dilanjutkan oleh muridnya (Ibn Qajjim'al Jauziriah - 1292 - 1350), kemudian disebarluaskan oleh Mohammad Ibn Abdul Wahab (1703 - 1787); lebih diintensipkan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani (1838 - 1897) dan muridnya Syech Rasyid Ridha (1856 - 1935). (154)

Muhammad Ibn Abdul Wahap adalah pelopor golongan Wahabi, yang antara lain pernah berpendapat "Tak ada seorang pun dapat dianggap dalil pernyataannya dalam agama, melainkan Firman Allah dan Hadith Nabi". Pengaruh aliran Wahabi ini di Sumatra Barat pernah menimbulkan peristiwa Perang Padri. Sedangkan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani adalah pelopor kebangunan Islam desa di Afganistan, yang oleh para penulis barat dianggap sebagai pembentuk Pam Islamisme Modern. Menurut H.A.R. Gibb, pembaharuan Islam itu mempunyai dua aspek pokok. Pertama mengembalikan Islam kepada praktek-praktek

yang sebenarnya dan kedua mempersatukan seluruh ummat Islam untuk mempertahankan agamanya. (155) Aspek yang kedua inilah rupanya dirasakan oleh Barat sebagai gejala yang ditunjukkan kepadanya, sehingga gejala demikian olehnya diberi ungkapan umum "Pan Islamisme". Ungkapan tersebut rupanya untuk pertama kalinya muncul dalam penerbitan Perancis tahun 1883 oleh Babriel Charms dalam bukunya *L'Avenir de la Turquie - Le Pan-Islamisme*. (156) Pada tahun 1884 Sayyid Jamaluddin Al Afghani menerbitkan suatu mingguan berbahasa Arab di Paris yang bernama "*Alu Urwah al Wuthhqaq*" (artinya Tali yang kokoh). (157) Lewat mingguan inilah idee-ideenya dikemukakan. Adapun Syech Muhammad Abdul adalah seorang Maha Guru di Perguruan Tinggi Al Ashari di Mesir, yang antara lain pernah berpendapat : "Perjuangan secara politik saja tidak akan menghasilkan kebaikan-kebaikan apa, karena tegaknya suatu masyarakat yang adil tidak tergantung kepada hilangnya halangan yang datang dari bangsa asing saja. Akan lebih efektif apabila perjuangan diarahkan kepada pendidikan anak-anak yang nantinya dapat meneruskan cita-cita pembaharuan di suatu tempat yang aman jauh gejolak udara politik." Kalau dilihat sepintas lalu, Abduh dengan gagasannya seakan-akan mundur dari kalangan politik, tetapi kalau dipikirkan lebih dalam sikap Abduh itu dalam rangka yang jauh tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang bersifat politik juga. (158)

Ajaran dan cita-cita Muhammad Abduh tersebar ke seluruh Dunia dengan melalui majalah *Al Mannaar* yang terbit di Mesir dan dipimpin oleh Sayyid Rasyid Ridha.

Di Jawa pada tahun 1901 muncul Gerakan Salaf "*Jami'at Khair*" yang baru diberi ijin oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan syarat tidak boleh membuka cabang di luar Jakarta.

Para pemimpin dari perkumpulan ini mempunyai hubungan dengan luar negeri, terutama negeri-negeri Islam yang sudah maju seperti Mesir dan Turki dengan mendatangkan majalah dan surat-surat kabar yang dapat membangkitkan rasa kenasionalan bangsa Indonesia, seperti *Al Mu'ayat*, *Al-Liwa*, *Al-Ittihad*, *As-Siyasah*, *Al-Musyawah* dan lain sebagainya. Dari tempat inilah K.H. Ahmad Dahlan, pemimpin pertama perkumpulan Muhammadiyah, dan orang-orang terpelajar lainnya mengenal bacaan-bacaan dari luar negeri. Perkumpulan ini tidak disenangi

oleh Pemerintah Belanda, karena pengaruhnya yang membangkitkan semangat baru di Indonesia. (159)

Pada waktu itu Gubernur Jenderal Idenburg (1909 - 1916) sebagai pemeluk Kristen dan penganut politik asosiasi yang setia sedang menjalankan politiknya yang terkenal dengan sebutan *Krestening Politiek van den heer Idenburg*". Politik ini bermaksud mengKristenkan seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan untuk memiliki Indonesia selama-lamanya dengan ummat Kristen Indonesia sebagai pendukungnya. Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila Pemerintah Belanda menyokong *Missie Katholiek* dan *Zending Protestant* untuk menyebar-luaskan agamanya di Indonesia. Hal ini menyebabkan kedudukan ummat Islam makin terjepit, daerah penyebarannya dipersempit dan gerak pemimpin-pemimpin Islam selalu diawasi. (160)

Suasana semacam itu dan banyaknya kepincangan dalam bidang ajaran agama Islam di Masyarakat sekelilingnya, merupakan dorongan yang kuat bagi Muhammad Darwis atau lebih terkenal dengan nama Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan perkumpulan Muhammadiyah; yang merupakan rintisan gerakan rintisan gerakan *Selaf* yang kongkrit. Demikianlah pada tanggal 18 Nopember 1912 (8 Dzulhijah 1330) berdirilah perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Pengurus pertamanya tersusun sebagai berikut : H.A. Dahlan, Abdullah Sirad, R.H. Ahmad, H. Abdurrachman, R.H. Sarkawi, H. Muhammad, R.H.D. Jaelani, H. Amis dan H.M. Fakhri. (161) Tujuan Muhammadiyah pada waktu itu ialah : "Menyebarkan Pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. kepada penduduk Bumiputra, dalam Residensi Yogyakarta". (161a)

Dengan demikian jelaslah, bahwa pada mulanya jangkauan organisasi Muhammadiyah itu hanya meliputi daerah Yogyakarta, tetapi tidak lama kemudian berdirilah cabang-cabang di mana-mana.

Pekerjaan K.H.A. Dahlan sebagai saudagar bati, yang berkelana kian-kemari memudahkannya mencari hubungan kawan dan menyiarkan fahamnya. Akibatnya, perkumpulan-perkumpulan lain, yang mempunyai arah tujuan yang mirip dengan Muhammadiyah dan berdasarkan Gerakan Salaf, meleburkan diri ke dalam organisasi Muhammadiyah. Perkumpulan-perkumpulan yang meleburkan diri ke dalam organisasi Muhammadiyah tersebut antara lain: "Nurul Islam" di Pekalongan, "Al Munir" dan

"Siratal Mustaqim" di Makasar "Al Hidayah" di Garut "Siddiq-Amanah-Tabligh-Fathonah" di Solo. (162) Bahkan Kyai Haji Mas Mansyur, seorang ulama di Surabaya yang telah tamat dari Universitas Al-Azhari di Mesir pun kemudian masuk menjadi anggota Muhammadiyah.

K.H.M. Mansyur dilahirkan di kampung Sawahan Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896. Ia adalah anak seorang Kyai yang bernama Mas Marzuki, seorang ulama terkenal di Jawa Timur, dan ibunya bernama Raulah. (163) Setelah memperoleh asuhan dan didikan dari ayahnya tentang ilmu Agama Islam, maka pada tahun 1908 ia menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci (Mekah) dan terus belajar di *Al-Azhari University* di Mesir, selama empat tahun. Meskipun mengalami kesukaran mengenai biaya dan sebagainya, ia dapat juga bertahan sampai menamatkan pelajarannya; sehingga setelah kembali ke tanah air ia mempunyai pengetahuan yang cukup, terutama dalam bidang Agama Islam.

Setibanya di tanah air, suasana politik di Hindia Belanda mulai hangat. Dalam keadaan demikian H. Mas Mansyur kemudian masuk menjadi anggota Sarekat Islam, yang pada waktu itu merupakan satu satunya pergerakan rakyat yang revolusioner. (164)

Kemudian bersama-sama dengan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (ipar K. Hasyim Asy'ari) ia membentuk perkumpulan yang dinamakan "*Jam'iyah Nahdhatul Wathan*" di Surabaya dan perkumpulan ini mendapat kedudukan sebagai Badan Hukum dalam tahun 1916. Azas tujuan perkumpulan ini ialah untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah-madrasah yang teratur. Atas usaha mereka, maka berdirilah sebuah sekolah yang modern di Kawatan (Surabaya), yang dipimpin oleh K. H.M. Mansyur. Sekolah ini dengan cepat meluas, meskipun dengan nama yang berbeda-beda di Wonokromo, Gresik, Jagalan, Pacarkeling dan lain-lain tempat. Tetapi pada tahun 1921 K.H.M. Mansyur mengundurkan diri, dan masuk ke dalam gerakan Islam Muhammadiyah, di samping masih aktif juga dalam Sarekat Islam. Walaupun ia belum lama menjadi anggota Muhammadiyah namun kemudian diserahi tugas untuk memimpin Muhammadiyah cabang Surabaya dan ia sebagai ketuanya. (165) Demikianlah pada tanggal 21 Nopember 1921 berdirilah Muhammadiyah cabang Surabaya dengan kantor cabangnya di Sawahan Gg. I

(Kalimas Udik Gg. III) Surabaya. Sedangkan susunan pengurusnya yang pertama adalah sebagai berikut:

Ketua I (Voorzitter)	: K.H. Mas Mansyur.
Ketua II (Vice Voorzitter)	: Wondowidjojo.
Sekretaris I	: M. Badjuri
Sekretaris II	: M. Wisadmo
Sekretaris III	: R. Sudiro Atmodjo
Bendahara I	: H. Mustafa
Bendahara II	: H. Hamid
Comissaris (pemeriksa) I	: Kartosubroto
Commissaris II	: A.M. Sangadji

Muhammadiyah berdiri, tidak hanya didorong oleh sangat reaksionernya pemerintah kolonial Belanda terhadap agama Islam dan perkembangannya, akan tetapi juga karena tuntutan sejarah. Ummat Islam memerlukan sinar baru dalam menghadapi dunia modern yang makin menampak di pelupuk matanya. Kema-juan jaman yang menghebat, tidak bisa dihadapi dengan khurafat dan bid'ah, tetapi harus kembali kepada ajaran Rasulullah sendiri, yang telah teruji kebenarannya sepanjangmasa. Kemunduran dan pendesakan dunia barat terhadap Islam tak lain hanyalah karena kesalahan ummat Islam sendiri, yang menyelewengkan ajaran asli agamanya yang luhur, kepada pendapat-dapat ulama dan mematikan fikiran sendiri dan tidak mau ber-Ijtihad. Maka dari itu masalah pendidikan dan pengajaran mendapatkan tempat yang utama dalam perkumpulan Muhammadiyah tersebut. Sekolah-sekolah moderna yang berprinsip ajaran Salaf harus diperbanyak. Buku-buku pelajaran model baru, alat-alat media massa harus disebar-luaskan; da'wah tablighpun harus dipergiat.

Di samping Gerakan Salaf, yang bersifat pemurnian agama, maka Muhamaddiyah pun mengamalkan ajara Salaf dalam bidang politik, maka dari itu tidaklah mengherankan apabila dalam hal ini para pengikutnya dengan leluasa diperbolehkan masuk dalam perkumpulan-perkumpulan politik. Bahkan ketika pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan "*Wilde Scholen Ordonnantie*" (Undang-undang Sekolah Liar), yang menekan perkembangan perguruan-perguruan Swasta, Muhammadiyah mengadakan reaksi yang pedas, (166) seperti apa yang dilakukan oleh sekolah Taman Siswa juga.

## 5. *Taman Siswa.*

Taman Siswa adalah perguruan atau "Peguron" Swasta yang berusaha membina kepribadian bangsa dan memupuk semangat kebangsaan serta membina jiwa kemerdekaan. Perguruan Taman Siswa berusaha menggembleng para calon pemimpin pejuang yang sadar. Perguruan tersebut didirikan oleh Suwardi Surjaningrat pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. (167).

Demikianlah, karena keanggotaannya dalam *Indische Partij* dan aktivitasnya menentang usaha-usaha perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas jajahan Perancis Napoleon, maka Raden Mas Suwardi Surjaningrat dibuang ke negeri Belanda bersama dengan dr. Tjipto Mangunkusumo dan E.F.E. Douwes Dekker. Dalam masa pembuangan itu ia telah menanggalkan gelar kebangsawanannya (Raden Mas), dengan menyebut namanya Suwardi Surjaningrat saja. Di samping itu ia telah berkesempatan untuk mendalami masalah pendidikan dan berhasil merumuskan pernyataan azas pengajaran nasional. (168).

Pada tanggal 18 Agustus 1917 putusan hukuman pembuangan Suwardi Surjaningrat dicabut, ia boleh kembali ke tanah air sebagai orang bebas. Tetapi berhubung dengan masih berlangsungnya Perang Dunia I, ia harus kembali ke tanah air pada tanggal 6 September 1919. Begitu tiba di tanah air, begitu Suwardi Surjaningrat terjun dalam perjuangan. Ia diangkat menjadi Sekretaris dan kemudian menjadi ketua *Nationaal Indische Partij* (NIP — penjiwaan dari *Indische Partij*), yang berkedudukan di Semarang. Ketangkasannya mempergunakan ketajaman penanya diteruskan. Suwardi Surjaningrat tetap bergerak di lapangan jurnalistik. Bahkan ia telah memimpin majalah *De Beweging* (= pergerakan), "Persautan Hindia", *De Express* dan "Penggugah". Berkali-kali Suwardi Surjaningrat harus berhadapan dengan polisi kolonial Belanda. Pidato-pidato dan tulisan-tulisannya dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai wartawan politik ia sering terkenal apa yang dahulu terkenal dengan sebutan *persdelict* (*pelanggaran pers*). Bahkan karena dituduh melanggar peraturan dan menghina pemerintah Belanda Suwardi Surjaningrat dimasukkan ke dalam penjara. Mula-mula di penjara Semarang, kemudian dipindah ke Pekalongan. Setelah keluar dari penjara ia tinggal di Yogyakarta dan sejak itu ia mengubah taktik dan strategi perjuangan

annya. (169).

Demikianlah, pada tahun 1921 Suwardi Surjaningrat mulai meninggalkan kariernya dalam lapangan politik dan terjun ke dunia pendidikan nasional. Mula-mula Suwardi Surjaningrat membantu di sekolah "Adhidharma" kepunyaan kakaknya yang bernama R.M. Surjopranoto. Selain daripada itu Suwardi Surjaningrat juga menggabungkan diri sebagai anggota *Sarasehan Selasa Kliwon* (= Musyawarah Selasa Kliwon) di Yogya, yang anggotanya antara lain terdiri dari: R.M. Sutatmo Sutjukusumo, Ki Ageng Surjoputro, Ki Ageng Surjomataram, Ki Pronowidigdo, Ki Sutopo Wonobojo, Ki Prawiroworo, R.M. Gondotmodjo, BRM. Subono dan Suwardi Surjaningrat sendiri. Tujuan dari perkumpulan ini antara lain ialah: *mengayu-ayu salira, mengayu-ayu manungsa* (= membuat bahagia diri pribadi, membuat bahagia bangsa dan membuat bahagia manusia).

Kekecewaan-kekecewaan oleh kekalahan yang dialami dalam perjuangan politik, kebohongan "Janji Nopember" (*November belofte*) Belanda, menimbulkan pikiran baru untuk meneruskan perjuangan menuju kemerdekaan bangsa dan tanah air. Mereka mulai insyaf bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa harus didasari jiwa merdeka dan jiwa nasional dari bangsa itu. Untuk ini perlu penanaman jiwa merdeka yang harus dimulai dari sejak anak-anak. Hanya orang yang berjiwa merdeka saja yang akan sanggup berjuang menuntut dan selanjutnya mempertahankan kemerdekaannya. Maka dari itu perlu adanya pendidikan nasional dan pendidikan merdeka yang akan memberi bekal kepada anak-anak rakyat untuk perjuangan kemerdekaan nasional. di samping pergerakan politik. Keadaan pengajaran bagi rakyat Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda jumlahnya tidak memadai dan isi pendidikannya tidak sesuai dengan kepentingan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan pada waktu itu hanya menanamkan jiwa budak untuk mengabdikan kepentingan kaum kolonial semata-mata. Sehingga dalam salah satu musyawarah "Slasa Kliwon" kemudian diputuskan, bahwa perlu adanya orientasi dan pembagian tugas perjuangan. Suwardi Surjaningrat (yang tanggal 23 Februari namanya diganti dengan Ki Hajar Dewantara), Sutatmo Surjukusumo, Pronowidigdo dan Surjopranoto, bertugas di lapangan pendidikan anak-anak; sedangkan Ki Ageng Surjomataram dan kawan-kawan lainnya bertugas di lapangan pen-

didikan orang tua, dengan gerakan kebathinannya *Ngelmu Begjo* yang mencita-citakan kebahagiaan manusia dan tertib damai dunia. (170).

Demikianlah pada tanggal 3 Juli 1922, sebagai langkah lebih lanjut dari keputusan tersebut di atas, maka Suwardi Surjaningrat mendirikan *Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa* yang pertama di Yogyakarta, yang kelak namanya dirubah menjadi "Paguron Kebangsaan Taman Siswo" (dalam bahasa Indonesianya: Perguruan Kebangsaan Taman Siswo).

Modal pertama Taman Siswo ialah berupa murid dan bangku sekolah yang diterimanya dari sekolah Adhidharma". Yang mula-mula dibuka hanya bagian Taman Kanak-kanak dan Kursus Guru saja. (171). Sedangkan sebagai landasannya Taman Siswo telah membuat pernyataan asas yang berisi 7 pasal, yang secara lengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri (*zelfbeschikkingsrecht*) dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum (*maatschappelijke saamhoorrigheid*) itulah asas kita yang pertama. Tertib dan Damai (*Tata lan Tentrem, Orde en Vrede*) itulah tujuan kita yang tertinggi-tingginya. Tidak adalah ketertiban terdapat, kalau tak bersandar pada perdamaian. Sebaliknya tak akan ada orang hidup damai jika ia dirintangi dalam segala syarat kehidupannya. Bertumbuh menurut kodrat (*natuurlijke groei*) itulah perlu sekali untuk segala kemajuan (*evolutie*) dan harus dimerdekakan seluas-luasnya. Maka dari itu pendidikan yang beralaskan syarat "Paksaan - hukuman - ketertiban" (*regeeringtuchtorde*, inilah perkataan *opvoedkunde*) itulah kita anggap memperkosa hidup kebatinan anak. Yang kita pakai sebagai alat pendidikan, yaitu pemeliharaan dengan sebesar perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak, lahir dan batin, menurut kodratnya sendiri. Inilah yang kita namakan *Among-methode*.
- b. Dalam sistem ini maka pelajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, akan tetapi harus juga mendidik si murid mencari pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Penge-

tahuan yang baik dan perlu, yaitu yang manfaat untuk keperluan lahir dan batin dalam hidup bersama (*sociaal belang*).

- c. Tentang zaman yang akan datang, maka rakyat kita ada di dalam kebingungan. Seringkali kita tertipu oleh keadaan, yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita, padahal itu adalah keperluan bangsa-bangsa asing, yang sukar didapatnya dengan alat penghidupan kita sendiri.

Demikianlah acapkali kita merusak sendiri kedamaian hidup kita. Lagi pula kita sering juga mementingkan pengajaran yang hanya menuju *intellectualisme*, padahal pengajaran itu membawa kita kepada gelombang penghidupan yang tidak merdeka (*economisch afhankelijk*) dan memisahkan orang-orang yang terpelajar dengan rakyatnya.

Di dalam zaman kebingungan ini seharusnya keadaban kita sendiri (*cultuurhistorie*) kita pakai sebagai penunjuk jalan, untuk mencari peghidupan baru, yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita.

Dengan keadaan bangsa kita sendiri kita lalu pantas berhubungan bersama-sama dengan keadaan bangsa asing.

- d. Oleh karena pengajaran yang hanya terdapat oleh sebagian kecil dari rakyat kita itu tidak berfaedah untuk bangsa, maka haruslah golongan rakyat yang terbesar dapat pengajaran secukupnya. Kekuatan bangsa dan negara itu jumlahnya kekuatan orang-orangnya. Maka dari itu lebih baik memajukan pengajaran untuk rakyat umum dari pada meninggikan pengajaran, kalau usaha meningkatkan pengajaran ini seolah-olah mengurangi tersebarnya pengajaran.
- e. Untuk dapat berusaha menurut asas yang merdeka dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Walaupun kita tidak menolak bantuan dari orang lain, akan tetapi kalau bantuan itu akan mengurangi kemerdekaan kita lahir atau batin haruslah ditolak. Itulah jalannya orang yang tak mau terikat atau diperintah pada kekuasaan, karena berkehendak mengusahakan kekuatan diri sendiri.
- f. Oleh karena kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka haruslah segala belanja dari usaha kita itu dipikul

sendiri, dengan uang pendapatan biasa. Inilah yang kita namakan *zelfbedruipingsysteem* yang jadi alatnya semua usaha yang hendak hidup tetap dengan berdiri sendiri.

- g. Dengan tidak terikat lahir atau batin, serta dengan suci hati, berniatlah kita berdekatan dengan Sang Anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri akan berhamba kepada Sang Anak. (172).

Dari pernyataan asas yang berisi tujuh pasal tersebut di atas nampak dengan jelas, bahwa Perguruan Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan dan kebudayaan yang mendidik murid-muridnya agar supaya dapat berperasaan, berpikir dan bekerja merdeka di dalam batas-batas tujuan mencapai tertib damainya hidup bersama. Cita-cita Perguruan Taman Siswa akan membentuk manusia yang hidup dalam salam bahagia dan dalam masyarakat tertib damai. Hidup salam dan bahagia berarti selamat lahir dan bahagia batinnya, bebas merdeka jiwanya. Kebebasan dan kemerdekaan adalah hak tiap orang. Untuk mencapai hidup salam bahagia, hidup salam bahagia itu dapat tercapai hanya dalam satu masyarakat yang tertib dan damai (*tata lan tentrem atau orde en vrede*). Masyarakat tertib damai akan terwujud kalau di dalamnya berlaku *democratie met leiderschap* (= Demokrasi dengan Pimpinan), yaitu setiap anggota masyarakat mengakui hak kebebasan tiap orang dan mengakui adanya pimpinan untuk keselamatan dan kepentingan pergaulan hidup bersama. Dalam bidang pendidikan pelaksanaan asas kemerdekaan diri-tertib damai atau *democratis met leiderschap* itu dipergunakan "sistem among" dan cara *tut wuri andayani*. Guru yang disebut *pamong* memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya (= kodrat iradatnya sendiri), tetapi *pamong* akan bertindak, kalau perlu dengan paksaan, apabila keinginan akan membahayakan keselamatannya. Tut Wuri andayani, berarti pemimpin (= *pamong*) mengikuti dari belakang, memberi kemerdekaan bergerak yang dipimpin (= siswa), tetapi *handayani*, atau mempengaruhi dengan daya kekuatannya, kalau perlu dengan paksaan dan kekerasan, apabila kebebasan yang diberikan itu dipergunakan untuk menyeleweng dan akan membahayakan hidupnya. Maka dari itu *pamong* harus mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap siswa,

sehingga guru dan siswa tak terpisah. *Tusschen guru en siswa bestaat geen ruimte*, demikianlah semboyan Ki Tjokrodirdjo, seorang Pengetua Taman Siswa. Sehingga Suwardi Surjaningrat (= Ki Hajar Dewantoro) lebih cenderung memakai bentuk "paguron" daripada bentuk sekolah biasa.

Paguron, yang biasanya diterjemahkan dengan kata "Perguruan", adalah tempat orang *maguru* atau belajar hidup. Demikianlah Paguron Taman Siswa menjadi tempat hidup bersama-sama antara penganut-penganut Taman Siswa untuk membina dan mengembangkan ajaran serta cara hidup Taman Siswa. Guru dan siswa tinggal menetap di sekolahan dan pergaulan antara guru dan siswa sebagai kehidupan keluarga yang erat bersatu. (173) Di samping itu mereka membina nilai-nilai kebudayaan bumiputra yang positif walaupun tidak menolak nilai-nilai kebudayaan asing yang dapat membawa kemajuan. Akibatnya, bahasa Belanda bukanlah dijadikan bahasa pengantar di sekolahan, tetapi dijadikan mata pelajaran, yang diperlukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. (174) Selanjutnya diungkapkan pula, bahwa pengajaran harus diberikan dan disebarkan kepada rakyat banyak, jangan hanya diberikan kepada lapisan rakyat yang mampu dan golongan atas saja. Kekuatan bangsa tidak dapat berkembang jikalau hanya atas saja yang terpelajar. Untuk membina kekuatan bangsa maka susunan pengajaran harus dimulai dari bawah mengarah ke atas. Maka dari itu pendidikan rakyat harus diutamakan.

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa Taman Siswa berusaha meletakkan dasar kemerdekaan sebagai dasar pendidikan bangsa Indonesia (dengan kesadaran bahwa mengisi jiwa merdeka pada anak-anak jajahan, berarti mempersenjatai bangsa dengan senjata keberanian berjuang, menanamkan rasa harga diri pada bangsa yang dijajah untuk mencapai kemerdekaannya. Walaupun nampaknya Taman Siswa mengesampingkan pendekatan politik, tetapi ternyata ia dapat mewujudkan keinginan bangsanya. Usahnya untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebangsaan Indonesia merupakan dasar perjuangan meninggikan derajat rakyat. Sehingga, dalam perkembangan selanjutnya, banyak sekolah yang telah berdiri terlebih dahulu kemudian menyerahkan sekolahnya kepada Taman Siswa, seperti Budi Utomo di Jatibaru (Jakarta) dan Sekolah Rakyat di Bandung. (175). Sedangkan di Jawa Timur muncul pula Perguruan Taman Siswa

di Surabaya dan di Malang.

Perguruan Taman Siswa Surabaya berdiri dan diakui sebagai cabang sejak tanggal 25 Desember 1925. Yang tergolong tokoh-tokoh Taman Siswa Surabaya pada waktu itu ialah: Sukaso, Sudijono Djojoprajitno, Wardoyo, Bambang Suprpto dan Atmadji. Sedangkan pendirinya ialah Ki Notodiputro. Pengasuh Majelis Luhurnya adalah Ki Sumali dengan dibantu oleh Ki Slamet Dajono, Dr. Sundoro dan lain-lainnya. (176) Taman Siswa cabang Surabaya itu pertama kali lahir di kampung Plampitan Gg. IX. Kemudian muncul pula sekolah Taman Siswa di Kranggan dan di Tumenggungan berupa Taman Indriya dengan 7 guru dan 420 murid, serta sekolah rendah di Pacarkeling dengan 1 guru dan 32 murid. Tetapi di kota Surabaya itu sistem pendidikan Taman Siswa di Yogya tidak dapat dilaksanakan. Di situ para siswa tidak tinggal menetap di sekolah bersama-sama gurunya, bahasa Belanda mulai dipakai sebagai bahasa pengantar, pengajaran musik dan nyanyian berdoa dengan apa yang telah dilaksanakan di pusat budaya Jawa Yogyakarta. Banyak yang mementingkan Taman Indriya sebagai usaha regenerasi anak-anak kota. Sedangkan hasil-hasil pengajarannya pun termasuk baik juga. Dari tahun kursus 1927 telah lulus 9 murid untuk ujian pegawai rendah, 4 untuk MULO, 10 untuk *Burger Avond School*. Dari tahun kursus 1928 telah lulus 12 orang untuk ujian pegawai rendah. (177).

Munculnya sekolah-sekolah Taman Siswa di Jawa Timur pada umumnya dan di kota Surabaya pada khususnya, berarti menambah jumlah lembaga pendidikan yang menaburkan benih semangat kebangsaan Indonesia yang dengan penuh kepercayaan kepada kekuatan diri sendiri berjuang untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, di dalam jiwa angkatan muda.

#### 6. *Organisasi Kepemudaan.*

Sebenarnya Pergerakan Pemuda yang pertama kali muncul di atas panggung Sejarah Indonesia adalah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1920. Hal itu nampak dengan jelas, bahwa promotor-promotor pendirinya adalah para pemuda murid dari STOVIA, yang kemudian mendapat dukungan dari para pemuda murid dari Sekolah Pertanian dan Kehewanan dari Bogor, para pelajar di "Sekolah Menak" (*Hoofden School*) di Ban-

dung, Magelang dan Probolinggo, Sekolah Guru di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo, dan *Burger Avond School* di Surabaya. (178) Pada waktu itu jangkauan Gerakan Pemuda Budi Utomo ialah: Jangka pendek akan menyatukan penduduk Bumi-putra dan jangka panjang akan membentuk organisasi umum di Jawa (*Algemeen Javasche Bond*), dengan adanya suatu organisasi nasional (*Nationale Broederschap*), yang tidak memandang perbedaan ras, jenis kelamin dan kepercayaan. Namun setelah terjadi Konggres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, pada tanggal 5 Oktober 1908, kelihatan bahwa perkumpulan tersebut bukan perkumpulan pemuda melainkan perkumpulan kaum tua, oleh karena semangat konggres itu bukan semangat pemuda dan yang memegang pimpinan hampir semua kaum tua. Sebagian besar dari anggota perkumpulan terdiri dari ambtenaar-ambtenaar dari golongan bangsawan.

Lama kelamaan golongan pemuda merasa tidak puas terhadap Budi Utomo yang condong menjadi perkumpulan kaum tua. Akibatnya H.O.S. Tjokroaminoto, pendiri Budi Utomo cabang Surabaya meninggalkan organisasi tersebut dan tertarik pada organisasi Sarekat Dagang Islam. (179) Sedangkan para pemuda lainnya makin menyadari bahwa mereka harus mempunyai perkumpulan sendiri, di mana pemuda dapat dididik secara pemuda untuk memenuhi kewajibannya di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 7 Maret 1915 sejumlah pemuda pelajar yang dipelopori oleh pemuda intelektual lulusan STOVIA, antara lain dr. Satiman Wirjosandjojo, mengadakan rapat bertempat di gedung pertemuannya Budi Utomo, Gang Kweni di Jakarta, untuk mendirikan suatu organisasi pemuda. Berdirilah perkumpulan yang diberi nama *Tri Koro Dharmo*, yang merupakan gerakan pemuda pertama yang sesungguhnya, dan dipimpin oleh dr. Satiman Wirjosandjojo sebagai ketua, Sunardi (= Wongsonegoro) Wakil Ketua, Sutomo sebagai sekretaris serta para anggota pengurus lainnya ialah: Muslich, Musodo, Abdul Rachman dan Kadarman. (180) Menurut pasal 4 anggaran dasarnya, yang diterima sebagai anggota hanyalah para pelajar Bumiputra (dari sekolah menengah) Jawa dan Madura. Sedangkan tujuannya ialah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok.

Asas dari organisasi pemuda yang baru lahir itu, sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya pasal 2 mengatakan:

- a. Menimbulkan pertalian antara murid-murid Bumiputra pada sekolah menengah, dan kursus vak keguruan (Perguruan *uitgebroid* dan *vakonderwijs*);
- b. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;
- c. Membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan tiga asas inilah maka organisasi itu dinamakan Tri Koro Dharmo. (181) yang artinya: "Tiga Tujuan yang Mulia").

Berdasarkan asasnya, perkumpulan Tri Koro Dharmo itu nampak adanya dasar kebudayaan Jawa - Raya Jawa - Sentris, suatu dasar yang menjadi persoalan pada waktu itu. Namun demikian jangkauan pendiri perkumpulan (Dr. Satiman Wirjosandjojo) lebih luas dari itu, sehingga ia menyadari pula akan sifat terbatasnya perkumpulannya. Hal itu nampak dengan jelas pada pernyataannya dalam majalah Tri Koro Dharmo no. 3 bahwa: "perkumpulan Tri Koro Dharmo harus memakai *sifat buat sementara*, supaya di kemudian boleh diubah menjadi suatu perkumpulan buat pemuda-pemuda Indonesia semuanya." Selanjutnya diungkapkannya pula bahwa: "dengan lahirnya perkumpulan Tri Koro Dharmo haruslah dipikirkan suatu perkara yang penting, yakni: mencari pertalian dan persaudaraan dengan bangsa-bangsa dari pulau lain buat memperkokoh rakyat Indonesia". (182).

Sifat perkumpulan Tri Koro Dharmo yang Jawa - sentris itu ternyata menimbulkan rasa yang kurang senang bagi pemuda Sunda dan Madura. Untuk menghindari perpecahan, maka pada Konggresnya yang pertama di Solo ditetapkan bahwa mulai tanggal 12 Juni 1918 nama Tri Koro Dharmo diubah menjadi *Jong Java*, dengan semboyannya: Sakti, Budi, Bakti".

Walaupun nama Tri Koro Dharmo telah diganti menjadi *Jong Java*, namun asas dan tujuannya sama seperti tercantum dalam anggaran dasar Tri Koro Dharmo. Karena itu dalam perkembangannya juga masih sangat terasa asas kebudayaan Jawa - Raya dengan berintikan kebudayaan Jawa Tengah. *Jong Java*

itu pada pokoknya bergerak dalam lapangan kebudayaan, pendidikan dan olah raga. Dalam lapangan kebudayaan mengadakan kegiatan dalam seni musik dan seni tari Jawa. Dalam lapangan pendidikan ia mengadakan dana belajar (*studie fonds*) yang dinamakan *nationale fonds* dan kemudian diubah menjadi *Jong Java Studie Fonds*. Sedangkan dalam lapangan olah raga ia terutama mengorganisasikan kepanduan dengan nama *Jong Java Padvinderij* (Pandu Pemuda Jawa) (183).

Tri Koro Dharmo maupun *Jong Java* dalam waktu yang singkat telah berkembang, sehingga mempunyai cabang-cabang di berbagai kota di Jawa. Demikian juga pada tahun 1915 di kota Surabaya muncul pula Tri Koro Dharmo cabang Surabaya, (184) dan pendirinya adalah Sukarno (kemudian menjadi Presiden pertama RI), yang pada waktu itu menjadi pelajar HBS (1916 - 1921) di Surabaya. Tentang bagaimana aktivitas Tri Koro Dharmo yang kemudian menjadi *Jong Java* cabang Surabaya? Hal itu dapat kita ikuti uraian dari pendirinya, sebagai berikut:

"Perkumpulan politik yang pertama kudirikan adalah Tri Koro Dharmo jang berarti "Tiga Tujuan Sutji" dan melambangkan kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial jang kami tjari. Ini pada dasarnya adalah suatu organisasi sosial dari para pelajar seumurku (Sukarno pen.) 'Jong Java' sebagai langkah kedua, mempunyai dasar jang lebih luas. begitupun pergaulan sosial kami berlandaskan kebangsaan. Kami membaktikan diri untuk memperkembangkan kebudayaan asli seperti mengadjarkan tari Djawa atau mengadjar main gamelan. Jong Javapun banyak melakukan pekerdjaan-pekerdjaan sosial. Kami pergi kekampung-kampung jang berdekatan untuk mengumpulkan dana bagi sekolah atau untuk membantu korban bentjana letusan gunung. Kami mengadakan pertundjukan ditempat-tempat jang memerlukan pertolongan dan memerlukan biaja-biaja itu dari hasil uang masuk. (185).

Dari data tersebut di atas jelaslah, bahwa *Jong Java* cabang Surabaya aktivitasnya lebih menitikberatkan dalam bidang kebudayaan dan bidang sosial, walaupun menurut keputusan kongres di Solo tanggal 12 Juni 1918 kelihatan bahwa *Jong Java* adalah perkumpulan pelajar yang mempelajari teori

politik. (186).

Pada tanggal 10 Juni 1921 Sukarno telah lulus dari HBS dan pada minggu terakhir bulan tersebut ia telah meninggalkan kota Surabaya untuk meneruskan pelajarannya ke kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan kota Surabaya, Sukarno masih sempat memberikan kenang-kenangan yang sangat penting pula dalam perjuangan kemerdekaan. Waktu malam perpisahan dengan para anggota *Jong Java* cabang Surabaya, Sukarno sebagai pendiri organisasi tersebut mengusulkan agar supaya *Peci (Kopiah)*, dipakai sebagai lambang Indonesia Merdeka! Pada hal pada waktu itu kaum terpelajar merasa terhina kalau disuruh memakai peci, yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. (187).

Tentang bagaimana kelangsungan hidup *Jong Java* cabang Surabaya sesudah ditinggalkan Sukarno, data penjelasannya belum penulis temukan. Yang terang dalam tahun 1924 di kota Surabaya muncul lagi suatu perkumpulan untuk kaum pelajar yang jangkauannya lebih luas dari *Jong Java*. Perkumpulan tersebut namanya *Indonesische Studie Club*, yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawannya.

Setelah Sutomo lulus dari STOVIA (1911), ia berpraktek sebagai dokter di beberapa tempat di Jawa dan Sumatra. Pada bulan Nopember 1919 ia berangkat ke negeri Belanda untuk melanjutkan pelajarannya di Universitas Amsterdam. Pada waktu itu di negeri Belanda sudah ada perkumpulan para pelajar Indonesia yang bernama *Indische Vereeniging* dan ketuanya Ahmad Subardjo (1919 - 1921). Maka dari itu dr. Sutomo lalu masuk menjadi anggota perkumpulan tersebut, bahkan pada tahun 1921 - 1922 diangkat sebagai ketuanya. *Indische Vereeniging* yang berdiri sejak tahun 1908 itu, semula bertujuan sosial; namun setelah Perang Dunia ke I, perkumpulan tersebut mulai cenderung ke arah politik. Bahkan pada tahun 1922 perkumpulan tersebut berganti nama dengan *Indonesische Vereeniging*, Pedoman perjuangannya seperti tertulis dalam majalah *Hindia Poetra* adalah sebagai berikut:

"Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya pada rakyat Indonesia semata-mata; bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri, bukan dengan pertolongan siapa pun juga; bahwa segala jenis perpecahan tena-

ga haruslah dihindarkan supaya tujuan itu lekas tercapai.” (188).

Dari data tersebut di atas jelaslah, bahwa *Indonesische Vereeniging* tersebut mempunyai idee untuk: menuntut Indonesia Merdeka, Persatuan Indonesia, Demokrasi dan non-koperasi. Ternyata idee tersebut sangat berpengaruh kepada jalannya sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Idee tersebut oleh para pengikutnya kemudian disebarkan ke Indonesia (Hindia Belanda), baik dengan cara mendirikan perkumpulan baru atau pun dengan cara menyebar luaskan majalah-majalahnya (“Hindia Poetra” kemudian menjadi “Indonesia Merdeka”).

Demikianlah Dr. Sutomo setelah mendapatkan gelar Dokter dalam Ilmu Kesehatan pada tahun 1923 ia pulang ke Indonesia menjadi dokter spesialis di rumah sakit negeri C (*entrale*) B (*urgelijke*) Z (*iekenhuis*) di kota Surabaya; disamping menjadi guru NIAS. (189) Untuk mengembangkan idee perkumpulan *Indonesische Vereeniging* tersebut, maka atas dorongan Dr. Sutomo pada tanggal 12 Juli 1924 di kota Surabaya didirikan perkumpulan *Indonesische Studieclub*.

Surat kabar Melayu - Tionghwa *Sin Jit Po* (yang kemudian menjadi *Sin Tit Po*) memuat laporan rapat pendirian ini dalam penerbitannya tanggal 14 Juli 1924. Diberitakan di situ, bahwa rapat pendirian itu diadakan di rumah R.M. Hario Suyono di Palmenlaan (sekarang Jl. Panglima Sudirman no. 35) dengan mendapat kunjungan dari 25 orang “pelajar-pelajar tinggi”. Disebutkan dalam berita itu bahwa selain Sunjoto, Sunarjo, Mr. Koesnoen, Dr. Saleh dan lain-lain orang Indonesia, hadir juga beberapa orang Belanda, seperti Koch dan Tilleman. (190) Adapun *Indonesische Studieclub* itu bertujuan membangunkan kaum terpelajar supaya mempunyai keinsyafan kewajiban terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuan tentang politik. Perkumpulan tersebut mengajak kaum terpelajar supaya melakukan pekerjaan yang berfaedah bagi masyarakat dengan jalan memperbincangkan dahulu setenang-tenangnya soal-soal nasional dan sosial.

Munculnya *Indonesische Studieclub* ternyata membawa pengaruh terhadap kaum intelek muda di kota-kota lain.

Dalam waktu yang singkat di Bandung berdiri *Algemeene Studieclub*, meniru Surabaya, yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. Kemudian kota-kota Solo, Jogja, Jakarta, Semarang dan Bogor

mengikuti jejak langkah kota Surabaya. Walaupun *Studieclub-Studieclub* tersebut berbeda-beda, namun ada satu hal yang terlihat sama ialah *kesadaran atas persatuan Indonesia* dan tujuan kepada Kemerdekaan. (191).

Di antara *Studieclub-studieclub* tersebut ada tiga yang menonjol, baik karena aktivitasnya maupun karena dapat mengeluarkan majalahnya sendiri. *Studieclub* Surabaya dengan majalahnya: "Suluh Indonesia", *studieclub* Bandung dengan majalahnya: "Indonesia Muda" dan *studieclub* Solo dengan majalahnya: "Timbul". Dengan adanya majalah-majalah tersebut kaum intelek memperoleh suatu tempat yang dianggap paling cocok pada waktu itu untuk dapat mengasah otaknya dan dapat mengeluarkan suaranya sebagai pengabdian Bangsa dan Tanah-Air. Barang siapa yang membaca ketiga majalah itu akan merasakan getaran jiwa rakyat Indonesia yang hidup pada waktu itu dan yang dijurubicarai oleh pemuda-pemuda pelajarnya. (192).

#### 7. *Partai Komunis Indonesia.*

Pada tahun 1848 Karl Marx telah mencetuskan "Manifesto Komunis" yang di dalamnya telah diuraikan, bahwa di dunia ini ada dua golongan, yaitu golongan kaum yang tertindas dan golongan kaum yang menindas; golongan proletar dan golongan borjuis. Golongan yang dua ini sepanjang sejarah selalu terlibat di dalam perjuangan yang tak berkeputusan dan tidak mengenal damai. Ia menerangkan pula, bahwa kaum buruh hanya mendapat perbaikan nasib jika ia sanggup menghilangkan perbedaan kelas, dengan jalan perjuangan kelas yang tidak enggan memakai *kekerasan*. Akhirnya ia memberi nasehat kepada kaum yang tertindas dengan seruan: "Kaum proletar seluruh dunia, bersatulah". Pikiran-pikiran ini biasanya disebut pikiran yang revolusioner-sosialistis.

Di dalam sejarah Marxisme, idee tersebut di atas menimbulkan peristiwa-peristiwa berdirinya Internationale ke I di London (1864), Internationale ke II di Paris (1889) dan Internationale ke III di Kremlin di Moscow (Komintern).

Internationale ke I menunjukkan jalan bagi kaum yang tertindas dengan perkataan-perkataan bahwa: "Kemerdekaan Kaum buruh hanya dapat diperoleh dengan usaha kaum buruh sendiri", dan "kemerdekaan kaum buruh bukanlah suatu pekerjaan lokal atau nasional, akan tetapi suatu pekerjaan sosialis serta

internasional". Internationale ke II berusaha mengumpulkan dan mengatur tenaga kaum buruh. Sedangkan Internationale ke III mau menjadikan Internationale yang menjalankan perbuatan, mau menjadikan *Internationale - van - de - daad*, dengan menjelmakan *massa actie*. Ia hendak menjalankan *actie* dengan tenaga kaum yang tertindas seluruhnya dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan agama. Ia telah menyerukan kepada kaum proletar seluruh dunia. "Kemerdekaan jajahan hanya dapat tercapai dengan kemerdekaan kaum buruh seluruhnya." (193).

Ternyata idee Marxisme tersebut mendapat pengaruh di Eropa, terutama pengaruh itu berkembang di kalangan kaum buruh. Negeri Belanda rupanya juga tidak luput dari pengaruh tersebut, sehingga disana muncul gerakan kaum buruh yang bernama *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Para anggota SDAP inilah kiranya yang pertama kali menaburkan benih-benih Marxisme di bumi Indonesia sebelum Perang Dunia I, dengan tokohnya yang terkenal antara lain H.J.F.M. Sneevliet.

Sneevliet, di Indonesia, mula-mula bekerja sebagai anggota staf redaksi pada surat kabar *Soerabajaasch Handelsblad*, tidak lama kemudian pada tahun 1913 ia pindah ke Semarang dan menjadi sekretaris pada *Semarangsche Handelsvereeniging*. Bagi Sneevliet tinggal di Semarang adalah menguntungkan karena Semarang adalah pusat daripada *Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP), serikat buruh yang tertua di Indonesia dan pada masa itu Sneevliet segera dapat membawanya ke arah yang lebih radikaal. Atas prakarsanya pada tanggal 9 Mei 1914 bersama-sama dengan orang-orang sosialis lainnya, seperti J.A. Brandsteder (pengurus Wisma Pelaut Surabaya = *Soerabajasche Marinegebouw*), H.W. Dekker, P. Bergsma dan juga Semaun, mereka telah berhasil mendirikan suatu organisasi di Semarang yang diberi nama *Indische Sociaal - Democratische Vereniging* (ISDV). Pada tahun 1915, ISDV telah menerbitkan majalah *Het Vrije Woord* dengan redaksi Sneevliet, Bergsma dan Ir. Adolf Baars (pengajar di *Koningin Emma-school* di Surabaya). (194).

Faham sosialis (revolusioner = kiri) pada waktu itu belum mendapat pasaran di kalangan rakyat umum Indonesia. Padahal ISDV tidak dapat berkembang kalau tidak berakar di dalam

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu para pengurus ISDV sejak mulai berdirinya selalu berusaha mendekati rakyat umum dengan jalan memakai organisasi lain sebagai perantaraannya. Hal itu dilakukan karena ia sendiri tidak dapat bersandar kepada rakyat umum. Para anggotanya bangsa Belanda mendekati serdadu-serdadu bangsa Belanda (Sneevliet), serdadu-serdadu angkatan laut (Brandsteder), pegawai negeri bangsa Belanda Sipil (Ir. Baars dan van Burink), sedangkan para pemimpin bangsa Indonesianya berusaha merembes ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang berhaluan nasional. (195).

Mula-mula ISDV bersekutu dengan Insulinde, tetapi karena tidak memenuhi sasaran tujuannya, maka sesudah satu tahun bekerjasama itu bubar. Sasaran kemudian ditujukan kepada Sarekat Islam yang pada waktu itu (1916) mempunyai ratusan ribu anggota dan merupakan suatu raksasa di dalam pergerakan nasional Indonesia. Dengan menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal dengan nama "blok di dalam", ISDV berhasil menyusup ke dalam SI. Caranya ialah dengan menjadikan anggota ISDV menjadi anggota SI dan sebaliknya menjadikan anggota SI menjadi anggota ISDV. Akibatnya, dalam waktu singkat SI cabang (= *afdeling*) Semarang sudah berada di bawah pengaruh ISDV, Sasaran infiltrasi utama kemudian ditujukan ke arah Centraal Sarekat Islam (CSI) yang sejak tahun 1915 muncul di kota Surabaya, dengan tokoh-tokoh pengurusnya antara lain: H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Muis, H. Gunawan, H. Samanhudi, W. Wondoamiseno, H. Agus Salim, Sosrokardono dan Surjopranoto. Pusat perdebatan politik SI pada waktu itu berada di rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Peneleh Gang VII Surabaya.

Pada waktu itu (tahun 1916) Surabaya merupakan kota pelabuhan yang sibuk dan ribut. Ia menjadi kota tempat perlombaan dagang yang kuat dari orang-orang Cina. Ia menjadi suatu kota industri yang penting dengan pertukaran yang cepat dalam perdagangan gula, teh, tembakau dan kopi. Ditambah lagi dengan adanya arus besar dari para pelaut dan pedagang yang membawa berita dari segala penjuru dunia. Penduduknya semakin bertambah, terdiri dari para pekerja pelabuhan dan pekerja bengkel yang masih muda-muda dan bersemangat. Ia menjadi kota di mana bergolak persaingan, pemboikotan dan perkelahian di jalan-jalan. Pendeknya pada waktu itu Surabaya menjadi suatu

kota yang bergolak karena ketidak puasan dari orang-orang revolusioner. (196).

Dalam situasi kota Surabaya yang demikian itulah tokoh-tokoh ISDV, Semaun (Sejak tahun 1915) Raden Darsono, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo, berhasil menjadi anggota SI cabang ("Afdeling") Surabaya. (197) Di dalam SI itulah mereka berusaha memasukkan aliran yang revolusioner sosialis (atau sosialis - kiri).

Dalam Konggres Nasional CSI atau *National Indisch Congres* yang pertama (1916) di Bandung, sebagai wakil SI cabang Surabaya, Semaun berusaha mempengaruhi Pengurus CSI untuk tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial; tetapi gagal karena aliran politik koperasi masih kuat.

Tetapi setelah Semaun pada tahun 1917 diangkat menjadi pemimpin SI cabang Semarang, paham revolusioner-sosialistis atau sosialisme ciptaan Marx makin merembes ke tubuh SI.

Demikianlah dalam Konggres Nasional CSI ke II (1917 di Jakarta) muncul suatu keterangan asas (*beginselfverklaring*) yang merupakan suatu kompromi pendapat antara aliran Haji Agus Salim yang berdasarkan agama Islam dan aliran Semaun yang berdasarkan ajaran Marx.

Asas tersebut di antaranya menyebutkan: "Pemerintah sendiri (*zelfbestuur*) sebagai tujuan perjuangan terhadap penjajahan dan menentang semua penghisapan oleh "Kapitalisme yang buruk". Selanjutnya dalam Konggres Nasional CSI III di Surabaya (1918) telah diputuskan untuk menentang Pemerintah sepanjang tindakannya "melindungi kapitalisme"; pegawai negeri Indonesia dikatakan adalah alat, penyokong kepentingan kapitalis. Diputuskan pula bahwa SI akan menggerakkan semua organisasi bangsa Indonesia untuk menentang kapitalisme dan akan mengorganisasi kaum buruh (198).

Sesudah Konggres NASIONAL CSI III tahun 1918 itu kedudukan Semaun makin kuat, karena pada tahun itu juga ia diangkat sebagai komisarwilayah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan Darsono diangkat sebagai propandis resmi CSI. Kedudukan makin diperkuat dengan kedatangannya Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo di Semarang. (199) Namun demikian di dalam ISDV sendiri ternyata timbul perpecahan. Oleh karena sikap pimpinannya yang terlalu radikal maka golongan yang moderat di dalam ISDV mengundurkan

diri. Pada tanggal 8 September 1917 mereka membentuk SDAP cabang Hindia Belanda yang kemudian menjadi *Indische Sociaal Democratische Partij (ISDP)* yang berkedudukan di Jakarta.

Sementara itu di Rusia pada tanggal 7 Nopember 1917 (= 23 Oktober 1917 menurut tahun yang dulu dipakai di Rusia) Lenin telah berhasil mengadakan revolusi sosialis atau revolusi Bolsyewik yang hendak mendirikan Rusia Baru yang sosialis. Peristiwa tersebut kemudian diikuti peristiwa 5 Maret 1919 di Kremlin (Moskow) dengan berdirinya Internationale ke III atau *Communistische Internationale* (Comintern) atau Komunis Internasional (Komintern).

Pada waktu pecahnya revolusi Bolsyewik di Rusia tersebut, tubuh ISDV telah bersih dari unsur-unsur yang moderat dan dapat dikatakan sikapnya telah bersifat komunis. Akibatnya berita kemenangan kaum Bolsyewik itu disambut dengan penuh antusiasme. Baars dengan berapi-api menyerukan agar revolusi Rusia diikuti sekarang juga di Hindia Belanda. Darsono menyerukan dikobarkannya pemberontakan dan dikibarkannya bendera merah. Akibatnya, pada akhir tahun 1917 itu juga kelasi-kelasi kapal perang Belanda di Surabaya dan beberapa prajurit tentara Belanda berdemonstrasi, yang menimbulkan perkelahian dengan polisi. Sejalan dengan itu di Semarang timbul pula pemogokan-pemogokan yang dijalankan oleh Sarekat-Sarekat Buruh. (200) Bersamaan dengan itu, karena situasi Perang Dunia I Hindia Belanda terputus hubungannya dengan Negeri Induknya (Negeri Belanda), memberi kesempatan bagi partai yang moderat seperti Budi Utomo, Insulinde, SDAP - Hindia Belanda dan SI untuk mendesak kepada pemerintah kolonial Belanda agar supaya *Volksraad* diganti dengan parlemen pilihan rakyat.

Krisis Nopember segera menjadi reda ketika Gubernur Jenderal van Limburg Stirum menjanjikan akan mengadakan perubahan pemerintahan yang luas. Ketika suasana dapat dikuasai maka pemerintah kolonial segera mengambil tindakan keras. Anggota-anggota militer yang indisipliner dan menimbulkan kecacauan dihukum berat, sedangkan pegawai negeri yang terlibat dimutasikan. Sneevliet diusir, sedangkan Darsono, Abdul Muis dan beberapa pemimpin Indonesia lainnya ditangkap. Dengan tindakan ini ISDV mengalami depresi.

Masa tahun 1919 merupakan masa sulit bagi para anggota

golongan Eropa di dalam ISDV. Sebagai akibat tindakan pemerintah kolonial yang keras, maka banyak di antara mereka yang dipenjarakan dan diusir dari Hindia Belanda. Karena kehilangan pimpinan serta kegagalan gerakan mereka di Negeri Belanda dan di Hindia Belanda, peranan golongan Eropa di dalam ISDV menjadi berkurang. Muncullah aktivitas bangsa Indonesia di dalam pimpinan ISDV. Mereka itu antara lain adalah Semaun dan Darsono yang telah memperoleh didikan Sneevliet. (201).

Setelah kedudukan Semaun dalam SI makin kuat, ia beserta Darsono dan Alimin terus berusaha membawa SI ke hulu kiri. Di dalam Kongres Nasional CSI IV di Surabaya (29 Oktober - 27 Nopember 1919) Alimin telah mengecam CSI dengan hebat dan Kongres membicarakan soal penyempurnaan organisasi kaum pekerja serta pembentukan suatu federasi Sarekat Sekerja. Akibatnya pada Kongres Nasional CSI ke V di Yogyakarta (25 Desember 1919) berdirilah (*Vak - Centrale*, yang bernama "Persatuan Pergerakan Kaum Buruh" (PPKB) dengan Semaun sebagai Ketua, Surjopranoto sebagai wakil dan Haji Agus Salim sebagai sekretaris. Tetapi dalam Kongres tersebut telah tergambar dengan jelas adanya pertentangan antara H.O.S. Tjokroaminoto cs. dan Semaun cs., terutama dalam memperebutkan nama *Vak - Centrale* tersebut. H.O.S. Tjokroaminoto cs. menghendaki nama "Persatuan Perserikatan Kaum Buruh", sedangkan Semaun cs. menghendaki nama *Revolutionair Socialistische Vak centrale*. (202) Pertentangan itu makin menghebat setelah ISDV dilebur menjadi "Perserikatan Komunis Hindia".

Ketika SDAP di Negeri Belanda pada tahun 1918 memaklumkan dirinya menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), maka beberapa anggota bangsa Eropa di dalam ISDV mengusulkan untuk mengikuti jejak itu. Sebagai hasil gagasan mereka, maka pada kongres ISDV ke VII bulan Mei 1920 dibicarakan usul untuk menggantikan ISDV menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Di antara sponsor utama terdapat Baars, Bergsma dan Semaun. Mereka ingin mengubah nama ISDV dengan tujuan untuk membedakan diri dengan "kaum sosialis revisionis" atau "kaum sosialis palsu" dan untuk mengidentifikasi diri dengan "Komintern".

Di lain pihak, golongan yang menentang yang diwakili oleh Hartogh, menganggap bahwa walaupun ISDV menaruh simpa-

ti kepada revolusi Bolsyewik di Rusia, akan tetapi tidak semua unsur komunisme cocok bagi alam Indonesia; seperti sistem diktatur proletar dan sistem Sovyet yang menurut Baars merupakan program komunis yang paling esensial. Akhirnya diadakanlah pemungutan suara untuk mendapatkan keputusan. Ternyata hanya cabang-cabang Surabaya, Bandung dan Ternate yang menentang perubahan nama ISDV. Dengan demikian Baars, Bergsma, Semaun cs. mendapat kemenangan dan pada tanggal 23 Mei 1920 nama ISDV diubah menjadi *Partij Komunist Hindia* (*Indische Communistische Partij*. = PKI).

Kemudian disusun pengurus baru yang antara lain terdiri dari Semaun sebagai Ketua, Darsono sebagai Wakil Ketua, Bergsma sebagai Sekretaris, Dekker sebagai Bendahara, Baars, Sugono dan lain-lainnya sebagai anggota pengurus. Sebagai tindak lanjut perubahan nama, maka pada Konggres istimewa tanggal 24 Desember 1920 PKI mengambil keputusan untuk berafiliasi dengan organisasi "Komintern". Sesuai dengan garis Komintern, akibatnya PKI harus membentuk "fron persatuan" dengan partai-partai non-komunis dan menentang cita-cita Pan-Islamisme. (203). Mulai saat itu serangan kaum komunis terhadap CSI golongan H.O.S. Tjokroaminoto makin gencar dan jurang pertentangan antara anggota SI golongan Semaun cs. dan golongan H. O.S. Tjokroaminoto makin melebar.

Melihat kenyataan tersebut di atas para tokoh SI golongan Tjokroaminoto tidak tinggal diam. Dengan giat H.O.S. Tjokroaminoto menggembleng para anggota SI dengan faham "Sosialisme yang berdasarkan Islam", baik melalui surat kabar SI "Oetoesan Hindia", melalui kursus-kursus untuk para anggota SI maupun melalui pidato di Konggres Al-Islam (di Garut th. 1922); bahkan pada bulan Nopember 1924 ia menerbitkan buku yang berjudul "ISLAM DAN SOCIALISME". (204) Begitu pula Haji Fahrudin, wakil Ketua Muhammadiyah (juga anggota CSI), di dalam konferensi SI bulan Maret 1921 telah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan Islamisme tidak mungkin tercapai apabila tetap bekerjasama dengan komunis. Sedangkan Haji Agus Salim mengecam SI - Semarang, yang mendukung PKI, berhubung dengan kecaman Darsono (SI - Semarang) terhadap beleid keuangan Tjokroaminoto dan pernyataan SI - Semarang bahwa agama dan politik jangan dicampur adukan di dalam SI. Pertentangan itu makin memuncak ketika berlang-

sung Konggres Nasional CSI ke VI tanggal 6 s/d 10 Oktober 1921 di Surabaya. Agus Salim dan Abdul Muis mendesak agar ditetapkan peraturan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Hal itu ditentang oleh Semaun dan Tan Malaka. Tetapi akhirnya, dengan suara mayoritas konggres menerima disiplin partai tersebut. Dengan demikian langkah pertama untuk mengakhiri infiltrasi dan pengaruh PKI ke dalam tubuhnya telah diambil oleh SI. Dengan dilaksanakannya keputusan konggres Surabaya yang menentukan disiplin partai di dalam tubuh SI. itu, maka cabang-cabang SI yang telah terkena pengaruh PKI kemudian memisahkan diri dari organisasi induknya (CSI) dan mereka terkenal dengan julukan "SI - Merah". Sedangkan "SI - Tjokroaminoto" (yang asli) kemudian terkenal dengan sebutan "SI - Putih".

Untuk merealisasi taktik "Front persatuan" PKI masih berusaha memperbaiki kembali kerjasama dalam "kubu SI". Akan tetapi usahanya untuk memasuki kembali kubu SI mendapat kegagalan oleh karena pada konggres CSI ke VII di Madiun (17 s/d 20 Pebruari 1923), Tjokroaminoto mempertajam ketentuan disiplin partai dan meningkatkan pendidikan kader SI dalam usaha memperkuat organisasi partai. Sesudah konggres di Madiun ini bersihlah pengaruh PKI di dalam SI yang asli. (205) Tentang bagaimana usaha PKI untuk masuk kembali ke tubuh SI, W. Wondoamiseno yang pada waktu itu menjadi komisaris CSI, pernah memaparkan suasana Konggres CSI di Madiun itu, yang antara lain sebagai berikut:

Sebelum resepsi dimulai pada malam harinya, seperti biasa para pemimpin CSI memeriksa gedung tempat Konggres dan tempat pemondokan para utusan. Ketika H.O.S. Tjokroaminoto dan H.A. Salim cs. (termasuk W. Wondoamiseno dan Fahrudin) memasuki gedung Konggres, ternyata gedung itu telah dihiasi dengan ratusan bendera yang bercorak "merah palu arit" ialah bendera Komunis. Bahkan di atas meja pimpinan CSI pun berkibar besar yang melambai-lambai "palu-arit berdasar merah". Melihat hal itu H.O.S. Tjokroaminoto lalu membisiki H.A. Salim dan Fahrudin untuk menggantinya dengan bendera SI. Demikianlah ketika pada malam harinya resepsi dimulai di atas meja pimpinan telah berkibar bendera *Bintang Bulan berdasar hijau* yang dengan lafadl: *Laailaha, illallah Muhammadur - Rasuhullah*. Juga digedung itu sudah tidak nam-

pak lagi bendera "palu arit berdasar merah".

Resepsi dibuka oleh Ketua Panitia, Djodjodihardjo (?), mempersilakan seorang pemuda (anggota Panitia) untuk mengucapkan sambutannya terhadap Konggres dan tamu sekalian. Sambutannya yang dikemukakannya antara lain maksudnya demikian: " .... Saudara-saudara kaum SI janganlah selalu mengekor saja kepada pemimpinnya, jangan cuma rubah gedung seperti orang sembahyang ma'mun di belakang imam dengan tidak mengerti maksudnya .....". Ketika mendengar ucapan itu, para utusan serentak berdiri dan meloncat kedepan menghampiri podium lalu digulingkannya. Resepsi kacau balau. H.O.S. Tjokroaminoto berusaha menenangkan para Kongresisten. Setelah tenang resepsi dibuka kembali dengan pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Berhari-hari konggres berjalan dengan tenang. Sehingga akhirnya menghasilkan keputusan-keputusan yang terpenting antara lain ialah:

- a. Menetapkan partai-disiplin terhadap PKI.
- b. Menetapkan sikap Non-Cooperation terhadap Pemerintah Belanda.
- c. Mengganti SI menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur (yang kemudian diubah menjadi PSII).
- d. Membaharui pormulir bai'at. (206).

Sebagai reaksi terhadap Keputusan Konggres Nasional CSI ke VII di Madiun itu, maka pada tanggal 4 Maret 1923 kaum komunis mengadakan pula konggresnya di Bandung; yang dihadiri oleh 16 cabang PKI, 14 cabang SI Merah dan serikat-serikat sekerjanya. Konggres PKI tersebut kemudian mengambil keputusan, bahwa di setiap tempat di mana ada "SI - Putih" maka didirikan "SI - Merah" yang nantinya akan dinamai dengan "Sarekat Rakyat". Di samping itu didirikan pula cabang PKI yang mengkoordinasikan dan mengendalikan gerakan massa SI - Merah. Pada bulan April 1924 "SI - Merah" berganti nama menjadi "Sarekat Rakyat". Kemudian pada bulan Juni 1924 Sarekat Rakyat dijadikan *onderbouw* (tangkatan bawah) dari PKI. Hal itu berarti bahwa sejak itu pendidikan ideologi komunis dilakukan secara intensif. Dan akhirnya pada bulan Desember 1924 para pemimpin PKI mengambil prakarsa untuk melebur Sarekat Rakyat ke dalam PKI. (207)

Dengan demikian, maka PKI untuk pertama kalinya mulai me-

mimpin sendiri organisasi massa, yang anggotanya sangat besar. Kalau dalam tahun 1923 anggota PKI sekitar 13.000, maka dengan masuknya para bekas anggota SI - Merah jumlahnya bertambah lagi sekitar 30.000 a 35.000. (208).

#### 8. *Gerakan Perburuhan.*

Organisasi Sarekat Sekerja bangsa Indonesia (= Bumiputra) baru timbul dalam masa Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu syarat-syarat kehidupan rakyat di Hindia Belanda (Indonesia) makin merosot, sebagai akibat dari adanya kesukaran dalam pemasukan dan pengeluaran barang-barang ke dan dari Hindia Belanda. Kehidupan politik di Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi subur, sehingga golongan-golongan radikal makin meluas. Namun demikian kehidupan rakyat dari bulan ke bulan makin sengsara, sedangkan hati mereka kian lama makin merasa tidak senang atau makin tidak merasa puas. Salah satu tempat yang dapat dipakai oleh rakyat untuk mengungkapkan rasa tidak puas tersebut antara lain organisasi pergerakan nasional.

Demikianlah dalam Kongres Nasional CSI yang pertama (21 Juli 1916 di Bandung), telah terdengar pengaduan rakyat daerah Jawa Timur yang berada di daerah-daerah pabrik gula, tentang tindakan sewenang-wenang dari *Gewestelijke Raad* (Sidang Dewan Daerah) terhadap rakyat. Suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh *Gewestelijke Raad* telah menetapkan, bahwa jika ada kebun tebu terbakar, setelah apinya dipadamkan, maka sekalian penduduk laki-laki bangsa Indonesia (Bumiputra) yang telah dewasa di daerah itu, lima hari lima malam lamanya mereka diwajibkan menjaga tempat kebakaran itu. Juga di Jember penduduk desa disuruh menjaga tanpa dibayar, jika ada gudang tembakau yang terbakar. Barang siapa yang tidak datang, ia disuruh membayar denda yang sangat berat. Juga para pegawai Pegadaian (*pandhuis*) Bumiputra mengemukakan pengaduan tentang hinaan yang diderita oleh mereka dari pihak atasannya (208 a).

Selanjutnya akan nampak, bahwa adanya perkumpulan-perkumpulan politik itu dapat membuka pikiran kaum buruh untuk memperbaiki kedudukannya dengan cara berorganisasi. Tentang cara berorganisasi ini mereka telah melihat adanya perkumpulan Sarekat Sekerja bangsa Eropa atau pun campuran

Eropa dan Bumiputra bersama-sama) yang dapat dipakai sebagai contoh. Demikianlah misalnya sejak tahun 1905 di Semarang telah berdiri perkumpulan Sarekat Sekerja *SS Bond* untuk pegawai "SS" (*Staatsspoorwegen*) atau PN. Kereta api dari segala bangsa, yang berada di bawah pimpinan pegawai Belanda. *SS Bond* ini pada tahun 1912 menemui ajalnya, karena kalah saingan dengan VSTP (*Vereniging van Spoor - en Tramwegpersoneel*) yang berdiri pada tahun 1908 untuk pegawai dari semua angkutan darat kereta api dan trem.

Perkumpulan ini berkedudukan di Semarang dan sejak tahun 1913 berada di bawah pengaruh ISDV (dengan Sneevliet dan kemudian Semaun sebagai ketuanya).

Demikianlah pada tahun 1916 para pegawai Bumiputra (Indonesia) dari jawatan pegadaian mendirikan *Pandhuisbond* atau perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra" (PPPB) dan Sosrokardono (dari Jawa Timur) sebagai ketuanya. Sosrokardono adalah salah seorang pemimpin Sarekat Islam, yang pada tahun 1916 (21 Juli) ikut serta memimpin Kongres Nasional CSI di Bandung. Ia adalah anak Bupati Sidoardjo, R.A. Tjondronegoro I, waktu kecilnya namanya R.P. Kardono.

Ia pernah ditangkap oleh pemerintah kolonial bersama-sama dengan H.O.S. Tjokroaminoto. Setelah keluar dari penjara, ia menjadi anggota *Indonesische Studieclub*, di samping itu ia juga menjadi redaktur surat kabar "Suara Umum" dan "Panjebbar Semangat". Ia meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1935 dan dimakamkan di belakang Masjid Jamik Sidoardjo. (209) - 62).

Dalam tahun 1916 itu juga kemudian muncul pula perserikatan para pegawai *Burgerlijke Openbare Werken* (BOW = Dep. Pekerjaan Umum) dengan nama *Vereniging Inheemse Personeel Burgerlijke Openbare Werken* (VIPBOUW). Ketua pengurus besarnya adalah R.P. Suroso (ketika itu ia menjadi anggota SI) dan Wakil Ketuanya adalah W. Wondoamiseno.

Selain memimpin VIPBOW, W. Wondoamiseno juga menjadi Ketua P.B. *Chauffeurs - Bond* seluruh Jawa. Kemudian menyusul lagi perserikatan pegawai jawatan candu, perserikatan dari berbagai golongan guru, perserikatan pegawai duane dan lain sebagainya. sementara itu (dalam tahun 1917) kaum pekerja di pabrik-pabrik gula mendirikan pula serikat sekerja dengan nama *Personeel Fabrieks Bond* (PFB) di bawah pimpinan

R.M. Surjopranoto (komisaris CSI). Semula PFB ini muncul di Yogya, tetapi dengan lekas lalu tersebar di seluruh Jawa. Karena pada waktu itu pegawai Bumiputra (Indonesia) hanya terdiri dari para pegawai golongan rendahan saja, maka perserikatan-perserikatan tersebut mendekati organisasi "kaum buruh" khusus. (210).

Untuk menggalang kekuatan kaum buruh, dalam kongres PPPB. di Bandung (bulan Mei 1919) Sosrokardono telah menganjurkan agar semua perkumpulan sekerja dijadikan satu federasi dalam satu badan sentral. Jika Badan Sentral itu bergerak dengan giat, maka rakyat nanti akan dapat mencapai *Pemerintahan Sendiri (zelfbestuur)* dan mengubah masyarakat kapitalis menjadi sosialis. Dalam Konggres Nasional CSI di Surabaya (Oktober - Nopember 1919) pendapat Sosrokardono tersebut dibicarakan lebih lanjut oleh R.M. Surjopranoto, yang oleh fihak Belanda ia terkenal dengan sebutan "Si Raja Mogok" atau *de Stakings Koning*.

Dalam Konggres Surabaya itu oleh Surjopranoto dibentangkan, bahwa kemenangan perjuangan kelas dan menjadikan alat-alat produksi menjadi milik umum tidak harus dicapai dengan aksi bersenjata, tetapi dengan paksaan batin (moral) protes, perundingan di muka ramai dan jika perlu dengan pemogokan. Di situ diterangkan pula bahwa federasi serikat sekerja yang merupakan Badan Sentral itu akan merupakan *Eerste Kamer*, di mana duduk wakil-wakil dari Serikat Buruh dan Serikat Tani; sedang partai-partai politik harus membentuk pula *Tweede Kamer*, sehingga kedua majelis tersebut merupakan Dewan Perwakilan Rakyat (*Volksraad*) yang sesungguhnya-sungguhnya. Dengan adanya persatuan itu, maka rakyat akan dapat beraksi menentang kapitalisme dan penjajah asing. Sebagai realisasi keputusan Konggres Nasional CSI ke IV di Surabaya (1919), maka dalam Konggres Nasional CSI ke V di Yogya (25 Desember 1919) berdirilah perpusatan serikat sekerja (*Vak-centrale*) dengan nama seperti yang diusulkan SI, yaitu "Persatuan Pergerakan Kaum Buruh" (PPKB), yang dipimpin oleh Semaun selaku Ketua, Wakil Ketuanya R.M. Surjopranoto dan Haji Agus Salim sebagai Sekretaris intinya terdiri dari PFB, PPKB dan VSTP. Langkah pertama yang diambilnya, ialah menuntut berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat yang semata-mata dibentuk oleh Rakyat. (211).

Walaupun *Vak-centrale* telah terbentuk, namun dalam pembentukan tersebut nampak dengan jelas adanya perbentangan antara H.O.S. Tjokroaminoto cs. (penganut faham Sosialisme-Islam) dengan Semaun cs. (penganut faham Sosialisme Marx, yang kemudian menjadi Komunisme). H.O.S. Tjokroaminoto cs. menghendaki nama *Vak-centrale* itu PPKB seperti tersebut di atas, sedangkan Semaun cs. menghendaki nama "*Revolutionaire Socialistische Vak-centrale*". Pertentangan itu makin menghebat setelah ISDV pada tanggal 23 Mei 1920 dilebur menjadi PKI dengan Semaun sebagai Ketuanya. Akibatnya di dalam *Vak-centrale* (PPKB) terjadi perebutan pengaruh antara golongan agama Islam yang dipimpin oleh Agus Salim dan Surjopranoto dengan golongan komunis yang dipimpin oleh Semaun dan Bergsma. Pertentangan makin memuncak sehingga pada Kongres PPKB di Jogja bulan Juni 1921 *Vak-centrale* tersebut pecah menjadi dua. Semaun cs. keluar dari PPKB dan mendirikan "*Revolutionaire Vak-centrale*" dengan pusatnya di Semarang, yang terdiri dari: VSTP, Serikat Sekerja Kehutanan, Serikat Sekerja Pelabuhan, Serikat Sekerja Sopir dan Kusir. Sedangkan PPKB terus berlangsung di bawah pimpinan R.M. Surjopranoto dan H.A. Salim dengan pusatnya di Jogja, yang meliputi: PFB, VIPBOW, Bond guru-guru dan lain-lainnya 212)

Sementara itu persaingan antara SI dengan PKI dalam memperebutkan pengaruh di kalangan Serikat Sekerja makin menghebat. Propaganda dari para anggota PFB (Pengaruh SI) di Surabaya telah berhasil menimbulkan Sarikat-Sarikat Sekerja di perusahaan-perusahaan penjahit, pelabuhan dan perusahaan-perusahaan teknik. Bahkan Serikat-Serikat Sekerja tersebut kemudian bergabung dalam satu pusat daerah (*eenplaatselijke centrale*) (tahun 1920). Sebaliknya ketika pada bulan Agustus 1921 di Surabaya timbul pemogokan buruh pelabuhan, Semaun (pemimpin PKI) mempunyai peranan dalam menyampaikan tuntutan mereka.

Sesuai dengan taktik perjuangan PKI yang mengutamakan "front persatuan", maka atas inisiatif Semaun pada tanggal 25 Juni 1922 di kota Surabaya, berlangsung rapat bersama antara Sarikat-Sarikat Sekerja, dengan tujuan untuk mengadakan fusi kembali antara PPKB (yang berpusat di Jogja) dengan *Revolutionaire Vak-centrale* (yang berpusat di Semarang). Fusi tersebut menjadi kenyataan pada tanggal 3 September 1922 di Madiun

dengan lahirnya "Persatuan Vokbonden Hindia" (PVH). Dalam persaingan untuk mendapatkan pengaruh di kalangan Sarikat Sekerja, kalau dalam Perang Dunia I Sarekat Islam lebih unggul, namun setelah perang tersebut selesai rupanya PKI pengaruhnya makin meluas. Sehingga dalam "Pan Pacific Conference" kaum merah yang diadakan di kota Kanton tahun 1924 telah diputuskan, bahwa "Sarikat Laut dan Gedung" di Semarang, "Sarekat Buruh Pelabuhan" di Jakarta dan di Surabaya akan dipersatukan menjadi "Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan" (SPPL). Keputusan tersebut kemudian disusul dengan berdirinya "Secretariaat der Roode Indonesische Vakbonden" (Sekretariat Sarekat Sekerja Indonesia Merah) di Surabaya (21 Desember 1924), yang menjadi pemimpin organisasi-organisasi Sekerja dan akan menjadi cabang dari "Pan Pacific Labour Union" (Merah) di Kanton. (213) Kemudian dalam tahun 1925 di Surabaya telah muncul: Sarekat-Sarekat Sekerja Percetakan, Pabrik-pabrik, Mesin, "Maatschappij Droogdokken" dan Sarekat Buruh Bengkel, dan lain-lainnya. Yang sebagian besar mendapat pengaruh dari PKI. (214).

Pengaruh PKI terhadap Sarekat Sekerja menjadi lumpuh, setelah ia mengalami kegagalan dalam pemberontakannya pada tahun 1926. Pada waktu itu PVH dapat dikatakan sudah mati, walaupun Sarekat-Sarekat Sekerja masing-masing (yang bukan kommunistis) masih berdiri. Dalam pada itu, Dr. Sutomo di Surabaya asyik bekerja mengadakan gabungan di antara beberapa Sarekat Sekerja (Sarekat Buruh Listrik, Sarekat Buruh Bengkel, SB. Jahit, SB. Dagang); juga diusahakan agar supaya perkumpulan-perkumpulan SPPL, *Chauffeurbond* Indonesia, *Marinebond* dan lainnya, berusaha lagi untuk memperbesar jumlah anggotanya. Dalam pekerjaan itu Dr. Sutomo mendapat saingan dari pemimpin-pemimpin SI dengan jalan diam-diam.

Sementara itu para pemimpin SI sedang mengadakan percobaan untuk mendirikan suatu sentral sarekat sekerja yang beraliran Islam (Perserikatan Buruh Islam Indonesia), namun usaha mereka kemudian gagal. Selanjutnya dari para pengurus PPPB (Surjopranoto) dan VIPBOW timbul kehendak untuk mengadakan sentral baru bagi sarekat-sarekat sekerja pegawai pemerintah. Maka pada tanggal 31 Mei 1929 berdirilah Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) yang tidak beraliran politik dan tidak beraliran agama: dengan R.P. Suroso sebagai ketuanya.

Sesudah berdirinya sentral sarekat sekerja pegawai negeri

itu, maka atas usaha *Indonesische Studieclub* di Surabaya dalam bulan Mei 1930 berdiri Persatuan Sarekat-Sekerja Indonesia (PSSI), yang merupakan sentral dari sarekat-sarekat buruh yang bukan pegawai pemerintah; yang mengesampingkan tujuan politik atau agama. Yang tergabung dalam PSSI ini ialah, "*Spoorbond Indonesia Jawa Timur*". Perserikatan Buruh Penjahit, dan Per-cetakan, Sarekat Jengon, Sarekat Sopir, Sarekat Penganggur dan Sarekat-Sarekat Buruh yang belum berorganisasi, yang semuanya itu berdiri di bawah pengaruh *Indonesische Studieclub*. Yang menjadi ketuanya: Roeslan Wongsokusumo. (215) Akibat makin banyaknya para anggota PSSI yang bersikap non koperasi terhadap pemerintah kolonial, pada Kongres Kaum Buruh Indonesia yang pertama, di Surabaya (4-7 Mei 1933, maka nama PSSI diganti dengan "Centrale Perkumpulan Buruh Indonesia" (CPBI). CPBI ini secara praktis di bawah pengaruh organisasi PNI Baru dan Partindo, yang bersikap "non-koperasi". Sedangkan para anggota PSSI yang berada di bawah pengaruh organisasi PSI (Persatuan Bangsa Indonesia penjelmaan dari *Indonesische Studieclub*) yang bersikap "kooperasi" mendirikan suatu sentral kecil baru dengan nama "Centrale Sarekat Sekerja Indonesia" (CSSI).

Di samping kedua sentral sarekat Sekerja itu atas usaha Partindo di Surabaya muncul pula sentral sarekat sekerja yang bernama "*Radicale Vakcentrale Indonesia*" (RADVAKSIN), ini merupakan sentral sarekat sekerja yang berdasarkan kebangsaan, bagi sarekat-sarekat sekerja yang telah didirikan atau akan didirikan oleh Partai Partindo.

Dengan demikian jelaslah, bahwa di sekitar tahun 1933 di Jawa Timur telah terdapat tiga sentral serikat sekerja swasta, yang masing-masing berada di bawah pengaruh organisasi pergerakan nasional, yaitu: RADVAKSIN (Partindo), CPBI (PNI) dan CSSI (PBI). Sedangkan lapangan hidup yang merupakan tumbuhnya suatu partai buruh pada waktu itu tidak ada. Hal terbukti dengan adanya kenyataan, bahwa berdirinya "Partai Buruh Indonesia" di Malang 3 Pebruari 1941, menimbulkan reaksi yang membawa akibat begitu organisasi tersebut lahir terus mati. (215)

## 9. *Nahdatul Ulama.*

Nahdatul Ulama, yang berarti "Kebangkitan Ulama-ulama" adalah suatu perkumpulan ummat Islam yang pada mulanya

sebagai pembela terhadap mazhab Syafi'i, sebagai salah satu Mazhab "*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*". Perkumpulan ini berdiri di kota Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H). Salah seorang ulama yang turut membangun dan sebagai tokoh pembentuk isi Nahdatul Ulama (NU) ialah Kyai Haji Hasyim Asj'ari, yang karena usahanya maka NU dapat menjadi perkumpulan ulama yang besar di Indonesia.

K.H. Hasyim Asj'ari dilahirkan di Jombang (Jawa Timur) pada tahun 1871. Ia telah bertahun-tahun bermukim di Mekkah untuk menuntut ilmu Agama Islam dan bahasa Arab. Untuk melaksanakan cita-citanya, maka pada tahun 1899 ia mendirikan pesantren Tebuireng di Jombang, yang nanti menjadi pesantren terbesar di Jawa Timur. 216) Apabila K.H. Hasjim Asj'ari sebagai tokoh pembentuk isi NU, maka salah seorang ulama yang mewujudkan NU menjadi organisasi ialah Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ipar K.H. Hasjim Asj'ari. 217)

Demikian setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah kembali dari menuntut pelajarannya di Mekkah, pada tahun 1914, ia tinggal menetap di kampung Kertopaten Surabaya. Ia giat mengajarkan pengetahuan Islam, di samping selalu mencari jalan untuk mempersatukan ummat Islam dalam sebuah ikatan agama. Hal itu dilakukan karena ia melihat kenyataan bahwa sebagai akibat pembontakan SI afdeling B di Garut, banyak ummat Islam yang meninggalkan SI karena takut akibat-akibat penangkapan polisi.

Sekembalinya dari luar negeri, K.H. Abdul Wahab Hasbullah lalu mendirikan suatu kursus perdebatan, yang dinamakan "*Taswirul Afkar*". Di situ pernah terjadi diskusi antara K.H. Abdul Wahab Hasbullah dengan K.H. Mansur, yang juga baru pulang dari Mesir, sebelum ia masuk Muhammadiyah. Mereka kemudian membentuk perkumpulan yang dinamakan "*Djama'ijah Nahdhatul Wathan*" dan mendapat kedudukan sebagai Badan Hukum dalam tahun 1916. Asas dan tujuan perkumpulan itu ialah akan memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah-madrasah yang teratur. Atas usaha *Nahdhatul Wathan* ini maka berdirilah sebuah sekolah modern di Kawatan, Surabaya, yang dipimpin oleh K.H. Mas Mansur. Sekolah ini dengan cepat meluas, meskipun dengan nama berbeda-beda, di Wonokromo, Gresik, Jagalan, Pacarkeling dan lain-lain tempat. Pada tahun 1921 K.H. Mas Mansur mengundurkan diri dan masuk ke dalam gerakan Islam Muhammadiyah. Sementara itu Pimpinan "*Nahdhatul Wathan*" dipegang oleh K.H.M.

Alwi Abdul Aziz. Kemudian di Malang muncul pula gerakan "Nahdhatul Wathan" di bawah pimpinan K.H. Abdul Halim dan juga di Semarang oleh K.H. Ridhwan dan kawan-kawannya. Mereka semuanya lalu mempersatukan diri dalam sebuah ikatan "Perguruan Nahdhatul Wathan". Meskipun bagian-bagian ulamanya tetap dipegang langsung oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah, dibantu oleh K.H. Alwi Abdul Aziz. Kemudian di Malang muncul pula gerakan "Nahdhatul Wathan di bawah pimpinan K.H. Abdul Halim dan juga di Semarang oleh K.H. Ridwan dan kawan-kawannya. Mereka semuanya lalu mempersatukan diri dalam sebuah ikatan "Perguruan Nahdhatul Wathan". Meskipun demikian bagian-bagian ulamanya tetap dipegang langsung oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah, dibantu oleh K.H. Alwi Abdul Aziz, K.R. Ridwan (pencipta lambang NU), K. Abdullah, Ubaid, K.H. Nachrowi dan K.H. Abdul Halim. Sedangkan "Nahdhatul Wathan" dipimpin oleh K.H. Abdul Kahar Alwan.

Sejak tahun 1924, K.H. Abdul Wahab Hasbullah mengadakan kursus-kursus agama, yang dihadiri oleh banyak calon Kyai, di antaranya yang kerap kali muncul ialah K.H. Chalil Masjhuri dari Seditan, Lasem. Dalam kursus-kursus itu para pemuda mendapat penerangan tentang kewajiban ummat Islam dan tentang kewajiban meluaskan pengetahuan agama, terutama dalam empat mazhab, yang banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Dari para pengikut kemudian timbul minat yang keras untuk mengadakan suatu ikatan persatuan yang tetap dengan mengadakan pertemuan murid-murid dari dua guru besar di Surabaya, yaitu K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur. Demikianlah dengan dihadiri kedua tokoh tersebut berlangsunglah pertemuan antara dua gerakan massa pemuda, yaitu: 1. *Da'watus Sjubban*, terutama terdiri dari murid-murid yang ingin mempertahankan mazhab dan 2. *Mardisantoso*, terdiri dari pemuda-pemuda *Muhammadiyah*. Tetapi pertemuan itu ternyata tidak membawa hasil yang diidamkan persatuan ummat Islam.

K.H. Abdul Wahab Hasbullah, selain aktif dalam gerakan Pemuda, juga giat dalam "*Islam Studie Club*" yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Memang kota Surabaya pada waktu itu sedang timbul gerakan-gerakan untuk mempersatukan ummat Islam dengan ikatan agama, di samping itu timbul pula perdebatan perihal masalah "chilafiah" (perbedaan) dalam Islam, mengenai bidang

"tauchid" dan "fiqih". Juga K.H. Abdul Wahab Hasbullah giat berdebat dengan Sjurkati dari Gerakan "Al-Irsjat" dan dengan H. Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah.(218) Bahkan soal "chilafiah" itu pernah pula perdebatkan dalam Kongres "Al-Islam" di Cirebon.

Setelah Kongres Nasional CSI ke VI di Surabaya (1921) menetapkan disiplin partai untuk PKI, maka banyak anggota SI pengikut Semaun yang memisahkan diri dari induknya. Untuk menyusun kekuatan Sarekat Islam, maka H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim cs. berusaha menggalang persatuan ummat Islam dengan ikatan agama, dengan melancarkan Pan-Islamisme. Maksudnya ialah untuk mencari hubungan internasional dan menghimpun segala kekuatan Islam yang ada di Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1921 diadakan Konggres Al-Islam yang pertama di Cirebon di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto dan H. Agus Salim dengan maksud mengurangi perselisihan tentang soal-soal '*furu*' (cabang) dan '*chilafiah*' (perbedaan). Di situ mereka mencari jalan bagaimana mewujudkan persatuan aliran dan kerjasama di antara kaum Muslimin. Kongres tersebut kemudian diikuti dengan Konggres Al-Islam ke II di Garut (1922) di bawah pimpinan H. Agus Salim dan Pengurus Besar Muhammadiyah. Di situ ditegaskan pentingnya persatuan kaum Muslimin dan pentingnya bekerjasama untuk menyelesaikan masalah khafilah, yang pada waktu itu menjadi problim bagi seluruh ummat Islam. (219)

Demikianlah, pada waktu itu dunia Islam digemparkan oleh tindakan Mustafa Kemal Pasja yang menghapuskan kedudukan "khalifah" di Turki. Tindakan Kemal Pasja itu menimbulkan problim yang menarik bagi para "Ulama Azhar" di Kairo (Mesir), sehingga mereka memandang perlu adanya suatu Konggres (Muktamar) Dunia Islam di Kairo, yang membicarakan soal Khalifah tersebut. Segera undangan disampaikan ke seluruh Dunia Islam. Untuk menanggapi undangan Para "Ulama Azhar" itu, maka di Surabaya lalu diadakan Konggres Al-Islam luar biasa (24-26 Desember 1924), yang dihadiri lebih kurang 1000 orang Islam, terdiri dari sebagian besar kalangan SI, Muhammadiyah dan kumpulan-kumpulan Islam lainnya. Di situ ditentukan berdirinya "Centraal Comite Chilafat" di Surabaya, dengan beranggotakan berpuluh-puluh organisasi Islam dan W. Wondosudirdjo (= W. Wondoiseno) sebagai ketuanya. Di samping itu disebut-sebut pula, bahwa para calon yang akan dikirim ke Muktamar di Kairo ialah: H.O.S. Tjokroaminoto (CSI), Sjech Ahmad Surkati (Al-Irsjat),

H. Fachruddin (anggota Pengurus Besar Muhammadiyah), Pengurus Besar CSI, Surjopranoto (PSI) dan K.H. Abdul Wahab Abdullah (Ketua perkumpulan Islam Surabaya). Menurut keputusan kongres tersebut khalifah harus dipegang oleh suatu "Majelis Ulama" di Makkah. Namun karena keadaan tidak mengijinkan maka Muktamar Khalifah di Kairo dibatalkan.(220)

Pada tahun 1925 sekali lagi Dunia Islam digemparkan dengan berhasilnya Ibnu Sa'ud menguasai kota Makkah, sehingga dapat mempersatukan Jazirah Arab di bawah kekuasaannya. Ibnu Sa'ud yang beraliran Salaf itu kemudian menyampaikan undangan kepada seluruh pemimpin Islam, untuk menghadiri Kongres (Muktamar) "*Alam Islami*" di Makkah tanggal 1 Juni 1926, guna mencari kata sepakat dari seluruh Dunia Islam tentang tanah Hejaz.

Undang Ibnu Sa'ud tersebut kemudian disambut dengan adanya Kongres Al-Islam ke VI di Surabaya (1926), yang memutuskan bahwa H.O.S. Tjokroaminoto (PSI) dan K.H. Mas Mansur menjadi utusan ke Makkah dan "Central Comite Chila-fat" diubah menjadi *Muktamar Alam Islami Far'ul Hindis Sjarqiah*" (MAIHS) atau Kongres Islam sedunia cabang Hindia Timur". 221) Sedangkan bagi K.H. Abdul Wahab Hasbullah kemudian membentuk panitia khusus, yang dinamakan "Komite Hidjaz".

Komite Hidjaz (di Surabaya) inilah yang menjadi pokok pangkal berdirinya Perkumpulan Ulama. Surabaya menjadi tempat pengolah perkumpulan baru ini, dan tokoh utamanya antara lain, K.H. Hasjim Asj'ari dari Tebuireng (Jombang), K. Bisjri dari Denanyar (Jombang), Ridhwan dari Semarang, Nawawi dari Pasuruan, Asnawi dari Kudus, Nachrowi dari Malang, Cholil dari Bangkalan & lain-lain. Komite Hidjaz tersebut kemudian mengambil dua keputusan penting:

- a. Mengirimkan perutusan ulama Indonesia ke Kongres Dunia Islam di Makkah, dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum ibadah dalam empat mazhab.
- b. Membentuk suatu organisasi atau Jam'iyah, yang akan mengirim utusan itu.

Atas usul K.H. Alwi Abdul Aziz organisasi baru tersebut kemudian diberi nama "*Djam'iyah Nahdhatul Ulama*", yang berdiri di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijrah atau 31 Januari 1926. Hari itu juga dibentuk pengurus yang terdiri dari dua badan, yaitu: *Badan Sjuritah* dan *Badan Tanfidziah*. Pengurus

Sjurijah, diketuai oleh K.H. Hasjim Asj'ari dengan gelar Raisul Akbar, wakil ketuanya K.H. Dahlan dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Sekretaris atau Katib. Badan ini terdiri dari para ulama yang terkemuka. Sedangkan pengurus Tanfidziah, terdiri dari Ketua: H. Hasan Dipo dan M. Sidik sebagai Penulis. Sebagai utusan yang dikirim ke Mekkah ditentukan K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan Sjech Ahmad Gena'im Al Amir Al Misri. Mereka diangkat sebagai utusan yang membawa tugas untuk menyampaikan keputusan-keputusan mengenai ibadah dan pengajian, serta tindakan untuk mencegah pemerintah Saudi Arabia dalam pengrusakan terhadap kuburan dari Keluarga Nabi Muhammad dan Maqam Imam Empat di sekitar Ka'bah. Pemerintah Wahabi di Saudi Arabia, dengan sendirinya menjamin kebebasan ummat Islam untuk menjalankan ibadatnya, menurut mazhabnya masing-masing, dan menyatakan hal itu dalam suratnya no.2082 tanggal 13 Juni 1928 kepada Pengurus Besar NU.

Adapun Anggaran Dasar organisasi Nahdhatul Ulama itu baru disahkan dengan keputusan Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 6 Pebruari 1930 No.23. Di situ dijelaskan antara lain: Maksud perkumpulan ini ialah memegang teguh pada salah satu dari Mazhabnya Imam Empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris As-Sjafi'ie, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanafiah dan N'man atau Imam Ahmad ibn Hambal; dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam''.

Para peninjau sejarah melihat, bahwa NU tersebut berpraktek menurut ajaran Imam As-Safi'ie, sedang dalam anggaran dasar pada hari-hari pertama tercantum sebagai aliran pokok berpegang kepada Mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kegiatannya ditujukan kepada mengembangkan agama Islam dengan memperbaiki tabligh-tabligh, pendidikan, agar ummat Islam sadar kembali akan kewajibannya terhadap agama, bangsa dan tanah air, sehingga mereka dapat beramal sebagaimana mestinya. Dalam kesadaran nasional, NU tidak ketinggalan dengan kawan-kawannya, akan kesadaran terhadap kemerdekaan tanah-airnya. Perbaikan-perbaikan dalam hal bahasa Indonesia dan penggunaannya dalam kongres selalu diusahakan setapak demi setapak; juga menyokong tuntutan agar Indonesia mempunyai Parlemen. (222)

#### 10. *Gerakan Wanita*

Tentang pergerakan wanita pada umumnya, ada Sarjana (Ir.

Sukarno) yang telah mengemukakan adanya tiga tahap perkembangan. Tahap pertama dimulainya dengan Pergerakan "Keperempuanan", yang kemudian meningkat menjadi Pergerakan Feminisme dan akhirnya menjadi Pergerakan Sosialisme.

Dalam tingkat ke satu, kaum wanita mulai mengadakan persekrikatan-perserikatan atau *club-club*, yang anggotanya rata-rata dari kalangan kaum wanita atasan. Tujuan serta usahanya ialah untuk memperhatikan *kerumah-tangga*n, maka dari itu soal-soal ilmu masak, ilmu menjahit, ilmu memelihara anak, ilmu bergaul, ilmu kecantikan, ilmu estetik dan lain sebagainya, menjadi lapangan usahanya. *Club-club* itu hanyalah satu "kesukaan" atau suatu "pengisi waktu nganggur", yang sebenarnya kurang tepat kalau kegiatannya disebut dengan istilah "pergerakan." Di situ perbandingan hak antara laki-laki dan perempuan pun tidak disinggunginya. Hal itu baru dibicarakan setelah muncul Pergerakan Feminisme atau pergerakan tingkat kedua. Pergerakan Fenimisme itu memperjuangkan persamaan hak dengan kaum laki-laki. Programnya yang terpenting ialah hak untuk melakukan pekerjaan dan hak pemilihan. Aksi wanita Feminis berjalan melawan laki-laki. Tetapi setelah Pergerakan wanita meningkat ke taraf yang ketiga atau Pergerakan Sosialisme, maka aksi wanita sosialis itu berjalan bersama-sama dengan laki-laki. Dalam Pergerakan Sosialisme itu wanita dan laki-laki bersama-sama berjuang bahu-membahu, untuk mendatangkan masyarakat sosialis, dalam mana wanita dan laki-laki sama-sama sejahtera dan sama-sama merdeka. (223)

Adapun Pergerakan Wanita di Indonesia sejalan dengan munculnya kesadaran nasional, dimulai dengan masa Pergerakan Feminisme Namun Pergerakan Feminisme di Indonesia tidak sama dengan Pergerakan feminisme di Dunia Barat. Pergerakan Feminisme Barat, tujuan utamanya ialah menentang kaum laki-laki untuk mendapatkan kemajuan dengan menuntut hak-hak kaum wanita. Misalnya, gerakan kaum wanita untuk menuntut hak memilih di Inggris. Sedangkan di Indonesia pergerakan wanita dimulai dengan perjuangan untuk mempertinggi kedudukan sosial dan derajat kaum wanita dengan jalan memajukan pendidikan. Yang mereka tentang bukanlah kaum laki - laki, tetapi adat - istiadat yang membelenggu kebebasan wanita dan yang merendahkan derajat kaum wanita. Pergerakan wanita di Indonesia dalam permulaannya adalah gerakan orang seorang, sebagai aksi dari beberapa

orang perempuan sendiri-sendiri, yang kemudian meningkat dengan munculnya organisasi-organisasi kaum wanita atas bantuan atau menjadi bagian dari organisasi-organisasi kaum laki-laki. Pergerakan wanita inilah yang menjadi salah satu dasar kebangkitan perasaan nasional, persatuan, kesadaran nasional dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang; sehingga pada akhirnya situasi pergerakan wanita telah cukup masak untuk ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. (224)

Demikianlah pada permulaan tahun 1900 di Indonesia telah dimulai pergerakan wanita secara perseorangan yang dirintis oleh RA. Kartini, yang telah membuka "Sekolah Gadis" di Jepara (1903) dan di Rembang (1904). Kemudian disusul oleh wanita Sunda Rd. Dewi Sartika, yang telah mendirikan sekolah gadis di Bandung dengan nama "Sekolah Istri" pada tahun 1904 (Tahun 1914 nama sekolahannya diganti dengan "Sekolah Kautamaan Istri"), dan selanjutnya muncul pula tokoh wanita Sumatra Barat, Rohana Kuddus, yang mendirikan sekolah gadis di Kota Gedang dengan nama "Kerajinan Amai Satia". (1905); dan akhirnya di Minahasa muncul pula tokoh wanita Walandouw Maramis. Tokoh-tokoh gerakan wanita tersebut telah menyadari betapa beratnya penderitaan dan kungkungan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu terhadap dunia kaum wanita, maka dari itu mereka lalu bercita-cita untuk memajukan dan memerdekakan kaum wanita dari belenggu adat istiadat yang merendahkan derajat kaum wanita. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuhnya pada waktu itu ialah dengan memperbanyak sekolah gadis, karena dengan memiliki pengetahuan "vak" para gadis dapat membebaskan diri dari ketergantungan hidupnya dari kaum laki-laki. (225)

Dalam sejarah Pergerakan Wanita Indonesia R.A. Kartini telah dianggap sebagai perintis emansipasi wanita. Cita-cita dan kritik-kritiknya yang tajam terhadap keadaan wanita pada waktu itu telah dituliskannya dengan penuh energi dan emosi, berupa surat-surat kepada teman-temannya di Negeri Belanda, ternyata dapat membuka mata dan hati rakyat Hindia Belanda (Indonesia) dan rakyat luar negeri tentang keadaan rakyat Hindia Belanda pada umumnya dan kedudukan wanita pada khususnya. Surat-surat R.A. Kartini tersebut telah dibukukan oleh Mr. J.A. Abendanon dengan judul "*Door Duisternis Tot Licht*" (1911) dan telah diterjemahkan oleh Armijn Pane dengan judul "Habis Gelap Terbitlah

Terang" (1922) serta telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Agnes Louise Symmers dengan judul ("*Letters of a Javanese Princess Raden Adjeng Kartini.*") (226)

Dari isi surat-surat tersebut nampak dengan jelas, bahwa R.A. Kartini secara perseorangan telah menyatakan cita-cita yang berdasarkan kesadaran kebangsaan (*Nationaal bewustzijn*). (227)

Cita-cita R.A. Kartini itu kemudian disebar-luaskan oleh adik-adiknya (Rukmini, Kartinah dan Sumatri) dengan jalan antara lain mengedarkan surat edaran dengan semboyan "*Java Voo-ruit*" (Jawa Maju) th. 1904). Disarankan dalam surat siaran itu, agar supaya kaum wanita mendirikan perkumpulan atas kekuatan sendiri dan hendaknya menerbitkan "*Majalah*" sebagai gelanggang perjuangan untuk tugas suci, yaitu : "*Mengangkat derajat Bangsa*". (228)

Sedangkan untuk menghormat cita-cita R.A. Kartini sejak tahun 1913 muncul badan-badan yang mendirikan sekolah-sekolah "*Kartini*" di kota-kota besar, seperti: di Jakarta (1913), di Madiun (1914), di Malang (1916), di Cirebon, di Pekalongan (1917), di Indramayu (1918), di Surabaya, di Rembang dan lain sebagainya. (229)

Demikian juga antara tahun 1912 dan 1915 muncul beberapa perkumpulan kaum wanita, seperti : "*Putri Merdika*" (didirikan atas bantuan organisasi laki-laki Budi Utomo tahun 1912 di Jakarta), "*Keutamaan Istri* (di Bandung tahun 1914), "*Pawijatan Wanita*" di Magelang (1915), "*Wanita Hadi*" di Jepara (1915) dan lain sebagainya. Dan sesudah tahun 1920 muncullah perkumpulan-perkumpulan wanita yang menjadi bagian dari organisasi laki-laki, seperti : "*Aisjiah*" (bagian wanita dari Muhammadiyah), "*Wanudijo Utomo*" (bagian wanita dari Sarekat Islam), "*Ina Tuni*" (bagian wanita dari Sarekat Ambon), "*Putri Indonesia* (bagian wanita "*Jong Java*"). Di samping itu para wanita terpelajar, juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan wanita, antara lain : "*Wanita Utomo*", "*Wanita Muljo*", "*Wanita Katolik*" (kesemuanya di Jogja tahun 1920) dan di *Surabaya* muncullah perkumpulan "*Putri Budi Sedjati*".

Dalam konperensinya yang pertama (Januari 1937), ketua "*Putri Budi Sedjati*", yaitu Nyonya Sudirman, telah menjelaskan bahwa organisasi "*Putri Budi Sedjati*" yang berpusat di Surabaya itu tidak turut dalam lapangan politik, tetapi memberi kelonggaran

kepada para anggotanya untuk ikut bergerak di kalangan politik. Putusan ini diambil dengan alasan, bahwa kaum istri berkewajiban membantu kaum laki-laki dalam usaha-usaha kerja politik. Sedangkan cita-cita "Putri Budi Sedjati" itu ialah mempertinggi derajat kaum wanita Indonesia, yang didasarkan kepada cita-cita kebangsaan. "Putri Budi Sedjati" tidak membedakan agama, karena agama menurut pendapatnya adalah terlalu suci untuk dimasukkan dalam pergerakan dan dijadikan dasar. Kegiatannya ditujukan ke arah usaha mendirikan badan-badan sosial, seperti: pengumpulan dana, pakaian-pakaian, pemeliharaan orang miskin, kursus-kursus dan lain sebagainya. Di lapangan pengajaran, "Putri Budi Sejati" pernah mendirikan "Sekolah-sekolah Siang" dan "Sekolah-sekolah dengan asrama", dengan bantuan dari *Indonesische Studie-club* yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Selain dari pada itu, "Putri Budi Sedjati" juga turut dalam pemberantasan buta huruf di kalangan kaum wanita. Ia berusaha menyadarkan kaum wanita apa arti kedudukannya dalam masyarakat. Yang hendak dicapainya ialah bahwa kaum wanita Indonesia menjadi sadar akan arti "menjadi-Perempuan" dan ia bercita-cita agar kehidupan wanita bersamaan dengan kedudukan laki-laki. (230).

Ketika kaum wanita mengadakan Konggres Perempuan Indonesia ke I (22-25 Desember 1928) di Yogyakarta, "Putri Budi Sedjati" juga mengirimkan utusannya. Nyonya Sudirman, sebagai utusan dari "Putri Budi Sedjati", telah mengucapkan pidato yang membahas soal "Penghargaan dan nasib kaum wanita". Di situ ia telah menjelaskan, bahwa kaum wanita Bumi Putra harus berusaha dan mempertimbangkan masalah-masalah dewasa itu. Mereka seyogyanya menyesuaikan diri dengan masyarakat yang telah berubah dan mengesampingkan kebiasaan-kebiasaan yang kolot dan yang tidak terpakai lagi. Tentang perkawinan dan perceraian dikatakannya, bahwa kaum wanita dalam masyarakat Bumi Putra masih memegang peranan yang terhina. Wanita tidak mempunyai hak untuk ikut serta berbicara, ia dibeli, dikawinkan dan dicerai. Agar supaya hal itu semua mendapat perubahan sebaik-baiknya, maka kaum wanita Bumi Putra haruslah bangkit untuk mengangkat diri sendiri. Mereka harus tahu akan dirinya, percaya kepada diri sendiri dan memiliki harga diri, maka dari itu mula pertama mereka harus mendapatkan pengakuan mencari kepercayaan dan mendapatkan penghargaan yang layak. (231)

Dalam kongresnya bulan Desember 1938 oleh "Putri Budi Sedjati" pernah diambil dua mosi tentang hal pengajaran. Mosi yang pertama menerangkan, bahwa pengajaran pada waktu itu jauh dari mencukupi, maka dari itu ia mendesak kepada Pemerintah agar supaya banyaknya sekolahan disandarkan kepada kebutuhan, dan agar supaya usaha partikular untuk memberantas buta huruf diberi kesempatan yang leluasa, jangan dihalang-halangi, bahkan dibantu oleh Pemerintah.

Mosi yang kedua, menganjurkan didirikannya taman kanak-kanak nasional, dan mengharap bahwa kaum wanita pada umumnya dan anggota Putri Budi Sedjati khususnya, mencurahkan perhatian sepenuhnya terhadap pendidikan dan pergerakan pemuda. (232)

### 11. *Partai Nasional Indonesia*

Setelah para pelajar STOVIA, pada tahun 1908 (20 Mei), mendirikan organisasi Budi Utomo di Jakarta, maka pada tahun itu juga (bulan September ?) para pelajar Bumi-Putra dari berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi yang berada di Negeri Belanda mendirikan organisasi "*Indische Vereeniging*". Perkumpulan ini semula bergerak di bidang sosial budaya dan majalah "Hindia Poetra" sebagai gelanggang pencetusan idee-ideenya. Tetapi setelah "Tiga Serangkai" bekas tokoh pimpinan "*Indische Partij*" R.M. Suwardi Surjaningrat, Tjipto Mangunkusumo dan E.F.E. Douwes Dekker), pada tahun 1913, berada di Negeri Belanda, maka dengan lambat tetapi pasti unsur politik mulai menyelinap ke dalam organisasi itu. Walaupun demikian, pada waktu itu, prinsip kerjasama dengan bangsa penjajah masih menjadi dasar politik "*Indische Vereeniging*". Hal itu terbukti, bahwa pada tahun 1917 muncul federasi antara organisasi-organisasi pelajar Bumiputra (*Indische Vereeniging*), pelajar Cina (*Chung Hua Hui*) dan pelajar Belanda (*Indologen Vereeniging*, *Cadetten-Vereeniging* dan *Adelborsten-Vereeniging*) yang berada di Negeri Belanda, dengan nama "*Indonesische Verbond Studerenden*". Secara jujur dan ikhlas mereka mengadakan ikrar untuk bekerja sama. Namun di dalam Federasi itu sudah ada benih perpecahan karena masing-masing perkumpulan yang tergabung dalam Federasi itu, mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. (233) Karena kecewa oleh hasil-hasil negatif daripada "Kerjasama" tersebut, maka

muncul kepercayaan pada diri sendiri pada "*Indische Vereeniging*". Namanya juga kemudian diubah menjadi "*Indonesische Vereeniging*". (1922) dan sebagai konsekwensinya nama majalahnya "*Hindia Poetra*" juga diubah menjadi "Indonesia Merdeka". Akhirnya, pada tahun 1923, *Indonesische Vereeniging* keluar dari "*Verbond*" tersebut dan tak lama kemudian *Verbond* itu dibubarkan.

Kepercayaan atas diri sendiri semakin mantap, setelah janji Gubernur-Jenderal Graaf van Limburg Stirum pada bulan November 1918 di muka sidang *Volksraad*, tidak ditepati. Dari kekosongan janji itu dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa dalam politik kolonial secara praktis tak ada istilah untuk gagasan "Indonesia lepas dari Holland". Kenyataan-kenyataan inilah yang mendorong "*Indonesische Vereeniging*" untuk menerima prinsip *non-cooperation* (prinsip non-koperasi), mengubah haluan dan yang kemudian mengubah namanya menjadi "Perhimpunan Indonesia" (1924).

Pada tahun 1924, Perhimpunan Indonesia telah mengungkapkkan "Deklarasi Prinsip" daripada kepengurusan, yang pada dasarnya memandang perlu prinsip *persatuan dan solidaritas Indonesia* sebagai landasan perjuangan dalam suatu persiapan menuju kemerdekaan politik. Deklarasi Prinsip tersebut pada tahun 1925 dilengkapi oleh Pengurus Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wirjosandjojo dengan prinsip "non-koperasi" dan prinsip *sel help* dan yang kemudian terkenal sebagai "*Statement-Sukiman* atau "program-prinsip" gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan.

Oleh karena Perhimpunan Indonesia jauh dari Tanah Air (Indonesia) dan terutama sekali suatu organisasi mahasiswa, maka sifat pekerjaannya adalah *mempersiapkan*. Tugasnya yang utama ialah menentukan dan mempropagandakan prinsip-prinsip nasional yang diperolehnya dengan analisa daripada sistem kolonial. Sedangkan yang mengalihkan prinsip-prinsip ini ke dalam tindakan-tindakan adalah tugas organisasi-organisasi yang berada di Indonesia. Agar supaya prinsip-prinsip dapat dialihkan menjadi tindakan, maka Perhimpunan Indonesia berpendapat bahwa adalah perlu untuk menggairahkan terbentuknya suatu *Partai Rakyat Nasional Indonesia* yang berdiri atas dasar nasionalisme murni. (234)

Dalam rangka penyebaran bibit prinsip-prinsip nasionalnya, di samping Perhimpunan Indonesia menyebar-luaskan majalah "Indonesia Merdeka", juga para anggotanya yang telah pulang kembali ke Indonesia secara aktif mempropagandakan prinsip-prinsip tersebut kepada para anggota organisasi-organisasi pergerakan yang telah ada atau pun mendirikan organisasi baru. Demikianlah Dr. Sutomo, bekas ketua *Indonesische Vereeniging* (1921-1922), pada bulan Juli 1924 telah mendirikan perkumpulan *Indonesische Studieclub* di Surabaya, dengan majalah "Suluh Indonesia" sebagai gelanggang pencetusan idee-ideenya. Dengan mengikuti jejak munculnya *Indonesische Studieclub* Surabaya, maka kemudian muncul pula perkumpulan *Algemeene Studieclub* di kota Bandung, dengan majalah "Indonesia Muda" sebagai pelengkapanya.

*Algemeene Studieclub* didirikan oleh Ir. Sukarno beserta lima orang Bumiputra lainnya, pada tahun 1925 di Bandung. Anggotanya sebagian besar terdiri dari orang-orang bekas anggota Perhimpunan Indonesia, maka dari itu tidak mengherankan kalau sikap *Studieclub* Bandung ini sama dengan sikap Perhimpunan Indonesia, yang pusatnya berada di Negeri Belanda. Berbeda dengan sepak terjang *Studieclub* Surabaya yang telah memusatkan tenaganya di lapangan sosial, maka *Studieclub* Bandung ini sejak semula sudah mengarahkan haluannya ke lapangan politik. Begitu pula kalau pada mulanya *Studieclub* Surabaya bersikap "koperasi" terhadap pemerintahan kolonial, maka *Studieclub* Bandung bersikap "non-koperasi". Walaupun *Studieclub-studieclub* itu berbeda-beda, namun ada satu persamaan yang mendasarinya yaitu "adanya kesadaran atas persatuan Indonesia dan tujuan kepada kemerdekaan". (235) Akibatnya, pada tahun 1926 majalahnya *Studieclub* Surabaya yang bersama "Soeloeh Indonesia", digabungkan menjadi satu dengan majalah *Studieclub* Bandung yang bernama: "Indonesia Moeda". Dari gabungan kedua majalah itu lahirlah "Soeloeh Indonesia Moeda", yang diasuh bersama oleh Ir. Sukarno dan Dr. Sutomo. Dengan tindakan ini maka bersatulah ke-moderatannya *Studieclub* Surabaya dan ke-radikalannya *Studieclub* Bandung. (236) Tindakan yang demikian itu merupakan salah satu realisasi dari prinsip-prinsip nasional Perhimpunan Indonesia. Untuk realisasi lebih lanjut, Perhimpunan Indonesia pernah menginginkan adanya Partai Rakyat Nasional Indonesia, kesempatan untuk mendirikan organisasi semacam itu baru ada

setelah organisasi PKI, sebagai akibat pemberontakannya bulan Nopember 1926 dan Januari 1927, dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Pemerintah Kolonial.

Demikianlah, setelah pada tahun 1927 PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, rakyat umum dari Sarekat Rakyat yang oleh fihak PKI dipandang sebagai borjuis kecil dan perintang PKI, memerlukan pimpinan baru. Akibatnya, dirasakan perlu akan adanya suatu wadah baru untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi rakyat yang tidak mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang telah ada pada waktu itu. Sejalan dengan hal itu politik kolonial pemerintah Belanda yang reaksioner dan tumbuhnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah memberi jalan ke arah terbentuknya suatu gerakan yang bercorak nasional murni dan bersifat radikal. (237)

Dalam bulan Juli 1927, suatu rapat *Algemeene Studieclub* yang dihadiri oleh Ir. Sukarno, Mr. Iskaq Tjokrohadi-surjo, Tjipto Mangunkusumo, Mr. Budiarto dan Mr. Sunario, telah membentuk suatu "Komite Persiapan" untuk mendirikan suatu Partai Nasional Revolusioner". Setelah "Komite" tersebut bekerja, maka pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung berdirilah organisasi politik "Perserikatan Nasional Indonesia". Yang duduk sebagai pengurus sementara ialah: Ir. Sukarno sebagai Ketuanya, Mr. Iskaq Tjokrohadi-surjo sebagai Sekretaris merangkap Bendaharawan dan Dr. Samsi Sastrowidagdo sebagai Komisaris. Pemimpin lainnya yang terkemuka antara lain: Mr. Budiarto, Mr. Sartono, Mr. Sunarjo dan Ir. Anwari (juga Dr. Tjipto Mangunkusumo). (238)

Lima di antara delapan orang pengurus tersebut di atas adalah orang-orang bekas anggota Perhimpunan Indonesia di Nederland, maka dari itu tidaklah mengherankan bahwa PNI yang baru didirikan itu merupakan kelanjutan dan pelaksanaan cita-cita yang disebarkan serta dihidupkan oleh Perhimpunan Indonesia. Akibatnya, dengan tegas PNI menyatakan dalam program asasnya bahwa tujuan PNI ialah untuk mencapai Indonesia Merdeka. Disebutkan sebagai asas dari perkumpulan ini, pertama *self-help* (prinsip untuk menolong diri sendiri) kedua *non-cooperation* (non-koperasi) dan ketiga asas *Marhenisme*. Yang dapat menjadi anggota PNI adalah semua orang Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berumur 18 tahun. Orang-orang Asia lainnya dapat juga menjadi anggota PNI tetapi hanya sebagai anggota luarbiasa.

Program asas dan daftar usaha (*Begindel - en werkprogram*) PNI semacam itu telah disusun dalam rapat PNI di Bandung (24-26 Maret 1928), yang kemudian disahkan pada Konggres PNI I di Surabaya (27-30 Mei 1928). (239)

Dalam Konggres PNI yang pertama di Surabaya itu, Ir. Sukarno sebagai ketua telah menerangkan bahwa sebelum membangun "Negara Nasional" terlebih dahulu haruslah dicapai "Kemerdekaan Politik". Caranya ialah dengan memadu semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional dengan memperdalam keinsyafan rakyat dengan mengarahkan pada gerakan rakyat yang sadar. Untuk memperoleh pergerakan yang sadar, maka perkumpulan perlu mempunyai asas dan tujuan yang terang dan tegas, perlu mempunyai teori nasionalisme yang radikal yang dapat menimbulkan kemauan yang satu, kemauan nasional. Bila kemauan nasional cukup tersebar dan masuk secara mendalam di hati sanubari rakyat, maka kemauan nasional ini menjadi satu perbuatan nasional. Inilah yang disebut trilogi: *nationale geest - nationale wil - nationale daad*. Dalam konggres itu ditetapkan pula bahwa nama organisasi "perserikatan Nasional Indonesia" diganti dengan nama "Partai Nasional Indonesia" dan PNI akan mengeluarkan majalah "Persatuan Indonesia" di bawah pimpinan Ir. Sukarno dan Mr. Sunario, Konggres yang dihadiri oleh kira-kira 1000 atau 1500 orang dari wakil-wakil organisasi pergerakan itu kemudian telah memilih Ir. Sukarno sebagai Ketua Pengurus Besar PNI dan Mr. Sartono sebagai Bendaharanya. (240) Dalam Konggres PNI yang pertama di Surabaya itu dijelaskan pula program usaha-usaha perbaikan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Di bidang politik usahanya:

- 1). Memperkuat perasaan kebangsaan dan persatuan Indonesia,
- 2). Menyebarkan pengetahuan tentang sejarah nasional,
- 3). Mempererat hubungan antara bangsa-bangsa di Asia,
- 4). Menuntut kemerdekaan pers dan kemerdekaan berserikat.

Di bidang ekonomi usahanya: 1). Mencapai perekonomian nasional, 2). Menyokong perdagangan dan perindustrian nasional, 3). Mendirikan fonds nasional dan koperasi-koperasi. Di bidang sosial akan berusaha: 1). Memajukan pengajaran nasional, 2). Memperbaiki kedudukan wanita, 3). Memajukan sarikat-sarikat buruh dan tani, 4). Memperbaiki kesehatan rakyat, 5). Menganjurkan monogami. (241).

Adapun dua macam tindakan yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat. ke dalam mengadakan usaha-usaha terhadap dan untuk lingkungan sendiri, misalnya: mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, bank-bank dan sebagainya. Keluar, PNI memperkuat "publik opini" terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat-surat kabar ("Banteng Priangan" di Bandung, "Persatuan Indonesia" di Jakarta). Kegiatan PNI yang demikian itu dengan cepat dapat menarik masa, sehingga sangat mencemaskan pemerintah kolonial. Akibatnya, Gubernur Jenderal dalam pidato pembukaan sidang *Volksraad* tanggal 15 Mei 1928, memandang perlu memberikan peringatan kepada para pemimpin PNI menahan diri di dalam ucapannya, propogandanya dan lain sebagainya. Walaupun ada peringatan dari Gubernur Jenderal, nyatanya cabang-cabang PNI tumbuh di seluruh Indonesia. Muncullah tujuh cabang pertama yang di Bandung, Jakarta, Jogjarta, *Surabaya*, *Malang*, Pekalongan dan Palembang. (242) Adapun tokoh-tokoh PNI cabang Surabaya yang terkenal pada waktu itu antara lain ialah: Sidik Djojokusarto, Ongko A, Ir. Anwari, Doel Arnowo. (243) Antara PNI dengan *Indonesische Studieclub* (di Surabaya) rupanya telah timbul pertalian yang erat. Acapkali Ir. Sukarno datang berpidato ke Surabaya. Akibatnya, situasi kota Surabaya menjadi hangat, sehingga para polisi kolonial mempunyai alasan untuk mengadakan penggeledahan di rumah-rumah para pemimpin "Sarekat Kaum Buruh" di Surabaya, dan orang di antara mereka ditangkap dan ditahan. (244) Penggeledahan rumah-rumah dan penangkapan para pemimpin PNI oleh pemerintah kolonial kemudian dilakukan pula pada tanggal 29 Desember 1929. Berdasarkan kabar yang bersifat Profokatif, yang mendesas-desuskan bahwa PNI akan menimbulkan pemberontakan pada awal tahun 1930, maka empat orang pemimpin PNI Pusat (Ir. Sukarno, Gatot Mangkupradja, Maskun dan Surjadinata) ditangkap oleh pemerintah kolonial. Setelah mereka dihadapkan kemuka hakim kolonial, mereka dijatuhi hukuman penjara dan secara tidak langsung PNI dinyatakan sebagai perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. Karena pemimpin PNI pada waktu itu, Mr. Sartono, beranggapan bahwa kelangsungan hidup PNI akan membahayakan bagi para anggotanya, maka pada bulan April 1931, organisasi tersebut dibubarkan. Tentang pembubaran PNI itu ada fihak yang setuju, tetapi

ada pula yang mencela tindakan Pengurus Besar membubarkan PNI itu. Yang setuju dengan pembubaran itu, kemudian dengan pimpinan Mr. Sartono mendirikan partai baru yang diberi nama "Partai Indonesia" (PARTINDO). Sedangkan yang tidak setuju dengan pembubaran PNI itu, dibawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir mendirikan partai baru yang dinamakan "Pendidikan Nasional Indonesia" dengan masih mempertahankan singkatan PNI.

#### D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914-1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD

##### 1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda

Perang Dunia I (Agustus 1914- 11 Nopember 1918) membawa situasi baru di Indonesia. Walaupun dalam Perang tersebut Negeri Belanda bersikap netral, namun Negeri tersebut letaknya di tengah-tengah negara yang sedang berperang satu sama lain dan letaknya pun jauh dari Indonesia, sehingga perhubungan antara Negeri Belanda dan Indonesia sebagai jajahannya sangatlah terganggu. Akibatnya, Pemerintah Hindia Belanda terpaksa dalam banyak hal yang penting mengambil keputusan sendiri. Dengan sendirinya keputusan itu lebih dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di Indonesia.

Baru saja Perang Dunia I meletus, maka sekalian pergerakan kebangsaan, artinya para pemimpinnya, telah dibawa berhadapan dengan soal perhubungan kolonial dalam arti yang sedalam-dalamnya. Meskipun kerajaan Belanda tidak terlibat di dalam pertempuran, namun tak ada seorang pun yang dapat menentukan, apakah keadaan itu esok atau lusa tidak akan berubah. Meskipun apa yang akan terjadi, di negeri ini belumlah ada suatu persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan. Baik tentang soal ketenteraan, maupun tentang soal ekonomi atau ketatanegaraan. Hindia Belanda adalah jauh dari pada siap. Akibatnya, keadaan peperangan tersebut memaksa Pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil sikap kerjasama yang sebaik-baiknya dengan rakyat dan gerakan-gerakan rakyat di Indonesia. (245)

Untuk mengetahui bagaimana sikap rakyat dan gerakan-gerakan rakyat dalam masa yang genting itu, maka pada akhir tahun 1914 Pemerintah Hindia Belanda menyampaikan permintaan kepada pucuk pimpinan Budi Utomo, hendaklah mereka meninjau apakah pertimbangan rakyat dan pemimpin-pemimpin-

nya, sekiranya Pemerintah mengadakan kewajiban kepada rakyat Bumiputra, buat mengadakan memasuki milisi. (246) Demikianlah Budi Utomo kemudian melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dan Budi Utomo pulalah yang pertama kali menyokong gagasan wajib militer Pribumi (= *Inlandsche Militie*). (247) Dalam Konggres di Bandung (5 Agustus 1915), Budi Utomo telah mengakui, bahwa milisi Bumiputra itu harus diadakan, tetapi dengan syarat pula, yaitu: Kewajiban memasuki milisi itu haruslah dilakukan atas sukanya seluruh rakyat, dan guna mengetahui kehendak rakyat, terlebih dahulu hendaknya dibentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang sejati, dan berhak mengeluarkan undang-undang. (248)

Pendirian Budi Utomo tersebut, ternyata disetujui pula oleh Centraal Sarekat Islam (CSI), yang dalam Konggres Nasionalnya yang pertama (Juni 1916 di Bandung) telah menyatakan: "Setuju dengan adanya *Inlandsche Militie*, tetapi dengan syarat bahwa dengan adanya *Inlandsche Militie* itu juga harus didirikan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Konggres itu ketua CSI (HOS. Tjokroaminoto) telah menyerahkan naskah rencana kedudukan suatu Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari pusat sampai ke daerah, menurut ajaran Islam. Dengan demikian, maka sebelum *Volkstraad* terbentuk SI terlebih dahulu sudah mempunyai suatu rancangan yang kongkrit mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang demokratis. (249)

Demikianlah diskusi yang terjadi berturut-turut di kalangan pergerakan rakyat, telah menggeser perhatian rakyat dari soal wajib militer ke arah soal Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam persoalan pertahanan Hindia Belanda telah muncul suatu Dewan Perutusan (=deputasi), yang bernama "*Comite Indie Weerbaar*" dan dipimpin oleh D. van Hinloopen Laberton, seorang penganjur politik "asosiasi", ahli bahasa-bahasa Timur serta pemimpin teosofi yang amat tangkas. Sebagai anggotanya antara lain terdiri dari Abdul Muis (dari SI), Dwidjosewojo (dari Budi Utomo) dan Kapten Rhemrev, seorang peranakan Eropa yang reaksioner. Tugas "*Commite Indie Weerbaar*" untuk menyampaikan petisi kepada Ratu Wilhelmina, yang berisi suatu permohonan agar supaya Indonesia diperkuat, sehingga dapat menahan serangan musuh. Setelah petisi tersebut pada bulan Januari 1917 disampaikan, maka Pemerintah Belanda menolak permohonan tersebut. (250)

Walaupun perjuangan untuk mendapatkan Undang-undang Wajib Militer gagal, namun pada tanggal 16 Desember 1916 rancangan Undang-undang pembentukan *Volksraad* yang dikemukakan oleh Menteri Urusan Daerah Jajahan Belanda, Pleyte, telah diterima dan disahkan oleh Parlemen Belanda. Dengan sendirinya pelaksanaan Undang-undang tersebut berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang pada waktu itu dijabat oleh Graaf van Limburg Stirum (1916-1921).

Ia telah terkenal sebagai tokoh yang bersikap sangat toleran terhadap perkembangan pergerakan rakyat di Indonesia. Terhadap gerakan rakyat, ia berpendapat bahwa gerakan itu sangat dibutuhkan, karena ia berguna untuk "memberi suntikan kepada rakyat, dalam perjuangannya hendak memperbaiki nasib peruntungannya". (251) Oleh karena pandangan yang sangat progresif, utilitarianistis dan memberi kesempatan organisasi hidup dengan sehat dan terbuka, maka ia dapat mengambil hati kaum terpelajar Bumiputra. Akibatnya pada masa itu ada hubungan yang cukup ramah antara pemerintah dengan para pemimpin Bumi-putra. (252).

## 2. *Keadaan Masyarakat (Sosial Ekonomi, Pendidikan, Budaya dan Agama)*

### a. Sosial Ekonomi

Walaupun dalam Perang Dunia I negeri Belanda bersikap netral, namun dalam suasana perang itu hubungan Negeri Belanda dengan Hindia Belanda (=Indonesia) sangat terganggu. Indonesia sebagai negara jajahan yang dalam perekonomiannya sangat tergantung dari Negeri Belanda dan negara-negara lain yang turut berperang, terpaksa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah Hindia Belanda harus mencari pasaran lain di luar negeri ataupun mengurangi produksi barang-barang eksportnya secara sistematis pengurangan tenaga pekerja. Akibatnya pengangguran di kalangan rakyat meningkat. Begitu pula beras hampir tak dapat masuk, karena kekurangan kapal yang akan mengangkutnya dari negara-negara di luar. Harga beras memuncak, upah buruh tinggal rendah, sehingga berjangkitlah kelaparan di Indonesia. (termasuk Jawa Timur).

Untuk mengatasi kekurangan bahan makanan itu Gubernur Jenderal van Limburg Stirum di muka *Volksraad* (18 Mei 1918)

telah mengusulkan untuk mengurangi luasnya kebun-kebun tebu, agar dapat ditanami padi. Namun usul tersebut ditolak oleh *Volksraad*, karena adanya bantahan-bantahan dari para pengusaha gula tersebut: Perseroan Dagang "*Handelsvereniging Amsterdam*" = HVA; yang di Surabaya bekas kantornya di Jl. Siktan 1), "*Suikersyndicaat*" dan "*Bond van eigenaren van Suikerondernemingen in Nederlands-Indie*". 256)

## b. Pendidikan

Di atas telah diterangkan, bahwa dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan dan makin meluasnya urusan administrasi pemerintahan membutuhkan banyak tenaga yang terdidik. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik itu jumlah sekolah yang menghasilkan calon-calon pegawai pangreh-praja, pegawai perusahaan dan di perkebunan harus diperbanyak. Demikianlah pada tahun 1849 di Pasuruan muncul Sekolah Rendah Bumi-putra yang pertamakali di Jawa Timur, di samping sekolah rendah Belanda *Europeesche Lagere School* (ELS). Kemudian pada tahun 1875 di Probolinggo berdiri Sekolah Guru Bumiputra yang pertama kali di Jawa Timur. Dalam tahun dan tempat yang sama berdiri pula sekolah *Hoofdenschool* yang dalam tahun 1900 ditingkatkan dan namanya diganti menjadi OSVIA (= *Opleiding-school voor Inlandse Ambtenaren*). OSVIA adalah sekolah yang mencetak calon pegawai pangreh-praja, yang lama belajarnya 5 tahun dan menerima muridnya dari tamatan "ELS". Pada tahun itu juga (1875) di kota Surabaya muncul sekolah "HBS" (*Hogere Burger School*), yang merupakan sekolah menengah umum yang tertua di Jawa Timur, bahkan tertua di tanah jajahan Hindia Belanda. Sekolah tersebut semula didirikan di gedung *Instituut Buys* di pojok Jalan Balowerti dan Alun-alun Contong (gedung ITS sekarang), kemudian pada tahun 1881 dipindahkan di gedung kediaman ex Bupati Surabaya (Kantor Pos Besar sekarang) dan pada tahun 1923 pindah lagi ke jalan *HBS-straat* atau Jalan Wijayakusuma SMA Negeri sekarang. (257) HBS lama belajarnya 5 tahun dan menerima siswa dari tamatan ELS. Tujuan dari sekolah tersebut ialah terutama untuk mempersiapkan anak-anak, agar supaya mereka langsung dapat diterima di perguruan tinggi di Nederland, atau apabila mereka harus pulang, maka tidak akan mengalami kesulitan untuk meneruskan pela-

jaran mereka di sekolah yang sama di Nederland. (258) Dengan demikian jelaslah, bahwa tujuan utama HBS dikhususkan bagi anak-anak orang Belanda, apabila ada pemuda atau pemudi "pribumi" yang memasukinya itu adalah suatu "kekecualian" (= exception). Ia adalah seorang "pribumi" yang dianggap "luar biasa" oleh masyarakat koloni Belanda maupun oleh masyarakat pribumi. (259) Di samping HBS di kota Surabaya terdapat pula sekolah sore *Burger Avond School*, di mana H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1907 – 1910 pernah belajar di situ. (260)

Demikianlah keadaan pendidikan formal pada waktu itu yang masih mengadakan pembedaan perlakuan antara golongan Eropa dan golongan pribumi atau golongan Bumiputra. Bahkan terhadap golongan Bumiputra diadakan pemisahan dalam pendidikan. Pada tahun 1893 sekolah rendah Bumiputra dipecah menjadi dua, yaitu: Sekolah Bumiputra Klas I, untuk para anak bangsawan dan orang-orang terkemuka (= Pajabat Tinggi); dan sekolah Bumiputra Klas II, untuk para anak rakyat biasa. Sedangkan untuk orang Desa baru pada tahun 1907 diadakan "Sekolah Desa" (*Volkschool*) (lama belajarnya 3 tahun) yang kelanjutan sekolahnya baru muncul tahun 1915 dengan nama *Vervolgschool* (2 tahun). Selanjutnya perlu pula dikemukakan di sini, walaupun banyak tantangan dari perikatan kaum dokter bangsa Eropa, maka pada tahun 1913 di kota Surabaya telah berdiri sekolah menengah kejuruan yang menghasilkan "Dokter Bumiputra" (*Indische Arts*) dengan sebutan *Nederlands Indische Artsen School* (= NIAS).

Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan untuk kaum Bumiputra sangat terbatas dan hanya ada kesempatan untuk mencapai pendidikan menengah kejuruan. Keadaan itu mengalami sedikit perubahan ketika Perang Dunia I mulai berlangsung. Sekolah Bumiputra Klas I pada tahun 1914 ditingkatkan menjadi "HIS" (= *Hollands Inlandse School* (6 tahun) dan kursus "MULO" (2 tahun) sebagai kelanjutan ELS pada tahun 1914 diubah menjadi sekolah menengah umum dengan nama MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*; 3 tahun = SMP sekarang). yang di Surabaya, Madiun, Kediri dan Malang baru muncul pada tahun 1917 (261) Walaupun demikian Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi belum nampak ada di atas panggung sejarah pendidikan di Indonesia pada waktu itu. Hal itu baru ada setelah Perang Dunia I berlalu.

### c. Budaya

Bagaimanakah keadaan budaya pada waktu itu di Jawa Timur? Belum banyak data yang dapat diungkapkan. Yang ada ialah bahwa pada waktu itu *Jong Java* cabang Surabaya pimpinan Ir. Sukarno telah berusaha memperkembangkan kebudayaan asli, seperti mengajarkan tari Jawa atau mengajarkan main gamelan. Dalam rangka melakukan usaha-usaha, *Jong Java* sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan dengan maksud mengumpulkan dana untuk membantu pendirian sekolahan, meringankan korban bencana alam dan lain sebagainya. (268) Setelah daripada itu, sebelum tahun 1911 di Jawa Timur sudah berkembang kesenian Ludruk Bandan dan Ludruk Lerok.

Pertunjukan Ludruk Bandan itu menggambarkan bermacam-macam kesaktian para leluhur dalam hal ilmu "*kanuragan*" (= kesaktian). Ceritanya bersifat *Epiek*, yaitu suatu cerita yang mengenai kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pahlawan yang sakti dan perwira pada masa lampau. Lama kelamaan kesenian Ludruk Bandan rupanya kurang menarik khalayak, sehingga kemudian habis riwayatnya. Sementara itu timbul suatu kesenian yang juga tidak ketinggalan kesaktian orang-orang yang mengaji ilmu kanuragan dan tidak pula mengurangi nilai luhur kebudayaannya di kala itu. Kesenian yang baru lahir sebagai pengganti kesenian Ludruk Bandan itu dinamakan Ludruk Lerok.

Ludruk Lerok kebanyakan mempertunjukkan kesenian yang dapat menakjubkan orang dengan kekuatan gaib. Permainan Ludruk Lerok ini hampir menyerupai permainan sulapan atas gendaman. Pertunjukan tersebut dimainkan dengan memakai lakon, tetapi si pemain memperdengarkan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian (*kidungan*, *sindenan*), seakan-akan merupakan pertunjukan kesenian yang bersifat *Lyriek*, yaitu suatu pertunjukan yang melukiskan suatu perasaan. Akan tetapi dengan lambat laun kesenian Ludruk Lerok itu lenyap pula dan kemudian menginjak tahun 1911 – 1931 timbullah kesenian Ludruk lain yang biasanya disebut *Ludruk Besut* atau *Ludruk Besutan*. (269)

### d. Agama

Van der Prijs pernah mengemukakan pendapat, bahwa pengembangan pendidikan gaya Barat itu bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah

kolonial, tetapi juga *untuk membentengi Belanda dari "volkano" Islam* (262) Hal itu merupakan suatu petunjuk adanya kekhawatiran dari pihak Belanda atas perkembangan agama Islam, yang di Jawa Timur biasanya disiarkan melalui lembaga pendidikan Islam "pondok pesantren". Sedemikian besar kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap perkembangan pondok pesantren sehingga pada tahun 1882 didirikan *Priesterraden* yang bertugas antara lain mengawasi pondok pesantren tersebut. (263) Bahkan pada tahun 1905 telah dikeluarkan "ordonansi" yang berisi tentang pengawasan terhadap perguruan yang hanya mengajarkan agama (yang dimaksud ialah agama Islam). "Guru-guru agama harus mendapat izin dari pemerintah". (264)

Kekhawatiran tersebut timbul mungkin berdasarkan adanya kenyataan, bahwa pendidikan pondok pesantren yang berpusat pada diri seorang Kyai dan yang biasanya berpraktek sebagai dukun itu banyak yang menyebarkan sikap asing terhadap orang kulit putih atau orang yang beragama Kristen. Akibatnya timbul kecurigaan dan mungkin perlawanan terhadap mereka. Hal itu mengundang keadaan bahwa banyak di antara kaum muslim tradisional yang menolak penjajahan. Hanya saja mereka tidak secara positif menumbuhkan perlawanan yang sistematis teratur yang berpangkal pada kesanggupan dan kemampuan diri dengan berorganisasi, melainkan mereka mengambil sikap negatif dengan mengasingkan diri di dalam pesantren atau pergi ke Mekkah dengan bermukim untuk tidak kembali lagi ke tanah air. Atau dengan ajaran mistik dan kumpulan tersebut mereka secara kelompok-kelompok kecil mencetuskan kehendak ketidaksenangan itu terhadap pemerintah Hindia Belanda. (265) Hal ini di Jawa Timur antara lain pernah terjadi di Kabupaten Sidoarjo (Peristiwa Gedangan 1903) dan di Kabupaten Nganjuk (Peristiwa Bandungan 1909"). (266)

Sedangkan pondok pesantren di Jawa Timur yang terkenal pada permulaan abad ke-20 antara lain: Pondok Nggendong (Jombang), Tebuireng (Jombang), Lirboyo (Kediri), Sidocermo (Surabaya), Plotegan (Mojokerto) dan Bendungan (Nganjuk) dan Cepaka (Banyuwangi) (267).

### 3. *Hubungan dengan Volksraad*

Pada tanggal 1 Agustus 1918 keluarlah ketetapan tentang

pendirian *Volksraad*, yang memperkuat Undang-undang Pembentukan *Volksraad* 16 Desember 1916. Hal itu memungkinkan pembentukan *Volksraad* di Indonesia, yang kemudian pada tanggal 18 Mei 1918 dengan resmi dibuka oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum di (Pejambon) Jakarta.

"*Volksraad* atau Dewan Rakyat itu bukanlah Parlemen yang mempunyai kekuasaan legislatif, melainkan hanyalah suatu badan yang berhak mempertimbangkan atau memberikan nasehat kepada Pemerintah (*advieserend college*). (270)

Mengingat bahwa kaum pergerakan nasional (Budi Utomo dan lebih-lebih Sarekat Islam) menuntut adanya "Parlemen", maka dalam pidato pembukaan *Volksraad* itu Gubernur Jenderal van Limburg Stirum telah mengungkapkan gagasan penawara lara, yang antara lain isinya sebagai berikut:

"*Volksraad* itu diharapkan akan menjadi pengumpul yang terutama baginya, yang akan mengangkat negeri ini dari tempatnya yang sudah-sudah. Dari tanah jajahan yang nyata telah dijadikan tempat perusahaan kaum uang. Indonesia hendak dipindahkannya ke tempat yang mulia, sehingga ia menjadi suatu bagian dari tanah Nederland yang demokratis, di bawah pemerintahan sendiri." (271)

Adapun jumlah anggota *Volksraad* itu semula hanya 39 orang, 20 orang dipilih oleh anggota-anggota Dewan-dewan Daerah (*Locale Raden*) dan 19 orang diangkat oleh Pemerintah. 20 orang anggota yang dipilih oleh Dewan-dewan Daerah itu terdiri dari 10 orang bangsa Bumiputra, 9 orang bangsa Eropa dan 1 orang bangsa Timur Asing. Sedangkan 19 anggota yang diangkat oleh pemerintah itu terdiri 5 orang bangsa Bumiputra/Indonesia, 14 orang bangsa Eropa dan bangsa Timur Asing. Ketuanya diangkat oleh Raja Belanda. Pada tahun 1920 jumlah anggota *Volksraad* mengalami perubahan, karena dengan adanya Surat Keputusan Seri Baginda Raja tanggal 11 Oktober 1920 jumlah anggotanya ditambah menjadi 49 orang. Di antaranya adalah 20 orang bangsa Indonesia (12 orang dipilih dan 8 orang diangkat), 28 orang bangsa Eropa dan 16 orang bangsa Timur Asing). (272)

Di antara para anggota bangsa Indonesia yang duduk dalam *Volksraad* yang pertama, terdapat tokoh-tokoh dari Jawa Timur antara lain ialah R.A.A. Kusumo Judo (Bupati Ponorogo) dan

H.O.S. Tjokroaminoto (Ketua CSI di Surabaya). Di dalam *Volksraad* itu H.O.S.Tjokroaminoto menempatkan dirinya di fihak oposisi, yang bersama-sama dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya seperti: Dr. Radjiman, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Dr. A. Rivai, dan A. Muis, ia berusaha secara berangsur akan memperbesar kekuasaan *Volksraad* sampai menjadi Dewan Rakyat yang sebenar-benarnya, yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat. (273) Usaha parlementarisasi *Volksraad* tersebut ternyata mendapat dukungan dari organisasi-organisasi pergerakan rakyat, yang antara lain sejak Kongres Nasionalnya (CSI) yang kedua di Jakarta (1917) telah memutuskan asas perjuangan politik untuk mendapatkan *zelf-bestuur* atau memerintah diri sendiri. (274)

Ketegangan politik makin memuncak, ketika tersiar berita bahwa Mr. Troelsta, pemimpin kaum sosialis-demokrat di negeri Belanda, sedang berusaha hendak merobohkan pemerintahan kerajaan Belanda dengan tuntutan dihapuskannya *Eerste Kamer* (bagian dari parlemen Belanda yang anggotanya terdiri dari kaum bangsawan). (275)

Anggota *Volksraad*, Teeuwen yang mewakili Insulinde, menuntut supaya diadakan perubahan yang berarti di dalam susunan pemerintahan di Indonesia. Sedangkan para anggota *Volksraad*, baik bangsa Indonesia maupun bangsa Eropa, yang berjiwa demokratis, menggabungkan diri di dalam rombongan "*Radicale Concentratie*" (16 Nopember 1918)

Di dalam gabungan itu duduk wakil-wakil dari Budi Utomo, Sarekat Islam, Insulinde dan *Indische Democratische Partij*. Mereka menuntut dibentuknya suatu Dewan Parlemen sementara atau Dewan Nasional, yang akan merancang berdirinya suatu Parlemen sementara. Mereka menuntut, supaya sesudah itu secepat mungkin dibentuk Parlemen sejati, yang disusun oleh dan dari golongan rakyat dan yang mempunyai hak penuh untuk mengeluarkan undang-undang. Dimintanya pula pembentukan suatu badan pemerintahan, yang bertanggung jawab kepada Parlemen itu. (276)

Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum yakin, bahwa untuk memenangkan dan menghilangkan ketegangan politik itu, perlu diperlihatkan tindakan yang nyata. Akibatnya, pada tanggal 18 Nopember 1918 dicetuskannya amanat peme-

rintah yang berisi janji untuk mengadakan perubahan sosial, yang terkenal dengan sebutan "*November-beloofte*" atau "*November-Verklaring*". Amanat pemerintah tersebut dibacakan oleh Mr. Dr. D. Talma, "*Regerings Gemachtigde voor Algemene Zaken*, di muka sidang *Volksraad* (18 Nopember 1918), yang isinya antara lain sebagai berikut:

"Segala aturan yang kurang baik, sebagaimana ia telah dilahirkan di muka sidang-sidang *Volksraad*, akan ditiadakan. Guna usaha itu hendak dibentuk suatu panitia, yang akan melakukan pemeriksaan, tentang keadaan dan perhubungan-perhubungan di dunia gula. Kepada Mentri Jajahan telah disampaikan permintaan, supaya bunyi fasal 111 *Regerings-reglement* yang membatasi hak-hak berkumpul dan ber-sidang, ditinjau kembali. Aturan memberi makan kepada tentara, hal ihwal di dalam tangsi tentara yang tidak memuaskan, dan hal hukum tentara yang pincang, akan diperbaiki. Meskipun Pemerintah hanya dengan hati enggan menggunakan "hak-haknya yang tidak terbatas" (*exorbitante rechten*), tapi ia terpaksa melakukan kehendak fasal 45 R.R. (pembuangan, *internering* atau *externering*) kepada segala orang, yang terus menerus berusaha hendak melemahkan alat-alat kekuasaan; apa lagi di musim genting secara ini, meskipun ia telah berulang-ulang diperingati".  
(277)

Para anggota "*Radicale Concentratie*" menganggap janji-janji Gubernur Jendral itu agak kurang terang dan tidak nyata batas-batas lingkungannya, sehingga pada 25 Nopember 1918 lahir mosi-Tjokroaminoto dan kawan-kawannya yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

### Volksraad

Menimbang telah sampai masanya buat mengadakan perubahan yang besar dalam susunan Pemerintahan yang besar dalam negeri ini;

Berpendapat bahwa secepat-cepatnya harus disusunnya suatu Parlement yang dipilih diantara dan oleh rakyat dengan hak menentukan hukum sepenuh-penuhnya dan dibangunkan suatu Pemerintah yang menanggung jawab pada Parlement tersebut.

Mengharapkan kepada Pemerintah supaya dengan bekerja bersama-sama dengan perhimpunan-perhimpunan politik dalam negeri ini (Indonesia), menjalankan daya upaya yang diperlukannya, agar supaya susunan Pemerintah baru yang menjadi pengharapan yang dinyatakan oleh Volksraad, dapatlah dibangun pada waktu sebelum akhirnya mandaat daripada Volksraad yang sekarang, yakni sebelum tahun 1921 dan mengharapkan supaya mosi ini dimaklumkan dengan kawat kepada Opperbestuur.

.....  
Mosi Tjokroaminoto ini dianda tangani juga oleh: Sastrowidjono, Dwidjosewojo, Cramer, Tjipto Mangunkusumo, Radjiman, Teeuwen, A. Muis dan Thajeb. (278)

Mosi Tjokroaminoto dan kawan-kawannya tersebut baru dikirimkan ke negeri Belanda pada 30 Juni 1920. Sedang hasilnya tidak sesuai dengan maksud daripada mosi Tjokroaminoto itu. Demikianlah kenyataannya, selama hidupnya *Volksraad* atau Dewan Rakyat itu (dari 1918 - 1942), haknya praktis sebagai badan penasehat saja. Di dalam hakekatnya dan kenyataannya, nasehat-nasehat yang dikeluarkan oleh para anggota Indonesia yang duduk di dalam badan tersebut, tidak mendapat perhatian yang sewajarnya dari Pemerintah. Lebih-lebih setelah Undang-undang 1926 dikeluarkan untuk Hindia Belanda ini, di mana dinyatakan bahwa Gubernur Jendral itu mempunyai kekuasaan *legislatif* dan *eksekutif*, maka jelaslah *Volksraad* itu tidak ada artinya lagi. (279) *Volksraad* itu di dalam kenyataannya merupakan suatu Dewan sandiwara yang tidak berakar sama sekali di dalam realita kehidupan rakyat. Akibatnya para pemimpin pergerakan yang bersikap non-koperasi seperti H.A. Salim menamakan Dewan itu: *Komidi Omong*. Walaupun demikian ada pula segi positif dari adanya *Volksraad*, yaitu sebagai tempat pertemuan (*rendez-vous*) dari para utusan dan wakil-wakil daerah yang terdiri dari bermacam-macam aliran dan suku bangsa, yang secara tidak langsung merupakan faktor terbinanya perasaan satu bangsa.

#### 4. Anggota Volksraad yang mewakili Daerah (Biografi ringkas)

Tokoh Jawa Timur yang pernah menjadi anggota *Volksraad* yang pertama (1918 - 1921) antara lain ialah R.A.A. Kusumo

Judo (Bupati Ponorogo) (280) dan H.O.S. Tjokroaminoto. Dalam pengumpulan daya yang sangat sederhana penulis hanya dapat menyajikan data biografi H.O.S. Tjokroaminoto, sedangkan data biografi R.A.A. Kusumo Judo belum dapat terungkap.

Adapun H.O.S. Tjokroaminoto, adalah seorang anggota *Volksraad* yang diangkat oleh pemerintah, sebagai wakil dari Centraal Sarekat Islam (CSI) yang pada waktu itu berkedudukan di kota Surabaya. Ia adalah anak kedua dari Raden Mas Tjokroamiseno, seorang wedana di Kawedanan Kleco (Madiun) dan dilahirkan di desa Bakur pada tanggal 16 Agustus 1882. Setelah tamat sekolah rendah ia kemudian memasuki sekolah OSVIA (= *Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren*) di Magelang yang ke II. Kemudian ia memasuki dunia BB (*Binnenlandsch Bestuur*) kira-kira tiga tahun lamanya menjadi jurutulis Patih di Ngawi. Pada tahun 1905 ia meninggalkan jabatannya secara hormat untuk mengembara mencari peruntungannya. Setelah sampai di kota Surabaya, ia bekerja pada sebuah firma Kooy & Co, sambil belajar di sekolah *Burgerlijke Avondschoon* (= BAS) dari tahun 1907 sampai 1910. (281).

Pada waktu itu di Jakarta terjadi suatu peristiwa, para siswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo (20 Mei 1908). Sebagai pemuda yang berjiwa pejuang, Umar Said Tjokroaminoto memberi tanggapan positif terhadap peristiwa itu dengan mendirikan cabang Budi Utomo di kota Surabaya. (282) Sejak itu ia mulai terjun ke dalam kancah organisasi pergerakan nasional, sehingga pada tahun 1912 ia telah berhasil menjadi pemimpin Sarekat Islam.

Dalam organisasi Sarekat Islam tersebut karier H.O.S. Tjokroaminoto semakin menanjak. Idee yang dipaparkannya dalam pidato-pidato rupanya berkenan dalam hati rakyat, sehingga ia mendapat julukan sebagai "Ratu Adil", "Raja Jawa" atau pun "Gatokaca" - "Sarekat Islam" dari rakyat. (283). Semikian tenar namanya di kalangan SI dan di kalangan rakyat, sehingga ia berhasil menjadi Ketua "Centraal Sarekat Islam" yang didirikan di kota Surabaya pada tahun 1915. Di dalam Konggres yang pertama CSI, yang juga terkenal dengan sebutan "Konggres Nasional yang I th. 1916 di Bandung nampak dengan jelas bahwa Oemar Said Tjokroaminoto adalah seorang

pejuang yang berjiwa nasionalis, demokratis dan religius. Di dalam Kongres itu H.O.S. Tjokroaminoto telah membentangkan suatu cita-cita persatuan dari seluruh nusantara yang sangat penting bagi terwujudnya suatu *natie*. Di situ ia telah pula menyerahkan suatu naskah yang mengupas tentang rencana kedudukan suatu Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari pusat sampai ke daerah. Di dalam naskah itu dijelaskannya tentang kedudukan para anggota. Dewan Perwakilan Pusat, Provinsi, Kota, Desa menurut ajaran Islam. Juga dijelaskan cara menyusun sesuatu Dewan Perwakilan, cara menyusun Dewan Pemerintah, Tata-Tertib Dewan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka sebelum rancangan Undang-undang pembentukan *Volksraad* disahkan oleh Pemerintah Belanda, (16 - 12 - 1916), maka HOS. Tjokroaminoto telah mempunyai konsep terlebih dahulu (Juni 1916). (284).

Dengan adanya konsep itu maka tujuan perjuangan politik Sarekat Islam makin jelas. Tujuan tersebut makin dipertegas dalam Konggres Nasional (CSI) ke II di Jakarta (1917) yang telah menelorkan suatu asas: "Pemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*) sebagai tujuan perjuangan terhadap penjajahan dan menentang semua penghisapan oleh "Kapitalisme yang buruk". Demikianlah CSI di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto makin lama makin menjadi organisasi yang radikal. Hal itu tentu menimbulkan rasa khawatir bagi Pemerintah Hindia Belanda, maka dari itu untuk dapat mengawasi serta mengikuti gerak langkahnya dari belakang H.O.S. Tjokroaminoto oleh Pemerintah diangkat menjadi anggota *Volksraad* yang pertama. (1918).

Sebagai anggota *Volksraad* H.O.S. Tjokroaminoto menempatkan dirinya di fihak oposisi yang tergabung daam *Radical Concentratie*. Di situ ia bersama dengan teman-temannya menyusun suatu mosi yang menuntut adanya Parlemen yang sejati ("Volwaardig Parlement") yang mempunyai hak legislatif (25 Nopember 1918). Mosi tersebut dikirim ke negeri Belanda pada 30 Juni 1920 dan hasilnya tidak sesuai dengan maksud dari mosi Tjokroaminoto dan kawan-kawannya.

Pada tahun 1921 kedudukan H.O.S. Tjokroaminoto sebagai anggota *Volksraad* digantikan oleh H.A. Salim, yang juga melakukan oposisi tegas dan prinsipial. Sejak itu H.O.S. Tjokroaminoto memperjuangkan cita-citanya dengan Sarekat Islam yang kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) se-

bagai wahananya. PSI pada tahun 1925 secara resmi memakai asas non-koperasi sebagai taktik perjuangannya, sehingga H.A. Salim segera meninggalkan *Volksraad*. Karena langkah yang diambil oleh PSI itu sangat mengkhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda, maka Pemerintah berusaha mendekati PSI dengan menawarkan keanggotaan *Volksraad* kepada H.O.S. Tjokroaminoto (1927). Tetapi dengan tegas H.O.S. Tjokroaminoto menolak tawaran itu, karena ia tetap setia kepada keputusan partainya. Demikianlah H.O.S. Tjokroaminoto adalah seorang nasionalis - demokratis - religius yang dengan gigih memperjuangkan cita-citanya, antar lain cita-cita tersebut diungkapkan dalam tulisannya yang berjudul "Islam dan Sosialisme" (1924), sampai akhir hayatnya (1934). (285).

##### 5. *Dewan-dewan (Raad) yang berdiri di Daerah.*

Pelaksanaan politik Etika disalurkan melalui Undang-Undang Desentralisasi, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1903 dan berlaku mulai tanggal 20 Desember 1904. Undang-undang Desentralisasi tersebut mengubah watak pemerintahan yang sentral-otokratis, berpusat di Jakarta. Namun baru pada tahun 1905 dikeluarkan surat keputusan mengenai pembagian atau pemecahan kekuasaan dan peraturan dewan-dewan kota dan daerah. Peraturan itu disebut *Locale Raden Ordonnantie*. Pada tanggal 1 April 1905 dibentuklah tiga "Kota Praja" atau *Gemeente* yang pertama, yakni Batavia (= Jakarta), Mr. Cornelis (= Jatinegara) dan Buitenzorg (= Bogor). (286) Setahun kemudian (1 April 1906) di Jawa Timur muncul pula kota Surabaya dan Malang sebagai "Kota Praja" atau *Gemeente*. (287).

Akibat berlakunya Undang-undang Desentralisasi itu kepada sebagian kecil penduduk diberikan hak untuk turut campur urusan pemerintahan daerah dan "Kota Praja" mengenai segi yang sangat sempit. Golongan kecil yang beruntung ialah golongan kulit putih. Pelaksanaan Undang-undang Desentralisasi tidak membawa perubahan apa-apa kepada rakyat banyak. Rakyat tidak mendapat tambahan hak apa pun. Mereka tetap merupakan rakyat yang dijajah, diperintah. Masih tetap harus membayar pajak dan melakukan "rodi" atau "rajakarya" seperti sebelumnya.

Larangan politik masih tetap berlaku. Dalam rapat-rapat

perhimpunan hanya perundingan mengenai kepentingan dewan kota atau dewan daerah yang boleh disinggung. Demikianlah politik adalah monopoli pemerintah. Rakyat tidak perlu turut mencampurinya. Baik sebelum maupun sesudah diumumkan Undang-undang Desentralisasi pemerintah tidak pernah memberi penjelasan mengenai pengertian politik. Rakyat karenanya tidak tahu sampai di mana batas-batasnya. mana yang masuk bidang politik dan mana yang tidak, tidak diketahuinya. Oleh karena itu pengertian politik itu bagi rakyat sangat kabur. Semuanya bergantung kepada selera pemerintah sendiri. Apapun yang tidak disenangi oleh pemerintah, boleh ditindak dengan dalih: melanggar larangan berpolitik. Rakyat tidak dapat membela diri. Dengan mudah pemerintah atau orang yang berkuasa dapat membubarkan rapat atau perhimpunan dengan dalih yang sama. Sesungguhnya rakyat tidak tahu sama sekali tentang bagaimana jalannya pemerintahan. Mereka hanya tahu bahwa ada pemerintahan dan bahwa mereka harus tunduk kepada segala perintahnya. Demikianlah padahakekatnya perubahan watak politik itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap nasib rakyat banyak.

Pada tanggal 19 Januari 1908 oleh pemerintah dikeluarkan Undang-undang pemilihan. Dengan keluarnya Undang-undang itu mulai terasa akan adaya kehidupan berpolitik di Indonesia. Yang pertama kali didirikan ialah perhimpunan pemilihan di Bogor, kemudian disusul dengan perhimpunan pemilihan Semarang, lalu perhimpunan pemilihan Surabaya. (288) Demikianlah Undang-undang Desentralisasi tahun 1905 kemudian menciptakan dewan-dewan lokal (*locale raden*) baik Dewan Karesidenan maupun Dewan Kota sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak, urusan bangunan umum seperti jalan, taman, jembatan, makam dan sebagainya. Dalam dewan-dewan tersebut ternyata golongan Eropa mempunyai kedudukan yang mayoritas. Di antaranya ada anggota yang diangkat Gubernur Jenderal, ada pula yang dipilih dan ada yang berdasarkan jabatannya, seperti bupati dan patih dalam dewan daerah/Karesidenan.

Usaha-usaha lebih lanjut dalam desentralisasi dijalankan terus, pada tahun 1914 diajukan suatu rencana perubahan pemerintahan tetapi ditolak; pada tahun 1918 diterima peraturan

*Ontvoogding* (= pendewasaan = pembebasan dari perwalian) dari Pangreh praja dan pada tahun 1922 menyusul Undang-undang Perubahan (= *Bestuurshervormingswet*), yang baru dilaksanakan di Jawa Timur pada tahun 1926.

Berdasarkan Undang-undang Perubahan tahun 1922 itu, Hindia Belanda dibagi atas "gouvernement" (yang kemudian disebut "provinsi"). Tiap *Gouvernement-gouvernement* diperintah oleh seorang gubernur yang dibantu oleh Dewan Propinsi, yang anggotanya sebagian dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Dewan Kota serta sebagian lain diangkat. Pekerjaan rutin dilakukan oleh Dewan Utusan di bawah pimpinan gubernur.

Dewan Kabupaten berjumlah 67 di Jawa dan diketuai oleh Bupati. Seperti Dewan Propinsi, sebagian dari anggotanya ada yang dipilih dan ada yang diangkat. Sebagian besar dari anggota pribumi, berasal dari golongan pegawai, sedang petani sangat sedikit diwakili. Dalam sidang Umumnya ada pembagian atas komisi, antara lain yang mengurus pekerjaan umum, pasar, peraturan-peraturan, sedangkan pekerjaan rutin ada di tangan Dewan Komisaris-komisaris.

Dewan Kota (= *Gemeenteraad*) dipimpin oleh seorang wali Kota (= *Burgermeester*). Semua anggotanya dipilih, meskipun demikian mayoritas masih dipegang oleh golongan Eropa. Hal ini disebabkan oleh karena batasan hak memilih, antara lain dengan ketentuan pajak pendapatan yang sedikit-dikitnya f.300,—. Anggota Dewan Kota harus faham bahasa Belanda. (289) Misalnya, jumlah anggota Dewan Kota Surabaya pada tahun 1925 kira-kira ada 20 orang, yang terdiri dari 10 orang bangsa Belanda di antaranya terdapat (van mook), 6 orang "Bumiputra" (di antaranya terdapat: Dr. Sutomo, BRMH. Sujono, M. Sunjoto dan Asmowinangun) dan 3 orang Cina (Timur Asing). 290).

Dengan adanya kenyataan bahwa golongan Eropa mempunyai kedudukan yang mayoritas di dalam Dewan Kota Surabaya itu, maka usul-usul tentang perbaikan kehidupan rakyat yang berasal dari fihak Bumiputra selalu mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan karena bila diadakan pemungutan suara dalam mengambil keputusan fihak golongan Eropa selalu unggul. Keadaan semacam itu dengan sendirinya menimbulkan rasa yang tidak puas bagi seorang idealis dan pejuang seperti Dr. Sutomo dan kawan-kawannya. Akibatnya pada tang-

gal 14 Maret 1925 Dr. Sutomo, BRMH. Sujono, M. Sundjojo dan Sastrowinangun menyatakan berhenti dan keluar dari Dewan Kota Surabaya. Karena pada sidang malam hari itu, usul Dr. Sutomo yang kesekian kalinya untuk memperbaiki kampung dan kesehatan rayat ditolak; sedangkan usul-usul fihak lawan (= golongan Eropa) untuk memewahkan lagi bagian-bagian kota yang didiami oleh penduduk Belanda diterima. Mulai saat itulah Dr. Sutomo secara pribadi mengambil sikap non-koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. (291).

## E. PERJUANGAN DI DAERAH JAWA TIMUR.

### 1. *Interaksi Dengan Pemogokan-pemogokan di Sekitar tahun 1923.*

Dalam Perang Dunia Pertama (1914 - 1918) Pemerintah Hindia Belanda, karena terputus dengan Negara Induk (= Negeri Belanda), terpaksa berusaha kebutuhan masyarakat Hindia Belanda sendiri; terutama di bidang perindustrian. Sedangkan dibidang expor dan impor hubungannya banyak yang dialihkan dari Negeri Belanda ke negeri-negeri lain, khususnya ke negeri-negeri yang berdekatan. Dengan demikian maka jumlah kaum buruh pun bertambah.

Akan tetapi, sesudah Perang Dunia Pertama berakhir, negeri Belanda sebagai penjajah mau menjual hasil industrinya ke daerah jajahannya. Hal itu berarti menghalang-halangi pertumbuhan industrialisasi Indonesia selanjutnya, bahkan industri yang sudah didirikan oleh orang Indonesia sendiripun disainginya, sehingga banyak yang harus ditutup dan kaum buruhnya pun terpaksa menganggur. Penutupan peusahaan-perusahaan Indonesia dipercepat dengan masuknya barang hasil industri Jepang yang kemudian diikuti pula dengan masuknya barang hasil industri Amerika Serikat dan Jerman. (292).

Akibat semakin banyaknya permintaan luar negeri atas barang expor dari Hindia Belanda (Indonesia), keuntungan kaum modal semakin bertambah besar. Akan tetapi, sebaliknya arti upah kaum buruh semakin menurun. Hal itu disebabkan harga barang dalam negeri makin naik, sedangkan upah kaum buruh tidak ikut dinaikkan atau kurang setimpal kenaikannya. (293) Akibatnya, timbul kegelisahan di kalangan rakyat. Kegelisahan itu makin menjadi ketika Pemerintah Kolonial Be-

landa mengambil keputusan, akan menyita sebagian dari padi kepunyaan petani, yang memungut hasil lebih daripada ukuran yang dibutuhkan, untuk makanan keluarganya. Aturan itu menimbulkan protes di sana sini dari fihak rakyat. Timbullah peristiwa pemberontakan di Toli-toli (Sulawesi Tengah; 5 Juni 1919), yang membawa korban pembunuhan orang *controleur* dan beberapa pegawai negeri. Muncul pula peristiwa Drama Cimereme di Garut (Jawa Barat; 5 Juli 1919) yang membawa akibat 21 orang (laki-laki perempuan dan anak-anak) ditembak mati atas perintah Residen Priangan. Di daerah Solo timbul bentrokan antara penyewa-penyewa tanah dengan rakyat. Makin lama makin banyak kebun tebu yang terbakar dan bangsal-bangsal tembakau yang menjadi abu. Kejadian itu semua merupakan pewujudkan sakit hati rakyat yang dilontarkan dengan segala perbuatan, sepanjang batas kemampuan yang dapat dilakukannya. (294) Keadaan semacam itu sangat menarik perhatian bagi organisasi Sarekat Islam (CSI) dan memberi kesempatan yang baik bagi ISDV untuk mempropagandakan teori revolusioner-sosialistisnya.

Demikianlah di dalam Kongres Nasional CSI ke-IV di Surabaya (29 Oktober - 27 Nopember 1919) telah disetujui adanya pemusatan Sarekat Sekerja dan telah muncul usul-usul adanya pemogokan. Dalam usul-usul tersebut nampak adanya dua pendapat tentang tujuan pemogokan. golongan sosialis Islam (Tjokroaminoto cs.) menghendaki pemogokan hanyalah sebagai tekanan moral dan aksi-upah, bukan aksi politik. Sedangkan golongan sosialis kiri (Semaun cs.) menghendaki pemogokan merupakan senjata untuk mencapai tujuan politik, yaitu berupa perlawanan kelas dan politik dengan dasar revolusioner. (295) Akibatnya dalam tahun 1920 muncul peristiwa pemogokan-pemogokan di Jawa.

Surjopranoto adalah seorang komisaris CSI (Centraal Sarekat Islam) yang menjadi pemimpin PFB (*Personeel Fabriek Bond*), yang cabangnya berada di seluruh Jawa, telah mengadakan percobaan pemogokan untuk pertama kalinya.

Pada bulan Maret 1920 perkumpulan ini telah meminta kepada para penguasa dan pengurus perusahaan perkebunan dan sindikat gula supaya merka mengakui PFB sebagai badan perwakilan para kaum buruh dan supaya menaikkan upah buruh (yang

ternyata sangat turun harga pemakaiannya). Ternyata permintaannya ditolak oleh para pengusaha perkebunan, oleh karena itu pada tanggal 9 Agustus 1920 PFB terpaksa mengeluarkan ultimatum "Pemogokan". Pemerintah ternyata berdiri di samping kaum modal gula dan melarang pemogokan umum, walaupun Pemerintah juga merasa perlu memperingatkan para pengusaha gula untuk menaikkan upah buruhnya. Peristiwa ini kemudian disusul dengan pemogokan di seluruh jalan kereta api Semarang - Cirebon yang digerakkan oleh serikat buruh *Semarang Cheribon - Stoomtram Maatschappij* (SCS). Hanya karena ikut campurnya VSTP (*Vereniging van Spoor en Tramweg-personeel*), maka pemogokan ini lekas berhenti.

Dalam bulan Nopember 1920 di Surabaya timbul pemogokan yang disebabkan karena kaum buruh menuntut kenaikan upah yang tidak sesuai dengan kenaikan harga barang yang makin membubung tinggi. Pemogokan terjadi di perusahaan-perusahaan penjahit, pelabuhan, pabrik baja dan perusahaan teknik.

Para pegawai perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing telah mendirikan perserikatan dan atas usaha dari seorang propaganda PFB (*Personeel Fabriek Bond*) mereka kemudian bergabung dalam satu pusat daerah (*een plaatselijke centrale*). Setelah pemogokan berjalan dua bulan dan syarat-syarat perjanjian kerja diperbaiki, maka akhir bulan Desember semua pegawai bekerja kembali. (296).

Sebagai salah satu usaha lebih lanjut dalam menggerakkan semangat rakyat biasa (yang pada waktu itu lebih umum dikenal dengan sebutan kaum Kromo), maka para pemimpin SI mendirikan suatu gerakan yang diberi nama *Djawa-Dwipa*, berpusat di Surabaya dan bawah pimpinan: H.O.S., Tjokroaminoto, Tjokrosudarmo, Tirtodanodjo dan lain-lainnya (tahun 1920). Gerakan "Djawa Dwipa" itu didirikan atas dasar kerakyatan yang seluas-luasnya. Dalam gerakan ini para anggotanya satu sama lain tidak diperbolehkan mempergunakan bahasa Kromo, yaitu bahasa Jawa halus yang biasanya dipergunakan oleh si-Kromo terhadap golongan menak (Bangsawan).

Bahkan semuanya harus mempergunakan bahasa Jawa "Ngo-ko" saja. Organisasi "Djawa Dwipa" ini memberi instruksi kepada para anggotanya agar sebutan-sebutan: Raden, Raden Mas, Bendoro dan lain-lainnya yang berbau feodal, harus dikubur-

kan. Dengan gerakan ini maka perasaan senasib-sepenanggung-an makin cepat dapat digalang di kalangan rakyat. Akibatnya, perasaan rendah diri (*Minderwaardigheids-complex*) berangsur-angsur dilemparkan jauh-jauh. Semboyan para anggotanya: "Sama rata - sama rasa - satu menderita semua turut merasa - satu senang semua bahagia. Lencana gerakan ini, berwujud: segi tiga dan di tengah-tengahnya terdapat pohon beringin yang diapit oleh padi. Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam tahun 1920 Sarekat Islam telah berhasil menggalang persatuan Sarekat-Sarekat Sekerja dan dengan dasar kerakyatan telah berusaha mempesatukan rakyat Kromo (rakyat kecil) di Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. (297).

Dari data tersebut di atas nampak, bahwa walaupun tidak semua pemogokan tahun 1920 membawa hasil yang langsung, namun bagi kaum pemogok banyak pula manfaatnya. Mereka mulai terbuka matanya, bahwa keburukan peraturan-peraturan dalam dunia perburuhan dan kekuasaan kaum modal yang dapat berbuat semau-maunya, itu dapat dilawan dengan pemogokan-pemogokan yang membahayakan. Pada waktu itulah Pemerintah kolonial mulai mempersoalkan upah-minimum dan majelis-majelis tetap untuk kaum modal dan buruh bersama-sama. Tetapi Pemerintah tidak terus mengambil tindakan apa-apa yang nyata. Akibatnya, setelah PKI (Partai Komunis di Hindia =; perubahan dari ISDV tgl. 23 Mei 1920) selangkah demi selangkah dapat menyebarkan pengaruhnya di bidang Sarekat Sekerja, timbullah pemogokan di kota Surabaya.

Kota Surabaya, yang sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama menjadi salah satu pusat perindustrian yang terpenting, (298) pada bulan Agustus 1921 timbul pemogokan buruh pelabuhan, yang memprotes soal penurunan upah buruh. Dalam persoalan ini Semaun (pemimpin PKI) dijadikan utusan untuk berumbuk dengan kaum majikan, agar supaya ia jangan meneruskan niatnya untuk menurunkan upah.

Setelah terjadi peristiwa Pemogokan Pegawai Pegadean (11 Januari 1922), atas inisiatif Semaun pada tanggal 25 Juni 1922 di kota Surabaya diadakan rapat bersama antara Sarekat-sarekat Sekerja. Di situ dijelaskan sangat perlunya diadakan fusi antara dua sentral Sarekat Sekerja, yaitu: PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) di bawah pengaruh "SI-Putih" dan

berpusat di Jogja (berdiri tahun 1919) dan "Revolutionaire Vakcentrale" di bawah pengaruh "SI - Merah" dan berpusat di Semarang (berdiri tahun 1921). Fusi tersebut menjadi kenyataan pada tanggal 3 September 1922 di Madiun dengan lahirnya "Persatuan Vakbonden Hindia" (PVH). Sasaran utama dari aksi Federal Sarekat Sekerja (Vak Federatie) baru ini adalah protes terhadap pengumuman Pemerintah akan dicabutnya tambahan upah dan gaji karena kemahalan (- tunjangan kemahalan), yang telah berjalan beberapa tahun. Semua lapisan pegawai dan buruh sangat takut akan pencabutan ini. Beberapa kesempatan dipergunakan untuk menentangnya, akhirnya pada Kongres VSTP (3 - 4 Maret 1923) diusulkan supaya mengadakan pemogokan pegawai kereta api dan trem. Sebelum pemogokan dimulai Semaun yang menjadi pemimpin para utusan Sarekat Sekera, pada tanggal 12 April 1923 mengadakan perundingan dengan pihak majikan. Setelah perundingan tersebut gagal, maka bersama-sama dengan Darsono ia bergerak untuk mengadakan pemogokan.

Dalam rapat sentral PVH di Surabaya tanggal 28 - 30 April 1923 dan dalam rapat VSTP di Semarang tanggal 6 Mei 1923 Semaun telah mengeluarkan perintah, supaya seluruh pegawai kereta api mogok, jika ada salah seorang di antara pemimpin-pemimpin VSTP yang ditangkap. Demikianlah ketika tanggal 8 Mei 1923 Semaun ditangkap, katanya berhubungan dengan *spreekdelict* yang dilakukannya tanggal 1 April; maka sehari sesudah itu (9 Mei) meledaklah pemogokan besar dari para pegawai dan buruh kereta api. Pemogokan yang dimulai di Semarang itu ternyata kemudian meluas sampai ke Madiun dan Surabaya. (299) Bahkan meluas menjadi pemogokan yang bersifat umum yang diikuti oleh 13.000 dari 20.000 buruh kereta api dan ditambah dengan perkumpulan pegawai-pegawai bangsa Eropa. Pemogokan itu oleh Pemerintah Kolonial dinyatakan di luar hukum dan dihantam dengan sehebat-hebatnya. Untuk mengatasi pemogokan tersebut Pemerintah Kolonial pada tanggal 10 Mei 1923 menambahkan pasal 161 bis ke dalam Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berbunyi: "Barang siapa menimbulkan atau memperluas pemogokan sedang ia tahu atau dapat mengira-irakan bahwa pemogokan itu akan mengakibatkan gangguan keamanan umum atau kegoncangan dari kehidupan ekonomi dalam masyarakat

dapat dihukum penjara maximum 5 tahun atau denda maximum 1000 rupiah". (300) Dengan jalan tersebut maka Pemerintah dapat memutuskan hubungan antara para pemimpin dengan kaum buruh, sehingga pada akhir bulan Mei (sesudah 2 Minggu) gerakan mogok mundur pun bubar. Pada bulan Agustus 1923 Semaun diasingkan keluar negeri, sehingga untuk sementara waktu aksi kaum komunis dalam Sarekat Sekerja berhenti.

## 2. *Interaksi Dengan Pemberontakan Tahun 1926/1927.*

Walaupun Pemerintah Kolonial Belanda telah menambahkan pasal 161 *bis* dalam Undang-undang Hukum Pidana yang berisi larangan mogok, namun gerakan pemogokan Sarekat Sekerja bangkit kembali setelah Alimin dan Budisutjito pulang kembali dari Konferensi Pan-Pasific-Merah yang diadakan di Kanton.

Demikianlah pada bulan Juni 1924 di Kantor telah diadakan *Pan-Pacific Conferentie* merah yang akan memperbincangkan bagaimana perjuangan proletar di Eropa dapat dipersatukan dengan perjuangan kemerdekaan nasional di Timur. Di situ dibicarakan juga dengan panjang lebar tentang strategi dan taktik pemogokan. Atas prakarsa "Vakinternationale Merah" (Profintern") maka telah diputuskan tentang perlunya ada organisasi internasional pelaut dan buruh merah di pelabuhan-pelabuhan Pasifik yang penting di benua Asia. Di Kanton akan didirikan sebuah kantor *Pan Pacific Labour Union (Merah)* untuk keperluan ini, yang meliputi bagian-bagian sekretariatnya di Cina, Filipina, Jepang, India dan di Indonesia.

Sedangkan "Sarekat Laut dan Gudang" di Semarang, "Sarekat Buruh Pelabuhan" di Jakarta dan di Surabaya akan dipersatukan menjadi "Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan" (SPPL). SPPL ini kemudian akan digabungkan dengan Sarekat Pegawai Laut India" (kemudian "Indonesia") yaitu perserikatan bagi anak kapal Indonesia dari kapal-kapal mail yang pada waktu itu telah didirikan oleh Seman di Amsterdam.

Konferensi Kanton kemudian disusul dengan Kongres PKI di Kota Gede (Jogya; merio Desember 1924) yang dipimpin oleh Alimin dan dihadiri oleh Darsono dan Muso.

Di situ telah diputuskan untuk mengulangi lagi dan memperdalam aksi di kalangan Sarekat Sekerja, yang dilaksanakan dengan

munculnya sistem perpusatan kecil (*kern en cel*) di kalangan buruh perusahaan-perusahaan Pemerintah (perusahaan angkutan, industri dan tambang). Dengan secara sembunyi, organisasi sekerja merah diperkuat dengan mengadakan gabungan 10 atau 5 orang (masing-masing mempunyai pemimpin sendiri) yang anggota-anggotanya dididik menjadi pemimpin dari gabungan-gabungan baru. Dengan jalan demikian tiap gabungan diharuskan berkembang "seperti bola salju".

Kota Surabaya yang pada waktu itu mempunyai posisi yang strategi dalam bidang perdagangan, perindustrian, angkutan darat dan laut, tidak luput dari incaran PKI. Pada tanggal 21 Desember 1924 di Surabaya berlangsung konferensi kaum buruh perdagangan, industri, pengangkutan, dan kaum buruh pelabuhan serta perkapalan. Di situ para pembicara memandang perlu adanya Kantor Pusat (*Centraal Kantoor*) yang memimpin organisasi-organisasi Sekera. Berdirilah "Sekretariat Sarekat Sekerja Indonesia Merah" (*Secretariaat der Roode Indonesische Vakbonden*) yang akan masuk menjadi anggota Vak - Internationale Merah" (*Roode Vak-Internationale*) di Moskow dan juga menjadi cabang dari *Pan Pacific Labour Union* (Merah) di Kanton. (301).

Setelah susunan organisasi Sarekat Sekerja dipandang kuat maka senjata pemogokan dilancarkan untuk menyingkapkan ketidak-adilan dalam dunia perburuhan, yang kemudian oleh PKI ditingkatkan menjadi pemberontakan. Demikianlah pada waktu itu PKI sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan aksi massa dengan melalui pemogokan-pemogokan. Daerah-daerah yang menjadi perhatiannya adalah Semarang dan Surabaya sebagai pusat kapitalisme dan daerah Banten beserta daerah Sumatra Barat yang mempunyai sejarah gemilang di dalam usaha melawan penjajah.

Pemogokan-pemogokan dimulai di Semarang dengan munculnya masalah pemecatan seorang pegawai percetakan (firma Cina). Karena tindakan tersebut dipandang tidak adil, maka "Sarekat Buruh Cetak" lalu melancarkan pemogokan (21 Juli 1925). Pemogokan tersebut kemudian meluas di Rumah Sakit Umum Begeri Pusat (*Centrale Burgelijke Ziekeninrichting*), sebab perbuatan angkuh dan keras dari kepala-kepala yang terdiri dari orang-orang Belanda. (1 Agustus 1925).

Bersamaan dengan itu mogok pula 1000 orang buruh pada Per-

usaha Kapal dan Perahu (*Semarangsche Stoomboot en Prauwenvaar*) yang dipimpin oleh buruh pelabuhan dan persatuan pelaut (SPPL). Pemogokan ini baru berakhir pada bulan September.

Sementara itu di kota Surabaya muncul pula pemogokan. Pemogokan tersebut dimulai oleh kaum buruh percetakan "Van Dorp" (1 September 1925), yang lamanya sampai 2 bulan. Kemudian disusul dengan pemogokan oleh kaum buruh di pabrik mesin kepunyaan *Nederlandsch-Industrie*, dengan latar belakang dipecatnya seorang buruh pabrik mesin tersebut karena dituduh mengadakan propaganda komunis yang revolusioner (di pabrik itu). Pemogokan tersebut ternyata makin meluas ke pabrik mesin kepunyaan Barat (19 Nopember 1925). Bahkan "Sarekat Buruh Bengkel" (SBB) yang merupakan perserikatan kaum buruh bengkel-bengkel Industri, juga melancarkan pemogokannya. Pada tanggal 2 Desember 1925 Federasi buruh pabrik dan persatuan buruh listrik memutuskan akan mengadakan beberapa tuntutan pada 7 Pabrik mesin dan bengkel-bengkel di Surabaya, yang kesemuanya merupakan langganan utama dari pabrik-pabrik Gula di Jawa Timur; dan tanggal 14 Desember 1925 timbullah pemogokan pada segala pabrik-pabrik mesin dan "*Maatschappij Droogdokken*". (302).

Pemogokan di Surabaya itu semata-mata telah dilakukan untuk memperbaiki nasib pekerja dan sebagai protes terhadap majikan, yang selalu menurunkan upah; sedangkan keadaan perumahan pegawai pun sangat buruk. Residen Surabaya, Jordan, yang telah menginsyafi misalnya, ia tidak senang mengambil tindakan terhadap pemogokan. Bahkan sebaliknya ia telah menasehati para majikan, agar supaya mereka mau memperbaiki keadaan perburuhan pada umumnya. Namun nasehat Residen itu rupanya tidak menyenangkan bagi para majikan, sehingga pemimpin pabrik-pabrik mesin (*Machine Fabrieken*) mengirimkan utusan ke Jakarta, yang harus menerangkan kepada Gubernur Jenderal (Fock), bahwa yang ada di belakang pemogokan itu yalah orang-orang komunis.

Dengan dasar laporan dari utusan Pemimpin Pabrik-pabrik Mesin Surabaya itu, Gubernur Jenderal Fock kemudian mengirimkan dua orang wakil ke Surabaya dengan membawa mandat blanko, yang artinya mereka boleh bertindak menurut pertimbangannya yang dipandang perlu, tanpa menantikan perintah

lebih dahulu dari Gubernur Jenderal. Setibanya di Surabaya, mereka telah menangkap seratus lima puluh orang, yang dianggap ada atau mungkin ada hubungannya dengan pimpinan pemogokan. Penangkapan itu berdasarkan kepada pasal 161 *bis* dari Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena kaum pemogok kehilangan seluruh pemimpinnya, maka padamlah pemogokan-pemogokan tersebut. Sesudah itu, dilepaskannyalah sekalian tahanan kecuali sebelas orang. Sepuluh bulan lamanya orang yang sebelas itu dipenjara, tetapi di depan pengadilan mereka dimerdekakan. Hal itu disebabkan karena Hakim berpendapat, bahwa sesuatu pasal di dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak jelas maksudnya, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum orang.

Perkara di Surabaya tersebut memberi gambaran yang nyata, secara bagaimana Pemerintah dan orang-orang Eropa menerima dan memperlakukan bentrokan-bentrokan sosial, yang timbul di dalam masyarakat Indonesia. Semata-mata tindakan reaksioner, merupakan bantahan terhadap segala kemajuan negara dan warga negaranya. (303)

Oleh karena PKI banyak campur tangan dalam aksi pemogokan kaum buruh, maka Pemerintah bertindak keras terhadap PKI. Dengan tujuan untuk membatasi gerak kaum PKI, maka hak bersidang organisasi-organisasi komunis dikurangi (17 November 1925 I. Stb. No. 582, terdapat kalimat tambahan bahwa kemerdekaan bersidang dapat dikurangi buat organisasi-organisasi yang istimewa ditunjuk); selain dari pada itu para pemimpinnya diasingkan, misalnya : Semaun (1923), Darsono, Aliarcham dan Mardjohan (Alimin sudah pergi lebih dahulu dengan kemauannya sendiri). Dengan demikian maka pada akhir bulan Desember 1925 pemogokan di Semarang dan di Surabaya telah berhenti dan semua perusahaan dapat bekerja kembali.

PKI memperingati timbulnya beberapa pemogokan di Jawa dengan tujuan untuk membantu pemberontakan yang telah direncanakan pada tahun 1924 (Kongres Kota Gede, Jogja). Maka dari itu setelah keadaan menjadi kritis, PKI mengadakan pertemuan rahasia atau Konferensi kilat di Candi Prambanan pada tanggal 25 Desember 1925. Di situ para pemimpin PKI yang terkemuka pada dasarnya setuju kalau mengadakan revolusi. Hanya soal waktu dan jalannya revolusi ada dua pendapat yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa revolusi dimulai

dari Sumatra Barat yang akan menjalar keseluruh Indonesia dan diadakan pada satu waktu. Sebagian lainnya berpendapat, bahwa waktunya belum sampai untuk mengadakan revolusi (pemberontakan) dan karena itu harus memperkuat persiapan dahulu (304)

Rupanya konferensi tersebut di atas telah mengambil keputusan untuk mengadakan pemberontakan (revolusi), sehingga pada tanggal 12 Nopember 1926 pemberontakan PKI meletus di karesidenan Banten (sampai 5 Desember), yang kemudian menjalar ke Jakarta, Jatinegara dan Tangerang (12 - 14 Nopember). Pemberontakan tersebut meluas sampai ke daerah Priangan (12 - 18 Nopember), ke daerah Solo (17 - 23 Nopember), dan ke daerah Kediri (12 Nopember - 15 Desember). Di daerah Banyumas, Pekalongan dan Kedu maksudnya juga akan bergolak, namun sebelum dapat bergerak para pemimpin PKI dan para anggota gerakan tani telah dapat ditangkap oleh Pemerintah setempat. Pemberontakan di Jawa tersebut kemudian disusul dengan pemberontakan PKI di Sumatra Barat (Januari 1927). Namun karena rupanya persiapannya kurang masak, maka pemberontakan PKI yang direncanakan secara besar-besaran itu akhirnya dapat ditumpas oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Sebagai akibat pemberontakan tersebut di atas, maka PKI oleh Pemerintah Kolonial dinyatakan sebagai organisasi politik yang terlarang. Tak kurang dari 13.000 orang ditangkap, di antaranya 4.500 dijatuhi hukuman dan 1.300 orang diasingkan ke Boven Digul. Digul yang semula hanya dimaksudkan sebagai tempat pengasingan atau untuk memencilkan orang-orang Komunis dengan kegiatannya, namun kemudian digunakan pula untuk mengasingkan kaum pergerakan nasional yang dipandang berbahaya. Sejak tahun itulah Digul dijadikan tempat pengasingan orang-orang yang tidak disukai oleh Pemerintah Kolonial dan nama Digul merupakan momok bagi rakyat Indonesia umumnya dan para pemimpin gerakan nasional khususnya. (305)

### 3. *Sikap Masyarakat Terhadap Asas Non-Koperasi dan Koperasi Terhadap Pemerintah Hindia Belanda*

Dalam jaman pergerakan nasional, bangsa Indonesia mengenal asas koperasi (= *cooperation = cooperatie*) dan asas non-koperasi (= *non-cooperation = non-cooperatie*) sebagai tak-

tik perjuangan mereka. Hal itu di dalam masyarakat penduduk Bumiputra (= bangsa Indonesia) menimbulkan sikap "ko" atau koperasi, yang berarti bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda. Sikap non-koperasi itu ada yang bersifat lunak (= *moderat*) dan ada yang bersifat keras (= radikal).

Sikap non-koperasi yang lunak, telah membawa akibat bagi para penganutnya untuk tidak mau duduk sebagai anggota dalam badan-badan perwakilan saja, baik di pusat maupun di daerah, yaitu baik di *Volksraad* maupun di *Gemeenteraad*, *Locale Raad*. Sedangkan sikap non-koperasi yang radikal telah menetapkan sikap "non" yang lebih luas lagi ialah tidak hanya mengenai anggota badan-badan perwakilan saja, tetapi juga mengenai bekerja sebagai pegawai dari pada Pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya sikap non-koperasi yang lunak dari organisasi-organisasi pergerakan nasional nampak adanya dua macam haluan, yakni ada yang menyerahkan sama sekali kepada para anggotanya untuk boleh bekerja sebagai pegawai negeri atau tidak, tetapi ada pula yang bahkan dengan tegas menganjurkan agar supaya para anggotanya seluas mungkin menempati kedudukan-kedudukan di dalam kepegawaian dengan alasan, supaya orang-orang Indonesia mendapat pengalaman dan kecakapan di dalam aparaturnegara, sebagai persiapan kalau pada masanya segala sesuatu harus dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri. (306)

Gerakan non-koperasi yang berlaku di Indonesia itu rupanya ada hubungannya dengan gerakan *satyagraha* yang dipelopori oleh Mohanandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi di India, yang pada pokoknya menganjurkan para pengikutnya untuk tidak bekerjasama dengan pihak penjajah. Di India, gerakan *satyagraha* itu mula pertama dilancarkan oleh para pengikut Mahatma Gandhi untuk memprotes dikeluarkannya Undang-Undang Rowlatt pada tahun 1919. Selanjutnya, pada bulan September 1920 asas *satyagraha* atau asas non-koperasi itu secara resmi telah diterima oleh organisasi pergerakan *All India Congres* sebagai taktik perjuangan untuk menghadapi penjajah Inggris. Diterimanya asas *satyagraha* (= asas non-koperasi) sebagai taktik perjuangan dalam pergerakan politik, membawa akibat yang bersifat negatif dan positif. Negatif sebab melarang bangsa India bekerja bersama-sama dengan pemerintah kolonial. Pegawai-pegawai negeri minta lepas, anggota-anggota dewan

perwakilan harus mengundurkan diri, rakyat diajak supaya jangan memilih wakil-wakilnya dalam dewan itu, polisi dan serdadu dilarang mengikuti pemerintah, rakyat tak boleh memberi barang buatan Barat. Anak-anak dan pelajar-pelajar harus meninggalkan sekolah pemerintah. Sifat positif dari non-koperasi adalah suatu kebaktian rakyat, kepercayaan kepada kekuatan rohani yang mengatur kekuatan senjata baja atau api. Non-koperasi mempersatukan bangsa sebab tak membeda-bedakan agama dan membatalkan segala pertentangan dalam golongan sosial. Non-koperasi ialah suatu jalan untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam segala lapangan terhadap lawan jasmani yang memaksakan kemauannya. (307)

Apa yang telah terjadi di India, rupanya menarik perhatian kaum pergerakan nasional Indonesia; sehingga organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia, seperti organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam dan lain sebagainya, mulai memperbincangkan atau menganut asas non-koperasi sebagai taktik perjuangannya. Adapun sebab pokok munculnya gerakan non-koperasi di Indonesia itu semula antara lain dimaksudkan sebagai protes terhadap pengingkaran janji pemerintah di bulan November 1918 (= *November Belofte*) dan protes terhadap dikurangnya budget pemerintah untuk urusan-urusan rakyat yang paling vital. (308)

Pengingkaran janji November oleh Pemerintah Kolonial, menimbulkan rasa kecewa dan pelajaran bagi bangsa Indonesia, bahwa dalam politik kolonial secara praktis tak ada istilah untuk gagasan "Indonesia lepas dari Holland". Pelajaran tersebut dapat mempertebal kepercayaan atas diri sendiri yang merupakan modal terpenting dalam menuju penerimaan prinsip non-koperasi. Sementara itu Gubernur Jenderal Mr. D. Fock telah mengumumkan *politik penghematan yang radikal* untuk membuat Anggaran Belanja Negara menjadi seimbang. Dengan cara radikal dilakukanlah penghematan pada budget Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan dengan demikian maka kepentingan rakyat yang paling vital menjadi terpukul (1922). Hal itu membawa akibat berganda daripada peningkatan kemiskinan rakyat yang semakin parah dan tekanan pajak yang lebih berat, bersamaan dengan cara pemungutan yang kejam. Mula-mula hal itu tampak terwujud dalam ketidakpuasan dan kegetiran rakyat yang makin meningkat. Namun di kalangan kaum intelek rasa tak puas dan

kejengkelan yang sama terlihat pula. Tidak saja mereka merasa tertipu oleh karena janji-janji November yang diingkari, tetapi diabaikannya kepentingan rakyat yang paling vital oleh pemerintah kolonial telah menimbulkan kekusaran yang besar di mana-mana. Akibatnya pemerintah reaksioner dari Gubernur Jenderal Fock telah menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah kolonial. (309) Akibat langsung dari politik Fock sejak 1922 tidak lain ialah radikalisasi pergerakan nasional. Dalam Dewan Rakyat muncul konsentrasi radikal dan gerakan non-koperasi terhadap pemerintah kolonial mulai meluas di kalangan kaum terpelajar. (310)

Demikianlah pada tanggal 14 Maret 1925 di kota Surabaya terjadi suatu peristiwa Pemogokan dalam *Gemeenteraad* (= Dewan Kota) Surabaya, yang dilakukan oleh Dr. Soetomo, bersama kawan-kawannya : B.R.M.H. Soejono, M. Soendjojo dan Asmowinangoen. Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 1925 itu Dr. Soetomo menyatakan berhenti dan keluar dari *Gemeenteraad* Surabaya. Hal itu disebabkan oleh karena usulnya yang kesekian kalinya untuk memperbaiki kampung dan kesehatan rakyat ditolak, sedangkan usul-usul fihak "lawan" untuk mewahkan lagi bagian-bagian kota yang didiami oleh penduduk Belanda diterima. Sebagai rasa solideritas, maka kawan-kawan Dr. Soetomo secara spontan juga menyatakan tidak sudi lagi duduk dalam Dewan Kota, "komidi kolonial" itu. (311)

Tindakan Dr. Soetomo dengan kawan-kawannya itu ternyata dapat menggemparkan dunia pergerakan nasional pada waktu itu. Tidak hanya di kota Surabaya, tetapi juga di luar kota Surabaya. Pada waktu itu di kota Surabaya telah terjadi suatu peristiwa untuk pertama kalinya para wakil rakyat menunjukkan keberaniannya untuk lebih baik keluar saja dari Dewan-Dewan demokrasi palsu buatan Pemerintah kolonial itu. Dengan demikian maka Dr. Soetomo dan kawan-kawannya telah merintis dan mempraktekkan politik atau asas "non-koperasi" terhadap Pemerintah Hindia Belanda, sebelum partai-partai politik yang militan mempraktekannya. Hal itu rupanya menimbulkan kekusaran dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1927 Dr. Soetomo ditawarkan untuk duduk menjadi anggota "Volksraad" (di Pejambon, Jakarta). Namun tawaran itu oleh Dr. Soetomo ditolak, karena fihak Pemerintah Hindia Belanda tidak mau memenuhi syarat-syarat yang dikemukakannya. (312)

Sikap non-koperatif Dr. Soetomo dengan kawan-kawannya tersebut ternyata mendapat sambutan yang hangat dari kaum pergerakan rakyat. Pada tahun 1923 (bulan April) organisasi Budi Utomo yang semula berasaskan koperasi sebagai taktik perjuangannya, mulai memperbincangkan masalah non-koperasi. Akibatnya pada tahun 1926 (bulan April) kongres Budi Utomo telah memutuskan bahwa sebagai perkumpulan Budi Utomo menetapkan sikap non-koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda, dengan ketentuan memberikan kebebasan para anggotanya untuk menyimpang dari itu. Begitu pula dalam Kongres Sarekat Islam tahun 1923 (17 - 20 Pebruari) di Madiun, yang mana nama Sarekat Islam kemudian diubah menjadi "Partai Sarekat Islam" (PSI), soal taktik non-koperasi mulai diperbincangkan dengan hangat. Dalam Kongresnya di Surabaya (8 - 11 Agustus 1924), soal itu dibicarakan kembali dan dalam Kongresnya di Jogyakarta (21 - 27 Agustus 1925) PSI telah mengambil keputusan dengan tegas untuk melaksanakan taktik non-koperasi, dengan ketentuan bahwa anggota partai diberi kebebasan untuk menjadi anggota badan perwakilan, tidak atas nama partai melainkan atas namanya sendiri. Sesuai dengan keputusan partai itu, maka H.A. Salim segera meninggalkan *Volksraad*, yang dalam pandangannya tidak lebih daripada suatu komidi omong. Sikap non-koperasi dari PSI itu rupanya juga menimbulkan rasa khawatir fihak Pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1927 Pemerintah berdaya upaya untuk mengajak H.O.S. Tjokroaminoto untuk kembali menjadi anggota *Volksraad*. Tetapi Tjokroaminoto dengan tegas menolak tawaran tersebut, karena ia bersama-sama partainya telah bertekad akan terus bersikap non-koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. (313).

Tindakan Dr. Soetomo dengan kawan-kawannya yang menunjukkan sikap non-koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda itu ternyata juga mendapat sambutan dari kaum intelek muda yang baru datang dari negeri Belanda. Lebih-lebih para intelek muda yang pernah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia yang telah menyusun *Algemeene Studieclub* di bawah pimpinan Ir. Sukarno (di Bandung). Pendek kata, dengan adanya tindakan Dr. Soetomo dengan kawan-kawannya yang menunjukkan sikap non-koperasi di kota Surabaya itu, pergerakan

nasional Indonesia memperoleh suatu contoh baru yang menakjubkan fihak kawan dan fihak lawan. (314)

Demikianlah, pada bulan Maret 1925 Dr. Soetomo, bekas anggota dan bekas ketua *Indonesische Vereeniging* di Negeri Belanda dan yang pada waktu itu menjadi ketua *Indonesische Studieclub* di Surabaya, telah memperkenalkan dan mempraktekkan untuk pertama kalinya asas non-koperasi di panggung pergerakan politik Indonesia. Akibatnya masalah perbedaan asas non-koperasi dan koperasi makin menarik perhatian bagi para pemimpin pergerakan rakyat di Indonesia. Perbedaan itu terutama diperkenalkan di panggung pergerakan politik Indonesia sekitar tahun 1926 - 1927 oleh para intelek muda Indonesia yang baru kembali dari negeri Belanda dan yang banyak bergerak dalam "Perhimpunan Indonesia". Kemudian perbedaan tersebut dikembangkan dan ditingkatkan secara militan dan tajam oleh "Partai Nasional Indonesia" (PNI), yang dipimpin oleh Ir. Soekarno pada tahun 1927 - 1929. (315)

#### 4. *Interaksi Dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)*

Ide persatuan dan solidaritas Indonesia telah lama menjadi pikiran dasar Perhimpunan Indonesia di Nederland, yang harus disebar-luaskan oleh para anggotanya. Pikiran dasar ini untuk pertama kalinya terungkap dalam dua dalil dari "Deklarasi Prinsip" daripada kepengurusan Perhimpunan Indonesia tahun 1924, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Hanya suatu Indonesia yang bersatu, yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan antara kelompok, dapat mematahkan kekuasaan kaum penjajah. Tujuan bersama yakni membebaskan Indonesia - menuntut terwujudnya masa aksi kebangsaan yang sadar akan diri sendiri dan tegak atas kekuatan sendiri.
- b. Turut sertanya *semua* lapisan bangsa Indonesia dalam perjuangan bersama mencapai kemerdekaan adalah pula suatu syarat mutlak untuk mencapai cita-cita. (316)

Tentang kewajiban para anggota Perhimpunan Indonesia untuk mengadakan propaganda *persatuan* dan *solidaritas Indonesia* itu, majalah "Indonesia Merdeka" No. 3, Th. 1925, halaman 42, pernah menulis sebagai berikut :

"Adalah toegas poetera-poeteri tjendekia dari rakjat yang diperboedak, oentoek memindahkan pohon solidaritas jang berharga itu ke bumi Indonesia yang subur dan memelihara dengan kasih sayang agar kelak mendjadi sendjata untuk memerdekakan Indonesia". (317)

Akibatnya, banyaklah anggota Perhimpunan Indonesia yang telah pulang ke Tanah Air (Indonesia) bekerja mempropagandakan semangat persatuan Indonesia dan rasa senasib sepenanggungan. Demikianlah, ketika Dr. Soetomo, bekas ketua *Indische Vereeniging* (PI), telah mendirikan *Indonesische Studieclub* di kota Surabaya (Juli 1924), maka setahun kemudian (Juli 1925) ia menyelenggarakan "*Interinsulaire dag*" atau "Hari Interinsulair" di gedung "Perlindungan Pelajar", Sulung (Surabaya). Hari Interinsulair atau hari Nusantara yang diselenggarakan di kota Surabaya itu merupakan pertemuan besar antara suku dari seluruh pulau Jawa, Madura, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain sebagainya. Latar belakang dari Hari Interinsulair itu tak lain dan tak bukan adalah usaha untuk menyebarkan prinsip persatuan dan solidaritas Indonesia. (318) Kalau Dr. Soetomo dengan dasar prinsip persatuan dan solidaritas Indonesia berusaha mempersatukan suku-suku yang ada di Indonesia, maka Mr. R.M. Sartono dan R.P. Singgih berusaha mempersatukan organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Demikianlah pada tanggal 21 - 22 Agustus 1926 atas usaha *Algemeene Studieclub* di Bandung telah terbentuk suatu panitia yang bernama *Indonesische Eenheidscomite* (Komite Persatuan Indonesia) yang dipimpin oleh Mr. R.M. Sartono, bekas Sekretaris *Indische Vereeniging* (di s'Gravenhage (Nederland)). Sedangkan di Surabaya, atas usaha *Indonesische Studieclub* sementara itu muncul pula suatu panitia (= "Komite") yang bernama "Persatoean Kebangsaan" di bawah pimpinan R.P. M. Singgih. Dua Komite itu merupakan titik-titik nyalanya "Nasionalisme Indonesia" (= *Indonesische Nationalisme*), yang melancarkan propaganda "Gagasan persatuan Indonesia". (319) Adapun Komite-Komite itu bermaksud hendak mengikat sekalian partai dan perhimpunan-perhimpunan kaum nasionalis di dalam pimpinan yang satu, agar mereka dapat bekerja sama untuk merebut kemerdekaan nusa dan bangsa. Sebagai hasil daripada usaha kedua Komite itu, di mana orang-orang yang terkemuka dari *Algemeene Studieclub* dan *Indonesische Studieclub* bersama-

sama dengan para pemuka dari : PSI, Muhammadiyah, *Jong Islamiten Bond* (JIB), Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon dan Sarekat Madura, pada bulan September 1926 telah berhasil membentuk satu panitia yang bernama "Komite Persatoean Indonesia" untuk mendirikan suatu federasi. Tetapi usaha itu terpaksa dihentikan berhubung dengan tindakan keras, yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial, sehabis Peristiwa Pemberontakan PKI bulan Nopember 1926 (320).

Sementara itu, Ir. Soekarno yang sebagai ketua *Algemeene Studieclub* telah terkenal dengan sebutan Bung Karno, dalam tahun 1926 itu juga telah melontarkan ide persatuan dan solidaritas Indonesia yang berlandaskan kepada faham "Nasionalisme Indonesia". Ide tersebut dilontarkan berupa tulisan dalam majalah "Soeloeh Indonesia Moeda" (1926) dengan judul "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme". Dalam tulisan itu dijelaskan, bahwa faham Nasionalisme dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Maka dari itu, walaupun fikiran para pemimpin Indonesia tidak semuanya mencocoki semua kemauan dari masing-masing fihak, namun berdasarkan keinsyafan bahwa Persatuanlah yang membawa kita ke arah ke-Besaran dan ke-Merdekaan, maka Persatuan itu akan bisa tercapai. Rahasia Persatuan ialah, bahwa kita harus bisa menerima, tetapi kita juga harus bisa memberi. Kalau hal itu bisa terjadi, tinggallah menetapkan saja bentuk organisasi Persatuan yang bagaimanakah yang bisa berdiri dan siapakah yang akan menjadi organisatornya. (321)

Walaupun usaha "Komite Persatoean Indonesia" tidak berhasil, namun semangat persatuan Indonesia pada waktu itu telah tumbuh dengan suburnya di hati para pejuang Indonesia. Akibatnya, ketika Ir. Soekarno sebagai Ketua Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), yang melanjutkan usaha "Komite Persatoean Indonesia", mengusulkan adanya suatu barisan persatuan nasional, suatu barisan yang kokoh, dari semua Pergerakan Rakyat Indonesia, fihak H.O.S. Tjokroaminoto dan H.A. Salim menyambutnya dengan baik. Kongres Partai Sarikat Islam (PSI) di Pekalongan pada tanggal 28 September 1926 telah menyetujui usul PNI tersebut. Maka diadakanlah badan perencana yang terdiri dari Ir. Soekarno dari PNI dan Dr. Sukirman dari PSI. Rencana yang telah disusun oleh Ir. Soekarno dan Dr. Sukirman, segera pula dikirimkan kepada semua pucuk pimpinan partai-

partai, hingga pada tanggal 17 - 18 Desember 1927 di Bandung lahirlah "Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia" (PPPKI), yang akan bergerak untuk :

- a. menyatukan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi, dengan kerja bersama di antara anggota-anggotanya dan dalam pada itu;
- b. menghindarkan perselisihan sesama anggota-anggotanya yang hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan saja.

Di dalam PPPKI ditentukan tidak akan diperundingkan soal-soal yang mengenai asas-asas, karena dalam soal-soal ini partai-partai yang tergabung di dalam PPPKI mempunyai faham yang berlain-lainan (misalnya : agama, non-koperasi). Ditentukan pula bahwa hanya keputusan-keputusan yang diambil dengan suara bulat, yang dapat mengikat semua partai yang bergabung di dalam federasi itu, sedangkan sesuatu soal yang tidak terdapat kata mufakat yang bulat, maka keputusan di dalam soal tersebut dapat dijalankan hanya atas nama partai-partai yang menyetujuiinya.

Adapun yang tergabung di dalam PPPKI itu ialah : PNI diwakili oleh Ir. Soekarno dan Mr. Iskaq Tjokrohadi-surjo, PSI (diwakili oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan Sjahbuddin Latief), *Algemeene Studieclub* Bandung (Mr. Sartono, Mr. Budiarto dan Dr. Samsi), *Indonesische Studieclub Surabaya* (B.R.M.H. Sujono, R.P.S. Gondokusumo dan M. Sundjoto), Budi Utomo (Kusumo Utojo dan Sutopo Wonobojo), Pasundan (Otto Subroto, Bakri Surjaatmadja dan S. Sendjaja), Sarikat Sumatra (Dahlan Abdullah dan Parada Harahap), dan Kaum Betawi (M. Husni Thamrin), kemudian masuk pula Sarikat Madura, Tirtajasa, Celebes. Federasi PPPKI ini oleh suatu Majelis Pertimbangan (*Raad van Advies*) yang berkedudukan di Bandung dan terdiri dari seorang ketua, penulis, bendahara dan wakil-wakil partai-partai yang tergabung di situ. Untuk pertama kalinya Mr. Iskaq Tjokrohadi-surjo diangkat sebagai ketuanya dan Dr. Samsi Sastrowidigdo sebagai penulis merangkap bendaharawan. (322)

Dalam kongres pertama, yang diselenggarakan di *Surabaya* dari 30 Agustus sampai 2 September 1928, telah diterima baik suatu mosi, yang menetapkan bahwa bersatu padunya seluruh gerakan rakyat adalah sangat perlu. Mosi itu terkenal dengan sebutan "mosi dari rakyat untuk rakyat". Selain daripada itu

diminta kepada para anggota PPPKI jika berpropaganda di kalangan himpunannya masing-masing, janganlah ia hendaknya celamencela anggaran dasar dan haluan kumpulan-kumpulan lain, yang menggabungkan diri kepada PPPKI dan jangan pula ia mengeluarkan kata-kata, yang mungkin akan menyakitkan hati para anggota yang lain di dalam gabungan itu. Sekalian perselisihan antara anggota dengan anggota, akan diselesaikan dengan damai dan tertib.

Akhirnya kongres telah memilih Dr. Sutomo (dari *Studieclub*) sebagai ketua "Majelis Pertimbangan" (*Raad van Advies*) dan Ir. Anwar (dari PNI) sebagai penulis merangkap bendaharanya. Berhubung dengan itu maka kedudukan Pengurus Harian (*Dagelijksch Bestuur*) dan Majelis Pertimbangan PPPKI pindah ke Surabaya. (323) Dalam Kongres itu dibicarakan pula pentingnya "Bank Nasional Indonesia" (oleh Mr. Isqaq). Sehubungan dengan itu maka "Bank Bumiputra" yang didirikan oleh *Indonesische Studieclub* pada bulan Maret 1926, diubah dan dijadikan "Bank Nasional Indonesia". N.V. Bank Nasional Indonesia tersebut mulai bekerja pada bulan Januari 1930 dengan modal pertama f.500.000,- dan kantornya di "Asrama Perlindungan Pelajar" Jl. Sulung, Surabaya. (Tahun 1932 kantor BNI itu pindah ke Jl. Bubutan di Paviljun Gedung Nasional Indonesia. (324)

Di antara partai-partai yang duduk di dalam PPPKI, rupanya yang paling banyak pengaruhnya terhadap tindakan-tindakan federasi tersebut ialah PNI, sehingga atas usul PNI, konperensi PPPKI di Jogja (29 - 30 Maret 1929) telah menyetujui bahwa Perhimpunan Indonesia diangkat menjadi *pengawal* yang paling depan (di Eropa) pergerakan kebangsaan Indonesia. Begitu pula pada tahun 1930 (12 Januari) PPPKI mengadakan rapat di Jakarta untuk memprotes penangkapan para pemimpin PNI oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Oleh PPPKI akan didirikan "Fonds Nasional" untuk menyokong keluarga orang-orang yang sedang meringkuk di dalam tahanan. Bahkan dalam rapat tertutupnya telah diambil keputusan akan mengadakan suatu "Konggres Nasional Indonesia Raya" pada bulan Desember 1930 itu. (325) Namun Kongres itu terpaksa diundurkan sebagai akibat keadaan yang kurang menyenangkan berhubung dengan kecaman dari golongan Islam terhadap kaum nasionalisme dan juga oleh karena dalam perkara PNI yang belum ada keputusan. Perbuatan kecaman itu timbul semenjak PNI sudah menjadi lemah dan

dilancarkan sebagai balasan pada kecaman nasionalis yang pernah dilancarkan terhadap golongan Islam. Oleh karena itu terjadilah beberapa ketidakserasian antara golongan-golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Suasana tidak serasi itu makin menjadi, sehingga perkataan "Permufakatan" dari nama federasi itu diganti dengan kata "Persatuan" dan dasar mufakat dalam mengambil keputusan diganti dengan dasar suara terbanyak. Perubahan dasar mufakat dengan dasar suara terbanyak itu kemudian disahkan dalam konggres Indonesia Raya di Surabaya.

Dengan tujuan untuk meredakan ketegangan yang terjadi di antara beberapa partai politik di Indonesia, seperti keterangan antara Partindo dengan PNI-Pendidikan, Budi Utomo dengan Partai Islam, PSII dengan PBI dan lain sebagainya, maka pada tanggal : 1 - 3 Januari 1932 PPPKI menyelenggarakan "Konggres Indonesia Raya" di Surabaya, yang dipimpin oleh Dr. Sutomo dan dihadiri oleh para anggota PPPKI dan golongan-golongan yang bukan anggota PPPKI (misalnya utusan-utusan dari Sarekat Ambon, Partai Selebes, *Timors Verbond*, Partindo, Vaksentral Persatuan Vakhonden Pegawai Negeri, Persatuan Kaum Christen dan Perkumpulan Politik Katholik Jawa). Konggres Indonesia Raya yang pertama tersebut diadakan di "Gedung Nasional Indonesia" di Jl. Bubutan Surabaya, bersesuaian dengan keluarnya Bung Karno dari penjara Sukamiskin di Bandung. Konggres tersebut ternyata dapat mencapai tujuannya, sehingga ketegangan-ketegangan yang dulunya agak panas, (lebih-lebih antara PNI-Pendidikan dengan Partindo, sudah menjadi reda kembali. Dan nama federasi secara sah diganti dengan "*Persatuan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia*". (326)

Konggres Indonesia Raya pertama itu kemudian disusul dengan konperensi "*Persatuan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia*" pada bulan Maret 1932 di Surabaya, yang memutuskan bahwa tempat kedudukan "Majelis Pertimbangan" (*Raad van Advies*) PPPKI (Baru) dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta, karena tempat tinggal para pengurus besar yang tergabung di dalam PPPKI itu kebanyakan berada di Jakarta. Berhubung dengan hal itu, maka Pengurus Harian (*Dagelijksch Bestuur*) yang terdiri atas Dr. Sutomo dan Mr. Latuharhary, diganti dengan Husni Thamrin dan Otto Iskandardinata. (327) Dengan demikian maka sejak tahun 1932 nama "*Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia*" sudah beru-

bah menjadi "Persatuan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia" dan sejalan dengan itu peranan Surabaya sebagai PPPKI sudah digeser oleh kota Jakarta.

##### 5. *Interaksi Dengan Sumpah Pemuda*

Data Sejarah Indonesia telah menunjukkan, bahwa saat berdirinya Budi Utomo oleh bangsa Indonesia dipakai tonggak sejarah Kebangkitan Nasional. Meskipun demikian pada waktu itu penduduk Hindia Belanda (= Indonesia) pada umumnya masih dikuasai oleh pandangan yang bersifat "regio-centris" (= daerah = kepulauan) dan *ethno-centris* (= kesukuan). Di kalangan para pemimpin pergerakan nasional pandangan semacam itu menimbulkan faham nasionalisme sempit, yakni faham nasionalisme daerah (= *regio = nasionalisme*) dan nasionalisme suku (= *ethno-nationalisme*). Di Jawa Timur faham yang demikian itu nampak pada anggaran dasar dan nama-nama dari organisasi-organisasi pergerakan nasional, misalnya : nama *Jong Java* cabang Surabaya (didirikan oleh Sukarno), nama "Sarekat Ambon" cabang Surabaya (didirikan oleh J.A. Syaranamual bulan Februari 1923), (328). Perserikatan Madura (berdiri tahun 1920 di Surabaya), Sarekat Madura (berdiri tahun 1925 di Surabaya) (329) dan lain sebagainya.

Ketika kaum pergerakan nasional di Hindia Belanda masih bergerak dengan faham nasionalisme yang sempit, maka para mahasiswa Bumiputra (= Indonesia) di negeri Belanda yang tergabung dalam organisasi *Indische Vereeniging* telah berpandangan Indonesia-sentris dan mengembangkan faham nasionalisme sempit menjadi nasionalisme Indonesia.

Hal itu nampak dengan adanya perubahan nama organisasi mereka dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* (tahun 1922) yang kemudian pada tahun 1924 diubah lagi menjadi "Perhimpunan Indonesia"; beserta perubahan nama majalahnya dari "Hindia Putra" menjadi "Indonesia Merdeka" (tahun 1923). (330) Faham nasionalisme Indonesia sebagai strategi perjuangan Perhimpunan Indonesia itu telah ditegaskan dalam "Deklarasi Prinsip" kepengurusan PI. tahun 1924 dan "Statemen Sukiman" tahun 1925 yang telah mengungkapkan betapa pentingnya persatuan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Merdeka. (331) Bahkan pada tahun 1925 itu juga Perhimpunan Indonesia telah mewajibkan para anggotanya untuk mengadakan

propaganda persatuan dan solidaritas Indonesia. Maka dari itu tidaklah mengherankan kalau kedatangan para bekas anggota Perhimpunan Indonesia di Hindia Belanda akan membawa angin baru dalam pergerakan nasional di Indonesia (Hindia Belanda).

Demikianlah Dr. Sutomo, bekas ketua *Indische Vereeniging* dan bekas anggota *Indonesische Vereeniging*, setelah pulang dari negeri Belanda mendirikan *Indonesische Studie Club* di kota Surabaya pada tanggal 12 Juli 1924. (332) Aktivitas organisasi ini antara lain berupa propaganda nasionalisme Indonesia. Untuk ini pada tanggal 11 Juli 1925 *Indonesische Studie Club* mengadakan "Hari Interinsulaire" (= *Interinsulaire dag* = Interinsulaire conferentie) di kota Surabaya dan sebagai tindak lanjut dari keputusan konferensi ini maka terbentuklah "Komite Persatoean Kebangsaan" yang diketuai oleh R.P. mr. Singgih.

Kelahiran *Studie Club* di Surabaya, merupakan rintisan lahirnya *studieclub-studieclub* di kota-kota lain, seperti di Bandung, Solo, Jogja, Jakarta, Semarang dan Bogor. Di antara *studieclub* tersebut yang paling radikal adalah *Studie Club* Bandung yang terkenal dengan sebutan *Algemeene Studie Club*, yang didirikan oleh Ir. Sukarno dengan dukungan para bekas anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali dari negeri Belanda (tahun 1925). Dengan maksud untuk mempersatukan organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia, maka *Algemeene Studieclub* itu pada tahun 1926 membentuk suatu panitia *Indonesische Eenheidscomite* dengan Mr. R.M. Sartono sebagai ketuanya. Kedua Komite tersebut, ternyata merupakan titik nyalanya "Nasionalisme Indonesia" yang melancarkan propaganda "gagasan persatuan Indonesia". (333)

Hasrat untuk bersatu di kalangan pemuda kemudian dinyatakan dalam Konggres Pemuda I, yang dilangsungkan di Jakarta dari tanggal 30 April s/d 2 Mei 1926. Dalam Konggres tersebut muncul cita-cita untuk mencapai Negara Kesatuan Indonesia yang Merdeka. Muncul pula cita-cita agar supaya bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan dan muncul juga cita-cita untuk menggalang potensi kaum muda dalam suatu wadah organisasi. (334)

Dengan berakhirnya Konggres Pemuda I itu, cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan untuk mencapai Indonesia Merdeka telah dilontarkan oleh kaum muda. Sebagai salah satu realisasi pembentukan wadah nasionalisme Indonesia yang

terkandung dalam hati nurani para pemuda, maka sejumlah pemuda di Bandung dengan bantuan *Algemeene Studie Club* telah mendirikan organisasi pemuda "*Jong Indonesia*" (15 - 8 - 1926). *Jong Indonesia* itu kemudian pada tahun 1927 nama diganti dengan "Pemuda Indonesia" dan pada tahun itu pula ditetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. (335) Organisasi "Pemuda Indonesia" itu segera meluas dan mempunyai cabang-cabangnya di Jogja, Solo, *Surabaya* dan Jakarta. Sedangkan menurut anggaran dasarnya, tujuan Pemuda Indonesia ialah : "memperluas dan memperkuat idee kesatuan Nasional Indonesia". (336) 54; PB. 393) Propaganda nasionalisme Indonesia yang sedang menentang kolonialisme makin dipergiat setelah para pelajar dari tiga sekolah tinggi (RHS, *STOVIA*, dan THS) mendirikan organisasi "Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia" (PPPI) di Jakarta (September 1926). PPPI yang telah dijiwai oleh Perhimpunan Indonesia itu mempunyai suatu prinsip bahwa persatuan Indonesia adalah senjata yang kuat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. (337)

Hasrat untuk menggalang persatuan nasional Indonesia rupanya juga meresap ke dalam tubuh organisasi kaum tua. Hal itu nampak dengan munculnya "*Komite Persatoean Indonesia*" (Sept. 1926) yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh *Indonesische Studie Club*, *Algemeene Studie Club*, PSI, Muhammadiyah, *Jong Islamieten Bond*. Pasundan, Perserikatan Minahasa, Sarekat Ambón dan Sarekat Madura ; yang bertujuan untuk mendirikan suatu federasi. Walaupun usaha "*Komite Persatoean Indonesia*" itu tidak berhasil, namun sebagai kelanjutannya atas inisiatif dari PNI telah berhasil mengadakan federasi dengan nama "Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia"(PPPKI) pada tahun 1927. (338)

Dengan demikian jelaslah, bahwa saat menjelang tahun 1928 cita-cita persatuan Indonesia telah menguasai suasana politik pergerakan nasional Indonesia. Rasa satu bangsa Indonesia telah diinsyafi oleh kaum pergerakan. Pengertian tanah air Indonesia telah meresapi benak mereka, begitu pula bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia dari tahun ke tahun pemakaiannya makin berkembang. Dengan demikian waktunya sudah matang untuk mencetuskan atau "Memvocal-kan" cita-cita nasionalisme Indonesia (= persatuan Nasional Indonesia). Dalam situasi yang demikian itu, tampil kaum muda untuk mem-

vocal-kan cita-cita tersebut.

Demikianlah atas prakarsa PPPI, dibentuklah Panitia Kongres Pemuda ke II, dengan Sugondo Djojopuspito sebagai ketuanya dan wakil-wakil dari beberapa organisasi pemuda sebagai anggotanya, serta beberapa tokoh dari kaum tua sebagai penasihatnya. Selanjutnya pada tanggal 27 s/d 28 Oktober 1928 berlangsunglah Kongres Pemuda ke II di kota Jakarta. Dalam rapat umum yang terakhir, pada tanggal 28 Oktober 1928 jam 17.30 s/d 19.30 di Kramat 106, telah terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Demikianlah setelah dalam waktu istirahat W.R. Supratman dengan gesekan biolanya, secara instrumentalis, selesai memainkan lagu gubahannya "Indonesia Raja"; dan rapat umum telah dibuka kembali, maka Sugondo Djojopuspito dengan suara keras membacakan usul resolusi yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

#### POETOESAN CONGRES PEMOEDA - PEMOEDI INDONESIA

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanya, *Jong Java*, *Jong Soematra* (Pemuda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, *Jong Islamieten Bond*, Jong Celebes, Pemoeda kaoem Batawi dan Perhimpoean Peladjar-Peladjar Indonesia;

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1928 di negeri Djakarta ;

Sesoedahnja mendengar pidato-pidato pemitjaraan jang diadakan didalam kerapatan tadi ;

Sesoedah menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pemitjaraan ini :

Kerapatan laloe mengambil kepoetoesan :

Pertama : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA  
MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG  
SATOE, TANAH INDONESIA.

Kedua : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA  
MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE,

## BANGSA INDONESIA.

Ketiga : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA  
MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN,  
BAHASA INDONESIA.

Setelah mendengar poetoesan ini kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wadajib dipakai oleh segala perkoempoelan kebangsaan Indonesia.

Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannya :

KEMAOEAN  
SEDJARAH  
BAHASA  
HOEKOEM ADAT  
PENDIDIKAN DAN KEPANDOEAN

dan mengeloearkan pengharapan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan.

Pembacaan resolusi oleh Sugondo Djojopuspito tersebut kemudian disusul dengan uraian penjelasan oleh Muh. Yamin.

Setelah uraian tersebut selesai, usul resolusi itu kemudian disahkan sebagai keputusan Konggres. (339) Keputusan Konggres inilah yang terkenal dengan Sumpah Pemuda.

Adapun peristiwa Sumpah Pemuda itu bagi bangsa Indonesia mempunyai arti politis dan psikologis. Politis berarti, bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa haruslah mempunyai perumahan sendiri, yaitu Negara Merdeka. Psikologis berarti bahwa rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia harus ditumbuhkan dan dikembangkan, sebagai syarat mutlak untuk mencapai Kemerdekaan bangsa dan Tanah Air. Kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan melalui persatuan, yalah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di sinilah letak pentingnya arti Sumpah Pemuda 1928, bahwa Pemuda melihat Indonesia dalam keseluruhan dan tidak lagi secara kedaerah (*regional*) atau secara kesukuan (*ethnis*).

6. *Kegiatan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kehidupan :*  
*Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama*

a. Ekonomi

Setelah Perang Dunia Pertama selesai, negeri Belanda sebagai penjajah mau menjual hasil industrinya ke Hindia Belanda (= Indonesia). Hal itu berarti menghalang-halangi pertumbuhan industrialisasi Indonesia selanjutnya, sehingga industri yang sudah didirikan oleh orang Indonesia banyak yang terpaksa ditutup dan banyak kaum buruh yang menganggur. Juga dari Jepang, Amerika Serikat dan Jerman kemudian banyak hasil industri yang membanjiri Indonesia, yang membawa akibat makin banyaknya perusahaan bangsa Indonesia yang ditutup. Bertambahnya jumlah pengangguran dan makin mahalnnya harga beras, memberi kemungkinan timbulnya kegelisahan yang sangat di antara rakyat umum (340) Kegelisahan rakyat itu makin menjadi, setelah Gubernur Jenderal Fock mengumumkan *politik penghematan yang radikal* untuk membuat Anggaran Belanja Negara menjadi seimbang (1922).

Dengan cara radikal Pemerintah Hindia Belanda melakukan penghematan pada budget Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan, dan dengan demikian kepentingan rakyat yang paling vital menjadi terpukul. Selain dari pada itu penduduk (Bumiputra) yang sudah merasakan akibat celaka dari pada konjunktur itu diharuskan memikul beban yang lebih berat lagi. Rakyat (Bumiputra) dibebani bermacam-macam jenis pajak yang jauh melampaui kemampuannya untuk membayar. Sejauh mana kiranya tekanan pajak terhadap kehidupan ekonomis rakyat Bumiputra pada waktu itu, datanya dapat dijumpai dalam laporan "Commissie-Meyer Ranneft-Huender".

"Commissie-Meyer Ranneft-Huender", yang dibentuk dalam tahun 1922, itu berkewajiban menyelidikkan hal tenakan pajak (= belasting) atas diri rakyat di tanah Jawa dan Madura. Data dari laporan tersebut memberikan petunjuk, bahwa hasil pungutan pajak dari rakyat makin lama makin memberi keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda. Misalnya, hasil pungutan pajak dari tahun 1919 sampai 1921 hanya sekitar f. 23.5 'a f. 24.-juta, maka pada tahun 1922 menjadi f. 28.1 juta, dalam tahun 1923 menjadi f. 31.7 juta dan dalam tahun 1924 naik menjadi f. 32.8 juta. Di daerah-daerah dari pulau Jawa dan Madura pajak tahunan yang harus dibayar oleh penduduk Bumiputra antara 5% sampai 15% atau rata-rata 10% daripada pencaharian mereka. Sedangkan penghasilan rata-rata per keluarga Bumiputra di Jawa dan Madura itu adalah sebesar f. 225 setahun ; bagi rata-rata ke-

luarga yang beranggotakan sebanyak 4,9 orang (= 5 orang). Hal itu berarti bahwa rata-rata penghasilan setahun per kepala adalah sebesar f. 45,- dalam setahun.

Dengan penghasilan yang sangat minimal dan pajak yang berat itu dengan sendirinya penduduk Bumiputra makin lama makin menjadi bungkuk karena beban yang berat itu. Bagi golongan Eropa yang rata-rata per keluarga berpenghasilan f. 9000,- sampai f. 10.000,- setahun, pajak 10% setahun tidak begitu berat, namun bagi penduduk Bumiputra yang berpenghasilan minimal hal itu merupakan pukulan yang berat. Pukulan itu kamin terasa ketika dalam majalah "*De Economist*" tahun 1926 meng- ungkapkan suatu berita, bahwa bagi golongan yang berpenghasilan rendah dari bangsa *non-Bumiputra terdapat* penurunan persentasi pajak, sedangkan bagi mereka dari kalangan Bumiputra, *penurunan itu tidak ada*. Yang lebih terpukul lagi ialah golongan kaum tani, yang harus membayar *pajak bumi* (pajak natura) di samping bermacam-macam pajak lainnya yang juga dibebankan kepadanya (misalnya, pajak kepala dan pajak-pajak desa). Akibatnya banyak tanah milik petani yang ditinggalkan karena tekanan pajak yang terlalu berat untuk dipikulnya. Demikianlah keadaan kehidupan ekonomis penduduk bangsa Indonesia yang menderita kemiskinan makin meningkat dan hampir roboh di bawah tekanan pajak yang berat. (341)

Dalam situasi ekonomi rakyat seperti tersebut di atas, organisasi *Indonesische Studie Club* yang dipimpin oleh Dr. Sutomo dan berkedudukan di kota Surabaya, telah melakukan kegiatan sosial-ekonomi yang bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat. Kegiatan sosial-ekonomi tersebut antara lain berupa pendirian "Bank Bumiputra" dan "Persatuan Cooperasi Indonesia".

Dengan tujuan untuk menolong kehidupan masyarakat umum dan usaha pemberantasan lintah darat (= *woeker*), maka pada bulan Maret 1926 bagian *Economische Commissie* dari *Indonesische Studie Club* telah membuka "Bank Bumiputra" di Palmenlaan (sekarang Jl. Panglima Sudirman 33) no. 19 Surabaya. Modal pertama dari Bank Bumiputra ini semula F.10.000,- dan B.R.M.H. Soejono diangkat sebagai direktornya. Yang menjadi Administratir ialah M. Soendjoto dan R.M. Soehirman sebagai pembantunya. Para anggota lainnya terdiri dari Dr. Sutomo, R.M.P. Hatmosoerono, dan R. Sudirman. Dengan suksesnya

Bank Bumiputra ini, maka dalam kongres PPPKI yang pertama (1 September 1928 di Surabaya) Bank tersebut diubah menjadi *Bank Nasional Indonesia*. Akibatnya berdasarkan *Staatsblad* 1929 no. 437, maka pada bulan Januari 1930 N.V. Bank Nasional Indonesia mulai bekerja dengan modal f. 500.000,- dengan kantornya di Sulung (Asrama Pelindung Pelajar). (342)

Di samping pendirian Bank tersebut, *Indonesische Studie Club* juga mengadakan gerakan pendirian koperasi, baik koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Koperasi konsumsi yang kecil-kecil kemudian dipusatkan dalam "Persatuan Cooperatie Indonesia" (PCI) dengan kantornya di Plampitan. (343) Selanjutnya, atas permintaan dari Prof. Dr. J.H. Boeke, *Adviseur voor Volkscredietwezen & Cooperatie*, maka pengawasan dan pimpinan 9 buah Bank koperasi Desa diserahkan kepada *Indonesische Studie Club*. Penyerahan kekuasaan itu ditetapkan dengan *besluit* dari "*Adv. voor Volkscredietwezen & Cooperatie*" tanggal 17 September 1928 No. 302111 dan disertai pula *besluit* dari pemerintah Hindia Belanda tanggal 12 September 1928 No. 12. dan pimpinan tersebut lebih intensif, maka oleh *Indonesische Studie Club* diserahkan kepada suatu *Commissie van Toezicht yang* terdiri dari: Ketua Mr. Dr. Subroto, M. Soendjoto sebagai Penulis, sedang para anggotanya terdiri dari BRMH. Soejono, R. Sudirman dan R.P. S. Gondokusumo. Bahwasannya atas dasar itu perasaan kerja sama dapat lebih mendalam, terbukti dengan tambahnya jumlah koperasi dari 9 buah menjadi 33 buah pada tahun 1931 (343)

#### b. Sosial

Sejak permulaan abad ke-20 telah ada tiga kelompok sosial pribumi (= Bumiputra) yang bersaing dalam memperebutkan pengaruh di antara penduduk Indonesia. Kelompok aristokrasi feodal yang berusaha mempertahankan struktur sosial tradisional dengan adanya pelapisan masyarakat (= stratifikasi sosial) *priyayi dan wong cilik* (= orang kecil), di satu pihak. Sedangkan kelompok para pemimpin agama Islam dan kelompok intelektual, di pihak lain, yang berusaha mengadakan perubahan sosial, dari corak masyarakat kolonial dan "feodal" menjadi masyarakat yang demokratis dan merdeka. (345) Salah satu kegiatan untuk mendemonstrasikan masyarakat Bumiputra pernah dilancarkan oleh Sarekat Islam cabang Surabaya dalam bentuk gerakan "Dja-

wa Dwipa". Untuk menggerakkan semangat rakyat jelata yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan kaum "Kromo", maka para pemimpin Sarekat Islam pada tahun 1920 mendirikan suatu gerakan dengan nama "Djawa Dwipa". Gerakan tersebut berpusat di Surabaya dan dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto, Tjokrosoedarmo, Tirtodanoedirdjo dan lain-lainnya.

Gerakan "Djawa Dwipa" tersebut dibangun atas dasar kerakayatan yang seluas-luasnya. Dalam gerakan itu, anggota-anggotanya satu sama lain, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Jawa "Kromo" (= Halus), yaitu bahasa Jawa yang biasanya dipergunakan oleh si-Kromo terhadap golongan "menak" (= priyayi). Seluruh anggota harus mempergunakan bahasa Jawa "Ngoko" (= kasar) saja. Organisasi "Djawa Dwipa" menginstruksikan kepada para anggotanya agar sebut-sebutan : Raden, Raden Mas, Bendoro dan lain-lainnya lagi yang berbau feodal, harus dikuburkan.

Dengan gerakan "Djawa Dwipa" itu ternyata perasaan senasib seperjuangan makin cepat dapat digalang di kalangan rakyat. Perasaan rendah diri (= *minderwaardigheids-complex*), berangsur-angsur dilemparkan jauh-jauh. Semboyan para anggota "Djawa Dwipa" ialah : "Sama rata sama rasa - satu menderita semua turut merasa - satu senang semua bahagia". Lencana gerakan ini berwujud *segi-tiga dan di tengah-tengah* terdapat pohon beringin, diapit oleh padi. (346)

### c. Pendidikan

Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, pemerintah Hindia Belanda mulai mengadakan Sekolah Lanjutan Atas yang terkenal dengan sebutan AMS atau *Algemeene Middelbare School*. Sekolah AMS itu merupakan lanjutan dari sekolah MULO dan merupakan persiapan untuk perguruan tinggi, dengan lama pendidikan 3 tahun. Adapun sekolah AMS yang pertama kali di Indonesia didirikan di kota Yogyakarta pada tahun 1919 (5 Juli 1919). Munculnya sekolah AMS afdeling B. (bagian Ilmu Pasti dan Alam) di Yogyakarta itu kemudian pada tahun 1926 diikuti dengan berdirinya AMS afd. B di kota Jakarta dan di kota Malang.

Walaupun di Jawa Barat pernah muncul beberapa perguruan tinggi, seperti : THS atau *Technische Hoge School* (di Bandung pada tahun 1920) RHS atau *Rechts Hoge School* (di Jakarta pada tahun 1924) dan GHS atau "*Geneeskundige Hoge School*"

(di Jakarta pada tahun 1927), namun di Jawa Timur, sampai berakhirnya Pemerintah Hindia Belanda (1924), perguruan-perguruan tinggi semacam itu belum ada. (347)

Selain daripada itu, dengan adanya politik penghematan dari Gubernur Jenderal Fock (1922) yang membatasi budget pertanian, pendidikan dan kesehatan, rupanya memberi angin baru bagi perkembangan sekolah swasta. Demikianlah pada tanggal 25 Desember 1925 di kampung Plampitan Gg. IX Surabaya lahir "Perguruan Taman Siswa" cabang Surabaya yang kemudian diikuti dengan munculnya sekolah Taman Siswa di Kranggan dan di Tumenggungan berupa Taman Indriya dengan 7 guru dan 420 murid; serta sekolah rendah di Pacarkeling dengan 1 guru dan 32 murid. Tetapi di kota Surabaya itu siswa tidak tinggal menetap di sekolah bersama-sama gurunya, bahasa Belanda mulai dipakai sebagai bahasa pengantar, pengajaran musik dan nyanyian berbeda dengan apa yang telah dilaksanakan di pusat budaya Jawa Jogyakarta. Banyak yang mementingkan Taman Indriya sebagai usaha regenerasi anak-anak kota. Sedangkan hasil pengajarannya pun termasuk baik juga. Dari tahun kursus 1927 telah lulus 9 murid untuk ujian pegawai rendah, 4 untuk MULO, 10 untuk *Burger Avond School*. Dari tahun kursus 1928 telah lulus 12 orang untuk ujian pegawai rendah. (348)

Munculnya sekolah-sekolah Taman Siswa di Jawa Timur pada umumnya dan di Surabaya pada khususnya, berarti menambah jumlah lembaga pendidikan yang menaburkan benih semangat kebangsaan Indonesia yang dengan penuh kepercayaan kepada kekuatan diri sendiri berjuang untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, di dalam jiwa angkatan muda.

#### d. Budaya

Dari tahun 1911 sampai dengan 1930 di Jawa Timur pernah berkembang kesenian Ludruk Besutan, yang pada tahun 1931 lalu diubah menjadi Ludruk Sandiwara. Permainan yang dipertunjukkan dalam Ludruk Besutan itu banyak memaparkan cerita-cerita yang bersifat *novelle*, yaitu cerita pendek, yang mengisahkan suatu kejadian secara tertentu. Inti sari dalam ceritanya menggambarkan "kakang Besut" mencari pekerjaan ke Surabaya yang kemudian disusul oleh istrinya. Antara lain dilukiskan pula perjalanan mereka dari Jombang melalui Mojokerto terus ke Surabaya dengan selalu menjumpai rintangan dalam

perjalanan mereka. Adapun pemain Ludruk Besutan yang terkenal antara lain : Cak Ngari (almarhum), Cak Gondo Doerasim (almarhum. Cak Daoek alias Haji Doelatip (almarhum), Cak Koesin (almarhum), Pak Doel, Satari dan Kasijan. Di antara para pemain tersebut yang termasyhur ialah Cak Ngari dan Cak Gondo Dorasim.

Cak Ngari adalah orang Surabaya asli yang selalu memegang peranan sebagai "Kakang Besut". Selain itu ia juga seorang pencipta gending Ijo-Ijo dan Emek-Emek yang sering dipakai dalam "tajuban" dalam jaman kolonial. Sedangkan Cak Gondo Doerasim juga seorang Surabaya asli, selain sebagai pemain pelawak dalam Ludruk juga terkenal sebagai seorang penyair puisi atau prosa. Dalam jaman Jepang ia terpaksa mendapat siksaan *Kempetai* Jepang karena syairnya yang berbunyi : "*Bekupon omahe dara, sajege ana Nippon awakku sangsara*" (= Bekupon rumahnya merpati, sejak ada Nippon badanku sengsara, setengah mati)(349).

### c. Agama

Di Jawa Timur pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dipergunakan untuk penyebaran Agama dan tempat mempelajari agama Islam. Selanjutnya lembaga ini selain menjadi pusat penyebaran dan belajar agama Islam juga menghasilkan tenaga-tenaga bagi pengembangan agama dan pemuka-pemuka dalam kehidupan masyarakat. Gerak bagi penyebaran agama, gerakan bagi pemahaman kehidupan keagamaan dan gerakan-gerakan sosial, berpadu dalam pekerjaan pondok pesantren . (350) Akibatnya di Jawa Timur muncullah pondok pesantren yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat pada jamannya.

Demikianlah pada tahun 1926 di desa Gontor (Ponorogo) berdirilah pondok pesantren "Daarusalaam" yang dalam masyarakat Jawa Timur kemudian terkenal dengan nama "Pondok Modern Gontor". Adapun pendiri Pondok Modern Gontor itu terdiri dari tiga bersaudara, yakni : Ahmad Sahal, Zainudin Fanie dan Imam Zarkasji. Menurut biodata genealogis tiga bersaudara pendiri Pondok Modern Gontor itu masih keturunan Kyai Ageng Mohammad Besari pendiri Pondok Pesantren Tegalsari. (351)

Pengakuan dan pengharapan masyarakat yang tertuang dalam pemberian nama di atas didasarkan kepada kenyataan bah-

wa pondok modern itu menunjukkan segi-segi perbedaan dengan sistem pondok tradisional atau pendahulunya. Perbedaan tersebut terletak dalam penggunaan sistem sekolah untuk segi pendidikan dan pengajarannya, yang merupakan sintesa dari sistem : a. Universitas Al-Azhar dengan tugasnya sebagai kubu pertahanan Islam, wataknya yang sangat luas dan keabadiannya; b. Pondok Syanggit di Afrika Utara dengan sistem beasiswa yang luas; c. Universitas Aligarh di India dengan usaha-usaha yang tak kenal lelah dalam mengadakan modernisasi ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan jaman; dan d. Santiniketan dari Tagore di India dengan sistem kebudayaannya dan kekeluargaan serta kedamaiannya. Perbedaan lainnya dengan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur dapat dicari pula dalam unsur-unsur, sikap-sikap dan cara-cara mereka menanggapi kebudayaan Barat yang dibawa oleh Pemerintah Kolonial ke Jawa Timur.

Meskipun telah modern dalam sistem pendidikan dan pengajarannya, lembaga tersebut tetap mempertahankan ideologi pendidikan pondok dengan harapan dapat dikembangkan nilai-nilai positif yang tersimpul di dalamnya dan dipertahankannya kontinuitas sejarah dengan lembaga pendidikan pondok pesantren tradisional. Bagi pondok modern ini, di samping kontinuitas sejarah dan ideologi, ternyata diperkuat juga dengan kontinuitas genealogis. Hal itu nampak dalam hubungan kekerabatan antara pendiri Pondok Pesantren Tegalsari dengan Pondok Pesantren Modern Gontor. (352) Hubungan kekerabatan antar pondok pesantren di Jawa Timur ini dapat menimbulkan cara berfikir "supra-desa," (353) yang dapat menjadi benih cara berfikir Indonesia-sentris yang melampaui cara berfikir regio-sentris ataupun etno-sentris.

### BAB III

#### KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 - 1942

##### A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN ± 1930

###### 1. *Politik keras terhadap gerakan non-koperasi*

Sebelum sampai kepada apa sebab serta macam apa politik keras terhadap gerakan non-koperasi ini, perlu diketahui bagaimana sebenarnya gerakan non-koperasi. Pengertian dasar dari gerakan non-koperasi ialah suatu cara untuk mencapai kemenangan dalam cita-cita dengan kebiasaan sendiri, tenaga sendiri, usaha sendiri, kepandaian sendiri, keringat sendiri dan fi'il keberanian sendiri. Lebih jelasnya merupakan politik menyusun masyarakat kita secara positif dengan tenaga dan usaha sendiri. Politik tidak mau bekerja sama dengan kaum penjajah di atas semua lapangnya perjuangan politik. Politik memboikot dewan-dewan kaum penjajah, baik yang ada di sini maupun yang ada di negerinya. 1)

Sedangkan ruang lingkup usahanya non-koperasi tidak berhenti di luar dinding dewan-dewan saja, tetapi meliputi semua bagian dari pada perjuangan politik. Maka non-koperasi berisi radikalisme, baik radikalisme hati, radikalisme pikiran, radikalisme sepak terjang maupun radikalisme di dalam semua *innerlijke* dan *uiterlijke houding*. Jadi non-koperasi meminta kegiatan, meminta *radicale activiteit*. Dengan tujuan mendidik rakyat percaya kepada diri sendiri, demi kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang sedang menderita akibat tekanan pemerintah jajahan. 2)

Dengan demikian jelas bahwa gerakan non-koperasi adalah gerakan pembela dan pembina masyarakat dengan menyandarkan kemampuan serta kekuatan sendiri tanpa mau bekerja sama dengan pemerintah jajahan. Hal semacam ini bagi pemerintah Belanda dirasa sangat berbahaya, oleh karena itu untuk mengatur kehidupan gerakan-gerakan nasional dikeluarkanlah bermacam-macam peraturan antara lain sebagai berikut :

- a. R.R. 111 (*Regerings Reglement* S. 1855 No. 2) yang berbunyi : "Perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat yang bersifat politis atau yang dapat mengan-

cam ketenteraman umum dilarang di Hindia Belanda (Indonesia). Pelanggaran terhadap larangan ini akan diambil tindakan sesuai dengan keadaan". 3)

- b. Disebabkan R.R. 111 menimbulkan tuntutan rakyat, maka dikeluarkan peraturan, S. 1915 No. 215 yang isinya :
  - 1) Hak penduduk untuk mengadakan perkumpulan dan rapat-rapat diakui.
  - 2) Pelaksanaan hak ini untuk kepentingan umum diatur dan dibatasi dengan peraturan-peraturan.4)
- c. Peraturan mengenai hak dimaksud adalah peraturan S. 1919 - 27 jo 561 yang berbunyi :
  - 1) Untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan tidak diperlukan izin Pemerintah ;
  - 2) Seseorang boleh menjadi anggota partai politik jika ia telah berumur 18 tahun. 5)

Disebabkan adanya peningkatan kegiatan baik dari para pemimpin pergerakan maupun anggota masyarakat, maka dikeluarkan lagi peraturan pasal 5 yang berbunyi : "Untuk mengadakan rapat umum diperlukan izin Pemerintah. 6) Peraturan ini dirasa sangat keras bagi kaum pergerakan nasional, akibatnya usaha untuk melakukan kegiatan semakin keras. Semakin dihalangi oleh pemerintah Belanda, semakin mantep usaha yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan dikeluarkannya lagi peraturan yang lebih keras lagi yakni K.U.H.P. ( S.1926 - 139 dan 140) pasal 153 bis dan 153 ter yang bunyinya sebagai berikut :

- d. 153 bis :

Barang siapa yang dengan sengaja mengeluarkan pikirannya dalam perkataan, tulisan atau gambar yang memuji atau menganjurkan gangguan terhadap ketertiban umum atau hendak merobohkan atau menyerang kekuasaan baik yang ada di negeri Belanda maupun yang ada di Hindia Belanda, biarpun secara langsung ataupun tidak langsung ataupun dengan kata-kata yang samar-samar dihukum penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus gulden ;

- e. 153 ter :

Barang siapa yang secara terang-terangan memperli-

hatkan atau menunjukkan atau menyebarkan tulisan atau gambar yang di dalamnya memuji atau menganjurkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum atau hendak merobohkan ataupun menyerang kekuasaan yang sah baik yang ada di negeri Belanda maupun yang ada di Hindia Belanda dengan maksud menyebarkannya atau menyiarkannya lebih luas lagi dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus gulden. 360

Dengan adanya peraturan tersebut jelas bahwa pemerintah jajahan ingin menghancurkan cita-cita pergerakan nasional. Oleh karena itu kaum pergerakan nasional juga harus hati-hati, sehingga partai politik yang gerakannya betul-betul non-kooperatif tidak banyak, walaupun pergerakan lainnya juga sama-sama mempunyai cita-cita Indonesia merdeka. Salah satu pergerakan nasional dipimpin oleh Ir. Sukarno, Ir. Anwar, Dr. Samsi dan lain-lain.

Adapun asas dan tujuan PNI, adalah sebagai berikut :

- a. Imperialisme Belanda menyebabkan Indonesia berabad-abad lamanya dijajah oleh Belanda. Dengan jalan monopoli, kerja paksa, tanam paksa, Belanda berusaha memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Akibatnya adalah bahwa rakyat Indonesia sengsara dan sangat mundur dalam segala lapangan kehidupan, baik di bidang perekonomian maupun di bidang kebudayaan, sosial dan lain-lain. Dengan demikian rakyat asli Indonesia mempunyai kedudukan yang serendah-rendahnya dan segala peraturan Belanda yang mengenai orang-orang Indonesia adalah tidak wajar ;
- b. Untuk memperbaiki kembali keadaan masyarakat Indonesia agar rakyat menjadi sentausa kembali dan dapat menyempurnakan kebudayaannya dan sebagainya, maka rakyat Indonesia harus mempunyai pemerintahan sendiri yang dipilih oleh rakyat sendiri. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus merdeka dan harus disiapkan untuk menghadapi Indonesia Merdeka;
- c. Tujuan Indonesia Merdeka dapat dicapai dengan jalan

aksi masa secara besar-besaran berdasarkan kekuatan sendiri.

Departemen-departemen kebangsaan harus disusun sebagai negara dalam negara. Kekerasan tidak dipakai, tetapi dengan tekanan batin kemerdekaan akan tercapai. Dalam negara nasional, pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan sesungguhnya ;

- d. Dalam perjuangan kemerdekaan tidak dapat diharapkan bantuan dari penjajah pun tidak dapat diharapkan bantuan dari Moskow atau dari Istambul. Dan bantuan itu berbahaya, sebab dapat menyimpangkan orang-orang Indonesia dari jalan menuju ke kemerdekaan. Dengan sikap demikian ini dasar yang dipakai adalah non-kooperatif ;
- e. Meskipun rakyat Indonesia harus bersandar pada tenaga sendiri, orang-orang luar negeri terutama bangsa-bangsa Asia yang juga ditindas oleh imperialisme Barat, harus mengerti tentang perjuangan bangsa Indonesia. Segenap bangsa Asia yang diperbudak harus bekerja sama. (Pan Aziatisme) ;
- f. Semenjak abad ke-19 kapitalisme berkuasa di negara-negara Barat dan kapitalisme mempergunakan imperialisme ini diperkokoh oleh kapitalisme. Keadaan bangsa Indonesia yang sengsara ini adalah akibat kapitalisme dan imperialisme Barat. Karena itu semua bangsa yang terjajah menentang kapitalisme dan imperialisme;
- g. Dalam perjuangan kemerdekaan ini orang tidak boleh membedakan pangkat, golongan, kekayaan, laki-laki atau perempuan (demokrasi). Perbedaan agama pun tidak dipersoalkan. Kaum wanita yang bertugas mendidik pemuda/pemudi yang menjadi harapan bangsa dan tanah air harus dimerdekakan dari segala ikatan yang menindas kehidupannya ;
- h. Orang-orang yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan ini tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun kesenangan, yang didapat hanya baban belaka dalam pengabdiannya untuk kebahagiaan bangsa di masa yang akan datang. 361)

Dengan asas dan tujuan tersebut, untuk pelaksanaannya

perlu adanya program. Maka pada tahun 1928 diadakan kongres PNI di Surabaya, dengan hasil sebagai berikut :

*Bidang politik*

1. Memperkuat perasaan kebangsaan dan persatuan Indonesia;
2. Menyebarkan pengetahuan tentang sejarah nasional ;
3. Memperkuat hubungan antar negara-negara Asia ;

*Bidang Ekonomi*

1. Berusaha mencapai perekonomian nasional ;
2. Menyokong perdagangan dan perindustrian nasional ;
3. Mendirikan fond nasional dan koperasi.

*Bidang Sosial*

1. Memajukan pengajaran nasional ;
2. Memperbaiki kedudukan wanita ;
3. Memajukan serikat buruh dan serikat tani ;
4. Memperbaiki kesehatan rakyat ;
5. Menganjurkan monogami. (362)

Berdasarkan hasil kongres seperti tersebut di atas, maka mulailah Ir. Sukarno mempropagandakan idee-idee PNI kepada segenap masyarakat. Hasilnya menyenangkan sekali, sebab dari masyarakat mendapat tanggapan yang bagus sekali, sehingga dalam waktu singkat pengaruh PNI sudah meluas ke seluruh penjuru daerah Jawa, terutama daerah Jawa Timur. Hal ini rupanya dirasa sangat berbahaya bagi pemerintah, maka pada bulan Mei 1928 PNI mendapat peringatan dari Gubernur Jenderal De Graa. 363)

Para Pemimpin PNI rupanya sudah tidak mengingat lagi peraturan-peraturan pemerintah yang ada bahkan peringatan tersebut tidak dihiraukan lagi. Gubernur Jenderal De Graaf yang memang mempunyai ambisi besar sekali untuk menghapuskan pergerakan nasional yang bersifat non-kooperatif ini, merasa jengkel sekali, maka akibatnya datang lagi peringatan yang kedua pada bulan Juli 1929. 364)

Sesudah adanya peringatan yang kedua ini, sebagai tindak lanjut dilakukan penggeledahan di rumah-rumah pemimpin PNI. Hal ini disebabkan karena adanya desas-desus yang menyatakan bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930. Karena desakan kaum reaksioner Belanda dan bertambahnya rasa khawatir, maka sesudah dilakukan penggeledahan, akhirnya

pada tanggal 22 Desember 1929 dilakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yakni Ir. Sukarno, Maskun, Gatot Mangkupradja, Supriadinata. 365) Karena di dalam sidang kolonial ke-4 pemimpin tersebut dituduh melanggar pasal 153 bis dan pasal 169 dari K.U.H.P. kolonial, maka tertuduh mendapat hukuman 4 tahun dan PNI dinyatakan sebagai suatu partai yang bertujuan melakukan kejahatan. 366)

Untuk menyelamatkan anggota-anggota PNI, atas kebijaksanaan Mr. Sartono, pada bulan April 1931 PNI dibubarkan. Sehubungan dengan pembubaran ini menimbulkan kegoncangan di antara para anggota partai. Hal ini disebabkan adanya dua golongan yakni yang setuju dan yang tidak setuju. Akhirnya dari yang setuju kemudian mendirikan lagi partai baru yakni Partindo (Partai Indonesia), dipimpin oleh Mr. Sartono Cs. Dari yang tidak setuju kemudian mendirikan PNI baru (Pendidikan Nasional Indonesia), di bawah Pimpinan Moh. Hatta dan St. Sjahir Cs. Kedua Partai ini tidak banyak perbedaannya. Keduanya sama-sama mempunyai tujuan perjuangan utama yakni kemerdekaan politik, yang harus dicapai dengan taktik non-kooperatif. Hanya ada sedikit perbedaan ialah bahwa PNI-baru lebih mengutamakan politik dan sosial. Sedangkan Partindo percaya bahwa organisasi massa dengan aksi massa adalah senjata yang tepat untuk mencapai Kemerdekaan. 367)

Setelah Ir. Sukarno keluar dari penjara, kemudian bergabung dengan Partindo. Penjara rupanya bukan penghalang dari cita-cita nasional, tetapi baginya justru merupakan pematang, pematang dan pendorong untuk mencapai tujuan utama. Hal ini terbukti dari kegiatan Ir. Sukarno Cs. tetap aktif melancarkan cita-cita pergerakan nasional. Semangat ini dari kaum pergerakan nasional yang tidak kenal mundur ini dirasa sangat berbahaya bagi pemerintah.

Maka pada tanggal 1 Oktober 1932, De Jonge menciptakan peraturan *Toezicht ordonnantie* (Ordonansi Pengawasan) 368)

Pelaksanaan dari pada Ordonansi Pengawasan ini, De Jonge membentuk PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*), semacam badan penyelidikan yang ditangani oleh polisi. Polisi ini ditugaskan untuk :

- a. Mengawasi keaktifan langkah-langkah dari kaum pergerakan nasional ;
- b. Menghadiri setiap rapat baik yang bersifat politik maupun yang tidak ;

- c. Menghentikan pembicara yang mengancam politik pemerintah ;
- d. Membubarkan rapat dan menahan peserta yang dicurigai. 369)

Jadi pada masa itu setiap langkah kaum pergerakan nasional betul-betul diawasi. Yang perlu disayangkan bahwa polisi-polisi itu adalah bangsa Indonesia sendiri, yang sampai hati menghalang-halangi tujuan kaum pergerakan nasional yang berusaha untuk memperjuangkan nasib bangsanya.

Karena semakin giatnya usaha dari Partindo dan PNI Baru, maka pada tanggal 27 Juni 1933 pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa Partindo dan PNI-Baru adalah partai larangan bagi pegawai negeri. 370) Pernyataan ini pada hakekatnya tidak menimbulkan kesulitan apa-apa bagi partai yang bersangkutan, karena para anggotanya kebanyakan bukan pegawai negeri. Partindo dan PNI-Baru menjalankan politik tegas terhadap pemerintah. Non-kooperasinya menyangkut keanggotaan partai secara konsekuen.

Disebabkan adanya kemauan keras dari Partindo tersebut, maka pada tanggal 1 Agustus 1933 Ir. Sukarno ditahan, kemudian diasingkan ke Endeh (Flores). Pada tahun 1937 internirannya dipindahkan ke Bengkulu. Baru pada tahun 1942, Ir. Sukarno dibebaskan oleh Jepang. 371) Mengenai Partindo dan PNI-Baru, setelah Ir. Sukarno ditangkap, perkembangannya kurang baik. Namun demikian usaha untuk meneruskan kehidupan kedua partai tersebut tidak berhenti. Sehingga pada tahun 1935 Partindo mengubah asas non-kooperatif menjadi taktik. Tetapi tekanan pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya Partindo semakin lumpuh sehingga pada tanggal 18 Nopember 1936, Partindo membubarkan diri. Sedangkan PNI-Baru belum pernah membubarkan diri, tetapi kenyataannya juga susah untuk bergerak. 372)

Demikianlah pasang surut dari pergerakan nasional yang bersifat non-kooperatif. Dengan bubarnya Partindo, maka pergerakan-pergerakan nasional yang dibentuk kemudian, walaupun orang-orangnya Partindo tetap ada yang duduk di dalam partai-partai berikutnya, tetapi sedikit demi sedikit asas non-kooperasi diubah menjadi kooperasi.

Kalau di atas telah dikemukakan mengenai pasang surut pertumbuhan serta tindakan tegas terhadap PNI yang merupakan

partai masyarakat secara langsung, maka ada lagi suatu partai yang bergerak pada awalnya hanya di lingkungan para pelajar, yakni PI (Perhimpunan Indonesia). PI sebenarnya tercetus sudah sejak lama yakni tahun 1908, tetapi pada awalnya hanyalah di negeri Belanda, yang didirikan oleh mahasiswa yang berada di negeri Belanda tersebut. 373) Baru setelah adanya penangkapan atas diri 4 (empat) orang mahasiswa Indonesia di negeri Belanda tahun 1927, PI mulai berkembang di Indonesia dengan baik. Bahkan yang mengilhami lahirnya PNI di Indonesia adalah PI.

Setelah keluarnya keputusan PPPKI (Permufakatan Partai-Partai Politik Kebangsaan Indonesia) atas kongresnya tanggal 29 - 30 Maret 1929, yang isinya ialah : memutuskan untuk mengakui Perhimpunan Indonesia sebagai wakilnya di Eropa dengan memberikan mandat kepadanya untuk mengadakan propaganda menentang pasal-pasal 153 bis dan ter beserta pasal 161 bis dari K.U.H.P. Hindia Belanda di forum internasional, dengan pemberitahuan bahwa Perhimpunan Indonesia diangkat pula menjadi *voorpost* (pos terdepan) di Eropa, tetapi dengan *beperkte volmacht*. 374) maka mulailah PI berkembang di Indonesia.

Melihat statemen PI, sebetulnya jelas adalah bersifat non-kooperatif, tetapi berhubung pembahasan serta analisisnya secara ilmiah maka tidak begitu dirasakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Statemen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Hanya suatu kesatuan Indonesia, dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan antara golongan-golongan masing-masing dapat mematahkan kekuasaan kaum penjajah. Tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia menghendaki terwujudnya kasa aksi nasionalis yang sadar dan bersandar kepada kekuatan sendiri;
- b. Ikut sertanya lapisan Rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan itu adalah juga suatu syarat yang mutlak benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut ;
- c. Unsur yang terpenting dan bersifat inti dalam setiap masalah politik kolonial yakni pertentangan dalam kepentingan antara penjajah dan yang dijajah/terjajah. Kecenderungan dari politik kaum penjajah untuk membikin kabur dan menyelimuti unsur tersebut harus dijawab oleh pihak yang terjajah dengan memper-

tajam dan menegaskan segala pertentangan ;

- d. Melihat pengaruh dari penjajah yang bersifat merusak dan menurunkan kesusilaan terhadap keadaan *physis* dan *psychis* dari kehidupan Indonesia itu perlu diusahakan sekeras-kerasnya supaya keadaan rohani dan jasmani menjadi normal kembali. 375)

Setelah mempelajari isi statemen PI tersebut, rupanya Dr. Sutomo tergerak hatinya untuk menanamkan idee-idee PI di Jawa Timur. Maka di Surabaya Dr. Sutomo memulai kegiatannya diawali dengan menanamkan idee-idee PI di dalam *studieclub* 376) Jadi praktis *studieclub* itu tidak hanya mengembangkan segi pendidikan saja tetapi dari segi politik ikut juga, bahkan di dalam diri *studieclub* inilah dicetak kader-kader pergerakan yang cukup militan. Karena PI yang berbau non-kooperatif ini bergerak juga di Eropa, maka idee-idee pergerakan nasional Indonesia didukung oleh bangsa lain, bukan oleh bangsa Indonesia sendiri di mana para mahasiswa telah menjelajah ke daerah-daerah lain selain di tempat mereka belajar.

Sedangkan PI di Indonesia yang berbau non-kooperatif ini, disebabkan tindakan penjajah akibatnya semakin lama semakin susah untuk bergerak, maka akhirnya mengubah sifat menjadi kooperatif. Demikian juga halnya dengan *studieclub*, karena adanya ancaman dan hantaman dari pemerintah kolonel Belanda terhadap organisasi-organisasi (partai) radikal, maka *studieclub* pada tahun 1930 - 1931 meluas menjadi PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), jadi sifatnya lebih bebas lagi. Kemudian dengan lebih memuncaknya lagi larangan terhadap gerak partai radikal, pada tahun 1935 PBI bersama-sama dengan Budi Utomo atas anjuran Dr. Sutomo, keduanya menyatukan langkah dan tenaganya dalam sebuah fusi, yang kemudian lahir Parindra (Partai Indonesia Raya) yang diketahui oleh Dr. Sutomo. 377) Demikianlah akhirnya partai-partai/organisasi-organisasi ini semuanya dan lain-lainnya mengubah sikap menjadi kooperatif.

## 2. *Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie)*

Sejak awal lahirnya pergerakan bangsa Indonesia, pemerintah kolonial Belanda selalu merasa khawatir akan perkembangan lebih jauh, yang akan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup penjajahannya terhadap bumi Indonesia ini. Sehingga akibatnya Belanda berusaha menindas, tidak hanya kepada per-

gerakan politik saja tetapi pendidikan juga tidak lepas dari pengawasannya. Tekanan pendidikan yang sangat berat merasakan adalah Taman Siswa. Memang saat itu seakan-akan pusat perhatian bidang pendidikan terutama ditujukan kepada Taman Siswa.

Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Soewardi Surjaningrat. Oleh karena Soewardi seringkali keluar masuk penjara sehubungan dengan arus politik, maka kemudian dia mengubah haluannya untuk memusatkan diri kepada pendidikan. Oleh karena itu pendidikannya bercorak nasional. Dia merasa bahwa pendidikan rakyat bumiputra yang diterima dari sekolah Belanda, sangat kurang memenuhi kebutuhan nasional. Dengan rasa inilah maka Soewardi berusaha kuat menyiarkan pelajaran di sekolah Taman Siswa ini sehingga betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan nasional, maka karena itu perkembangan Taman Siswa cepat mencapai kemajuannya dan perkembangannya. Sehingga sekolah-sekolah swasta lainnya banyak yang asuhannya kemudian diserahkan kepada Taman Siswa. Sekolah-sekolah yang digabung ini antara lain Budi Utomo, Sekolah-sekolah Sarikat yang didirikan oleh Tan Malaka, Sekolah Sarekat Rakyat yang didirikan oleh Ir. Sukarno dan lain-lain. Dengan telah didapatnya kepercayaan besar dari sekolah-sekolah yang lain inilah maka Soewardi Surjaningrat pada tanggal 23 Pebruari 1928 mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro yang artinya guru perantara Dewa. (378)

Sesuai dengan jiwa Ki Hajar Dewantoro tersebut maka dasar serta tujuan cita-citanya dirumuskan sebagai berikut: "Rakyat jajahan Belanda yang hidup di dalam wilayah Hindia Belanda berhak untuk menentukan nasibnya sebagai bangsa Indonésia yang merdeka dan berdaulat serta berkemampuan untuk :

- a. menyelenggarakan suatu masyarakat tertib dan damai berdasarkan asas kekeluargaan dan asas kodrat alam;
- b. membina suatu kebudayaan (cara hidup masyarakat) yang berkepribadian Indonesia berdasarkan asas "Bhinneka Tunggal Ika" dan asas trikon (asas Trikon ialah kontinu - konpergen - konsentris). Asas ini berarti bahwa dalam membina kebudayaan, berdasarkan nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan yang sesuai dengan kodrat alam, wajiblah orang yang berpangkat pada

kebudayaan bangsa sendiri dengan sikap yang progresif dalam arti sanggup meninggalkan unsur-unsur kebudayaan sendiri yang usang, lapuk dan tak sesuai dengan kepentingan rakyat sekarang, serta membuka pintu bagi kebudayaan asing dengan tugas mengambil unsur-unsur kebudayaan asing itu secara selektif dan kritis, yang dapat memperkaya dan mengembangkan kebudayaan sendiri. Kebudayaan lama (kontinue) menuju ke arah kebudayaan universal (konpergen) dengan memiliki pribadi bangsa sendiri (konsentris) 379)

- c. memberi kesempatan dan kemungkinan kepada warga bangsanya untuk hidup secara salam dan bahagia serta untuk mengembangkan bakat dan pribadinya ke arah perwujudan manusia merdeka lahir dan batin. 380)

Disebabkan dasar dan tujuan Taman Siswa yang bersifat nasional dan kerakyatan tersebut, maka Taman Siswa mempunyai hubungan erat serta mendapat dukungan yang kuat dari kaum pergerakan Nasional dan masyarakat umumnya. Oleh karena itu Taman Siswa menolak subsidi dari pemerintah, jadi sifatnya swasta atau partikelir.

Taman Siswa yang mendapat dukungan kuat dari pergerakan nasional dan masyarakat ini berkembang dengan cepat dan pesat, sehingga pada kongresnya yang pertama bulan Agustus tahun 1930, Taman Siswa sudah memiliki 58 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 381) Perkembangan Taman Siswa yang pesat dan cepat ini menimbulkan rasa khawatir bagi pemerintah kolonial Belanda. Maka pada tanggal 17 September 1932 dikeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar (liar yang dimaksud ialah Swasta) atau *Wilde Scholen Ordonnantie*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932. Adapun isi dari pada Ordonansi Sekolah Liar ini ialah memberi kuasa kepada pemerintah untuk mengurus ujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh Negara. (382)

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sekolah Liar tersebut terasa berat sekali bagi para perintis sekolah swasta. Hal ini disebabkan karena terlalu ketatnya Undang-Undang Sekolah tersebut dilaksanakan, sehingga apabila akan mendirikan sekolah swasta sebelum dibuka harus minta izin. Sedangkan izin tersebut dapat diberikan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dan

sangat berat, antara lain : berijazah negeri; berkelakuan baik menurut ukuran Belanda; tidak berbahaya bagi keamanan Hindia Belanda; dan lain sebagainya.

Selanjutnya mengenai mata pelajaran, juga harus disesuaikan dengan mata pelajaran pada sekolah-sekolah kolonial dan tidak melanggar peraturan pemerintah. 383)

Apabila Ordonansi tersebut betul-betul dilaksanakan, maka jelas berarti bahwa akan membunuh sekolah-sekolah swasta yang bersifat nasional seperti Taman Siswa tersebut, akibatnya akan menghancurkan kaderisasi nasionalis yang berpendidikan, yang sekaligus berarti menghambat cita-cita nasionalisme untuk menghancurkan pemerintah kolonialisme Belanda. Oleh karena itu Majelis Luhur beserta cabang-cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia, bertekad bulat untuk mengadakan perlawanan sekuat-kuatnya dengan tenaga yang ada sampai dihapusnya Ordonansi tersebut. Kemudian Ki Hajar Dewantoro selaku Pemimpin Umum Taman Siswa mengirimkan kawat kepada Gubernur Jenderal, yang isinya : mengancam dengan pedas isi undang-undang yang dimaksud serta mengancam akan mengadakan perlawanan selama-lamanya. 384)

Karena adanya ancaman dari Taman Siswa yang dibantu oleh partai-partai politik, juga orang-orang yang moderat serta mereka yang berkooperasi, maka pemerintah merasakan betapa besar bahaya yang mengancam serta betapa berat dan sulit Ordonansi itu akan dilaksanakan. Akhirnya Ordonansi Sekolah Liar atau *Wilde Scholen Ordonnantie* dicabut oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 13 Pebruari 1933. 305) Dengan demikian bebaslah perkembangan sekolah-sekolah swasta, seperti yang diharapkan untuk dapat mencetak para tunas muda yang berpendidikan serta berkepribadian nasional untuk menggalang cita-cita bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, bebas dari cengkeraman Pemerintah Kolonial Belanda.

## B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Tekanan ekonomi dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia, sudah tidak asing lagi, selama Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di bumi Indonesia ini. Akibat tekanan ekonomi ini, maka kemelaratan rakyat Indonesia tidak dapat dibendung lagi. Hal ini menyebabkan tergeraknya hati beberapa pemimpin Belanda di dalam Parlemen Belanda, untuk

menggugat Pemerintah Belanda di Indonesia, yang kurang perhatiannya terhadap penduduk.

Jalan keluarnya, pada tahun 1902 didirikanlah suatu komisi yang bertujuan untuk menyelidiki kemiskinan rakyat Indonesia. Komisi ini ialah *Mindere Welvaart Commissie*. Pendukung komisi ini antara lain Mr. C.Th. van Deventer. Laporan hasil penyelidikan baru masuk tahun 1920. Tindakan dari hasil laporan itu hanya dalam batas yang sangat minim. 386)

Kemudian penyelidikan mengenai tekanan pajak bagi kehidupan rakyat diadakan pada tahun 1924, dipimpin oleh Dr. Huender dan Meyer Ranneft, yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Orang tani miskin sekeluarga penghasilannya setahun: F.150;
2. Orang tani maro sekeluarga penghasilannya setahun : F.120;
3. Buruh tani sekeluarga penghasilannya setahun : F.120. 387)

Jadi kalau kita hitung satu keluarga tani miskin rata-rata 1(satu) bulan hanya memperoleh hasil  $F.150 : 12 = F.12.50$ . Untuk hidup satu hari rata-rata  $F.12.50 : 30 = F.0,42$ . Kalau satu keluarga penghuninya rata-rata 5 orang, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan rakyat kecil pada saat itu.

Pada tahun 1937, diadakan lagi suatu penyelidikan untuk menyelidiki tentang tingkat kehidupan rakyat kecil di Jawa. Penyelidikan ini disebut : *Budget Onderzoek*. Di Jawa Timur dilakukan pada desa Kutowinangun, dengan hasil sebagai berikut : penghasilan bersih setahun rata-rata F. 72,20. 388)

Oleh karena adanya kesulitan ekonomi yang sangat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia inilah maka wajar apabila pada tahun 1926/1927 meletus pemberontakan pergerakan kaum buruh dan tani Indonesia. Akibatnya pergerakan buruh dan tani mendapat pukulan-pukulan yang hebat dari Pemerintah, yang memang maksudnya untuk melumpuhkan pergerakan buruh dan tani tersebut.

Tetapi rupanya pergerakan kaum buruh ini tidak patah semangat. Terbukti VSTP (*Vereeniging Spoor Tram Personeel*) yang dilarang oleh Pemerintah, mereka masih tetap setia kepada pimpinannya. Akhirnya untuk menghancurkan VSTP tersebut, Pemerintah Belanda mendirikan PBST (Perhimpunan *Beambte Spoor dan Tram*), yang diakui sebagai Badan Hukum dengan *Gouvernements Besluit* (G.B.) tanggal 12 Nopember 1929. 389) PBST ini tidak banyak geraknya dalam bidang politik, sehingga

seakan-akan gerakan buruh ini bagi kaum revolusioner mati sama sekali.

Untuk tidak mematahkan semangat pergerakan kaum Buruh revolusioner, maka di bawah pimpinan Bung Karno pada tahun 1928 didirikan lagi SKBI (Serikat Kaum Buruh Indonesia), yang mengusahakan adanya suatu gabungan kaum buruh dan tani, untuk memperkuat perasaan persatuan bangsa Indonesia dengan semboyan "Keadilan, kebenaran dan persamaan". Lebih jauh tujuan tersebut ialah untuk menghindarkan adanya *Exploitation de l'home par l'home* (penghisapan manusia oleh manusia). 390)

Perkembangan lebih lanjut, SKBI menjadi anggota dari *League Against Imperialism and for National Freedom* (Liga Anti Imperialisme) di Berlin. Kemudian pada tahun 1929 diadakan penggrebegan kepada para pemimpin SKBI, sebab Liga ini diduga berbau Komunis. Para pimpinannya disingkirkan ke Digul dan kemudian pada tahun 1930 SKBI dibubarkan. 391) Setelah SKBI dibubarkan kedudukan kaum buruh pergerakan revolusioner lebih susah lagi.

Walaupun SKBI sudah dibubarkan tetapi semangat dari kaum buruh tidak berhenti sampai di situ. Terbukti pada tahun 1933 terjadi pemberontakan di Kapal Tujuh. Pemberontakan ini terjadi disebabkan akan adanya pemotongan gaji bagi Marine, maka kaum buruh rendah ini mulai merasakan betapa pedihnya nasib yang akan diterima. Akhirnya mereka bertekad bulat untuk mengadakan aksi-aksi menentang penurunan gaji. Kaum buruh rendah ini mulai mengadakan rapat-rapat. Pada bulan Januari 1933 yang dihadiri oleh ± 600 orang, ditekankan bahwa walaupun penurunan gaji itu untuk sementara waktu diurungkan, akan tetapi jikalau surat-surat permohonan, audiensi dan kawat-kawat tidak menghasilkan apa-apa, maka aksi-aksi yang lebih keras akan dijalankan. 392)

Kemudian pada tanggal 27 Januari 1933 diadakan rapat lagi diteruskan dengan demonstrasi, tetapi dapat ditumpas oleh Polisi. Tanggal 28 Januari 1933 diteruskan demonstrasi lagi. Pada tanggal 3 Pebruari 1933, mengadakan pemogokan besar-besaran di tangsi Marine Ujung, di pangkalan Kapal Selam, di Pangkalan Kapal Terbang Morokrembangan, para kelasi Bangsa Indonesia menolak setiap perintah untuk bekerja. Mereka ini berjumlah 530 orang. Akhirnya pemogok ini ditangkap oleh anggota-anggota Angkatan Darat Belanda dan digiring ke Suko-

lilo. Penangkapan terhadap para pemogok inilah yang merupakan pokok timbulnya/meletusnya pemberontakan di Kapal Tujuh. 393)

Partai Buruh tidak berhenti semangatnya, ternyata tanggal 7 Oktober 1938 berdiri lagi Partai Buruh dengan nama : *Indische Partij van Werknemers*. 394) Tetapi kembali seperti semula kaum buruh tetap mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Walaupun demikian kaum buruh di mana-mana tetap saja ada pencetusan rasa kurang puas, baik di perusahaan-perusahaan partikelir maupun negeri. Sehingga pada tanggal 20 Juli 1939 dibentuklah satu Komisi yang terdiri dari pegawai-pegawai negeri. Komisi ini bertujuan untuk mengurus perselisihan antara buruh dan majikan di perusahaan-perusahaan partikelir. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1940, dikeluarkan Undang-Undang tentang Penyelesaian Pertikaian Perburuhan di perusahaan-perusahaan vital yang mempunyai buruh  $\pm$  20 orang. Apabila komisi ini tidak dapat menyelesaikan, maka putusan akan diambil oleh Direktur Justisi. 395)

Disebabkan sejak semula tindakan kaum radikal revolusioner ini selalu mendapat tanggapan/tindakan yang sangat keras dari pemerintah Belanda, maka pada tahun 1929 Dr. Sutomo mulai merintis untuk menanggulangi krisis ekonomi rakyat tanpa bantuan dari pihak resmi menggerakkan para penganggur diajak untuk mendirikan perkampungan di Jalan Gresik. Di sini para penganggur di arahkan kepada beberapa aktivitas di bidang kerajinan terutama tenun. Dari kerajinan tenun ini kemudian dikembangkan ke cabang-cabang kerajinan lain. Sedangkan untuk menghindarkan konsumen kecil serta produsen kecil dari penghisapan kaum pemilik modal, maka Dr. Sutomo menggerakkan koperasi, baik koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Kemudian dipusatkan di dalam PCI (Persatuan Cooperasi Indonesia), pusatnya di Plampitan. Di samping itu didirikan juga Kooperasi kredit, yang kemudian dipusatkan didalam Kredit Centrale Kahu-ripan. Juga didirikan Bank Pasar yang pusatnya di pavilyun GNI di Bubutan. 396)

Usaha Dr. Sutomo di bidang ekonomi ini sering dikecam oleh sebagian kaum pergerakan yang bersifat radikal. Cara penanganan semacam tersebut di atas dikatakan kurang prinsipil. Memang ada sedikit perbedaan pandangan. Dalam hal ini

bukan berarti bahwa Dr. Sutomo tidak menyadari akan watak yang sesungguhnya dari sistem ekonomi kolonial serta sistem kapitalisme, tetapi usaha kecil-kecilan ini penting untuk melatih otonomitas rakyat. Tujuan serta dasar-dasar pendapat Dr. Sutomo jelas seperti yang dicetuskan pada dasar tujuan perhimpunan *Studie Club*, sebagai berikut :

1. Bahwa buat berjuta-juta rakyat bangsa Indonesia yang ada di dalam kemelaratan ini hanya dapat dicapai kesempurnaannya dengan jalan usaha atas dasar bekerja bersama-sama dalam segala-segalanya.
2. Sebagai dasar untuk mencapai maksud kesempurnaan rakyat tadi maka segala perbuatan harus mengandung maksud kemerdekaan bekerja ;
3. Maka daya untuk mewujudkan segala angan-angan dari bangsa kita, baik yang berupa usaha maupun yang berupa daya upaya di dalam pikiran dan tulisan, harus bersifat adil dan benar. Keadilan dan kebenaranlah yang harus menjadi pedoman bagi bangsa kita akan berjuang seterusnya. 397)

Dengan dasar tujuan tersebut, maka *Studie Club* memberi kebebasan kepada rakyat di dalam berusaha, guna mencapai kemerdekaan dengan mau bekerja bersama-sama.

Oleh karena itu maka pada bulan Juli tahun 1928 atau anjuran Professor Dr. J.H. Boeke (*Adviseur voor Volkscreditwezen en Cooperatie*) *Studie Club* diberi kepercayaan untuk menjalankan pimpinan dan pengawasan terhadap 9 (sembilan) Bank Desa yang diubah menjadi *Crediet Cooperatie* dalam kota Surabaya. Penyerahan kekuasaan pimpinan dan pengawasan ini ditetapkan dengan besluit dari *Adviseur Volkscredietwezen en Cooperatie*, tanggal 17 September 1928 Nomor 302 111 dan disertai pula persetujuan Pemerintah Hindia Belanda dengan besluitnya tanggal 12 September 1928 Nomor 12. Ditunjuk sebagai penuntutnya Mas Soendjoto yang dilindungi oleh *Commissie van Toezicht* yang terdiri dari :

Ketua : Mr. Dr. Soebroto.

Penulis : Mas Soendjoto.

Anggota: R. Soedirman.

R.M.H. Soejono. 398)

Atas dasar susunan organisasi yang pada hakekatnya dilimpahkan ke *Studie Club* tersebut, mulailah badan ini melakukan kegiatannya sesuai dengan dasar kerja yang ada. Suatu hal yang menggembirakan sekali, sebab ternyata perkembangan koperasi pesat sekali, sehingga pada tahun 1931 di kota Surabaya sudah terbentuk 33 (tiga puluh tiga) buah koperasi. Kesuksesan kerja yang sangat meyakinkan ini dapat menambah kepercayaan *Adviseur Volkscredietwezen en Cooperatie* kepada *Studie Club*. Oleh karena itu wajar apabila pada tahun 1931 *Studie Club* diminta untuk menyelenggarakan pendirian badan-badan *Crediet Cooperatie* di *Stadsgemeente* Malang, yang disertai juga pendirian badan *Centrale*. Pernyataan ini tercantum di dalam surat dari *Adviseur Volkscredietwezen en Cooperatie* tanggal 10 Agustus 1931 Nomor 1187/A.399)

Karena saat itu (tahun 1931) dirasa oleh *Studie Club* baik wilayah maupun tanggung jawabnya lebih luas, maka *Studie Club* mengubah nama kesatuannya menjadi PBI (Persatuan Bangsa Indonesia). Di dalam menjalankan kekuasaan sebagai pimpinan dan pengawasan menjadi lebih luas yakni seluruh Jawa Timur. Dasar-dasar langkah kerjanya ditentukan dalam besluit *Adviseur Volkscredietwezen en Cooperatie* tanggal 6 Agustus Nomor 9 FC sebagai berikut :

1. Kemerdekaan penyimpanan uang kelebihan ;
2. Kemerdekaan mengadakan biaya dari pendirian-pendirian *Cooperatie* guna melakukan pimpinan dan pengawasan ;
3. Mengadakan kesempatan kepada *Adviseur* atau yang mewakilinya untuk mengadakan penyelidikan terhadap pendirian-pendirian *Cooperatie* ;
4. Tidak akan mengumumkan beban-beban *Cooperatie* sebelumnya hal ini dibicarakan lebih dulu dengan *Adviseur*. 400)

Dengan dasar-dasar tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Pebruari 1932 atas anjuran *Centraal Bestuur* Persatuan Bangsa Indoneia didirikan " *Inlandsche Cooperative Crediet Centrale Toemapel*". Prakarsa didalam pendirian ini ialah :

Soediono jabatan semula Ketua PBI di Malang ;  
Aboenandar jabatan semula Sekretaris PBI di Malang ;  
Soedarso jabatan semula Ketua BO di Malang.

Pengesahan pendirian ini oleh *Adviseur Cooperatie* tercantum di dalam suratnya tanggal 22 Pebruari 1932 No. 146.401)

Centraal Toemapel akhirnya mempunyai bermacam-macam jenis koperasi yang terkenal selain koperasi Kredit yaitu :

I. Koperasi Pertanian yang terdiri dari 2 golongan yaitu :

1. *Loemboengcooperatie* Rukun Tani.
2. *Djeroekcooperatie*

II. *Meubelcooperatie*

1. *Loemboengcooperatie*

Loemboeng ini pusatnya di Lumajang. Pada tahun 1937 masuk menjadi anggota Toemapel. Untuk membantu pengawasan kemudian di Lumajang didirikan sebuah badan Komunikasi Penolong Pengawasan. Sebagai *Controlevoerder* Sdr. Sastrodikoro. Sebelum Lumbang ini masuk menjadi anggota Toemapel, yang mengkoordinasi ialah Parindra sehingga pada saat masuk menjadi anggota telah banyak sekali jumlahnya antara lain :

- a. *Loemboengcooperatie* Umbulsari Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 359
- b. *Loemboengcooperatie* Kencong Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 360
- c. *Loemboengcooperatie* Sariono Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 361
- d. *Loemboengcooperatie* Kraton Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 362
- e. *Loemboengcooperatie* Karang Sari Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 363
- f. *Loemboengcooperatie* Rowokangoeng Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 364
- g. *Loemboengcooperatie* Jombang Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 365
- h. *Loemboengcooperatie* Soekorono Inl.rechtspersoon 24-12-'36 - 366
- i. *Loemboengcooperatie* Kutorenon Inl.rechtspersoon 9-6-'37 - 368. 402)

*Loemboengcooperatie* Lumajang ini sejak tahun 1937 selain memasukkan padinya ke Lumbang dan membayar pajak juga meminjam uang dari Toemapel, seperti diketahui dari jumlah

dibawah ini :

Tahun	Padi yang masuk lumbang dalam pikul	Harga padi	Pajak Anggota	Pinjaman dari Toemapel
1937	2035	f.4663	f.1657,50	f.1210
1938	3090	f.5957	f.2270	f.2237
1939	1790 kwintal	f.5500	f.1650	f.2530
1940	-	-	-	f.3324

403)

Dengan melihat tabel tersebut jelas menunjukkan adanya koordinasi yang bagus sekali antara Toemapel dan anggota koperasinya.

## 2. *Djeroekcooperatie*

Jeruk koperasi ini bernama RAOS (*Rukun Oetama Santosa*), didirikan pada tanggal 6 Maret 1936 di Punten, masuk menjadi anggota Toemapel tahun 1937. Pengurus koperasi jeruk : Min Soewarso, Martoredjo, H. Noerali, Nitisoemarto, Soepangkat. Perlu diketahui bahwa sebelum didirikan koperasi, para petani sangat sedih melihat hasil penjualan jeruknya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena cara penjualan mereka yang kurang perhitungan, maksudnya banyak dimakan para tengkulak, sebab cara mereka menjual sebagai berikut :

- tebasan unduhan*, artinya buah jeruk ditebaskan kalau sudah masak ;
- tebasan tahunan*, artinya buah jeruk dijual dalam waktu satu tahun ;
- panjeran*, yang mempunyai tanaman jeruk dapat "panjer" yaitu *voorschot* dan harganya ditetapkan kalau buah sudah masak ;
- tebasan lebih dari satu tahun ;
- dijual kepada *wlijo* atau tengkulak, kalau sudah masak.

404)

Cara penjualan semacam ini jelas hanya akan menguntungkan para tengkulak atau tukang tebas. Sebaliknya orang tani dirugikan secara besar-besaran. Atas dasar inilah maka koperasi

jeruk didirikan dengan tujuan :

1. Memperbaiki pertanian jeruk supaya mendapat hasil yang lebih sempurna ;
2. meluaskan dan memperbaiki penjualan hasil pertanian jeruk, agar supaya mendapat hasil keuangan yang tinggi ;
3. membesarkan napsu menyimpan ;
4. memberi pinjaman dengan bunga yang serendah-rendahnya bagi anggotanya ;
5. memberi pendidikan kepada para anggotanya dalam perusahaannya agar supaya dapat/mendapat kedudukan yang sempurna. 405)

Untuk mencapai tujuan koperasi tersebut, maka anggota-anggotanya diwajibkan :

1. Menyerahkan hasil perusahaan pertaniannya kepada perhimpunannya setiap tahun, sebagai pemenuhan pertanggungan.
2. Menjual hasil pertaniannya dengan perantaraan perhimpunan. Petani dapat menjual langsung kepada orang lain, hanya apabila perhimpunan sudah tidak sanggup menjualnya.
3. Menunjukkan semua pembeli yang datang padanya, supaya dapat menjual dengan perantaraan perhimpunannya.
4. Menabung seperempat dari keuntungan penjualan kepada perhimpunan.
5. Meminjam uang hanya dari perhimpunannya saja dan menggunakan uang pinjaman hanya untuk perusahaannya. 406)

Dengan perantaraan koperasi ini jeruk mendapat kredit yang lumayan sehingga mendapat hasil sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Jeruk	Harga
1936	30.175	f. 760
1937	49.237	f. 1.102,82
1938	66.845	f. 1.997,24
1939	89.669	f. 1.289,36

Cara menjual jeruk tersebut tidak hanya terbatas di kota Malang saja, tetapi meluas sampai ke seluruh Pulau Jawa bahkan sampai ke Bliton.

Dengan cara kerja koperasi jeruk yang ternyata sangat menguntungkan, ternyata dapat menarik perhatian dari para pem-

buat meubel di Pasuruan. Para pengusaha meubel dan para pekerja meubel yang terdiri dari bangsa kita, nasibnya sangat menyedihkan. Cara mereka menjual barang-barang meubelnya sama sistemnya dengan penjualan jeruk yakni dengan sistem panjer atau *voorschot*. Sebagai uang pembeliannya tidak sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk uang, tetapi ditukar barang kebutuhan misalnya minyak tanah, pakaian, beras dan lain-lain kebutuhan sehari-hari. Penyerahan meubel dari para pengusaha meubel kepada juragan masih dalam bentuk putihan, dengan harga yang sangat murah. Kemudian di tempat juragan baru diplitur dan akhirnya dijual oleh juragan keluar daerah Pasuruan dengan harga yang sangat tinggi sekali. Dengan melihat adanya perbedaan harga yang sangat banyak serta nasib para pengusaha serta para tukang yang sangat prihatin, maka pada bulan Mei 1936 berdirilah meubelcooperatie Kemadjoean, yang tercatat sebagai *Inl. rechtspersoon* tanggal 24 Desember 1936 Nomor 637, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan kepada anggotanya guna membuat segala macam barang-barang meubel, menurut kepandaian yang mereka miliki dan dibuat dengan cara serta hasil yang sebaik-baiknya.
2. Mencarikan segala pekerjaan meubel dan meluaskan penjualan meubel dari hasil pekerjaan anggota-anggotanya.
3. Memberi pertolongan kepada anggota-anggotanya untuk mendapat segala bekal atau pinjaman modal untuk keperluan pembuatan meubel dengan semudah-mudahnya.
4. Memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menabung keuntungannya.
5. Memberi penerangan atau pertolongan lainnya dengan jalan yang sah untuk meninggikan kedudukan anggotanya. 408)

Atas dasar tujuan tersebut maka langkah pertama meubelcooperatie Kemadjoean ialah meminjam modal kepada Toemapel. Kemudian memperkenalkan diri *Jaarmarkt* Surabaya. Dari perkenalan ini meubelcooperatie Kemadjoean mendapat keuntungan yang besar sekali ialah :

1. Memperkenalkan kepada umum dalam hal kecerdasan dan kepandaian tukang-tukang meubel di Pasuruan.
2. Membuktikan kepada umum bahwa dengan bantuan dan penerangan, perusahaan meubel bangsa kita dapat

dimajukan.

3. Membuka jalan kepada tukang-tukang bangsa kita dan membangkitkan semangat mereka akan bekerja memajukan perusahaan mereka sendiri. 409)

Dengan jalan perkenalan/promosi ini maka *meubel cooperatie* mendapat pasaran yang cukup luas, baik di seluruh Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai alat pengangkut untuk seluruh Jawa *meubel cooperatie* berhubungan dengan S.S. yang mau memberi tarip khusus kepada *meubel cooperatie*. Sedangkan untuk angkutan luar Jawa digunakan kapal Roepelin (Roekoen Pelajaran Indonesia) di Surabaya. Dengan demikian penyebaran *meubel* dari *meubel cooperatie* lancar tanpa ada rintangan. Sampai sekarang hasil *meubel* Pasuruan masih tetap mengalir dengan pesat.

Perlu diketahui bahwa hubungan antara Centrale cooperatie Toemapel dengan Centrale cooperatie Kahuripan berjalan dengan baik sekali, sehingga apabila akan membentuk sesuatu badan mereka terlebih dahulu mengadakan konperensi bersama. Demikian juga pada tanggal 6 Agustus 1938 diadakan konperensi sebanyak 2 (dua) kali.

Konperensi pertama membicarakan tentang :

1. Hak *Inl. rechtspersoon credietverband*, oleh Akoep Goelangi.
2. *Moeder Centrale* oleh Soekamto dan Soediono.
3. Pimpinan Cooperatie, ambtelijke atau partikulir oleh Soedomo.

Konperensi kedua membicarakan :

1. Organisasi pendirian cooperatie dengan menggunakan tanggungan-tanggungan yang sekarang ada dan *credietverbandrecht* oleh Mr. Soedarno.
2. Pengluasan kemerdekaan dalam menggunakan hak *Inl.rechtspersoon* oleh Mr. Iskaq.
3. Kepentingan pendirian *Moeder Centrale* oleh Setijono.
4. Kepentingan mengadakan majalah cooperatie. 410.

Dengan demikian jelas menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara centrale cooperatie Kahuripan dan centrale cooperatie Toemapel, demikian juga antara anggota koperasi. Kerja koperasi yang bertujuan pokok mengurangi kemiskinan ini mendapat perhatian yang baik sekali dari kaum Ibu, sebab banyak dijumpai

anak gadis seorang petani dipergunakan sebagai penebusan hutang petani kepada Cina. Oleh karena itu kaum Ibu tergerak hatinya untuk memikirkan nasib wanita tersebut. Maka pada tahun 1930 PPII (Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia) mendirikan suatu Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang diketuai oleh Ny. Soenarjati Soekemi. BPPPA ini di Madiun dipimpin oleh Ibu Soediro. 411) Jadi di dalam kegiatan kerja semacam koperasi tersebut, wanita ikut ambil bagian yang tidak kecil artinya. Harapan dari masyarakat dengan didirikannya koperasi-koperasi yang terdiri dari bermacam-macam jenis ini, akan dapat menanggulangi kemiskinan rakyat, baik yang ditimbulkan dari adanya tekanan pajak dan sebagainya dari pemerintah kolonial Belanda maupun adanya taktik pembelian dari para tengkulak bangsa asing yang sama sekali tidak mau memikirkan nasib orang lain, ataupun karena adanya sistem tanam paksa dan kerja paksa dari pemerintah kolonial Belanda. Sebab kerja paksa ini tidak hanya dikenakan pada kaum lelaki saja, tetapi kaum wanita pun ikut melaksanakan. Dengan demikian tekanan-tekanan dari pemerintah yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi rakyat kecil dapat terjadi dari bermacam-macam sebab seperti tersebut di atas.

## C. INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN/ORGANISASI

### 1. PNI Baru

Dengan telah dibubarkannya PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1931 oleh Sartono sebagai pimpinannya maka timbullah PNI Baru. Pembubaran ini dilakukan demi menjaga keselamatan anggotanya. Bagi mereka yang tidak setuju terhadap pembubaran PNI ini, mereka mendirikan PNI-Baru lagi dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). PNI ini berdiri pada tahun 1931 di bawah pimpinan Sutan Sjahrir. PNI ini mempunyai haluan sosial-revolusioner. Watak ini dinyatakan dalam pembentukan organisasi massa proletariat yang dihadapkan kepada kapitalisme dan borjuis, tidak pandang dari luar atau dalam negeri sendiri. Kapitalisme dan borjuis sangat mempengaruhi di dalam hal adanya klas-klas di dalam masyarakat. Adanya perbedaan klas inilah yang sama sekali tidak dapat diterima oleh PNI-Baru. Oleh karena itu PNI berusaha untuk dapat mencetak kader-kader yang terdidik, yang harus mengajar massa.

Untuk itu PNI-Baru secara diam-diam bergerak di dalam masyarakat, dengan mengutamakan pendidikan. Dengan dasar pendidikan inilah maka masyarakat atau massa yang dicetak oleh PNI bebas dari klas-klas, jadi berarti bebas dari pengaruh kapitalisme dan imperialisme. 412)

Karena massa atau masyarakat yang dicetak oleh PNI-Baru ini tidak membedakan klas-klas di dalamnya, maka partai ini mengutamakan kedaulatan rakyat, sehingga organ partai ini diberi nama "Daulat Rakyat". 413) Oleh karena itu PNI-Baru lebih banyak mendapat pengaruh dari kalangan masyarakat desa. Sehingga jumlah kader yang dicetak oleh PNI-Baru ini di Jawa Timur sampai mencapai 2000 orang. 414) Jumlah ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar pada saat itu.

Prinsip dari PNI-Baru mendasarkan kepada usaha-usaha bersama, maksudnya ialah adanya saling pengertian antara para saudagar dan rakyat, saling dapat merasakan kebahagiaan baik itu saudagar maupun rakyat jelata. Jelasnya ialah para saudagar Indonesia untuk membahagiakan rakyat harus mau menjalankan 2 (dua) hal :

- a. menolong menurunkan harga pasar, yang sekarang hampir dimonopoli oleh bangsa asing ;
- b. menolong menjualkan barang-barang yang dihasilkan oleh kaum tani atau kaum buruh sendiri dengan harga yang patut, sehingga sebagian besar dari hasil jerih payah marhaen dapat dirasakan kembali oleh kaum marhaen. 415)

Kalau 2 (dua) jalan ini dilaksanakan oleh kaum saudagar, sehingga jalinan saling menolong antara kaum atas dan kaum bawah dapat terwujud, maka Persatuan Indonesia yang tidak memandang kelas akan tercapai. Cita-cita inilah yang diusahakan dengan segala kekuatan oleh PNI-Baru.

Tetapi cita-cita yang bertujuan menolong rakyat marhaen atau rakyat jelata ini tidak luput dari incaran operasi politik pemerintah jajahan. Akhirnya pada tanggal 25 Pebruari 1934 pemerintah kolonial Belanda secara mendadak menangkap beberapa anggota PNI-Baru yakni Hatta, Sjahrir, Maskun, Burhanuddin, Murwoto, dan Bondan. Sambil menunggu keputusan dari pemerintah, Hatta ditawan di rumah penjara Glodok, sedangkan Sjahrir dan kawan lainnya ditawan di rumah penjara Cipi-

nang. Keputusan pemerintah kemudian keluar tanggal 16 Nopember 1934 diterima tanggal 9 Desember 1934, memutuskan sebagai tempat tinggal ibu kota onderafdeeling sementara Boven-Digul, afdeeling Amboina, Gubernemen Maluku. 416)  
Sejak saat itu PNI-Baru tidak kelihatan keaktifannya.

## 2. *Partindo*.

Pada tanggal 31 Desember 1931, mulai jam 06.00 sore stasiun Gubeng penuh sesak oleh manusia, yang tidak kurang dari 5000 orang berjejal didalam dan diluar stasiun. Hal ini tidak mengherankan sebab malam itu Ir. Sukarno akan datang dari Bandung setelah selama 2 tahun ditahan di penjara Sukamiskin. Di sini tidak begitu penting untuk dikemukakan secara panjang lebar bagaimana berjejalnya rakyat sepanjang jalan dari stasiun Gubeng sampai Hotel Muslimin, di mana Ir. Sukarno mau menginap. Yang penting, bertepatan dengan datangnya Bung Karno dari Pertapaan itu, di Surabaya diadakan Konggres Indonesia Raya yang pertama yakni pada tanggal 2 Januari 1932. 417)

Dengan telah pecahnya PNI (Partai Nasional Indonesia) menjadi PI (Partai Indonesia, kemudian dikenal dengan Partindo) dan GM (Golongan Merdeka, kemudian lebih dikenal dengan PNI-Baru), maka di dalam Konggres ini Bung Karno berpendirian bahwa dia tidak akan memihak pada salah satu tetapi dia akan mempersatukan keduanya. Di dalam Konggres tersebut dikemukakan juga *Trilogie, triniteit* atau wejangan Trimurti Bung Karno sebagai berikut :

- a. *Nationale Geest* (semangat nasional), semangat yang harus dihidup-hidupkan, diperdalam agar supaya berkobar-kobar, dan senantiasa berapi-api. Semangat nasional inilah yang mesti melahirkan apa yang dinamakan :
- b. *Nationale Wil* (kemauan nasional). Kemauan nasional ini lahir disebabkan karena adanya semangat nasional yang berkobarnya semangat nasional yang kemudian lahir kemauan nasional, maka terwujudlah misalnya Gedung Nasional, Bank Nasional, Surat Kabar Nasional dan lain-lain yang akan dapat melenyapkan ikatan-ikatan antara lain rodi, *poenale sanctie* dan lain-lain.
- c. *Nationale Daad* (perbuatan nasional), ialah realitas atau perwujudan dari *nationale wil* tersebut di atas. 418)

Karena tiga dasar cita-cita Bung Karno tersebut di atas maka

dia berusaha untuk mempersatukan kedua golongan tersebut di atas. Tetapi usaha Bung Karno yang telah dengan sekuat tenaga selama 6 (enam) bulan ternyata tidak mendapatkan hasil sesuai dengan harapannya. Akhirnya dia menjatuhkan pilihannya kepada Partindo, sebab baginya politik bukan pertama-tama menciptakan suatu idee, tetapi politik menyusun suatu kekuasaan yang terpikul oleh idee. Hanya pembentukan kekuasaan yang dijiwai oleh idee itulah yang sanggup mengalahkan musuh kaum Marhaen. Kekuasaan dibentuk dan didukung oleh massa aksi. Oleh karena itu Sukarno menjatuhkan pilihannya pada Partindo. 419)

Yang menjadi tujuan utama dari Partindo ialah memperjuangkan nasib kaum Marhaen. Untuk menjelaskan tentang faham Marhaen dan Marhaenisme, maka di dalam Konperensi tahun 1933 di Yogyakarta, Partindo mencetuskan Deklarasi Marhaen dan Marhaenisme sebagai berikut :

- a. Marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
- b. Marhaen, yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain
- c. Partindo memakai perkataan marhaen dan bukan proletar, sebab perkataan proletar sudah termaktub di dalam perkataan marhaen. Perkataan itu juga dapat diartikan kaum tani, jadi lain-lain kaum melarat tidak termasuk di dalamnya.
- d. Karena Partindo berkeyakinan, bahwa di dalam perjuangan kaum melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka Partindo memakai perkataan marhaen itu.
- e. Di dalam perjuangan marhaen, Partindo berkeyakinan bahwa kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali.
- f. Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala hal menyelamatkan marhaen.
- g. Marhaenisme adalah cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri seperti tersebut, oleh karena itu harus mempergunakan suatu cara perjuangan yang revolusioner.
- h. Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperial-

isme.

- i. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang menjalankan marhaenisme. 420)

Asas dan cara perjuangan Partindo yang langsung berhubungan dengan nasib masyarakat inilah, yang mendorong Partindo ke arah sukses besar. Oleh karena itu usaha Sukarno beserta pimpinan yang lain, sangat mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama Partindo sudah memperoleh pengikut/anggota 10.000 (sepuluh ribu) orang. Perkembangan Partindo yang sangat baik ini mengkhawatirkan sekali bagi pemerintah kolonial Belanda, maka sebagai akibatnya pada tanggal 1 Agustus 1933 Ir. Sukarno ditahan dan dibuang ke Ende (Flores).

Kemudian pada tahun 1937 interniuannya dipindahkan ke Bengkulu 421)

Dengan telah ditangkapnya Ir. Sukarno yang merupakan pusat perhatian masyarakat, maka perjuangan Partindo selanjutnya menjadi seret, terutama perjuangan ke atas. Pada tanggal 1 Desember 1934 Partindo mengajukan permohonan izin untuk mengadakan konggres di Jakarta tanggal 30-31 Desember 1934, tetapi permohonan tersebut ditolak. Kemudian pada tahun 1935 Partindo mengubah anggaran dasarnya dan menghilangkan pasal-pasal yang tidak disukai oleh pihak pemerintah, juga mengubah asas non-koperasi menjadi taktik. Namun demikian tekanan dari pemerintah terhadap Partindo tetap tidak berkurang. Akhirnya pada tanggal 18 Nopember 1936 Partindo terpaksa membubarkan diri. 422) Untuk melanjutkan cita-cita Partindo, dibentuk lagi partai baru yakni Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), tetapi sikap non-koperatif diubah menjadi kooperatif di bawah pimpinan Adna Kapau Gani.

### 3. *Partai Sarekat Islam Indonesia*

Organisasi Islam di Indonesia, pada awal mulanya tidak begitu cepat berkembang, sebab organisasi Islam muncul pertama kali dengan dasar menyaingi peranan orang Cina di dalam lapangan perdagangan. Oleh karena itu muncul pertama pada tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam, dan anggotanya hanya para pedagang. Baru kemudian atas prakarsa H.O.S. Tjokroaminoto dari Surabaya, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sare-

kat Islam, dengan maksud lebih mengembangkan organisasi ini, sehingga anggotanya tidak hanya terdiri dari para pedagang saja, tetapi segala lapisan masyarakat yang beragama Islam. Kemudian pada tahun 1916 Sarekat Islam mengadakan kongres di Bandung dengan nama: Konggres Nasional Sarekat Islam. Jadi kongres ini sifatnya nasional, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Organisasi yang seluas/sebesar ini belum mendapat pengakuan badan hukum, maka di dalam kongres dicantumkan tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan pemerintah sendiri (*Zelfbestuur*). Kemudian pada tahun Sarekat Islam masuk dalam *Volksraad*, yang duduk sebagai wakilnya ialah: Abdul Muis dan H.O.S. Tjokroaminoto. <sup>423)</sup>

Pada tahun 1927, karena gerakan-gerakan nasional makin meningkat, maka Sarekat Islam mengubah haluannya menjadi "mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam". Dengan telah mengubah haluan ini, maka PSI ikut bergabung ke dalam PPPKI. Kemudian atas dorongan dari Sukiman yang baru datang dari Eropa PSI lebih menunjukkan corak kebangsaannya. Akhirnya pada tahun 1929 PSI mengubah namanya yang lebih bersifat kepartaian yakni Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). <sup>424)</sup>

Karena haluan dari PSSI berubah, akibatnya terjadi perpecahan, sebab ada yang setuju dan ada yang tidak. Pihak yang tidak setuju, jadi pihak ini menekankan perjuangannya pada dasar agama, pihak ini di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto dan H.A. Salim. Sedangkan pihak yang setuju berarti condong kepada tekanan asas kebangsaan berada di bawah pimpinan Sukiman dan Surjopranolo. Dua orang yang terakhir ini kemudian pada tahun 1932 dipecat dari PSII. Kedua orang ini tidak tinggal diam akhirnya mendirikan partai baru yaitu Partai Islam Indonesia (Parii/PII). Pada tahun 1937 pemecatan dicabut, kemudian terjadi persatuan. Tetapi tahun 1938 kembali pecah. <sup>425)</sup>

Perpecahan pada tubuh PSII ini belum berhenti hingga pada tahun 1940. Kartosuwirjo dipecat, kemudian tetap mendirikan lagi PSII yang kemudian disebut PSII-Kartosuwirjo. Dengan demikian pada saat itu terdapat tiga nama di dalam tubuh PSII yaitu:

- a. PSII yang asli di bawah pimpinan Abikusno;
- b. PSII Kartosuwirjo yang dipimpin oleh Kartosuwirjo;
- c. PII yang berada di bawah pimpinan Sukiman dkk. <sup>426)</sup>

Akhirnya setelah maksud pemerintahan Jepang kegiatan kepartaian di Indonesia terhenti.

#### 4. *Parindra*

Dengan gagalnya Partindo untuk mengadakan kongres pada tanggal 22 – 25 Desember 1933 menimbulkan gagasan baru bagi Dr. Sutomo selaku Ketua PPPKI untuk menyatukan partai-partai lain di bawah asuhannya. Maka direncanakan oleh Dr. Sutomo adanya penggabungan partai antara Budi Utomo dan PBI. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1934 dibentuk panitia *ad hoc* dari pihak PBI, dan Budi Utomo, yang bertugas untuk mengadakan perundingan tentang adanya penggabungan kedua partai tersebut. Pada tanggal 19 April 1935 Panitia berhasil merealisasi gagasan penggabungan (fusi) antara dua partai tersebut dan akan dinyatakan/diresmikan pada kongres tanggal 24 – 26 Desember 1935. Hasil penggabungan dua partai yakni PBI dan Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raya yang disingkat menjadi Parindra. <sup>427)</sup>

Pada tanggal 24 – 26 Desember 1935 kongres bersama-sama antara Budi Utomo dan PNI dilaksanakan di Surakarta. Hasil kongres menyatakan sesuai dengan hasil keputusan rapat Panitia *ad hoc*, yaitu penggabungan menjadi Partai Indonesia Raya disingkat menjadi Parindra. Sebagai ketua dipilih Dr. Sutomo, Wakil Ketua R.M.A. Wurjaningrat. Pada Kongres tersebut dicetuskan tujuan Parindra sebagai berikut:

- a. Bahwa tiap-tiap manusia berhak dan berkewajiban untuk berjuang bagi keselamatan Negara dan bangsanya. Untuk itu harus ada kerjasama antara rakyat dan Parindra untuk mencapai kemakmuran dan kemuliaan Indonesia.
- b. Bahwa Parindra bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Indonesia Raya yang harus dilaksanakan oleh rakyat sendiri.
- c. Parindra berkeyakinan untuk memperjuangkan sebuah negara yang makmur, untuk itu rakyat Indonesia harus bersatu baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. <sup>428)</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut di dalam kongres dicetuskan pula syarat-syarat yang meliputi beberapa bidang:

- a. Susunan pemerintahan yang demokratis, bersandar atas kepentingan dan kebutuhan Indonesia;
- b. Alat pemerintahan yang berdasar dan ditujukan pada kepentingan Indonesia serta dipegang sendiri oleh bangsa Indonesia;

- c. Kedudukan yang sama bagi segala penduduknya;
- d. Hak dan kewajiban yang sama bagi tiap-tiap orang.

Syarat-syarat untuk mencapai tujuan dalam bidang ekonomi adalah mencapai alat ekonomi dan menjalankan perdagangan dengan luar negeri. Syarat-syarat untuk mencapai tujuan dalam bidang sosial adalah:

- a. Mengadakan/melengkapi perguruan kebangsaan;
- b. Membina kesehatan rakyat;
- c. Memajukan pendidikan jasmani;
- d. Hak bekerja, perlindungan kaum buruh, larangan bekerja oleh anak-anak, mencegah keadaan yang tidak baik.

Syarat-syarat untuk mencapai tujuan dalam soal perhubungan kebudayaan dengan luar negeri sebagai berikut:

- a. memajukan kerja sama dengan luar negeri dalam berbagai hal terutama tentang kebudayaan;
- b. mengangkat wakil-wakil luar negeri untuk keperluan orang yang tinggal atau bersekolah di negeri yang bersangkutan;
- c. memajukan pelajaran bahasa asing dengan mendirikan *club* bahasa asing. <sup>429)</sup>

Syarat-syarat tersebut yang dimaksud guna menunjang tujuan utama, kemudian mulai dilaksanakan. Di dalam pelaksanaan bidang politik, Parindra yang diketuai oleh H.M. Thamrin diadakan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. mempelajari dan memperhatikan hal-hal yang mengenai soal pemilihan anggota untuk dewan-dewan perwakilan, membangkitkan dan memberi tuntutan untuk berdirinya fraksi nasional serta membangunkan *fonds* untuk membiayai pemilihan, dan memajukan usul dan anjuran bagi perbaikan pemilihan, perbaikan hak-hak memilih atau pun perluasan banyaknya anggota-anggota dalam dewan-dewan;
- b. mempelajari dan memperhatikan soal-soal politik yang ada di dalam dan di luar dewan-dewan yang dapat dijadikan bahan untuk perjuangan oleh wakil-wakil partai dalam dewan-dewan, terutama yang dipentingkan dalam *Volksraad*. <sup>430)</sup>

Dengan telah adanya dasar pelaksanaan tersebut maka bidang politik Parindra segera mengadakan propaganda keliling dan rapat-rapat umum, yang lalu mendapat Parindra serta sambutan hangat

dari masyarakat. Berlaku sebagai pembicara antara lain K.H.Thamrin, Dr. Sutomo, Sukardjo Wirjopranoto, Suroso dan lain-lain. Berkat keuletan Parindra, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama Parindra mendapat pengikut dari kalangan masyarakat yang cukup besar, sehingga Parindra seakan-akan merupakan partai rakyat. Oleh karena kesuksesan Parindra ini, maka akhirnya banyak partai-partai lokal yang menggabungkan diri ke dalam Parindra antara lain:

- a. Sarikat Sumatra di bawah pimpinan Haji Dahlan Abdullah;
- b. Sarikat Ambon di bawah pimpinan Mr. Latuharhary;
- c. Sarikat Minahasa di bawah pimpinan Dr. Sam Ratulangi;
- d. Dan lain-lain. <sup>431)</sup>

Di saat gerak Parindra berhasil dengan baik dan berkembang dengan pesat, sehingga sudah akan mengadakan konggres lagi yang ke II yakni pada bulan Desember tahun 1938, mendadak ada kesedihan dalam diri Parindra sebab Dr. Sutomo yang merupakan motor dari Parindra meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1938 di Rumah Sakit Pusat Surabaya. Sebelum beliau meninggal masih sempat berpesan kepada Sudirman:

"Saudaraku, pesanku padamu dan pada saudara-saudara lain semuanya yang akan kutinggalkan, bekerjalah terus untuk kemajuan pergerakan kita. Ketahuilah olehmu saudara, bahwa pergerakan bangsa kita masih harus berkembang, harus bersemi dan harus selalu maju. Oleh karena itu, saudara sampaikanlah pesanku kepada saudara-saudara semuanya yang tidak dapat mengunjungi saya kemari; bersama-samalah bekerja lebih giat dan kuat guna kemajuan pergerakan dan perjuangan kita, sehingga tercapai kemerdekaan dan kemuliaan bangsa". <sup>432)</sup>

Atas permintaan beliau sendiri jenazah dikebumikan di halaman Gedung Nasional Surabaya.

Walaupun Dr. Sutomo telah meninggal, tetapi dengan adanya pesan terakhir tersebut, maka kaum pergerakan Nasional khususnya Parindra semangatnya pantang mundur. Untuk membina tetap adanya kekompakan pada diri Parindra, selaku Ketua diganti oleh R.M.A. Wurjaningrat. Dengan R.M.A. Wurjaningrat sebagai Ketua cita-cita atau rencana yang telah disusun bersama-sama dengan Dr. Sutomo tetap diteruskan. Sehingga pada tanggal 23-26

yang mempunyai hak-hak dan kewajiban.

- b. Mempertinggi cara mereka bekerja dan mengusahakan pekerjaannya, juga mempertinggi harga hasil-hasil pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih luas.
- c. Mengadakan organisasi terutama berbentuk kooperatif untuk keperluan mencari bibit tanaman, membeli dan menjual bahan. <sup>435)</sup>

Rukun Tani Parindra tersebut mendapat sambutan yang baik sekali khususnya dari para petani dan masyarakat lain pada umumnya. Sehingga pada bulan Juli 1938 Rukun Tani sudah mampu mengadakan konperensi yang pertama di Lumajang. Konperensi Rukun Tani Parindra ini dimeriahkan juga dengan pasar malam, yang mendapat perhatian dari segala lapisan masyarakat. Hadir dalam konperensi tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Van der Plas. Di dalam sambutannya dia mengatakan simpatinya terhadap Rukun Tani. Diharapkan juga oleh Van der Plas agar supaya Rukun Tani menjauhkan diri dari soal-soal politik. <sup>436)</sup> Harapan dari Van der Plas tersebut tentunya cukup didengar saja, sebab bagaimanapun juga Rukun Tani Parindra didirikan oleh kaum pergerakan nasional, jadi jelas sedikit banyak tentu berbau politik. Di dalam diri Parindra didirikan juga koperasi Tani yang disebut *Loemboeng-cooperatie* (lumbung koperasi). Lumbung koperasi Parindra ini banyak sekali didirikan di Jawa Timur, antara lain di Dawuhan, Gombloh, Kaliboto, Jogayudan, Karangbendo, Jombang, Kutorejon dan lain-lain. <sup>437)</sup>

Parindra selain memperhatikan bidang politik dan ekonomi, bidang sosial pun mendapat perhatian yang baik sekali, sehingga dibentuk Departemen Sosial Parindra. Dalam bidang ini Parindra mengusahakan pemeliharaan orang miskin, pemeliharaan anak yatim piatu, pemeliharaan penganggur dan pembukaan pelbagai klinik umum. Pekerjaan sosial lainnya yang tidak mampu ditangani oleh Parindra sendiri, wakil Parindra memperjuangkan di dalam dewan-dewan. Pekerjaan sosial dimaksud antara lain perbaikan perumbuhan rakyat, pengaturan air minum, perbuatan kakus umum dan lain-lain. <sup>438)</sup>

Dengan demikian jelas bahwa Parindra berjuang dalam bidang sosial masyarakat tidak hanya terbatas pada kemampuan yang ada, tetapi Parindra juga memperjuangkan kepada dewan (Parlemen), sesuai dengan jiwa atau sifat perjuangan Parindra yakni koperasi insidental.

Di dalam bidang pendidikan Parindra juga berusaha untuk memperjuangkan melalui dewan. Usaha ini antara lain:

- a. Memperjuangkan untuk dapatnya mengubah jumlah dan jenis sekolah yang cocok dengan rencana kemakmuran dan perkembangan penduduk.
- b. Memperjuangkan untuk dapatnya menurunkan uang sekolah dengan maksud agar sesuai dengan kemampuan rakyat. Di samping itu juga diperjuangkan agar supaya anak-anak yang tidak mampu mendapat kesempatan untuk belajar dengan cuma-cuma.
- c. Memperjuangkan untuk dapatnya memberikan beasiswa secara luas dan menyelenggarakan asrama murah bagi para siswa sekolah menengah dan sekolah tinggi dan apabila dipandang perlu juga untuk anak-anak sekolah rakyat.<sup>439)</sup>

Dengan melihat usaha-usaha Parindra yang menyeluruh, maka wajar apabila Parindra mendapat sambutan yang baik sekali dari masyarakat Jawa Timur sehingga partai ini hidup terus sampai nanti tahun 1942. Dengan bergantinya penjajah, dari penjajah Belanda kepada penjajah Jepang yang mana Jepang melarang partai yang berbau politik hidup di Indonesia.

## 5. *Gapi*

Pada tanggal 21 Mei 1939, rapat resmi Panitia Persiapan Pembentukan Badan Konsentrasi diadakan di Gedung Permufakatan di Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut ialah wakil-wakil dari beberapa partai politik antara lain:

- a. Wakil dari Partai Parindra : M.H.Thamrin, Sukardjo Wirjopranoto.
- b. Wakil dari Perkumpulan : Atik Suardi, S. Suradiredja, Pasundan Ukur Bratakusuma.
- c. Wakil dari Persatuan Mina- : Senduk, Ratulangi. hasa
- d. Wakil dari PSII : Abikusno, Tjokrosujoso, Sjahbuddin Latif, Moh. Sjafei.
- e. Wakil dari Gerindo : A.K. Gani, Amir Sjarifuddin, Sanusi Pane, Wilopo.
- f. Wakil dari PII : Kjai Mansur, Wiwoho.

Untuk pertama kali pimpinan dipegang oleh Muhammad

Husni (M.H.) Thamrin, Mr. Amir Sjarifuddin, Abikusno Tjokrosujoso. Keputusan selanjutnya dijelaskan bahwa dari hasil rapat tersebut didapat kata sepakat bahwa saat itu dibentuk suatu badan konsentrasi Nasional yang bersama Gabungan Politik Indonesia disingkat menjadi GAPI.<sup>440)</sup>

GAPI lahir pada hakekatnya adalah merupakan tantangan atau jawaban atas adanya penolakan terhadap Petisi Sutardjo yang diputuskan pada tanggal 16 Nopember 1938. Di samping itu juga adanya faktor-faktor lain dalam segi politik. Jelasnya alasan yang mendorong lahirnya GAPI ialah:

- a. Kegagalan Petisi Sutardjo.
- b. Kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme.
- c. Sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia.<sup>441)</sup>

Sesuai dengan alasan yang mendorong lahirnya GAPI seperti tersebut di atas, maka GAPI menentukan anggaran dasarnya sebagai berikut:

- a. Hak untuk menentukan diri sendiri;
- b. Persatuan Nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kerakyatan dalam faham politik, ekonomi dan sosial.
- c. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.<sup>442)</sup>

Dengan melihat dasar GAPI tersebut jelas bahwa sesungguhnya sifat GAPI adalah tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Namun demikian untuk mempermudah jalan untuk mencapai cita-cita, secara insidental tetap ada kerjasama. Oleh karena itu GAPI memutuskan tujuannya sebagai berikut:

- a. Mengajukan kepada semua partai politik nasional Indonesia untuk mengadakan kerja sama.
- b. Menyelenggarakan kongres Indonesia.<sup>443)</sup>

Setelah GAPI mencetuskan alasan-alasan yang mendorong lahirnya, dasar dan tujuannya, maka GAPI mulai melakukan menyebar luaskan aksinya. Panitia-panitia di daerah dianjurkan oleh GAPI untuk mengadakan kursus-kursus dan rapat-rapat yang bersifat tertutup dan umum. Di samping itu sekaligus GAPI berusaha untuk meyakinkan rakyat agar supaya rakyat sadar akan kewajiban untuk mau bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa. Usaha-usaha GAPI ini ternyata mendapat sambutan yang baik sekali dari

segenap rakyat Jawa Timur khususnya serta Indonesia pada umumnya, juga dari partai-partai politik yang lain. <sup>444</sup>)

Karena GAPI merasa sudah mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat/rakyat Indonesia, maka pada tanggal 23-25 Desember 1939 GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Gedung Permufakatan Indonesia di Jakarta. Hadir dalam kongres utusan-utusan dari sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) perkumpulan nasional. Dalam kongres diputuskan antara lain:

- a. Kongres Rakyat Indonesia menjadi suatu badan yang tetap sejak tanggal 24 Desember 1939 dan bertujuan kebahagiaan dan kesentosaan penduduk.
- b. Langkah pertama untuk mencapai tujuan adalah adanya Parlemen Indonesia.
- c. Yang dapat menjadi anggota KRI ialah perkumpulan-perkumpulan dan partai-partai yang cukup penting. Sedangkan sebagai badan petugas KRI ditunjuk oleh GAPI dari federasi partai-partai politik.
- d. Sebagai bendera persatuan diakui Merah Putih, sebagai lagu persatuan diakui lagu Indonesia Raya dan sebagai bahasa persatuan diakui bahasa Indonesia (bahasa Melayu yang diperbaharui. <sup>445</sup>)

Dengan kongres tersebut maka berarti bahwa GAPI sudah melangkah kepada tuntutan adanya Indonesia berparlemen. Selanjutnya GAPI melangkah terus untuk membela rakyat terutama dengan gerakan Indonesia berparlemen. GAPI hidup terus sampai nanti masuknya penjajahan Jepang, dibubarkan bersama-sama dengan partai-partai lain.

## 6. *MIAI*

MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia berdiri pada tahun 1937 dipimpin oleh K.H. Wahid Hasjim, Dr. Soekiman, Wondomiseno dan K.H. Mansur. <sup>446</sup>) MIAI merupakan suatu hasil gabungan dari beberapa partai Islam, jadi semacam koordinator. Adapun partai-partai atau organisasi-organisasi Islam yang tergabung di dalamnya ialah PII, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan organisasi atau partai-partai lainnya yang berdasar Islam. <sup>447</sup>) Data mengenai MIAI tidak banyak terdapat di Jawa Timur. Hal ini mungkin disebabkan karena partai-partai atau organisasi-organisasi yang tergabung di dalam MIAI sudah cukup matang untuk

mengatur dirinya sendiri, sehingga dari pihak MIAI tidak terlalu banyak ikut campur tangan. Sebab pada prinsipnya MIAI merupakan penengah apabila di antara anggota gabungannya terjadi pertentangan. Ini semua masih perlu penelitian lebih mendalam.

Pada tanggal 17-19 Pebruari 1940 organisasi-organisasi Pemuda Islam mengadakan konggres, dengan tujuan untuk mengadakan penggabungan dalam Konggres tersebut berhasil tujuan penggabungan organisasi pemuda Islam menjadi Pergabungan Perserikatan Pemuda-pemuda Islam Indonesia. Di dalam hal ini MIAI bertindak sebagai badan penasehat.<sup>448</sup>) Melihat hal tersebut jelas bahwa kegiatan MIAI mencakup seluruh kegiatan badan Islam, baik golongan partai-partai rakyat maupun organisasi pemuda. Jadi sebetulnya ruang lingkup kegiatan MIAI ini cukup luas. Contoh masalah yang ditangani oleh MIAI: pembuatan perangka Islam. H.B. Persatuan Islam mengusulkan kepada MIAI Surabaya untuk mengatur langkah-langkah yang perlu kepada yang berwajib sehubungan dengan hal tersebut demi kepentingan sosial Islam.<sup>449</sup>) Jadi sehubungan dengan kepentingan sosial Islam, MIAI mengkoordinasi sepenuhnya. Masih banyak lagi kegiatan sosial yang tidak dapat berjalan apabila tidak ada turun tangan dari MIAI.

Dengan demikian jelas sekali terlihat bahwa MIAI sebagai koordinator yang duduk dan diakui suaranya di dalam *Volksraad*, betul-betul merupakan pencetus suara masyarakat yang mewakili segala suara hati dari masyarakat terutama dari kalangan Islam. Jadi kalau MIAI tidak mau meneruskan suara masyarakat Islam, terutama yang tergabung di dalam MIAI berarti keseluruhan usaha dalam badan Islam tidak akan berhasil, sebab memang kenyataannya yang didengar oleh *Volksraad* hanyalah suara Islam yang telah tergabung di dalam MIAI. Karena MIAI merupakan koordinator partai masyarakat, maka wajar apabila MIAI mendapat tanggapan/sambutan yang baik dari masyarakat Islam. Mengingat di Jawa Timur banyak terdapat pondok-pondok atau pesantren-pesantren yang sudah cukup lama berdiri.

#### 7. *Petisi Sutardjo*

Petisi ini dikenal dengan sebutan Petisi Sutardjo sebab yang mencetuskan gagasan ini ialah Sutardjo Kartohadikoesoemo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur (Pamong Praja Bumiputra) (PPBB). Karena petisi ini diusulkan bukan atas nama PPBB, maka

petisi ini disebut atau diberi nama atas nama sendiri (Soetardjo). Usul petisi ini diajukan kepada Pemerintah, Ratu serta *Staten Generaal* (Parlemen) di negeri Belanda pada tanggal 15 Juli 1936. <sup>450</sup>) Adapun isi usul petisi Soetardjo dimaksud sebagai berikut:

”Oesoel Petisi Soetardjo.

Dengan tariech 15 Djoeli 1936 telah disorongkan kepada Volksraad oesoel:

Kami jang bertanda tangan di bawah ini dengan hasrat menjorongkan oesoel, soepaja Volksraad dengan mengena-kan hak jang diberikan kepada madjelis itoe dalam pasal 68 daripada oendang-oendang Indische Staatsregering, meng-adjoeakan permohonan pada Pemerintah Tinggi dan Staten Generaal soepaja soekalah menolong daja-oepaja agar soepaja diadakan satoe sidang permoesjawaratan dari wakil-wakil Nederland dan wakil-wakil Hindia Nederland. jang sidang permoesjawaratan itoe dengan memakai atoeran hak bersama antara angoeta-anggoetanya akan mengatoer soeatoe ren- tjana bagi memberikan kepada Hindia Nederland dengan djalan berangsoer di dalam sepuluh tahoen, ataepoen tempo jang oleh sidang permoesjawaratan itoe akan dianggap dapat melakoekannya, kedoedoekan berdiri sendiri dalam batas- batas pasal 1 dari pada Grondwet”.

Soetardjo

Ratoe Langie

Kasimo

Datoe’ Toemenggoeng

Ko Kwat Tiong

Alatas. <sup>451</sup>)

Dengan melihat nama-nama yang tercantum pada akhir usul tersebut terbukti bahwa usul tersebut didukung oleh beberapa golongan atau organisasi. Tetapi walau bagaimanapun juga Soetar- djo sudah berusaha, namun kenyataannya masih ada golongan yang merasa keberatan. Golongan yang merasa keberatan ini ialah anggota *Volksraad* yang tergabung dalam Fraksi Nasional. Adapun keberatannya ialah:

- a. Bahwa usul tersebut tidak menggambarkan keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki Indonesia merdeka.
- b. Bahwa cara untuk memperoleh perubahan kedudukan negara

itu sangat rendah, yakni dengan jalan meminta-minta. <sup>452)</sup>

Sudah menjadi watak kamus nasionalis radikal bahwa sikap yang lunak dari bangsa kita tidak disetujui, lebih-lebih yang dirasa adanya sifat meminta-minta. Oleh karena petisi Soetardjo mereka anggap terlalu lunak seperti dasar keberatan tersebut, maka kaum nasionalis radikal menolak. Parindra dan Gerindo yang saat itu anggotanya meliputi sebagian besar rakyat Jawa Timur menyatakan setengah-setengah. Parindra lebih condong kepada penyelenggaraan *Imperiaal Conferentie* daripada kepada tujuan Petisi Soetardjo. Jadi tanggapan dari bangsa kita sendiri terhadap usul Petisi Soetardjo ada dua pandangan yakni pro atau mendukung dan kontra atau keberatan atau menolak. Situasi bangsa Indonesia yang demikian itu rupanya tidak luput dari pengawasan pemerintah Belanda. Kesempatan yang semacam inilah yang memang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Belanda untuk menghancurkan atau setidaknya melumpuhkan semangat bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 16 Nopember 1938 keluar keputusan dari Nederland sebagai keputusan raja yang isinya ialah bahwa Petisi Soetardjo ditolak. <sup>453)</sup> Dengan ditolakannya Petisi Soetardjo ini, akibatnya justru tumbuhnya kegiatan-kegiatan baru di kalangan pergerakan, misalnya timbulnya GAPI seperti telah diuraikan di muka dan sebagainya.

#### 8. *Gerakan Indonesia Berparlemen*

Indonesia berparlemen adalah semboyan perjuangan Gabungan Politik Indonesia. Semboyan ini seakan-akan merupakan ketegasan dari Petisi Soetardjo yang telah ditolak oleh pemerintah Belanda. Karena Petisi Soetardjo dianggap lunak oleh sebagian masyarakat khususnya dari Fraksi Nasional, sehingga mereka merasa keberatan, maka GAPI kemudian mengambil semboyan yang lebih tegas. Dengan demikian semboyan Indonesia Berparlemen dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Semboyan tersebut dicetuskan pada waktu diadakan kongres GAPI tanggal 19-20 September 1939. Secara keseluruhan keputusan kongres GAPI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan adanya parlemen yang anggota-anggotanya pilihan rakyat, pemerintah bertanggungjawab terhadap parlemen pilihan rakyat tersebut.
- b. Apabila tuntutan Indonesia Berparlemen ini dipenuhi oleh

pemerintah belanda, maka GAPI bersedia untuk menganjurkan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintah Belanda.

- c. Anggota-anggota GAPI tidak diperbolehkan untuk mengadakan tindakan sendiri-sendiri dan harus mengeluarkan pendapatnya dalam satu ikatan yaitu GAPI. <sup>454</sup>)

GAPI merasa bahwa semboyan yang telah dicetuskan di dalam kongres tersebut akan mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat. Oleh karena itu GAPI mulai menyebarluaskan kepada masyarakat isi semboyan tersebut. Partai dan Pers masyarakat secara keseluruhan mendukung. Hanya Pers Belanda yang menyatakan bahwa "belum waktunya". <sup>455</sup>) Walau bagaimanapun juga Pers Belanda mengatakan tetapi GAPI bercita-cita dengan jalan apa pun tuntutananya akan tetap diteruskan. Akhirnya pada bulan Agustus 1940 GAPI mengajukan resolusi kepada Pemerintah Belanda sebagai berikut:

- a. Mendesak segera diadakannya parlemen dengan merubah Dewan Rakyat atau *Volksraad* yang ada, di antaranya dengan mengadakan pemilihan anggota-anggotanya secara bebas, sehingga betul-betul merupakan wakil-wakil yang sebenarnya dari semua golongan.
- b. Jabatan Kepala-Kepala Departemen supaya diubah, sehingga kedudukan mereka itu menjadi menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. <sup>456</sup>)

Sebagai jawaban dari pemerintah Belanda terhadap resolusi yang dikemukakan oleh GAPI tersebut adalah dibentuknya *Commissie tot bestudering van staatsrechtelijke hervormingen* (komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan). Komisi ini kemudian dikenal dengan Komisi Visman, sebab ketuanya Dr. F.H. Visman. <sup>457</sup>) Komisi Visman ini tidak mendapat tanggapan menyatakan tidak setuju. Tetapi GAPI masih bersikap lunak, yakni apabila nanti ada undangan secara resmi dari Komisi Visman akan diterima dan akan menyampaikan bentuk serta susunan ketatanegaraan Indonesia yang diinginkan.

Pada tanggal 14 Pebruari 1941 wakil-wakil GAPI dengan Komisi Visman mengadakan pertemuan di Gedung *Raad van Indie* di Jakarta. GAPI menyampaikan perencanaannya sebagai berikut:

Desember 1938 Parindra menyelenggarakan kongresnya yang ke II di Bandung. Salah satu keputusan yang penting dalam kongres ialah penetapan sikap partai terhadap golongan Indo-Belanda. Parindra belum memperkenankan golongan Indo masuk dalam partai, tetapi Parindra bersedia untuk mengadakan kerjasama dengan golongan Indo selama kerjasama itu tidak melanggar asas kepartaian. Di samping adanya keputusan tersebut yang cukup menarik untuk dikemukakan ialah prasaran dari M.H. Thamrin sebagai pemimpin Departemen Politik yang menegaskan bahwa selama keadaan Indonesia dan kedudukan bangsa Indonesia masih tetap tidak berubah dan bangsa Indonesia tidak diberi wewenang untuk mengubahnya, maka tidak wajar apabila menganjurkan pengorbanan spiritual dan material kepada mereka untuk mempertahankan keadaan yang tetap seperti saat itu. <sup>433</sup>)

M.H. Thamrin sebagai seorang pemimpin Departemen Politik Parindra, kegiatan serta langkah-langkah yang dilakukan patut mendapat pujian. Beliau sering mengadakan kecaman yang pedas terhadap kebijaksanaan Pemerintah, juga termasuk salah seorang ahli debat di dalam *Volksraad*. Jadi ia memperjuangkan nasib rakyat bukan hanya yang langsung dengan masyarakat saja, tetapi juga kepada Pemerintah tegasnya di *Volksraad*. Tetapi sayang M.H. Thamrin tidak dapat lama memimpin dan memperjuangkan rakyat Indonesia sebab pada tahun 1941, dia meninggal dunia. Akhirnya Parindra bubar pada tahun 1941 bersama-sama dengan partai lainnya sebab dilarang oleh Jepang. <sup>434</sup>)

Kalau politik merupakan pendorong idee untuk menunjang suksesnya cita-cita bangsa yang mana dorongan tersebut akan tidak dapat berjalan lancar, apabila kondisi masyarakat kurang kuat, maka sarana untuk mendukung kekuatan kondisi masyarakat guna mencapai cita-cita bangsa harus ada, itulah ekonomi. Di dalam bidang ekonomi Parindra mendirikan Departemen Ekonomi yang dipimpin oleh Susanto Tirtoprodjo. Usaha ekonomi yang masuk di dalam Departemen ini antara lain koperasi, baik pertanian, pelayaran, kerajinan dan perdagangan. Karena Parindra tahu bahwa salah satu faktor yang ikut menentukan hidup matinya masyarakat Indonesia adalah kaum tani, maka Parindra membentuk Rukun Tani. Melalui Rukun Tani ini Parindra berusaha menuntun kaum tani dengan jalan:

- a. Mengadakan kursus-kursus dan propaganda untuk menginsyafkan kaum tani, bahwa kaum tani adalah warga negara

A. Bentuk serta susunan parlemen :

1. Parlemen tersebut terdiri dari dua kamar, yaitu kamar pertama dan kamar kedua.
2. Anggotanya adalah warga negara laki-laki dan wanita.
3. Semua anggota dipilih melalui:
  - a. Untuk kamar pertama menurut cara yang akan ditentukan kemudian, yang harus memberikan perwakilan yang menyaranakan semua aliran dan golongan dalam masyarakat.
  - b. Untuk kamar kedua dipilih langsung dari rakyat.
4. Yang dimaksud dengan warga negara adalah yang berlaku untuk rakyat Raja Belanda.
5. Pemilih untuk para anggota kamar kedua didasarkan atas perbandingan suara dan per daerah.
6. Hak untuk memilih bersifat umum dan langsung.
7. Hak pilih ini berlaku untuk setiap warga negara.
8. Jumlah untuk wakil kamar pertama terdiri dari 100 orang, sedang untuk kamar kedua 200 orang.
9. Parlemen merupakan badan eksekutif tertinggi dalam negara.
10. Parlemen juga menetapkan segala peraturan untuk kepentingan negara.

B. Susunan lain yang berhubungan dengan "Indonesia Berparlemen" :

1. Indonesia adalah sebuah Negara yang dipimpin oleh seorang pimpinan Negara.
2. Pemimpin Negara mempunyai hak veto dan tak dapat dituntut dari apa yang diperbuat oleh pemerintah.
3. Yang bertanggungjawab dalam pemerintahan adalah para Menteri.
4. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Pimpinan Negara.
5. Pemimpin Negara mengangkat dan menghentikan Menteri-menteri.
6. Pemimpin Negara dibantu oleh Majelis Negara yang merupakan suatu Badan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Negara.
7. Kedudukan Indonesia bersama dengan Nederland meru-

pakan suatu Serikat Negara-negara (*Statenbond*).

C. Cara-cara untuk mencapai "Indonesia Merdeka".

1. Harus diadakan perubahan-perubahan politik yang bermaksud untuk pembangunan politik.
2. Pemerintah Hindia Belanda harus mengambil langkah-langkah pertama sebagai berikut:
  - a. Seorang Indonesia diangkat menjadi wakil Gubernur Jenderal.
  - b. Pada tiap-tiap Departemen diangkat seorang Indonesia pada Departemen-Departemen tersebut.
  - c. Untuk anggota-anggota *Raad van Indie* (Dewan Hindia) harus lebih banyak diangkat orang-orang Indonesia.
  - d. Di samping Dewan Rakyat yang ada, harus diadakan sebuah Kamar Rakyat.
  - e. Diadakan pemilihan secara langsung untuk anggota-anggota Kamar Rakyat, dengan cara perbandingan jumlah suara dan per-daerah-daerah.
  - f. Kepada semua rakyat raja Belanda baik laki-laki maupun wanita diberikan hak memilih maupun dipilih untuk Kamar Rakyat tersebut.
  - g. Untuk orang-orang Indonesia yang buta huruf dapat menunjuk pemilih.
3. Dewan Rakyat dan Kamar Rakyat bersama-sama merupakan Badan Perwakilan Rakyat.
4. Pemerintah dan Badan Perwakilan Rakyat bersama-sama merupakan *Self Government Indonesia*.
5. Yang dimaksud dengan *Self Government Indonesia* tersebut mengatur semua kepentingan negara, termasuk juga Anggaran Belanja dan lain sebagainya.
6. Pemerintah Agung Negeri Belanda dan *Self Government Indonesia* menetapkan bersama :
  - a. Konstitusi Negara yang tidak hanya untuk keperluan pembangunan politik saja, tetapi sosial ekonomis yang berdasarkan demokratis.
  - b. Hubungan Hukum antara Nederland - Indonesia dengan Negara-negara lain.

7. Selanjutnya pembangunan politik harus dilaksanakan dalam lima tahun, yang jika perlu dapat menggunakan "hukum istimewa tertinggi untuk negara dalam bahaya" (*Staatsnoodrecht*). 458).

Usul tersebut ternyata tidak mendapat tanggapan atau keputusan yang memuaskan bagi pihak pengusul sebab jawaban masih ditangguhkan sampai habis perang. Dengan penangguhan jawaban ini sangat menimbulkan kekecewaan dari para pengusul, akhirnya usul tersebut ditarik kembali. Kekecewaan yang dialami oleh GAPI ini tidak dapat mematahkan semangat perjuangannya, tetapi justru menambah gigihnya perjuangan mereka. Kemudian pada bulan April 1941 Ch.I.J.M. Welter dan Van Kleffens dua orang menteri jajahan datang mengunjungi Indonesia sebagai negeri jajahannya. 459). Kaum nasionalis Indonesia menyangka bahwa kedatangan dua orang tersebut membawa keputusan tentang usul yang telah dikemukakan beberapa waktu yang lalu. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka datang ke Indonesia hanya berkunjung sambil melihat situasi Indonesia yang mungkin selanjutnya dilaporkan kepada Raja Belanda.

Pada tanggal 10 Mei 1941, beberapa Minggu setelah kunjungan Ch.I.J.M. Welter dan van Kleffens ke Indonesia, raja Belanda memberikan amanatnya melalui corong radio, yang intinya sebagai berikut:

" ..... Sekarang saya umumkan kepada segenap penduduk kerajaan bahwa saya bermaksud untuk melaksanakan janji (pemberian kesempatan yang luas dalam ketatanegaraan) yang bertalian dengan penyesuaian struktur bagian seberang lautan dengan perubahan keadaan dan penetapan kedudukannya dalam kerajaan; Untuk tujuan tersebut saya bersedia menerima pemberitahuan tentang keinginan dan pendapat dari pihak yang bersangkutan untuk dipertimbangkan semasak-masaknya". 460).

Untuk memperjelas isi amanat tersebut, Gubernur Jenderal kemudian memberikan penjelasan dengan pengumuman sebagai berikut:

"Pemerintah tertinggi bermaksud untuk menyelenggarakan konferensi sehabis pembebasan negara induk, yang akan dihadiri oleh para pembesar penting dari pelbagai

bagian kerajaan ..... Dalam konferensi itu akan dibahas juga segala keinginan negara ini. Hal itu akan dibicarakan secara keseluruhan. 461).

Adanya amanat dari raja Belanda serta pengumuman dari Gubernur Jenderal tersebut, rupanya tidak dapat menggerakkan kaum pergerakan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia sudah kenyang akan janji-janji pemerintah yang tidak pernah dipenuhi. Kemudian demi untuk menjaga keamanan negara, pemerintah mengemukakan akan diadakan milisi bumiputra. keamanan pemerintah ini waktu dikemukakan pada kongres tanggal 29 - 30 Juni 1941 di Surabaya, ditolak oleh kaum pergerakan nasional, terutama Parindra. 462). Perlu diketahui bahwa Parindra pada saat itu merupakan salah satu partai yang paling banyak mendapat pengaruh di Jawa Timur. Sehingga apabila Parindra berkata ya, maka akan banyak mendapat dukungan dari rakyat. Begitu pula apabila Parindra berkata tidak, maka rakyat juga akan ikut menolak. Demikian maka milisi Bumiputra yang akan diadakan dan dikemukakan pada kongres di Surabaya tersebut mengalami kegagalan.

Pemerintah rupanya masih mempunyai taktik atau senjata yang baik baginya yakni *Volksraad*. Pemerintah mengajak melaksanakan sidang *Volksraad*, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1941. Hasilnya, milisi diterima oleh sidang melalui pungutan suara. 463). Namun demikian disebabkan simpati dari masyarakat terhadap *Volksraad* sudah tidak begitu baik, maka akibatnya milisi tersebut mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya semangat dari Parindra dan lain-lain untuk tetap memperjuangkan aksi Indonesia Berparlemen. Akhirnya karena aksi Indonesia Berparlemen tetap tidak dapat diterima oleh pemerintah, maka kaum pergerakan nasional berusaha mendirikan Parlemen Partikular. Parlemen Partikular ini dipelopori oleh: Gabungan Politik Indonesia; Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri, dan Majelis Islamil A'la Indonesia. 464).

Hasil usaha inilah kemudian terwujud dalam bentuk Majelis Rakyat Indonesia. Jadi Majelis Rakyat Indonesia adalah wujud dari Parlemen Partikular. Di dalam diri Majelis Rakyat Indonesia inilah kemudian terpusat komponen Golongan Nasional Indonesia dari Fraksi Nasional atau kaum Nasionalis ra-

dikal yang mempunyai tujuan yang jelas "mencapai Indonesia Merdeka".

#### D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG.

##### 1. Sikap Pemerintah hindia Belanda.

Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat pada masa akhir pemerintahannya sudah banyak diungkapkan di muka. Pada dasarnya pemerintah selalu mencurigai setiap gerak dari masyarakat terutama gerak-gerak dari kaum pergerakan, sehingga PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) diperketat. Pada tanggal 1 Pebruari 1939 *procureur generaal* H. Marcella memberi instruksi rahasia kepada PID untuk mengawasi gerak-gerak Gerindo. Instruksi ini tidak pernah dicabut. <sup>465)</sup> Walaupun instruksi tersebut hanya ditujukan kepada Gerindo, tetapi kenyataannya berlaku untuk seluruh organisasi/partai politik. Di samping PID pemerintah mempunyai Sarekat - Hidjo. Sarekat Hidjo ini tugasnya melaksanakan ancaman-ancaman intimidasi kepada rakyat yang berani melawan pemerintah. <sup>466)</sup> Jadi kegiatan di dalam bidang politik bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan dibatasi.

Kalau di dalam bidang politik segala gerak-gerak kaum pergerakan selalu mendapat pengwasan, maka di dalam bidang ekonomi demikian juga. Perusahaan-perusahaan kecil swasta dikenakan pajak yang terlalu tinggi, pegawai-pegawai rendah atau kaum buruh gaji upahnya sangat ditekan dan dibedakan dengan bangsa Belanda walaupun kedudukannya sama rendahnya. Untuk menghindarkan adanya tekanan-tekanan tersebut, maka atas prakarsa Bung Karno di Surabaya didirikan Sarekat Kaum Buruh Indonesia, yang di dalamnya sekaligus merupakan gabungan dari kaum buruh dan tani. Kegiatan inipun kemudian ditumpas oleh pemerintah Belanda. Kepada para pemimpinnya diadakan penggrebegan. <sup>467)</sup> Sehingga akhirnya kegiatan SKBI mengalami kesulitan dan lumpuh. Juga di dalam usaha-usaha lain dalam bidang ekonomi mengalami rintangan atau hambatan dari pemerintah Belanda pada saat itu. Akibatnya banyak sekali terjadi pengangguran. Kemudian atas uluran tangan Dr. Sutomo pengangguran-pengangguran ini di Surabaya ditampung

dan disalurkan sesuai dengan bakat masing-masing.

Usaha ini kemudian mengalami pembangunan yang baik, sehingga menjadi koperasi, yang kemudian dapat sedikit mengurangi penderitaan rakyat yang selama itu menjadi sasaran tekanan dari pemerintah kolonial Belanda.

Pendidikan merupakan tempat atau wadah untuk mencekik kaum pergerakan yang cukup militan tidak luput dari kekangan pemerintah. Untuk membatasi perkembangan bidang pendidikan ini, maka pada tahun 1932 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Sekolah Swasta (*Wilde Scholen Ordonnantie*). 468).

Dengan keluarnya Undang-undang ini, maka usaha pengembangan pendidikan bagi sekolah swasta sangat mengalami kesulitan. Hal ini diketahui oleh kaum pergerakan, sehingga kaum pergerakan berusaha untuk dapat membatalkan Undang-undang tersebut, yang memang kalau betul-betul terlaksana jelas akan mematikan sekolah swasta, berarti mematikan pendidikan kader revolusioner yang dapat ikut mewujudkan cita-cita bangsa. Akhirnya dengan segala daya usaha yang kompak dari kaum pergerakan dan kaum pendidikan, Undang-undang Sekolah Swasta tersebut dicabut kembali oleh pemerintah Belanda.

Akhirnya dengan dukungan kaum pergerakan, Sekolah-sekolah Swasta hidup terus walaupun jalannya tidak selancar sekolah pemerintah. Jadi sampai pada akhir pemerintahannya, pemerintah kolonial Belanda masih tetap bersifat angkuh, sombong dan memeras kepada rakyat Indonesia baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial.

## 2. *Keadaan masyarakat (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama).*

### a. Ekonomi

Daerah Jawa Timur adalah daerah yang terhitung padat penduduknya. Pada tahun 1930 jumlah penduduk Jawa Timur ada 15.055.714 orang. Luas daerah 47.922 km<sup>2</sup>. Jadi kepadatan penduduk rata-rata adalah 492,0469) Daerah yang paling padat penduduknya adalah daerah Surabaya dan Besuki. Oleh karena itu bagi masyarakat Jawa Timur usaha mengolah tanah adalah menjadi pokok penghidupan. Sehingga modal asing yang masuk ke Jawa Timur kebanyakan diarahkan untuk memper-

oleh hasil tanah misalnya perkebunan.

Tetapi perkebunan yang diusahakan dengan modal asing ini hasilnya tidak dapat dinikmati oleh rakyat. Sebab kenyataannya hanya mempersulit rakyat, sebab tenaga banyak dikeluarkan tanaman harus menurut kepada yang memerintah (tanam paksa) sedangkan gaji upah tidak sesuai. Hal itulah yang sebenarnya dianggap menyulitkan masyarakat. Untuk mengurangi tekanan-tekanan inilah seperti telah diuraikan di muka, atas prakarsa Dr. Sutomo, banyak didirikan koperasi. Koperasi ini meliputi beberapa jenis antara lain koperasi tani, koperasi meubel, koperasi buruh dan sebagainya. Sedangkan untuk mengurangi pengangguran, Dr. Sutomo merintis di Surabaya didirikan beberapa jenis kerajinan rakyat. Dengan demikian tekanan ekonomi dari pemerintah jajahan sedikit banyak dapat diatasi.

#### b. Sosial

Pada saat akhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia keadaan politik, ekonomi di daerah telah diuraikan di muka sangat tertekan. Hal ini semuanya akan sangat mempengaruhi keadaan sosial masyarakat. Sebab pada hakekatnya inti daripada sosialisme adalah memberantas kemiskinan, baik yang bersifat material maupun spiritual. 470) Jadi kebulatan tekad dari masyarakat untuk memperjuangkan kemiskinan adalah timbulnya rasa sosial.

Pada saat itu tindak sosial yang nyata langsung dirasakan oleh masyarakat terutama dipelopori oleh Dr. Sutomo di dalam Parindra. Di dalam badan sosial Parindra memiliki Departemen Sosial yang mengabdikan diri kepada bidang sosial. Yang telah dikerjakan oleh Parindra antara lain:

- 1). mengusahakan pemeliharaan orang miskin;
- 2). mengusahakan pemeliharaan anak yatim;
- 3). mengadakan pemeliharaan para penganggur;
- 4). membuka poliklinik umum dan lain-lain. 471).

Di samping itu Dr. Sutomo berusaha mengkoordinasi para pekerja atau buruh kecil untuk membantu secara langsung, sehingga berdiri Sarekat Supir, Sarekat Kusir, Sarekat Buruh Pelabuhan dan Sarekat Percetakan. 472) Dengan melihat kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa kerja sosial yang dilakukan oleh Dr. Sutomo atau Parindra sangat bermanfaat

dan betul-betul dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

### c. Pendidikan

Telah dirasakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, bahwa pendidikan yang maju dari penduduk Bumiputra akan membahayakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah mengadakan pembatasan dalam bidang pendidikan, baik mengenai jenis sekolah maupun para muridnya. Di samping ada pembatasan jenis sekolah dan murid, juga ada perbedaan. Perbedaan dimaksud dapat dilihat pada perincian sebagai berikut:

- 1). Tingkatan sekolah bagi golongan kecil bangsa Indonesia yang mampu: HIS - MULO - AMS - Sekolah Tinggi.
- 2). Tingkatan sekolah bagi bangsa Eropa (Belanda): ELS - HBS 5 Tahun - Sekolah Tinggi. 473).

Dengan adanya perbedaan serta pembatasan tersebut akibatnya bangsa Indonesia sedikit sekali yang dapat masuk sekolah. Hal inilah yang dikehendaki oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat berkembang dan tidak mampu untuk memikirkan ke arah politik.

Hal tersebut sangat dirasakan oleh kaum pergerakan nasional. Sebab kaum pergerakan sangat membutuhkan adanya kader-kader yang mampu untuk berkembang dengan baik. Sedangkan untuk dapat berkembang dengan baik tidak ada basis lain kecuali harus baik dalam bidang pendidikan. Akhirnya timbul gagasan untuk mengadakan sekolah swasta. Sekolah swasta umumnya tidak bersubsidi. Prakarsa pendirian sekolah swasta terutama dari pihak agama misalnya Islam. Perkembangan kemudian dari sekolah agama ini sistem pengajaran dan pelajarannya diperbaharui dan mengubah sikap menjadi nasionalis yang anti kolonial. 474). Jadi jelas munculnya sekolah swasta terutama yang tidak bersubsidi terutama adalah untuk mendidik kader-kader pergerakan nasional yang mampu dan sanggup melepaskan masyarakat dari genggaman kaum penjajah.

Selanjutnya atas prakarsa Ki Hadjar Dewantoro seperti telah disebut di muka berdirilah Taman Siswa. Taman Siswa ini berkembang dengan baik dan pesat sekali sehingga sekolah-sekolah swasta yang lain mempercayakan diri kepada asuhan Taman Siswa. Akhirnya Taman Siswa berkembang di seluruh In-

donesia. Pada tahun 1929 di Surabaya Taman Siswa telah didirikan di Kranggan, Tumenggungan, Pacarkeling dengan jumlah guru ada 8 (delapan) orang dan jumlah murid 452 orang. 475).

Melihat adanya perkembangan sekolah swasta yang meningkat dengan pesat tersebut, pemerintah merasa khawatir akan gerak lebih jauh terutama dalam bidang politik. Oleh karena itu pemerintah tidak tinggal diam. Untuk membatasi perkembangannya pada tahun 1932 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Sekolah Swasta (*Wilde scholen Ordnnantie*) 476). dengan tujuan untuk mengawasi sekolah-sekolah partikuler/swasta yang tidak dibiayai oleh pemerintah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini oleh pemerintah, mengakibatkan timbulnya rasa tersinggung baik di kalangan Taman Siswa maupun di kalangan kaum pergerakan. Akhirnya secara kompak sepakat mereka menolak dijalkannya Undang-Undang Sekolah Swasta tersebut. Usaha ini berhasil kemudian Undang-undang dicabut oleh pemerintah pada tahun 1933. Dengan demikian jelas bahwa di dalam bidang pendidikan, pemerintah membatasi adanya perkembangan dengan segala macam jalan.

#### d. Budaya

Keadaan masyarakat dalam bidang kebudayaan sama halnya dengan keadaan bidang-bidang lain. Belanda maunya tetap membatasi perkembangan. Penduduk bumiputra diletakan di bawah kedudukan bangsa Belanda. Tetapi semuanya itu tidak dapat diterima oleh kaum pergerakan, sehingga kalau tidak terjadi bentrokan dengan pihak Belanda juga terjadi saingan. Seperti halnya kejadian di Surabaya mengenai sport. Belanda mempunyai kesatuan sepak bola, yang mempergunakan lapangan sendiri, yang sudah dipilih sedemikian rupa sehingga bangsa lain tidak diperbolehkan. Nama perkumpulan sepak bola Belanda ini antara lain *Thor*, *Zumacht*, *Escelsior* dan lain-lain. 477).

Pada tahun 1932 terjadi insiden antara persatuan sepak bola Belanda dengan persatuan sepak bola Tionghoa. Dalam hal ini Belanda mengikuti bangsa Indonesia juga sehingga timbul kemarahan dari bangsa Indonesia. Akhirnya Dr. Sutomo mengambil kebijaksanaan dengan jalan mengadakan persatuan

sepak bola tanpa dengan orang Belanda yang disebut dengan Persatuan Bangsa Asia. 478).

Dengan cara Dr. Sutomo ini jelas menunjukkan adanya kekompakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain selain bangsa Belanda. Semangat Persatuan Asia ini menjadi kuat, sehingga sudah sanggup mengadakan kompetisi sepak bola sendiri.

Kompetisi sepak bola bangsa Belanda yang diadakan pada tahun 1932 hanya dikunjungi oleh orang-orang Belanda saja. Sedangkan kompetisi yang diadakan bangsa Asia di Pasar Turi dikunjungi oleh orang-orang Indonesia, Tionghoa dan Arab sehingga mendapatkan hasil yang cukup banyak.

Dari hasil kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh Semangat Persatuan Asia, kemudian dibagi-bagikan kepada organisasi-organisasi sosial yang ada di Jawa Timur. 479). Jadi rasa saling menolong, rasa saling kerja sama di antara bangsa Asia, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap dapat diwujudkan.

Di dalam hal membina hak serta menuntut kesamaan derajat bangsa Indonesia ini tidak hanya dalam bidang olah raga saja, tetapi dalam bidang kebudayaan yang lainpun demikian misalnya dalam bidang bahasa. Kaum nasionalis Indonesia menghendaki dapat menguasai bahasa Belanda, dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang tinggi serta kecerdasan berpikir yang baik. Dengan bekal tersebut kaum nasionalis akan mudah mengetahui taktik serta strategi penjajah, yang dapat dipergunakan untuk melumpuhkannya. 480).

Jadi kegunaan bahasa Belanda bagi kaum nasionalis Indonesia hanya sebagai alat untuk menghancurkan pemerintah jajahan.

Sedangkan untuk mempertahankan kebudayaan nasional, diharapkan tetap mempergunakan bahasa Indonesia. Sehingga M.H. Thamrin yang dikenal sebagai tokoh politik fraksi nasional, pada waktu melancarkan aksinya di depan *Volksraad* menggunakan bahasa Indonesia. 481). Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang hebat bagi penjajah, yang menyebabkan penjajah harus berpikir dua kali lipat. Keberanian M.H. Thamrin yang sangat hebat ini patut kita puji, tetapi sayang tidak lama kemudian yakni pada tahun 1940 M.H. Thamrin ditahan oleh penjajah. Dengan tindakan tersebut semangat bangsa Indonesia ti-

dak menjadi kendor tetapi semakin meningkat. Hal ini terbukti dari misalnya Taman Siswa dan akhirnya untuk melindungi budaya Jawa menerima prioritas kepentingan bahasa Indonesia. 482). Hingga akhirnya bahasa Indonesia berkembang terus sampai sekarang.

e. Agama.

Pada masa akhir pemerintahan Belanda, agama Islam di Jawa Timur dalam perkembangannya sudah mengarah kepada politik. Bahkan pesantren-pesantren antara lain Tegalsari (Ponorogo), Sidocermo (Surabaya), Plategan (Mojokerto), Tirem (Mojokerto) dan sebagainya, selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, berfungsi pula sebagai tempat penanaman kader-kader pemimpin politik Islam. 483) Dengan cara tersebut maka pada saat itu barisan Islam sudah cukup kuat mendukung pergerakan nasional menantang penjajah, walaupun dengan dalih mengembangkan agama Islam. Hal ini jelas ditunjukkan pada sifat-sifat yang mendorong kebangkitan Islam sebagai berikut:

- 1). Hajat dan usaha untuk membersihkan agama Islam dari pada takhayul dan dari anggapan-anggapan yang salah.
- 2). Membangkitkan orang Islam agar supaya menyesuaikan diri dengan keadaan dunia modern dengan jalan pendidikan.
- 3). Menimbulkan revolusi untuk segera menghilangkan keadaan buruk di negeri Islam oleh angkatan Muda Islam.
- 4). Menentang penjajah-penjajah Barat, mempertahankan agama Islam terhadap serangan-serangan dari dunia umumnya serta menyiarkan agama Islam di dunia Barat. 484).

Melihat sifat-sifat yang mendorong kebangkitan Islam tersebut, wajar apabila Islam saat itu mendukung langkah dari cita-cita kaum nasionalis Indonesia. Muhammadiyah mempunyai pandangan bahwa untuk tidak terdesak oleh bangsa asing harus menghilangkan kekolotan dan takhayul. Oleh karena itu orang Islam harus memperbaharui hidupnya. Usaha Muhammadiyah untuk mewujudkan pandangannya dengan jalan:

- 1). Mendirikan sekolah-sekolah Islam modern yang memberi:

- a). mata pelajaran seperti sekolah-sekolah pemerintah,
  - b). pendidikan agama Islam.
- 2). Mengadakan tabligh dengan leluasa.
  - 3). Mendirikan masjid, madrasah, pesantren, pondok dan sebagainya untuk memajukan kegiatan orang Islam dalam menetapi kewajiban terhadap Tuhan.
  - 4). Menerbitkan majalah, surat kabar, kitab-kitab dan sebagainya untuk memperdalam pengertian tentang agama. (485).

Dengan melihat perkembangan kegiatan Islam tersebut, maka setapak demi setapak pondok, pesantren sistem pelajaran serta jenis pelajaran diberikan berubah. Seperti halnya pondok Tegalsari (Ponorogo) akhirnya memperbesar ruang lingkungannya dan dikembangkan di Gontor (Ponorogo). Sehingga berkembang terus sampai saat ini, Gontor telah memiliki Universitas Islam.

### 3. Sikap masyarakat terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, rasa tidak puas terhadap pemerintah Hindia Belanda yang timbul di kalangan masyarakat Indonesia sudah menyeluruh. Baik di kalangan kaum nasionalis lunak maksudnya ialah kaum nasionalis yang duduk di dalam *Volksraad*, maupun di kalangan kaum nasionalis radikal. Rasa tidak puas di kalangan kaum nasionalis radikal, sudah jelas, sejak awal mula kebangkitannya. Sedangkan di kalangan kaum nasionalis lunak rasa tidak puas memuncak dan merupakan pukulan yang hebat karena ditolakny Petisi Soetardjo.

Soetardjo Hadikoesoemo yang mengemukakan petisi tersebut adalah seorang pegawai negeri yang dikenal setia. Dia sebagai wakil Bupati Gresik di Jawa Timur menjadi anggota Dewan Rakyat yang berpikiran progresip. Dia mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan bupati-bupati feodal aristokratis Jawa dan merupakan orang yang terpercaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda. (586). Prakarsa politik yang dikemukakannya ditolak begitu saja oleh pemerintah Belanda. Hal ini mengakibatkan timbulnya rasa tidak puas terhadap pemerintah Belanda, merata bagi masyarakat Timur khususnya serta kaum pergerakan nasionalis pada umumnya.

Di samping itu kaum nasionalis lunak juga mulai timbul rasa kurang puas terhadap pemerintah, bahwa pemerintah kemungkinan tidak akan memenuhi janji-janjinya. Akhirnya para kaum nasionalis lunak secara diam-diam mulai membenarkan cara-cara yang telah ditempuh oleh kaum nasionalis radikal.

Lebih lanjut pada saat Gabungan Politik Indonesia mengajukan usul Indonesia Berparlemen juga ditolak oleh pemerintah Belanda, lebih meningkat. Hal ini disebabkan cita-cita masyarakat. Masyarakat tahu bahwa cetusan Indonesia Berparlemen merupakan ketegasan dari Petisi Soetardjo. Oleh karena itu Indonesia Berparlemen betul-betul dapat dukungan yang kompak baik dari kaum nasionalis radikal maupun kaum nasionalis lunak dan masyarakat. Oleh karena itu pada waktu pemerintah mengumumkan untuk membuka/mengadakan mili-si bumiputra, tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat, bahkan hanya ditanggapi secara acuh tak acuh. 487).

Dengan demikian secara keseluruhan jelas menunjukkan bahwa pada masa akhir pemerintahan Belanda di Indonesia sikap masyarakat Jawa Timur khususnya serta Indonesia pada umumnya hanya masa bodoh. Sehingga pada masa Induk pemerintah Belanda diduduki oleh Jerman, masyarakat Indonesia ikut belasungkawa juga hanya lahirnya saja. Sebab kenyataannya masyarakat tidak membantu pernyataan perang dari pemerintah, tetapi hanya diam tak bereaksi dengan menurut semua larangannya sambil melihat perkembangan selanjutnya.

#### 4. *Keadaan Pemerntah Hindia Belanda di Daerah pada saat terakhir.*

##### a. Sesudah Perang Dunia II pecah di Eropa.

Keadaan daerah jajahan akan sangat terpengaruh oleh keadaan induk daerah yang menjajah. Jelasnya Indonesia yang sesudah Perang Dunia II pecah di Eropa masih menjadi jajahan Belanda, akan sangat terpengaruh oleh keadaan negeri Belanda sendiri. Untuk itu terlebih dahulu harus tahu secara singkat situasi negeri Belanda pada saat itu.

Perang Dunia II pecah sebab-sebab utama ialah:

- 1). Adanya kemelatan yang sangat dalam dirasakan oleh pihak Jerman dan Itali akibat harus banyak membayar hutang dalam Perang Dunia I;

- 2). Adanya tekanan terhadap industri Jerman, sehingga hasil industri sangat kurang, akibatnya kaum buruh merasakan penderitaan dalam;
- 3). Bertambahnya penduduk dari negara tersebut sangat membutuhkan bertambahnya daerah;
- 4). dan lain-lain. 488).

Dengan alasan tersebut maka Jerman, Itali dan kemudian Jepang kompak mulai bergerak mengobarkan Perang Dunia ke II. Jerman dibawah pimpinan Hitler dan Itali di bawah pimpinan Mussolini merasa masih ada saingan kekuatan besar yakni Rusia di bawah pimpinan Stalin. Untuk menghadapi Rusia, Jerman/Itali mengadakan perdamaian. Dengan demikian negara yang dipandang besar sudah tidak ada. Akhirnya pecahlah Perang Dunia ke II.

Karena Belanda terletak di antara Inggris dan Jerman, maka mau tidak mau Belanda ikut dalam situasi perang. Akibatnya negara jajahan ikut prihatin. Sehingga pada saat ini seperti telah diuraikan di muka, usul-usul baik dari GAPI dengan cita-cita Indonesia Berparlemen maupun yang lain-lain hanya ditanggapi dengan acuh oleh pemerintah Belanda. Dengan alasan jawaban akan diberikan nanti sesudah perang selesai. Tetapi kaum nasionalis Indonesia sudah bosan mendengar janji-janji Belanda, sehingga kaum nasionalis hanya kecewa saja. Dengan demikian pada saat itu hubungan antara pemerintah dengan kaum nasionalis sudah menunjukkan semakin jauh.

b. Sesudah Negeri Belanda diduduki oleh Nazi Jerman.

Pada masa Perang Dunia ke II negeri Belanda maunya akan mendekati Jerman seperti halnya pada masa Perang Dunia I, tetapi kenyataannya dengan tiba-tiba pada tanggal 31 Agustus 1939 Jerman menyerbu Polandia dan sekaligus menyerbu Negeri Belanda.

Sehingga pada tanggal 10 Mei 1940 secara resmi Negeri Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. 489). Karena Belanda telah diduduki oleh Nazi Jerman, maka pada saat itu Indonesia tidak ada hubungannya lagi dengan induk negeri Belanda. Jadi Indonesia seakan-akan berdiri sendiri. Oleh karena itu keadaan Indonesia serba sulit.

Dengan jatuhnya negeri Belanda kepada Nazi Jerman, ma-

ka Belanda sudah membayangkan tentang kekejaman Nazi Jerman. Belanda saat itu betul-betul merasakan kedukaan yang dalam. Untuk itu Belanda di Indonesia mencari jalan yakni bersekutu dengan Inggris dan Amerika, dengan tujuan untuk membantu kalau ada serangan lebih jauh baik oleh Jerman/Itali maupun oleh sekutunya yaitu Jepang. Jadi Belanda mempunyai maksud untuk mempertahankan Indonesia agar tetap di bawah jajahannya.

Masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur dalam menghadapi situasi yang serba sulit ini ada bermacam-macam cara, sehingga pada saat itu masyarakat terutama kaum nasionalis seakan-akan ada 3 kelompok yakni:

- 1). Kelompok yang mau menyokong Belanda dalam perlawanannya terhadap Jerman. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak ksatria apabila memukul musuh pada saat musuh itu mendapat duka.
- 2). Kelompok yang tinggal diam. Kelompok ini hanya diam saja menunggu perkembangan lebih lanjut. Maksudnya agar mereka dapat bertindak dengan tegas dan tepat pada saatnya.
- 3). Kelompok yang mau menggunakan kesempatan. Kelompok ini berpendapat bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk menyampaikan hasrat politik dan ekonomi kepada pemerintah Hindia Belanda. 490).

Karena adanya tiga kelompok masyarakat yang satu kelompok menurut perasaan Belanda, mereka masih mendukung, maka akibatnya Belanda masih aman tenteram dengan pegangan kuat seperti masa-masa sebelumnya. Sikap Belanda yang seperti itu menyebabkan sekelompok masyarakat merasa lebih jengkel lagi. Akibatnya sebagian masyarakat mulai mengadakan hubungan dengan Jepang dengan maksud/tujuan untuk membebaskan hubungan dari cengkeraman pemerintah kolonial Belanda. Sehingga Belanda semakin mencurigai segala gerak bangsa Indonesia, terutama kaum nasionalis.

Akhirnya pada tanggal 6 Januari 1941 terjadi adanya penggedahan rumah M.H. Thamrin dan sekaligus menangkapnya. M.H. Thamrin dicurigai oleh Belanda mengadakan hubungan dengan Jepang sebab M.H. Thamrin telah menerima kunjungan utusan Jepang yang bernama Kobajasi di Gedung *Volksraad*.

491) Penahanan terhadap diri M.H. Thamrin menyebabkan kemarahan yang meluap lagi di kalangan kaum nasionalis. Dengan demikian dalam situasi yang semakin gawat ini jurang pemisah antara kaum nasionalis dengan pemerintah Belanda semakin dalam sampai akhirnya nanti saat timbulnya serangan Jepang, sebagian masyarakat hanya tinggal diam.

c. Sesudah Perang Psifik pecah

Nazi Jerman setelah menguasai negeri Belanda, ingin melanjutkan menaklukkan daerah kekuasaan atau jajahan Belanda. Dengan demikian mau tidak mau Indonesia ikut di dalamnya. Karena Jepang merupakan sekutu Jerman Itali, maka Jepang ikut bermusuhan dengan Indonesia. Karena Belanda di belakangnya berdiri Inggris dan Amerika maka Belanda masih merasa kuat, akhirnya disepakati bersama untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian diadakan di Jakarta. Dari Jepang yang datang ke Indonesia semula Kobajasi tetapi kemudian diganti oleh Yoshisawa. Isi perjanjian antara lain:

- 1). Jepang dibenarkan untuk mengadakan imigrasi tanpa batas ke Hindia Belanda.
- 2). Jepang harus diberi konsesi memasang kabel-kabel tilgram dari kepulauan Yap ke Jakarta - Batavia, sedangkan yang melayani haruslah tenaga-tenaga Jepang.
- 3). Jepang harus mendapatkan hak-hak tak terbatas dalam bidang perikanan di Hindia Belanda Nederland.
- 4). Jepang harus mendapatkan hak-hak tak terbatas dalam bidang pelayaran pantai di Hindia Belanda Nederland.
- 5). Jepang harus mendapatkan hak-hak tak terbatas mengenai hubungan udara dan dibenarkan membangun lain-lain cabang, untuk selanjutnya diteruskan hubungannya dengan daerah Jepang. Dalam hal ini termasuk juga hak untuk membangun lapangan-lapangan terbang baru.
- 6). Jepang harus mendapatkan hak-hak tak terbatas mengenai pengolahan dan eksplorasi hasil pertambangan bumi Hindia Nederland termasuk pula produksi-produksi minyaknya.

- 7). Harus berjanji kepada Jepang untuk mensuplai dengan hasil-hasil ekspor Hindia Belanda terutama mengenai karet, timah, minyak, kina dan bahan-bahan mentah lainnya yang diperlukan untuk peperangan. Pembayaran akan dilakukan berupa barang-barang jadi *made in Japan*.
- 8). Jepang diberi hak untuk memiliki dan menguasai bersama kebudayaan-kebudayaan (*ondernemingen*), industri terutama pusat-pusat air tenaga listrik. 492).

Melihat adanya perjanjian yang berat sebelah, maka Belanda menyatakan menolak perjanjian tersebut. Dengan gagalnya perjanjian dengan Jepang ini, pemerintah merasa perlu untuk mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia. Kemudian pemerintah Belanda mengadakan aksi milisi bumiputra. Tetapi tanggapan masyarakat atau kaum nasionalis khususnya menyatakan menolak. GAPI dan MIAI yang tergabung dalam Kongres Indonesia, dalam keputusannya menolak adanya milisi bumiputra. Alasannya antara lain:

- 1). Waktu yang diberikan sangat tidak cukup dan sempit.
- 2). Rakyat Indonesia tidak merasa perlu untuk memanggul senjata. Sebab yang dianggap bahaya oleh pemerintah yaitu Jepang, bagi rakyat Indonesia justru bukan bahaya. 493).

Dengan alasan tersebut, maka Konggres Rakyat Indonesia menyatakan menolak adanya milisi bumiputra.

Disamping itu Parindra dalam konggresnya di Surabaya tanggal 29 sampai 30 Juni 1941 menyatakan keberatan. Keberatan-keberatannya antara lain ialah:

- 1). Keputusan melancarkan aksi milisi bumiputra sudah sangat terlambat. Dalam situasi yang sudah sangat genting pemerintah baru memutuskan untuk mengadakan milisi bumiputra.
- 2). Peraturan-peraturan untuk mengadakan milibisi bumiputra berbeda dengan peraturan wajib milisi di Nederland.
- 3). Pemuda-pemuda yang diterima dalam milisi bumiputra ada kemungkinan dikirim keluar, pada hal mereka itu diperlukan oleh Indonesia sendiri.
- 4). Pelaksanaan rencana milisi bumiputra itu tidak dibare-

ngi dengan pemberian hak-hak dalam ketatanegaraan kepada rakyat. 494).

Alasan-alasan perbuatan untuk menerima adanya aksi militer bumiputra, antara organisasi-organisasi nasional pada dasarnya sama saja, hanya di dalam diri Parindra lebih tegas. Jadi pada saat itu pemerintah sudah tidak mendapat dukungan serta simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia.

Dengan demikian pada saat itu kedudukan pemerintah Belanda di Indonesia lemah, baik dari segi mental maupun fisik dalam arti angkatan perang. Sehingga pada waktu Jepang secara tiba-tiba yaitu tanggal 7 Desember 1941 menyerang dan menghancurkan Pearl Harbor yakni pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik, yang dibangga-banggakan oleh Belanda. Belanda sangat kebingungan. Akhirnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang.

Untuk menghadapi Jepang di Jawa, pihak Amerika Serikat membentuk suatu komando yang disebut ABDA COM *American, British, Dutch, Australian Command*). Sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda ditunjuk Letnan Jenderal H. Ter Poorten, dengan kekuatan pasukan sejumlah 40.000 orang (4 divisi), di antaranya terdapat pasukan-pasukan Inggris, Amerika dan Australia.

Sedangkan pihak Jepang untuk Jawa di bawah komando Tentara Keenambelas yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitosyi Imamura, dengan kekuatan 100 sampai 120 ribu orang (6 – 8 divisi). 495).

Karena kekuatan Belanda jauh lebih kecil bila dibanding dengan kekuatan Jepang, maka akibatnya Belanda dengan mudah ditaklukkan. Secara berturut-turut daerah yang ditaklukkan ialah:

- 1). Tanggal 1 Maret 1942 Daerah yang ditaklukkan: Teluk Banten (Jawa Barat), Eretan Wetan (Jawa Barat) dan Kranggan (Jawa Tengah).
- 2). Tanggal 3 Maret 1942 Daerah yang ditaklukkan: Subang (Jawa Barat).
- 3). Tanggal 5 Maret 1942 Daerah yang ditaklukkan: Buitenzorg (Bogor).
- 4). Tanggal 8 Maret 1942 Daerah pertahanan terakhir yakni

Kalijati, tempat pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat. 496).

Dengan telah menyerahnya terakhir dari pihak Belanda atas daerah Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, maka berakhir sudah kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Rakyat Indonesia telah lepas dari cengkeraman penjajah kolonial, berganti menjadi jajahan fasis Jepang.

## E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG.

### 1. *Propaganda Jepang yang terasa di daerah.*

Cita-cita Jepang untuk menguasai daerah Asia Timur Raya, sudah sejak semula dicanangkan. Tetapi cara merebut masing-masing daerah berbeda-beda. Khusus untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda, Jepang mempunyai cara tersendiri. Jepang tahu bahwa saat itu bangsa Indonesia haus akan kemerdekaan. Untuk itu lama sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Radio Tokyo sudah menyiarkan lagu Indonesia Raya dan semboyan Asia untuk bangsa Asia. 497). Hal ini dilakukan oleh Jepang dengan maksud untuk menarik perhatian bangsa Indonesia.

Disamping itu di dalam bidang studi, Jepang menganjurkan kepada anak-anak bangsa Indonesia untuk belajar di Jepang. Sedangkan untuk memikat hati para penganut agama Islam, Jepang banyak mendirikan masjid antara lain pada tahun 1935 Jepang mendirikan masjid di Kobe, pada tahun 1938 Jepang mendirikan masjid di Tokyo dan sebagainya. Di kalangan Pers, Jepang mengadakan penerbitan pers di beberapa tempat di Nusantara dengan biaya Jepang. Kemudian mengundang beberapa wartawan terkemuka ke Jepang dengan biaya Jepang. 498). Hal ini semua dilakukan oleh Jepang, dengan maksud untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia, apabila nanti Jepang masuk ke Indonesia.

Karena Jepang tahu bahwa ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan lemah, maka Jepang berusaha menarik perhatian rakyat Indonesia dengan jalan memperbaiki segi ekonomi. Sehingga rakyat Indonesia betul betul dapat tertarik kepada Jepang. Rakyat kebanyakan hanya mendasarkan kepada kenyataan yang dihadapi saja, tanpa memikir atau mengetahui latar belakang apa yang ada atas kebaikan yang diberikan. Hal ini terbukti, pada waktu menjelang pecah Perang Pasifik,

keadaan ekonomi Indonesia lemah, saat itu tuan-tuan toko Jepang menjual barang dagangannya dengan harga yang sangat murah.

Sehingga rakyat kecil merasa bahwa apabila nanti Jepang betul-betul menguasai Indonesia tentu segala sesuatu akan dapat dibeli oleh rakyat kecil. 499). Memang Jepang tahu benar mencari saat yang tepat untuk mengadakan hubungan dan memukul musuh atau saingannya, sehingga pada saat itu penjajah Belanda sudah hulat mendapat antipati dari masyarakat Indonesia, lebih-lebih lagi kaum pergerakan nasional.

Untuk mengetahui dari dekat keadaan ekonomi rakyat kecil, Jepang berusaha mendekati rakyat secara langsung. Dalam hal ini Jepang mempunyai cara tersendiri yakni dengan jalan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang kecil. 500) Dengan jalan mendekati rakyat kecil ini Jepang langsung tahu bagaimana sebetulnya yang dikehendaki oleh rakyat, baik segi ekonomi maupun segi politik. Selain dari hal tersebut, Jepang juga dapat mengetahui sejauh mana rakyat kecil mendukung serta menyokong kaum nasionalis, baik dorongan moril maupun spiritual. Akhirnya Jepang tahu bahwa gerak kaum nasionalis Indonesia betul-betul mendapat dukungan dari rakyat. Untuk itu Jepang sangat berat mempengaruhinya. Satu-satunya jalan bagi Jepang hanya dengan jalan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, kaum nasionalis/pergerakan nasional Indonesia akan menjadi lunak. Tetapi melihat Jepang ini tidak berhasil. Hal ini terbukti dari pendapat Dr. Tjipto Mangunkusumo, bahwa dengan faham fasismenya, Jepang tidak mungkin akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 501).

Dengan demikian jelas bahwa propaganda Jepang terhadap Indonesia dapat dirasakan terutama hanya dikalangan rakyat kecil, sedangkan bagi kaum nasionalis sebagian besar tidak dapat menerimanya sebab kaum nasionalis Indonesia mendasarkan atas sifat dari faham yang dianut oleh Jepang.

## 2. *Waktu kedatangan pasukan Jepang.*

Kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia ada dua pihak tanggapan masyarakat Indonesia. Satu pihak merasa senang sebab mereka menganggap bahwa Jepang sebagai penyelamat atau

pembebas masyarakat Indonesia dari cengkeraman penjajah. Di pihak lain masih tetap menganggap bahwa bagaimanapun cara Jepang memikat hati rakyat Indonesia, tetapi Jepang tetap penjajah. Sehingga pada waktu kedatangan Jepang di Indonesia tepatnya pada saat dilaksanakan serah terima resmi kota Jakarta dan Belanda kepada tentara Dai Nippon, disambut oleh ribuan rakyat Indonesia dengan lambaian tangan dan kibaran merah putih serta teriakan Merdeka. Di beberapa tempat mulai dikibarkan merah putih dan dikumandangkan lagu Indonesia Raya. 502).

Sambutan rakyat Indonesia yang sangat baik itu diterima juga oleh Jepang dengan baik. Oleh karena itu pada waktu kedatangan Jepang tersebut sebagian rakyat merasa gembira menyangka bahwa Jepang betul-betul mau menolong rakyat Indonesia dari cengkeraman penjajah Belanda, dengan dasar serta tujuan yang baik. Bahkan pada saat itu setiap tentara Jepang bertemu dengan orang Indonesia selalu meneriakkan semboyan, "Indonesia Jepang sama-sama". Kemudian Jepang memperkenalkan kepada bangsa Indonesia sebagai saudara tua. 503). Dengan demikian pada saat itu kepercayaan sebagian rakyat Indonesia kepada Jepang betul-betul tertanam.

Tetapi situasi Indonesia seperti ini tidak berlangsung lama, sebab kemudian Jepang kembali kepada tujuannya semula, yakni antara lain Jepang ingin mengambil sebanyak-banyaknya bahan mentah yang ada di bumi Indonesia. Sebab Jepang merasa bahwa mungkin penjajahannya di bumi Indonesia tidak akan lama maka akhirnya tindakan Jepang terhadap masyarakat Indonesia lebih kejam apabila dibanding dengan penjajahan Belanda.

### 3. *Sikap Jepang terhadap aparat pemerintah Belanda.*

Setelah secara resmi Jepang berhasil menaklukkan Belanda, sehingga Belanda dapat bertekuk lutut kepada Jepang tanpa syarat, maka mulai saat itu secara resmi pula Indonesia berganti penjajah, yaitu di bawah penjajahan Jepang. Cara Jepang memerintah Indonesia berbeda dengan cara Belanda. Jepang berusaha terlebih dahulu menyenangkan hati rakyat Indonesia, sehingga nantinya bangsa Indonesia akan menurut kehendak Jepang, itulah rupanya yang diinginkan oleh Jepang.

Jepang tahu bahwa saat itu bangsa Indonesia masih me-

luap-luap rasa bencinya terhadap Belanda. Untuk itu Jepang ingin menarik perhatian bangsa Indonesia, sehingga Jepang berusaha untuk menyesuaikan keinginan bangsa Indonesia. Tindakan pertama-tama yang dilakukan Jepang antara lain ialah penurunan patung Jan Pieters Zoon Coen. Jan Pieterszoon Coen merupakan lambang kota Jakarta dan lambang kekuasaan kolonial, karena Jan Pieterszoon Coen adalah pendiri kota Batavia. 504).

Dengan penurunan patung tersebut, maksud Jepang berarti menghilangkan sifat kolonial. Rakyat yang saat itu benci terhadap kolonial, karena dianggap pemerintah kolonial-lah yang membuat sengsara rakyat Indonesia, dengan penurunan patung tersebut, mereka sudah sedikit berkurang rasa dendamnya.

Di samping itu di dalam hal pemerintahan, Jepang mengganti pejabat Belanda yang masih ada. Disebabkan Jepang masih ingin mengambil hati rakyat, juga sebenarnya orang-orang Jepang di Indonesia belum banyak, maka Jepang menggantikan pejabat Belanda sebagian kepada bangsa Indonesia terlebih dahulu, baru nanti secara perlahan-lahan Jepang menggantikan jabatan yang dimaksud dengan orang Jepang sendiri. Sebagai contoh Mr. W.A.H. Eucher yang menjabat sebagai burgemeester (walikota) terakhir, oleh Jepang diganti dengan Rajamin Nasution. Tetapi pada bulan September 1942 sudah diganti oleh Takarosi Ichiro. 505). Jadi penggantianannya terhadap penguasa Jepang secara perlahan-lahan, walaupun sebenarnya Jepang sudah haus akan kekuasaan, mengingat cita-citanya ingin menguasai Asia Timur Raya.

Berhubung dengan pemerintah, karena Jepang menginginkan Bahasa Jepang dapat difahami dan dirasakan oleh rakyat Indonesia, maka istilah pemerintahan juga diganti dengan istilah Jepang. Contohnya sebagai berikut :

Gubernur Jenderal	diganti menjadi <i>Saiko Sikikan</i>
Gubernur	diganti menjadi <i>Gunsaikan</i>
Residen/Wali Kota	diganti menjadi <i>Sico</i>
Bupati	diganti menjadi <i>Kenco</i>
Wedana	diganti menjadi <i>Gunco</i>
Camat	diganti menjadi <i>Sonco</i>
Lurah	diganti menjadi <i>Kuco</i>
Ketua Rukun Tetangga dan sebagainya. 506).	diganti menjadi <i>Tonari Gumico</i>

Dengan demikian pada saat itu segala sesuatu yang masih berbau Belanda diganti dengan Jepang, sehingga betul-betul Jepang ingin men-Jepang-kan Indonesia.

#### 4. Sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia.

Taktik politik Jepang memang bagus sekali, kalau dilihat dari tindakannya. Jepang takut bahwa sebelum Jepang masuk ke Indonesia, kekuatan kaum nasionalis cukup menakutkan Belanda, sehingga salah satu usaha Belanda untuk mengendalikan kekuatan kaum nasionalis ialah dengan jalan membentuk PID yaitu sejenis polisi rahasia. Polisi ini berhak menghentikan dan meneruskan jalannya rapat atau jelasnya usaha propaganda dari kaum nasionalis. Untuk mencegah berkembangnya kekuatan ini pada masa berkuasanya pemerintah Jepang, maka Jepang membuarkan semua organisasi nasionalis yang berlangsung pada masa pemerintahan Belanda. <sup>507)</sup>

Tetapi Jepang merasa khawatir kalau kaum pergerakan nasional tidak diberi wadah, maka mereka akan bergerak di bawah tanah. Oleh karena itu Jepang mengarahkan aktivitas kaum pergerakan ke dalam 2 (dua) wadah yakni:

- a. MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), yang diketuai oleh H. Wahid Hasjim.
- b. PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat).  
Ketua : Bung Karno  
Wakil Ketua : Bung Hatta  
Direktur/Sekretaris Jenderal : Mr. Sartono  
Kepala Bagian Pendidikan : Ki Hajar Dewantoro. <sup>508)</sup>

Perlu diketahui bahwa kaum nasionalis yang menduduki jabatan pengurus di dalam organisasi tersebut, bukan semata-mata hanya bekerja dengan Jepang dalam arti setuju dengan penjajahan Jepang, tidak. Mereka menggunakan kesempatan dengan segala usaha secara legal, untuk memperluas lapangan perjuangan kaum nasionalis. Jadi mereka berusaha untuk dapat memelihara organisasi tersebut, paling sedikit dapat menjadi pengganti dari organisasi nasional yang telah dibekukan oleh Jepang. Sedangkan sebagian lagi mengembangkan dalam bidang politik dengan cara bekerja di bawah tanah maksudnya tidak terang-terangan bekerja sama dengan Jepang. <sup>509)</sup>

Untuk tujuan tersebut, maka MIAI di samping berusaha menggerakkan kaum nasionalis dewasa, juga berusaha menggerak-

kan kaum muda. Kemudian pada bulan Juni 1943 Dewan MIAI membentuk Majelis Pemuda dan Keputrian MIAI. Majelis Pemuda MIAI dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Penasehat : Dr. Abu Hanifah  
Ketua : Ir. Sofwan  
Wakil Ketua : Kahfi  
Penulis : H.M. Effendi  
Pembantu : S. Toha Al Habsji dan  
Achmad Tjokroaminoto. <sup>510)</sup>

Sudah menjadi cita-cita kaum nasionalis bahwa kemerdekaan adalah merupakan tujuan utama. Oleh karena itu M PUTERA yang sebagai Ketua dan Pembicara di depan rakyat, juga tetap berbau nasionalis. Bahkan oleh Jepang dinilai akhirnya sebagai usaha nasionalisme. Sedangkan Bung Karno sebagai Ketua setiap ada kesempatan maka dia muncul rapat di muka rakyat, yang semuanya dapat menggerakkan hati rakyat, yang tentunya jiwa nasionalis bangsa Indonesia akan menyala dan berkembang lagi. Hal ini bagi Jepang dianggap sangat berbahaya. Akhirnya PUTERA dibubarkan dan diganti dengan Kebaktian Rakyat Jawa atau dalam bahasa Nippon: *Djawa Hookookai*. Sedangkan yang duduk di dalam pengurus, tetap seperti pada PUTERA. <sup>511)</sup>

Mengenai nasib MIAI, karena sikap dan kegiatannya tidak jauh berbeda dengan PUTERA, maka nasibnya sama juga dengan PUTERA yakni dibubarkan dan diganti. Sebagai ganti MIAI ialah Masjumi Yaitu Majelis Sjura Muslimin Indonesia. Yang duduk di dalam pengurus tetap seperti MIAI, <sup>512)</sup> Kedua organisasi tersebut dasar dan tujuan pengantiannya sama. Dasarnya diganti ialah karena keduanya mau bekerja keduanya bersifat nasionalisme. Tujuannya agar kedua-duanya selanjutnya mau bekerja demi kepentingan Jepang. Akhirnya Jepang mengambil kebijaksanaan lain yakni dengan menyiarkan penasehatnya, orang-orang Jepang.

Untuk menanggulangi kegiatan kaum nasionalis, Jepang bersikap lunak lagi dengan jalan memberikan kedudukan yang tinggi untuk bangsa Indonesia. Pengangkatannya berturut-turut sebagai berikut:

- a. Bulan September 1943 : Pengangkatan *Sanyo* yang dipilih untuk 6 macam bu (Departemen):
  - 1). Untuk *Somuhu* (Departemen

- Urusan Umum) diangkat: Ir. Sukarno.
- 2). Untuk *Naimubu* (Departemen Urusan Dalam Negeri) diangkat Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rasjid.
  - 3). Untuk *Sjihubo* (Departemen Kehakiman) diangkat Prof. Dr. Mr. Supomo.
  - 4). Untuk *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas) diangkat Mochtar bin Prabu Mangkunegoro.
  - 5). Untuk *Sendenbu* (Departemen Propaganda), diangkat Mr. Moh. Yamin.
  - 6). Untuk *Sangyobu* (Departemen Ekonomi) diangkat Prawoto Sumodilogo.
- b. 1 Oktober 1943 : Sebagai Kepala Departemen Urusan Agama, diangkat Prof. Hussein Djajadiningrat.
- c. 10 Nopember 1943 : Diangkat 2 *Syucokan* masing-masing ialah:
- 1). Untuk Jakarta diangkat Mas Sutardjo Kartohadikusumo.
  - 2). Untuk Djojonegoro diangkat R.M.T.A. Surio.<sup>513)</sup>

Dengan adanya pengangkatan para tokoh nasionalis tersebut menjadi pejabat-pejabat tinggi, pada hakekatnya tidak dapat mengurangi sikap dan sifat kaum nasionalis Indonesia.

Di samping pengangkatan pejabat-pejabat tinggi pada beberapa Departemen tersebut, pegawai-pegawai rendah bangsa Indonesia juga tetap masih diberi kesempatan. Tetapi tekanan Jepang terhadap bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, rupanya justru lebih berat apabila dibanding dengan masa penjajahan Belanda. Hal ini terbukti dari adanya pengurangan gaji pegawai, bagi mereka yang gajinya lebih dari f 100 (seratus). Gaji tertinggi tidak boleh lebih dari f. 500 (lima ratus). Dari gaji yang kurang dari 100,— dibayarkan tetap. Sehingga perbedaan gaji di atas f 100 akibat adanya pengurangan-pengurangan sebagai berikut:

No.	Banyaknya gaji dahulu sebulan	Potongan %	Banyaknya gaji sekarang sebulan
1.	f 100 – 150	5 %	f 100
2.	f 151 – 200	7,5 %	f 141
3.	f 201 – 250	10 %	f 184
4.	f 251 – 300	12 %	f 224
5.	f 301 – 400	15 %	f 239
6.	f 401 – 500	18 %	f 263
7.	f lebih dari 500	20 %	f 409

514)

Di samping pengurangan gaji seperti tersebut di atas, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Jepang, maka Jepang membentuk *Romusha*, yakni semacam tenaga kerja rodi zaman Belanda, walaupun Jepang, mengatakan sebagai Prajurit Pekerja. Tetapi sebenarnya *Romusha* adalah kuli, baik dipekerjakan di pabrik, perusahaan, pembuatan jalan maupun untuk kuli para tentara Jepang. Mereka yang dikerahkan tenaganya untuk bekerja di Jawa saja masih sanggup walau berat seperti apapun. Tetapi bagi yang dikerahkan keluar Jawa pada umumnya tidak ada yang kembali. Oleh karena itu pada saat itu ada seorang penulis yakni E. St. Harahap yang sempat bersyair sebagai berikut:

Ke manakah *Romusha* itu?  
 Pemuda-Pemudi digiring;  
 Sebagai ikan yang masuk jaring,  
 Ada yang jadi *Heiho*, ada yang buruh,  
 Ada yang jadi juru rawat, untuk meluruh  
 Semua tidak ada beda di antaranya,  
 Terkena dibujuk dengan kata tak ada tara,  
 Kebanyakan meluruh ke alam baka,  
 Jangan lagi ditanya. Ke mana mereka. <sup>515</sup>)

Dengan melihat isi dari syair tersebut, jelas menunjukkan bahwa bagi mereka yang diambil sebagai *Romusha*, mereka seakan-akan pergi untuk mati.

Di dalam usaha menambah kekayaan, Jepang juga memungut hasil pertanian. Para petani dianjurkan meningkatkan hasil produksi. Setelah musim panen, padi petani dikumpulkan dan dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah. Kalau

petani tidak mau menyerahkan padinya, maka dia akan terkena hukuman yang sangat berat, akibatnya petani hanya menurut saja. Bahkan di samping hasil padi juga masih ada lagi tanaman paksa antara lain jarak. Sedangkan sebagai sumbangan penduduk dengan alasan untuk dana perang, diminta untuk mengumpulkan harta kekayaan yang berupa emas, intan dan sebagainya. <sup>516</sup>) Dengan demikian segala milik rakyat, seakan-akan habis diambil oleh Jepang. Rakyat Indonesia saat itu betul-betul tercekam oleh kemelaratan, justru lebih berat dari masa penjajahan Belanda, sehingga masyarakat tani pada umumnya sehari hanya dapat makan satu kali. Mereka makan tidak dapat sampai kenyang, bahkan ubi atau singkong yang mereka makan. Pakaian mereka juga tidak punya hanya bagor yang mereka pergunakan. Karena bagor tersebut sangat kotor, mereka kalau di rumah praktis hanya telanjang. <sup>517</sup>)

Pemerasan dalam bidang ekonomi dari Jepang, tidak hanya terbatas pada para petani saja, tetapi para nelayan pun ikut. Jepang mendirikan *Gyogyo Kumiai* dengan tujuan untuk membeli ikan dengan harga murah. Jaminan bagi para nelayan tidak ada. perahu nelayan yang rusak, apabila akan memperbaiki tidak juga diberi bahan oleh Jepang. Dengan demikian tindakan Jepang tersebut betul-betul menyulitkan para nelayan. Mereka tidak berani mengeluarkan pendapat sebab memang dilarang oleh Jepang. <sup>518</sup>) Dengan demikian tekanan ekonomi dari Jepang terhadap bangsa Indonesia secara menyeluruh.

Kalau tekanan Jepang terhadap rakyat Indonesia di dalam bidang ekonomi dikatakan untuk menyokong tentara yang sedang perang maka akhirnya setelah Jepang di dalam peperangan-peperangan untuk mempertahankan daerahnya mengalami kekalahan. Jepang merasa perlu untuk mengerahkan tenaga rakyat dalam medan perang. Untuk itu Jepang membentuk barisan *Heiho* artinya pembentu serdadu. *Heiho* tenaganya diambil dari para pemuda yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi serdadu. Mereka inilah barisan pemuda yang pertama-tama mendapat didikan kemiliteran Jepang secara langsung. Mereka akhirnya betul-betul maju ke medan perang untuk melawan Sekutu di berbagai kepulauan Indonesia. <sup>519</sup>)

Tetapi rupanya walaupun tenaga rakyat sudah banyak sekali dikerahkan namun demikian kekuatan untuk mempertahankan kedudukan Jepang masih belum memadai. Akhirnya usul dari R. Gatot Mangkupraja kepada *Gunseikan* melalui suratnya tanggal

7 September 1943 yang isinya antara lain, bahwa ia meminta kepada Jepang agar supaya bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang, tidak hanya di belakang garis perang, tetapi juga di medan perang dikabulkan. Kemudian dibentuklah PETA yaitu: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Selanjutnya pada tanggal: 3 Oktober 1943 Panglima Tentara Keenambelas yang kedua yaitu Letnan Jenderal Kumakici Harada mengeluarkan maklumat *Osamu Seirei* Nomor 44, yang isinya antara lain tentang peraturan pembentukan PETA. 520).

Karena peperangan semakin mendesak, maka selain PETA, Dai Nippon membentuk *Seinendan* yaitu tentara cadangan yang nantinya apabila perang terjadi secara total, maka *Seinendan* dapat mempertahankan, paling tidak daerah lokal. Jadi *Seinendan* ini keanggotaannya mencakup seluruh rakyat pribumi yang mampu untuk dilatih kemiliteran. Bahkan anak-anak sekolah dipimpin oleh gurunya wajib menjalankan *kenrohosi* atau kerja sukarela dalam berbagai lapangan untuk kepentingan bala tentara pendudukan. 521). Dengan demikian jelas bahwa pengerahan tenaga rakyat Indonesia sudah menyeluruh, dari pemuda sampai anak-anak, dari laki-laki sampai perempuan.

Pada tahun 1944 pabrik-pabrik senjata Amerika mulai dapat menghasilkan senjata-senjata modern, akibatnya Jepang semakin terdesak. Karena Jepang merasa terjepit maka pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa *Teikoku Gikai* (Parlemen Jepang) ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Koisō mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Untuk itu pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan *Saiko Syikikan* Kumakici Harada, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan suatu Badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan Kemerdekaan yang disingkat menjadi Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Junbi Cokasai*) yang beranggota 60 orang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyaningrat 522). Untuk itu sidang membentuk 3 (tiga) Panitia yakni:

- a. Panitia Perancang Undang-undang Dasar, Ketua Sukarno.

- b. Panitia Pembela Tanah Air, Ketua Abikusno Tjokrosujono.
- c. Panitia Keuangan dan Perekonomian, Ketua Hatta. 523).

Dengan hasil tersebut, maka Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia tugasnya telah selesai dan dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, melalui corong radio *Gun-seikan* memerintahkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan dan supaya dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 1945. Sekaligus mengundang Sukarno dan Hatta untuk menghadap Jenderal Terauchi. Undangan ini dipenuhi oleh Sukarno, Hatta dan Radjiman Wedyaningrat, berangkat pada tanggal 9 Agustus 1945 dan kembali tanggal 12 Agustus 1945. Sebagai hasil pembicaraan di Saigon, mereka membawa tiga cap yakni:

- a. Sukarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Hatta sebagai Wakil Ketua;
- b. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia boleh mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945;
- c. Lekas atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan seluruhnya kepada Panitia. 524).

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, pemerintah Dai Nippon mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai berikut:

I. Tuan-tuan Sukarno, Hatta dan Radjiman yang telah diundang oleh *Nappo Gun Sikkon* untuk mengadakan pembicaraan tentang pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, tiba kembali di Jakarta sesudah menyelesaikan pembicaraan tentang hal-hal pokok asas kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan itu.

II. Nama-nama anggota Panitia itu sebagai berikut:

- 1. Ketua : Sukarno
- 2. Ketua Muda : Drs. Moh. Hatta
- 3. Anggota-anggota : Radjiman, Otto Iskandar Dinata, Hadikusumo, Wachid Harsjim, Surjohamidjojo, Purubo-,

- jo, Sutardjo, Suroso, Supomo, Abdul Kadir, Yap Tjwan Bing.
4. Anggota-anggota : Moh. Amir, Teuku Moh. Hasan, Abdul Abbas.  
dari Sumatra
  5. Anggota-anggota : Ratulangi, Andi Pangeran, A.A. Hamidhan, I. Gusti Ketut Putje, Latuharhary.  
dari daerah angkat-  
an Laut
- III. Nama-nama tenaga *Zimukyoku* Panitia Persiapan Kemerdekaan itu ialah seperti berikut: *Zimukyokucoo*; Drs. Moh. Hatta, *Zimukyokucoo Sanyo*: Mr. Subardjo.
- IV. Pada tanggal 18 bulan ini (Agustus 1945) semua anggota harus sudah berkumpul. Sedangkan hari persidangan pertama ialah pada keesokan harinya yaitu tanggal 19 Agustus 1945, 525).

Dengan telah tersusunnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut, maka mungkin janji Jepang\* sebenarnya akan dipenuhi. Tetapi dengan telah dijatuhkannya bom Atom maka Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Akibatnya rencana Dai Nippon untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia gagal. Jadi jelasnya Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang.

#### 5. *Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang.*

Sebenarnya pada waktu Jepang datang di Indonesia, bangsa Indonesia sebagian besar menaruh simpati. Hal ini disebabkan cara menarik hati rakyat pada masa sebelumnya. Sedangkan pada datang sampai dengan beberapa saat Jepang masih menunjukkan sikap baik, lebih-lebih dengan menggunakan istilah saudara tua, setiap Jepang berkenalan dengan bangsa Indonesia. Tetapi setelah bala tentara Jepang semakin hari semakin banyak di Indonesia, maka Jepang mulai mengetrapkan aksinya. Organisasi Nasional dibekukan walaupun tokoh diganti. Bendera Merah Putih dilarang dikibarkan bahkan lagu Indonesia Raya yang semula selau didengung-dengungkan oleh Radio Tokyo, di Indonesia mulai tidak boleh dinyanyikan. 526).

Saat itu bangsa Indonesia sudah mulai tidak senang terhadap tindakan Jepang. Bagaimanapun juga keadaan di Indonesia, karena Jepang perhatiannya sangat terpancang kepada peperangan di luar Indonesia, maka sikap rakyat Indonesia ti-

dak banyak mendapat perhatiannya. Kemudian dengan mendesaknya kebutuhan tenaga untuk menyokong peperangan, maka Jepang mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia untuk dididik sebagai militer. Jepang mengatakan bahwa kesemuanya itu adalah untuk perang suci guna mempertahankan tanah air. Sehingga bangsa Indonesia sebagian bertekad mati bersama-sama Jepang, demi menghancurkan Sekutu. Tetapi kenyataannya kemauan bangsa Indonesia semacam itu hanya bertepuk sebelah tangan. Hal ini terbukti dari peristiwa pada bulan Pebruari 1944 yaitu ketika kapal Jepang kena Torpedo musuh dan tenggelam, Jepang sampai hati membunuh *Heiho* yang tidak sanggup berkelahi di dalam laut. Hal ini dilakukan oleh Jepang dengan sasaran hanya untuk mengambil bantal pelampung mereka. 527).

Sikap Jepang memang sudah keterlaluan, tetapi walau bagaimanapun juga usaha Jepang, nyatanya di dalam peperangan masih tetap terdesak. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1944 Jepang menyusun Benteng Perjuangan Jawa. Maksudnya, apa saja yang ada di bumi Indonesia dapat dipergunakan sebagai alat perang menyambut Sekutu. 528). Oleh karena itu Jepang dengan seenaknya saja mengerahkan dan mempergunakan manusia dan seisi alam Indonesia ini. Lebih-lebih tindakan Jepang terhadap rakyat kecil, terlalu kejam, seperti telah dikemukakan di atas misalnya tindakan Jepang terhadap *Romusha*. Maka pada waktu tentara PETA berlatih di desa-desa, mereka tahu dengan mata kepala sendiri bagaimana penderitaan rakyat kecil di daerah, akibatnya mereka bertekad bulat untuk membela rakyat.

Dengan sesepuh Dr. Ismail dan pencetus idee Suprijadi dan dibantu oleh yang lain-lain, maka Suprijadi mengetengahkan motif-motif pemberontakan sebagai berikut:

- a. Mencapai Kemerdekaan sepenuhnya.
- b. Menghentikan penindasan terhadap rakyat yang sudah jatuh ke jurang kesengsaraan yang sedalam-dalamnya.

Dengan motif tersebut, serta kekompakan dan kesiap-siagaan para tentara PETA Blitar, maka pada tanggal 14 Pebruari 1945, pecahlah pemberontakan PETA Blitar. 529) Tetapi sayangnya pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Jepang, sehingga tujuan PETA belum dapat tercapai pada saat itu. Walaupun

pemberontakan PETA Jawa Timur ini gagal, namun demikian semangat rakyat Jawa Timur serta daerah-daerah lain se Indonesia tidak patah sampai di situ saja. Hal ini terbukti dengan adanya pemberontakan-pemberontakan yang sejenis yang muncul di tempat-tempat lain.

Jepang merasa bahwa saat itu rakyat Indonesia sudah mulai bergerak untuk berontak dan serangan tentara Sekutu semakin mendesak, maka Jepang merasa dirinya sudah dalam keadaan terjepit.

Oleh karena itu Jepang ingin memenuhi janjinya untuk memenuhi kemerdekaan dengan mulai menyusun Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada saat itu kaum intelektual Indonesia sudah tipis kepercayaannya terhadap Jepang. Maka untuk membalas siasat Jepang tersebut, kaum intelektual menyusun Panitia Kecil yang berjumlah 9 (sembilan) orang yakni: Sukarno, Hatta, Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim dan Moh. Yamin. Hasil Panitia Kecil tersebut ialah suatu naskah yang bersifat ilegal, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*, yang isinya sebagai berikut:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka bersatu berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 530).

Dengan melihat isi *Jakarta Charter* tersebut jelas menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak didambakan datangnya dari pemberian Jepang, tetapi didasarkan atas kemauan kemampuan serta kebulatan tekad bangsa Indonesia sendiri.

## PENUTUP

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas nampak dengan jelas, bahwa dalam zaman Kebangkitan Nasional sejarah daerah Jawa Timur pada umumnya dan sejarah daerah Surabaya pada khususnya telah banyak memberikan andil dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda. Yang tampak menonjol dalam medan sejarah daerah Jawa Timur tersebut antara lain ialah adanya usaha kaum pergerakan nasional untuk menyebar-luaskan ide persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan dengan sarana kegiatan olah raga telah muncul pula ide persatuan bangsa Asia. Hal itu tercermin dalam kegiatan organisasi sepak bola di Surabaya yang bernama Persatuan Bangsa Asia.

Dalam tulisan ini, penyusun menyadari masih banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang masih perlu dimasukkan, sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan oleh Ketua Proyek Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen P dan K. Tetapi karena keterbatasan waktu dan biaya yang tersedia, maka pekerjaan ini baru terbatas pada penampilan sebagian data sejarah, dalam bentuk catatan data sejarah, dengan maksud pada suatu ketika dapat diadakan penelitian lebih lanjut. Dengan kata lain taraf yang dicapai sekarang ini adalah usaha mencatat data yang menjadi modal penulisan sejarah daerah Jawa Timur dalam zaman Kebangkitan Nasional, dalam rangka penulisan sejarah Nasional yang lebih lengkap.

## CATATAN KAKI HALAMAN

1. Amir Hamzah NST, *Sedjarah Kebangsaan*, Pustaka Antara, th. 1952.
2. Drs. I. Nyoman Dekker, *Sedjarah Indonesia, Baru*, Lembaga Penerbitan IKIP Malang th. 1969,
3. D.G.E. Hall, A. *History of South East Asia*, London Macmillan & Co LTD. New York = St. Martin's Press-th. 1960,
4. Drs. I. Nyoman Dekker, *op cit*.
5. *Ibid.*, hal
6. Bernard H.M. Vlekke, *Geschiedenis van den Indische Archipel*, J. J. Romen & Zonen – Uitgevers Roermon-Maaseik, th. 1947,
7. Drs. I. Nyoman Dekker, *op cit* hal.
8. H.J. Idema, *Parlementaire Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, Martinus Nijhoff, th. 1924.
9. E'B. Kielstra, *De Vestiging van het Nederlandsch Gezag in den Indischen Archipel*, F. Bohn Haarden, th. 1920.
10. Drs. I. Nyoman Dekker, *op cit*.
11. *Ibid* hal.
12. *Ibid* hal. 59.
13. Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme sebagai modal perjuangannya bangsa Indonesia*, II P.N. Balai Pustaka, Jakarta th. 1969.
14. KPPK Balai Pendidikan Guru, *Sedjarah Nasional IIIB*, Bandung, th. 1958.
15. *Ibid.*
16. R. Suganda Purbakawatja, M.A. Gazali dan D.H. de Queljoe, *Sekolah dan Masyarakat*, Ganaco N.V. Bandung, Djakarta Amsterdam, th. 1956.
17. Prof. Dr. Slametmuljana, *op cit*.
18. *Ibid.*
19. *Ibid.*

20. Ruslan Abdulgani, "Seratus tahun H.B.S. Surabaya di jalan Wijayakusuma," *Surabaya Post* 19 Oktober 1975.
21. Drs. C.S.T. Kansil S.H. dan Drs. Julianto S.A., *Sedjarah Perdjuaan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* Erlangga Djakarta, th. 1972.
22. KPP Balai Pendidikan Guru, *op.cit.*
23. Prof. Dr. Slametmuljana, *op. cit.*
24. *Ibid.*
25. Drs. I Nyoman Dekker, *op cit.*
26. *Ibid.*
27. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Jawa Timur*, th. 1976.
28. Drs. I. Nyoman Dekker, *op cit.*
29. *Ibid.*
30. *Ibid.*
31. J.A.C. Machie, *Sejarah Pembangunan Ekonomi dalam dunia modern* P.T. Pembangunan – Djakarta, th. 1961.
32. Drs. I. Nyoman Dekker, *op cit.*
33. *Ibid.*
34. B.H.M. Vlekke, *op cit.*
35. Drs. I. Djoman Dekker, *op. cit.*
36. Multatuli, *Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda*, Djambatan th. 1973.
37. Drs. I. Nyoman Dekker, *op cit.*
38. Panitia Pameran Pekan Raya Jakarta, Coklat, Surabaya th. 1975.
39. *Ibid.*
40. *Ibid.*
41. H. Van Kon, *Uit onze kolonien*, Leiden, th. 1903.
42. Team Penulisan dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur, *op. cit.*
43. Drs. I. Nyoman Dekker, *op cit.*

44. Th. Muller Kruger, *Sejarah Gereja Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1966.
45. *Ibid.*
46. *Ibid.*
47. *Ibid.*
48. Yusmar Basri, *Sejarah Nasional Indonesia V*, "Jaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Akhir Hindia Belanda", Ed. Sartono Kartodirdjo cs., edisi ke 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta, 1977.
49. *Ibid.*
50. Sartono Kartodirdjo, "Kolonialisme Dan Nasionalisme di Indonesia Abad XIX – XX", Lembaran Sedjarah, no. 1, Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra Dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, 1967.
51. D.M.G. Koch, *Menudju Kemerdekaan*, terdj. Abdoel Moeis, Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951.
52. Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara A. History of Indonesia*, W. Van Hoeve, The Hague, 1965.
53. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*
54. Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, djilid I, P'N. Balai Poestaka, Djakarta 1968.
55. Laporan Team Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jatim, *Sedjarah Daerah*, Balai Penelitian IKIP, Surabaya, 1976, Team Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur, *Monografi Daerah Jawa Timur, Buku I, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
56. Drs. I. Nyoman Dekker SH, *Sejarah Indonesia Dalam Abad XIX, 1800 – 1900*, Lembaga Penerbitan "Almamater", YPTP IKIP, Malang, 1975.
57. *Ibid.* Team Penulisan Naskah . . . . ., *op.cit.*

58. Yusmar Basri, *op. cit.*
59. Laporan Team Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah  
Jatim, *op. cit.*
60. *Ibid.*
61. *Ibid.*
62. Yusmar Basri, *op. cit.*
63. Drs. T.B.A.F. Major Polak, "Tentang Cultuurstelsel Dan  
Penggantinya", majalah: Penelitian *Sedjarah*, no.4 Th.  
ke-II Jajasan "Lembaga Ilmiah Indonesia Untuk Penye-  
lidikan Sedjarah, Djakarta, 1961.
64. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*
65. *Ibid.*
66. Yusmar Basri, *op.cit.*
67. D.M.G. Koech, *op.cit.*
68. W.F.Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, Brussel-'s  
Gravenhage, 1959.
69. Yusmar Basri, *op. cit.*
70. —
71. *Ibid.*
72. I. Djumhur & Drs. H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, cet.  
ke-5, Penerbit CV Ilmu, Bandung, 1974.
73. *Ibid.*
74. Dr. H. Roeslan Abdulgani, "100 Tahun HBS-Surabaya di  
Jalan Wijayakusuma (I)", *Harian: Surabaya Post*, Sura-  
baya, 16 Agustus 1975.
75. I. Djumhur & Drs. H. Danasuparta, *op. cit.*
76. *Ibid.*
77. Solo Soemardjan, "Peranan Cendekiawan Dalam Pempa-  
ngunan Nasional", majalah: *PRISMA*, LP3ES, Jakarta,  
no.11, Nopember 1976.
78. Sugianto, *Sedjarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Umum  
Tingkat Atas di Indonesia*, Widjaja, Djakarta, 1971.
79. Bernhard Dahm, *History of Indonesia in The Twentieth Cen-*

ture, Pall Mall Press, London, 1970.

80. Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java, Institute of South east Asian Studies Oxford University Press, PT Indira, London-New York-Melbourne, 1973.*
81. Sartono Kartodirdjo, "Mitos Ratu Adil dan Aspirasi Petani" majalah: PRISMA, LP3ES, No.1 Th. VI, Jakarta, Januari 1977.
82. Selo Soemardjan, op.cit.
83. Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaruan Pendidikan dan Pengajaran Islam U.P. Ken Mutia, cet. ke-3, 1968.*
84. Sartono Kartodirdjo, op. cit. (1977). S. Wismoady Wahono, "Mesianisme Dalam Perjuangan Petani Tinjauan Dari Sisi Ke Kristenan", majalah: PRISMA, LP3ES, Jakarta, no.1 Januari 1977.
85. Sartono Kartodirdjo, op.cit. (1973).
86. Ibid.
87. Sartono Kartodirdjo, op.cit. (1977)
88. Yusmar Basri, op. cit.
89. Prof. Ahmad Subardjo Djojoadisuryo, *Pranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Idayu Press, Jakarta, 1977.  
Drs. A. Roeslan Abdulgani, op.cit. (III)
90. Mr. Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT' Pembangunan, Djakarta, 1962, hl. 7; Bernard Dahm, op.cit.,
91. Sutrisno Kutojo – Drs. Mardanas Safwan, *R.A.Kartini*, Angkasa Bandung,
92. Abdurrachman Surjomihardjo, *Budi Utomo Cabang Betawi*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
93. Ibid.
94. Ibid.
95. Ibid.
96. Ibid,
97. Yusmar Basri, op. cit.,

98. Imam Supardi, *Swargi Dr. Sutomo*, Penjebar Semangat, Surabaya, cet. ke-3, 1959.
99. Sutrisno Kutojo – Drs. Mardanas Sofwan, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Dr. Sutomo*, Angkasa, Bandung.
100. Abdurrachman Surjomihardjo, op. cit.
101. Bernard Dahm, op.cit.
102. Mr. Susanto Tirtoptodjo, op. cit.,
103. Prof. Kuntjoro Purbopranoto SH, "Pengaruh Sumpah Pemuda 1928 Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", majalah: *Gema Angkatan 45*, Dewan Harian Nasional Angkatan 45, Jakarta, No.14, Februari 1977.
104. Abdurrachman Surjomihardjo, op.cit.
105. Bernard Dahm, op.cit.
106. Abdurrachman Surjomihardjo, op.cit.
107. Ibid.,
108. Yusmar Basri, op.cit.
109. Abdurrachman Surjimohardjo, op.cit.
110. Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto, *Hidup dan Perjuangannya*, djilid I. Bulan Bintang, Djakarta, 1952.  
Bernard Dahm, op.cit.
111. D.M.G.Koch, op.cit.
112. Bernard Dahm, op.cit.,  
Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit.
113. A.K. Pringgodigdo SH, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, tjet.ke-7, Dian Rakyat, Djakarta, 1970.
114. Lothrop Stoddard, M.A.Ph.D., *Dunia Baru Islam*, terj.Letdjen H.M. Muljadi Djojomartono cs., Panitia Penerbit Menko Kesedjahteraan RI, Djakarta, 1966.
115. Bernard Dahm, op.cit.
116. Drs. Hidajat, Z.M., *Masyarakat Dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Penerbit "Tarsito", Bandung, 1977.
117. Bernhard Dahm, op. cit.,
118. Amelz, op. cit.,

119. Prof. Dr. Slametmuljana, op. cit.  
Bernhard Dahm, op.cit.
- 120 Amelz, op. cit.
120. A. J.Th. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*, Haarlem – H.D., Tjeenk Willink & Zoon – N.V. 1931 Amelz, op.cit.
121. L. Stoddard, MA.Ph.D., op.cit.
122. J.Th. Petrus Blumberger, op.cit.  
A.K. Pringgogigdo SH, op.cit.  
Dr. Mohammad Hatta, *Permulaan Pergerakan Nasional*, Idayu Press, Jakarta, 1977.
123. Amelz, op.cit.
124. Sartono Kartodirdjo, op.cit., (1973).
125. Deliar Noor, *The Modern Muslim Movement in Indonesia*, Oxford University Press, Singapore, London and New York, 1973 hl. Redaksi Prima, "Gerakan Mesianis dan Aspirasi Petani: Sebuah Pengantar", majalah: PRISMA, LP3ES, Jakarta no.1, Th.VI, Januari 1977.
126. Amelz, op. cit.
127. Ibid.
128. Ibid.
129. Bernhard Dahm, op.cit.
130. Mr. Susanto Tirtoprodjo, op.cit.  
A.K. Pringgogigdo, op.cit.
131. D.M.G.Koch, op.cit.,
132. Margono Djojohadikusumo, *Dr. E.F.E. Douwes Dekker (Dr. Danoedirdjo Setia Budi)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
133. Abdurrachman Surjomihardjo, op.cit.  
Bernhard Dahm, op.cit., Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit.,
134. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit.
135. Bernhard H.M. Vlekke, op.cit.
136. M. Balfas, *Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo Demokrat Sedjati*, tjet. ke-2 Djakarta 1957,  
Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit.

137. Bernhard Dahm, op.cit.
138. Ibid.
139. M. Balfas, op.cit.                      D.M.G. Koch, op. cit.
140. Ibid; ibid.
141. D.M. G. Koch. ibid.
142. —
143. Yusmar Basri, op.cit.
144. Prof. Dr. Slametmuljana, op. cit.
145. Prof. A.G. Pringgodigdo SH., *Capita Selecta Sedjarah Nasional Pantjasila*, Djurusan Sedjarah FKIS – IKIP, Surabaya, 1972.
146. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit.
147. Yusmar Basri, op. cit.                      Margono Djojohadikusumo,  
op. cit.
148. D.M.G. Koch, op. cit.
149. Ibid.
150. Dr. Mohammad Hatta, op.cit.
151. Margono Djojohadikusumo, op.cit.
152. M. Balfas, op.cit.
153. L.Stoddard, MA. Ph.D. op.cit.
154. Ibid.
155. H.A.R. Gibb, *Mohammedanism*, Oxford University Press,  
London New York – Toronto, 1954.
156. L.Stoddard, op.cit.
157. C.C.Adam, *Islam and Modernis in Egypt*, terdj. Ismail Djamil,  
Dian Rakyat,
158. Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaruan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, U.P.Ken Mutia, tjet. ke-3 1968.
159. L.Stoddard, op.cit.
160. Sjamsi Sumardjo, *Pengetahuan Ke-Muhammadiyah*, Stc.  
Indah, tjet. ke-5.
161. L.Stoddard, op.cit.

161. A. Mustafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, P'P. Muhammadiyah, Djogjakarta, 1971.
162. L.Stoddard, op.cit.
163. Musthafa Kamal Pasha, op.cit.
164. Sjamsi Sumardjo, op.cit.
165. Ibid., L. Stoddard, op. cit.
166. L.Stoddard, op.cit.
167. Sagimun M.D., *Ki Hajar Dewantara*, Bhatara, Jakarta, 1974.
166. Muhammad Tauchid, *Perjuangan dan Adjaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*, Madjleis Taman Siswa, Jogjakarta, 1963  
Yusmar Basri, op.cit.
169. Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara, Perintis Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1959.
170. Muhammad Tauchid., op. cit.
171. I. Djumhur – Drs. H. Danaduparta, op.cit.
172. Majelis Luhur Taman Siswa, *Pendidikan dan Pembangunan*, 50 Th. Taman Siswa, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta, 1976.
173. Muhammad Tauchid, op.cit.
174. Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, Djilid II, 1969.
175. Yusmar Basri, op.cit.
176. Wawancara dengan Sdr. I. Putu Putra, Ketua Yayasan Taman Siswa Cabang Surabaya, Gentengkali, 1977.
177. Yusmar Basri, op.cit.
178. Abdurrachman Surjamihardjom op.cit.
179. Bernhard Dahm, op.cit.
180. Biro Pemuda Departemen P.D.&K., *Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1965.  
Yusmar Basri, op.cit.
181. Pedoman Besar Jong-Java, *Gedenkboek Jong-Java*, 1915-1930 Jakarta, 1930.

182. Ibid. op.cit.
183. Biro Pemuda Dep. P.D.&K., op.cit.
184. Yusmar Basri, op.cit.
185. Cindy Adams, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia*, terj. Major Abdul Mar Salim, Gunung Agung, Jakarta, 1966.
186. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, 1974.
187. Cindy Adams, op.cit.
188. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, op.cit.,
189. Prof.A.G. Pringgodigdo SH., op.cit.
190. Dr.H.Roeslan Abdulgani, *Almarhum Dr. Soetomo Yang Saya Kenal*, Idayu, Jakata, 1974.
191. A.K.Pringgodigdo, SH' op.cit.
192. Dr. H.Roeslan Abdulgani, loc.cit.
193. L.M. Sitorus, *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, tjet.ke-2, Pustaka Rakyat N.V., Djakarta, 1951.
194. Yusmar Basri, op.cit. L.M. Sitorus, ibid,  
J. Th. Petrus Blumberger, op. cit.
195. A.K. Pringgodigdo SH., op.cit.  
J.Th. Petrus Blumberger ibid.,
196. Yusmar Basri, op.cit. Cindy Adams, op. cit.
197. A.K. Pringgodigdo SH., loc.cit.
198. Ibid.
199. Yusmar Basri, op.cit.  
J.Th. Blumberger, op.cit.
200. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indonesia*, djilid pertama, Djakarta, 1966.
201. Yusmar Basri, op.cit.
202. Amelz, op.cit.
203. Yusmar Basri, op.cit.
204. Amelz. op.cit.
205. Yusmar Basri, op.cit.

206. Amelz, op.cit.
207. Yusmar Basri, op.cit.  
L.M. Sitorus, op.cit.
208. Ir. S.J. Rutgers, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*,  
C.V. Hajam Wuruk, Surabaya 1951.
208. a. D.M.G., Koch, op.cit.
209. Panitya Penggali Sedjarah Kabupaten Sidoardjo, *Sedjarah  
Kabupaten Sidoardjo*, 1970.
210. A.K. Pringgodigdo SH, op.cit.  
Amelz, op.cit.
211. Amelz, ibid.  
J.Th. Petrus Blumberger, op.cit.
212. Amelz, ibid.  
Prof.Dr. Slametmuljana, op.cit.
213. J.The. Petrus Blumberger, op. cit.
214. Ibid. Ir. S.J. Rutgers, op. cit.  
Dr. H. Roeslan Abdulgani, op. cit. (1974).
215. A.K. Pringgodigdo SH., op.cit.
216. I. Djumhur – Drs. Danasuparta, op.cit.
217. L. Stoddard, op.cit.
218. Ibid.
219. Panitia Peringatan Hadji A. Salim, *Djedjak Langkah Hadji  
A. Salim*, Tintamas, Djakarta, 1954.  
Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit. (I)  
A.K.Pringgodigdo SH,
220. A.K. Pringgodigdo SH, ibid; Panitia Peringatan Hadji A. Sa-  
lim, ibid, Amelz, op.cit.
221. Ibid. Ibid.
222. L. Stoddard, op.cit.
223. Ir. Sukarno, *Sarinah*, Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan  
Presiden Sukarno, tjet. ke-3, 1963, hl.146-158.
224. Departement Of. Information Republic of Indonsia, *The In-  
donesian Women Movement*, 1968; hl. 10; A.K. Pringgo-  
digdo SH' op.cit. hl.18; Armyyn Pane, *R.A.Kartini Habis*

*Gelap Terbitlah Terang*, Balai Pustaka, Djakarta, 1962, hl. 41-51.

225. Dep. In.RI., *ibid*, hl. 8; I. Djumhur – Drs. Danasuparta, *op.cit.*, hl. 151 – 159.
226. *Ibid*.
227. Mr. Susanto Tirtoprodjo, *op.cit.*, hl. 7
228. Abdurrachman Surjomihardjo, *op.cit.*, hl. 20
229. A.K. Pringgodigdo, SH., *op.cit.*, hl. 19
230. *Ibid*, hl. 165; Dep. of Information RI., *op.cit.* hl. 10
231. J.Th. Petrus Blumberger, *op.cit.*, hl.376
232. A.K. Pringgodigdo SH., *op.cit.*, hl. 165
223. Prof. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *op.cit.*, hl. 20 – 25.
234. *Ibid.*, hl. 29; Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976., hl. 95 – 125.
235. A.K. Pringgodigdo SH., *op.cit.*
236. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *op.cit.* (1974). hl. 25
237. Yusmar Basri, *op.cit.*, hl. 214
238. J.Th. Petrus Blumberger, *op.cit.*, hl. 205–206; Mr. Susanto Tirtoprodjo, *op.cit.* hl. 63
239. Mr. Susanto Tirtoprodjo, *ibid*, Yusmar Basri, *op.cit.*, hl. 215 – 216.
240. J.Th. Petrus Blumberger, *op.cit.*, hl. 213; D.M.G.Koch, *op.cit.*, hl. 127; Yusmar Basri, *op.cit.*, hl. 217.
241. Mr. Susanto Tirtoprodjo, *op.cit.*, hl. 63 – 64
242. Yusmar Basri, *op.cit.* hl. 218
243. Dr. H. Roelsan Abdulgani, *op.cit.* (1974) hl.7
244. D.M. G.Koch, *op.cit.* hl. 129
245. *Ibid.*, hl. 56 – 57
246. *Ibid*.
247. Yusmar Basri, *op.cit.*, hl. 184
248. D.M.G. Koch, *op.cit.*, hl. 47
249. Amelz, *op.cit.* hl.106; Mr. Susanto Tirtoprodjo, *op.cit.* hl.30.

250. D.M.G. Koch, op.cit., hl. 58; Mr. Susanto Tirtoprodjo, ibid., hl.13; Yusmar Basri, op.cit, hl. 184
251. ibid., hl. 65
252. Yusmar Basri, op.cit., hl. 83
253. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH, op.cit., hl. 22-23
254. Yusmar Basri, op.cit., hl. 111
255. D.M.G. Koch, op.cit., hl. 60-61
256. ibid., hl. 63-71
257. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit. (1975), hl.1 (I)
258. Sugianto, op.cit. hl. 11
259. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit., (1975) j hl. 1 (I)
260. Amelz, op.cit. hl. 51
261. Sugianto, op.cit., hl. 12
262. Yusmar Basri, op.cit., hl. 125
263. Amir Hamzah Wirjosukarto, op. cit., hl. 47
264. ibid
265. Deliar Noer, Hubungan Tiga Golongan, 1900 - 1942, majalah : *Bulletin Yaperna*, No. 14 th. III, Juni 1976,hl. 20-23
266. Sartono Kartodirdjo, op.cit., (1973),hl. 80-97
267. ibid.; Abubakar, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan karangan Tersiar*, Penerbit Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, Djakarta, 1957, hl. 57-62
268. Cindy Adams, op.cit. hl. 56
269. Djawatan Penerangan RI Prop. Djatim., *Propinsi Jawa Timur*, Surabaya, 1953, hl. 850
270. D.M.G. Koch, op.cit., hl. 75; Yusmar Basri, op.cit., hl. 51
271. ibid., hl. 66
272. ibid.
273. Amelz, op.cit. hl. 107-108
274. Mr. Susanto Tirtoprodjo, op.cit., hl. 30
275. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., op.cit. hl. 23
276. D.M.G. Koch, op.cit. hl. 72-73
277. ibid', hl. 73
278. Amelz, op.cit., hl. 109-110
279. Dr. I. Njoman Dekker, *Sedjarah Indonesia Baru, 1900-1945* Lembaga Penerbitan IKIP Malang, 1969, hl. 93
280. Yusmar Basri, op.cit., hl. 159
281. Amelz, op.cit. hl. 50-51
282. Bernhard Dahm, op.cit., hl. 40
283. Redaksi Prisma, op.cit., hl. 9; Sartono Kartodirdjo, op.cit. (1973) hl. 150

- (1973) hl. 150
284. Amelz, op.cit. hl. 106
285. *ibid.*, hl. 137-153
286. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit. (I) hl. 100
287. Team Penyusun Hari Jadi Kota Surabaya, *Hari Jadi Kota Surabaya*, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1975, hl. 115
288. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit. (I), hl. 100-101
289. Yusmar Basri, op.cit., hl. 50-51
290. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit. (1974); Wawardi, *Riwayat Hidup Kanjeng Pangeran Ario Handajaningrat*, naskah Ketikan diserahkan tahun 1977, hl. 7
291. *ibid.*, hl. 23-25
292. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH, op.cit., hl. 27
293. A.K. Pringgodigdo SH, op.cit., hl. 76
294. D.M.G. Koch, op.cit., hl. 79
295. Ir. S.J. Rutgers, op.cit. hl. 15; A.K. Pringgodigdo. op.cit hl. 76
296. J. Th. Petrus Blumberger, op.cit., hl. 135-136; A.K. Pringgodigdo SH., *ibid.*, hl. 76-77
297. Amelz, op.cit., hl. 114-115
298. Yusmar Basri, op.cit., hl. 111
299. A.K. Pringgodigdo SH., op.cit., hl. 78-79; LP. 143-144 (?)
300. J. Th. Petrus Blumberger, op.cit., hl. 144; Ir. S.J. Rutgers, op.cit., hl. 111; Mr. Susanto Tirtoprodjo, op.cit. hl. 54
301. *ibid.*, hl. 145-146; L.M. Sitorus, op.cit., hl. 28-29
302. *ibid.*, hl. 147-18; Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit. (1974), hl. 20; Ir. S.J. Rutgers, op.cit., hl. 29
303. D.M.G. Koch. op.cit., hl. 113.
304. L.M. Sitorus, op.cit. hl. 30
305. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., (II), hl. 11
306. Mr. Susanto Tirtoprodjo, op.cit., hl. 20-23
307. Dr. T.S.G. Moelia, *India, Sedjarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, Balai Pustaka, Djakarta, 1949, hl. 165-167
308. Mohammad Hatta, op.cit. (1976), hl. 41
309. *ibid.*, hl. 33-41
310. Yusmar Basri, op.cit., hl. 83
311. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit., (1974), hl. 23; Wawardi, op.cit., hl. 7
312. *Ibid.*, hl. 24-25

313. Amelz, op.cit., hl. 111; Mr. Susanto Tirtoprodjo, op.cit., hl. 15 - 16 & 39.
314. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit. (1974), hl. 24
315. ibid., hl. 23.
316. Mohammad Hatta, op.cit. (1976), hl. 95-124
317. ibid., hl. 99 - 100
318. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit. (1974); Imam Supardi, op.cit., hl. 9
319. J.Th. Petrus Blumberger, op.cit., hl. 250; Mohammad Hatta, op.cit. (1976), hl 100.
320. D.M.G. Koch., op.cit., hl. 131
321. Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, djilid I, tjet. ke-2 Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963, hl. 1-23.
322. Amelz, op. cit., hl. 114-115; D.M.G. Koch, op.cit. hl. 131-132; J.Th. Petrus Blumberger, op. cit. hl. 251-252; A.K. Pringgodigdo SH, op.cit. hl. 63..
323. J.Th. Petrus Blumberger, ibid, hl. 251 - 256 ; D.M.G. Koch, ibid., hl. 132
324. Wawardi, op.cit., hl. 9-10.
325. A.K. Pringgodigdo SH., op.cit., hl. 71.
326. Dr. J.M. Pluvier, *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesie, in de jaren 1930 tot 1942* N.V. Uitgeverij W. van Hoeve - 's-Gravenhage, Bandung, 1953., hl. 65; Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., (I), hl. 216; Dr. H. Roeslan Abdulgani, op. cit., (1976) hl. 27.
327. A.K. Pringgodigdo SH, op.cit., hl. 129.
328. Richard Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perdjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1975, hl. 64.
329. A.K. Pringgodigdo SH, op.cit. hl. 65
330. Prof. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, op.cit., hl. 26.
331. ibid., hl. 29; Mohammad Hatta, op.cit., (1976) hl. 95-124.

332. "Pidato toean Mr. Singgih pada pemboekaan gedoeng Studieclub di Soerabaja pada tg. 21-22 Februari 1925", dalam harian: *Kemadjoean-Hindia*, No. 24,23 Februari 1925 hl. 1; Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit., (1974) hl. 21.
333. J.Th. Petrus Blumberger, op.cit., hl. 250; Mohammad Hatta, op.cit. (1976), hl. 100
334. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, op.cit., hl. 311
335. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit. (II), hl. 139
336. Biro Pemuda Departemen P.D. & K., op.cit., hl. 53.54; J.Th. Petrus Blumberger, op.cit., hl. 393.
337. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, op.cit., hl. 42
338. D.M.G. Koch, op.cit. hl. 131-132; A.K. Pringgodigdo SH, op.cit., hl. 63.
339. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, op.cit. hl. 70.
340. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH, op.cit., hl. 27.
341. Mohammad Hatta, op.cit., (1976), hl. 39-62; D.M.G.Koch, op. cit. hl. 95-96.
342. Wawardi, op. cit. hl. 8-9.
343. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op. cit. (1974), hl. 28
344. Wawardi, op. cit., hl. 10-11
345. Selo Soemardjan, op.cit., hl. 5-8; Yusmar Basri, op.cit., hl. 163-179.
346. Amelz, op.cit., hl. 114-115.
347. Sugianto, op.cit., hl. 12-17
348. I. Putu Putra, op.cit.; Yusmar Basri, op.cit., hl. 253
349. Djawatan Penerangan RI Prop. Djatim., op.cit., hl. 851-852.
350. Suyoto, "Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional", Pesantren dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta, cet. pertama, 1974, hl. 61.
351. Ali Saifullah HA, "Daarussalam, Pondok Modern Gontor", *Pesantren* dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta, cet. pertama, 1974, hl. 137.
352. *ibid.*, hl. 136

353. Yusmar Basri. op.cit., hl. 177.
354. Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme sebagai modal per-  
juangan Bangsa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Dja-  
karta, th. 1969, hl. 19.
355. ibid. hl. 19 - 20.
356. Yayasan Gedung-Gedung bersejarah Jakarta, *45 tahun Sum-  
pah Pemuda*, P.T. Gunung Agung, th. 1974, hl. 14-15.
357. ibid. hl. 15
358. ibid. hl. 15
359. ibid. hl. 15
360. ibid. hl. 16-17
361. ibid. hl. 53-54
362. Drs. C.S.T. Kansil SH., Drs. Julianto S.A., *Sedjarah Per-  
juangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Erlangga  
Djakarta th. 1972, hl. 41.
363. ibid. hl. 41
364. ibid. hl. 41
365. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro,  
Nugroho Notosusanto, editor Umum *Sejarah Nasional  
Indonesia V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
th. 1975, hl. 220.
366. Drs. C.S.T. Kansil SH., Drs. Julianto S.A., loc. cit.
367. Sartono Kartodirdjo, Marwati, Djoened Poesponegoro,  
Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 221
368. ibid. hl. 90
369. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 47
370. ibid., hl. 49.
371. Drs. I. Njoman Dekker, *Sedjarah Indonesia Baru, th. 1900-  
1945*, Lembaga Penerbitan IKIP Malang, th. 1969, hl.  
59.
372. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 51.
373. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro,  
Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 199.
374. Ali Sastroamidjojo SH., *Empat Mahasiswa Indonesia di*

- Negeri Belanda tahun 1927*, Yayasan Idayu, th. 1975  
hl. 21-32.
375. Prof. Ahmad Subardjo Djojodisurjo, *Peranan Ide-Ide dalam gerakan kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta th. 1975, hl. 29-30.
376. Drs. C.S.T. Kansil SH., Drs. Julianto S.A., op.cit., hl. 40.
377. Dr. H. Roeslan Abdulgani, *Almarhum Dr. Soetomo yang saya kenal*, Yayasan Idayu, Jakarta, th. 1974, hl. 31.
378. Yayasan Kesedjahteraan Keluarga Pemuda 66, *Buku Pantja Windhu Kebangkitan Perjuangan Pemuda Indonesia*, Djakarta, th. 1970, hl. 41-42.
379. ibid. hl. 44
380. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indone-sia*, Djakarta, th. 1963, hl. 57
381. ibid. hl. 58
382. Drs. I. Njoman Dekker, op.cit., hl. 101.
383. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., op.cit., hl. 57.
384. ibid. hl. 59.
385. Drs. I Njoman Dekker, op.cit. hl. 101.
386. ibid. hl. 90.
387. ibid. hl. 90-91.
388. ibid. hl. 91.
389. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., op.cit., hl. 69.
390. ibid. hl. 70.
391. Dra. Ek. S.K. Trimurti, *Hubungan Pergerakan Buruh In-donesia dengan pergerakan Kemerdekaan Nasional*, Yayasan Idayu th. 1975, hl. 12.
392. M. Sapija, *Sedjarah Pemberontakan di Kapal Tujuh (Zeven Provincien)*, Djakarta, th. 1960, hl. 66.
393. ibid., hl. 69-70.
394. Dra. Ek. S.K. Trimurti, op.cit., hl. 12.
395. ibid., hl. 12.
396. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op.cit. hl. 28.

397. M. Soendjoto, Mewoedjoetkan kenang-kenangan almarhum Dr. Soetomo, dimuat di dalam *Kitab Peringatan Windon ke I dari Cooperatieve Credit Centrale Toemapel*, th. 1940, hl. 17-18.
398. *ibid.* hl. 18.
399. *ibid.* hl. 18.
400. *ibid.* hl. 19.
401. Soedomo Prawirodirdjo, Riwayat Cooperatieve Credit Centrale Toemapel dimuat di dalam *Kitab Peringatan Windon ke I dari Cooperatieve Credit Centrale Toemapel*, th. 1940, hl. 21-24.
402. *Kitab Peringatan Windon ke I dari Cooperatieve Credit Central, Toemapel*, th. 1940 hl. 34.
403. *ibid.*, hl. 38.
404. *ibid.*, hl. 37.
405. *ibid.*, hl. 37.
406. *ibid.*, hl. 38-39.
407. *ibid.*, hl. 39.
408. *ibid.*, hl. 40-41.
409. *ibid.*, hl. 42.
410. *ibid.*, hl. 50.
411. R. Wawardi, Peranan wanita dalam Gerakan Koperasi dimuat di dalam 30 tahun koperasi, Surabaya, th. 1977, hl. 16-17.
412. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 35.
413. Drs. I Njoman Dekker, *op. cit.*, hl. 60.
414. *ibid.*, hl. 61.
415. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 44.
416. *ibid.*, hl. 50.
417. Pengoeroes, *Congres Indonesia Raya ke I, Soerabaja*, th. 1932, hl. 1-3.
418. *ibid.*, hl. 38-39.
419. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 36-37.

420. *ibid.*, hl. 45-46.
421. Drs. I Njoman Dekker, *op.cit.* hl. 58-61.
422. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 51.
423. Drs. I Njoman Dekker, *op.cit.*, hl. 31-36.
424. Drs. C.S.T. Kansil SH, Drs. Julianto, *op.cit.*, hl. 34-35.
425. Drs. I Njoman Dekker, *op.cit.*, hl. 39-40.
426. *ibid.*, hl. 41.
427. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 56-57.
428. Prof. Iwa Kusuma Sumantri, SH, *op.cit.*, hl. 71-72.
429. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 57-58.
430. *ibid.*, hl. 63.
431. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66, *op.cit.*, hl. 31.
432. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 64
433. *ibid.*, hl. 65
434. Drs. I Njoman Dekker, *op.cit.*, hl. 66-67.
435. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 60.
436. *ibid.*, hl. 60
437. Kitab Peringatan Windon ke I dari Cooperatieve Crediet Centrale Toemapel, *op.cit.*, hl. 34.
438. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.* hl. 60-61.
439. *ibid.*, hl. 61.
440. *ibid.*, hl. 70.
441. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hl. 235
442. *ibid.*, hl. 236
443. Prof. Dr. Slametmuljana, *op.cit.*, hl. 70.
444. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hl. 238.
445. Yayasan Gedung-gedung bersejarah Jakarta, *op.cit.*, hl. 101.
446. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66, *op.cit.*, hl. 55.
447. M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, Peladjar Bulan Sabit, th. 1969, hl. 155.

448. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 110.
449. M. Natsir, op.cit., hl. 155-158.
450. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 226.
451. ibid., hl. 241.
452. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 67.
453. ibid., hl. 68.
454. Yayasan Kesejahteraan Keluarga 66, op.cit., hl. 51.
455. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 238.
456. Yayasan Kesejahteraan Keluarga 66, op.cit., hl. 51-52.
457. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 239.
458. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66, op.cit., hl. 52-54.
459. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 90.
460. ibid., hl. 91.
461. ibid., hl. 91.
462. ibid., hl. 93.
463. ibid., hl. 94.
464. ibid., hl. 95.
465. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 78.
466. Drs. I Njoman Dekker, op.cit., hl. 101.
467. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., op.cit., hl. 70.
468. Drs. I Njoman Dekker, op.cit., hl. 100-101.
469. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 105.
470. H. Roeslan Abdulgani, *Perkembangan Tjita-tjita Sosialisme di Indonesia*, Yayasan Perguruan Tinggi Malang, th. 1960 hl. 19-20.
471. Prof. Dr. Slametmuljana, op. cit., hal. 61.
472. ibid., hl. 61.
473. I Djumhur + Drs. H. Donosuparto, *Sejarah Pendidikan*

- C.V. Ilmu , Bandung, th. 1974, hl. 145.
474. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 128.
475. ibid., hl. 254-255.
476. Drs. I Njoman Dekker, op.cit., hl. 100-101.
477. Dr. H. Roeslan Abdulgani, op. cit, hl. 30.
478. ibid., hl. 30.
479. ibid., hl. 30.
480. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 127.
48. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 289.
482. ibid., hl. 288-289.
483. ibid., hl. 271.
484. K.P.P.K. Bapalai Pendidikan Guru, *Sedjarah Nasional Djilid IIIB*, Bandung, hl. 158.
485. ibid., hl. 155.
486. Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *Lahirnya Republik Indonesia*, P.T. Kinta, Djakarta, th. 1972, hl. 13.
487. ibid., hl. 14.
488. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., op.cit., hl. 78.
489. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 81.
490. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., op.cit., hl. 79.
491. Prof. Drs. Slametmuljana, op.cit., hl. 88.
492. Soebagijo I.N., *Pecahnya Perang Pasific*, *Surabaya Post tgl. 6 Desember 1975*, hl. 4 dan 6.
493. ibid.
494. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 93.
495. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cit., hl. 1-2.
496. ibid, hl. 3-4.
497. Prof. Iwa Kusuma Sumantri, op.cit., hl. 82.
498. Drs. O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menantang*

*Fasisme Jepang*, Djakarta, th. 1962, hl. 54-55.

499. Yayasan Gedung-Gedung bersejarah Jakarta, op.cit., hl. 109.
500. Drs. O.D.P. Sihombing, op.cit., hl. 54-55.
501. Yayasan Gedung-Gedung bersejarah Jakarta, op.cit., hl. 109.
502. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 150.
503. *ibid.*, hl. 150.
504. *ibid.*, hl. 153.
505. Data dari Kotamadya Surabaya.
506. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 155.
507. *ibid.*, hal. 151..
508. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., op.cit., hal, 85.
509. Drs. O.D.P. Sihombing, op.cit., hal. 81-85.
510. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, op.cit., hl.113.
511. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hl. 153.
512. Prof. Iwa Kusuma Sumantri, op.cit., hal. 85.
513. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, op.cit., hal. 12.
514. *ibid.*, hal. 6.
515. Drs. O.D.P. Sihombing, op.cit., hal. 153.
516. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hal. 156-157.
517. Nugroho Notokusanto, *Pemberontakan Peta Blitar*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, hal. 3-4.
518. Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur*, Surabaya, th. 1953, hal. 347.
519. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, op.cit., hal.114.
520. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, op.cit, hal. 14.
521. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit., hal. 157.
522. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notokusanto, op.cit., hal. 14.
523. Prof. Dr. Slametmuljana, op.cit. hal. 157.
524. *ibid.* hal. 162-163

525. *ibid.*, hal. 163.

526. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op.cit.*, hal. 110.

527. Drs. O.D.P. Sihombing, *op.cit.* hal. 197

528. *ibid.* hal. 192.

529. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op.cit.*, hal. 115.

530. *ibid.* hal. 159-160.

---

## DAFTAR TATA NAMA/ISTILAH

### A

Afdeeling  
Afrika  
Agraria  
Al Mannar  
Amanat  
Ambon  
Among-methode  
Aristokrat  
Assosiasi

### B

Bakti  
Banteng Priangan  
Bataviaasch Nieuwsblad  
Belasting  
Bendungan  
Boedi  
Boedi Oetomo  
Burgemeester

### C

Capellen, Baron van dr.  
Charter  
Chijs, Mr.J.A. van dr.  
Chilafiah  
Coklat  
Contingenten  
Coolen, C.L.

### D

Daendels, H.W.  
Da'wat us Sjubban  
De - Express  
Dekker, E.D.  
Deklarasi Prinsip  
Deputasi  
Dermojoyo

Desentralisasi  
Deventer, Van  
Digul  
Djawa Dwipa  
Djeroekcooperatie  
dominasi  
Douwes Dekker, E.F.E.

### E.

eigendom  
Ende  
Erfpacht  
Ethis  
ethnis  
ethno-centris

### F

fasisme  
Féminisme  
Fendal. Z.  
Fi'il  
fiqih  
Fond Nasional  
furu

### G

Gemeenteraad  
Gereja  
Gerindo  
Gewestlijke Raad  
Gedung Nasional Indonesia.

### H

Han Ti Ko  
HBS  
hemileivastatrix  
Helopeltis  
Het Tijdschrift

Hindia – Maju  
Hindia Poetra  
Hoevel, Baron van  
Humanis

I

Ibu Taimiyah  
Imam Makdi  
Indische Partij  
Indonesia Berparlemen  
Indonesia Merdeka  
Indonesia Muda  
Infiltrasi  
Inlandsche School

J

Jam Yat – Khair  
Janji Nopember  
Jansens, J.W.  
Jawa – Maju  
Jawa – Raya  
Jong – Java  
Jong – Indonesia

K

Kakang Besut  
Kapal Tujuh  
Kartini, R.A.  
Kasan Mukmin  
Kodrat  
Komintern  
Komite  
Komite Bumiputra  
Komite Hidjaz  
Komidi Omong  
Konpergen  
Kring  
Kweek – School  
Kyai Dermojoyo

L

Lada  
Land Rente  
Liberal  
Liberia  
Loemboengcooperatie  
Lord Minto

M

Majelis Pertimbangan  
Mardisantoso  
Marhaen  
Marhaenisme  
Max Havelaar  
Menas  
Meubelcooperatie  
Muhammadiyah

N

nationaal – bewust  
national – home  
Ngelmu Begio  
Ngoro  
NIAS  
non-cooperation  
Notodiredjo, Pangeran  
November Belofte  
Novelle  
Nurul Islam

O

Oesoel  
Oetoesan Hindia  
Opendeur-politiek  
Opstal  
OSVIA

## P

Paguron  
Pajak Bumi  
Pajak Tanah  
Pan Aziatisme  
Panggugah  
Pauperisme-Commissie  
Peći  
Pemufakatan  
Pes  
Pesantren  
PETA  
Plampitan  
Prajurit Pekerja  
Profintern  
Proefstation  
Projokusumo  
Protonasionalisme  
Provincialisme  
Putri Budi Sedjati  
Putri Merdeka

## R

Radicale-Concentratie  
Raffles  
Ratu – Adil  
Reformasi-Islam  
Regent  
Regio-centris  
revivalistis  
rituil  
Robusta  
Rukun Tani

## S

Sakti  
Salaf  
Sarekat Buruh Cetak  
Sarekat Hidjo

Sarekat Rakyat  
Satyagraha  
Saudara – tua  
Sidomuljo  
Sekolah Menak  
Self – help  
sepak – bola  
Sieberg – J  
Sing Hwee  
Sin Jit Po  
S.I. Merah  
S.I. Putih  
Soerabajaasch Handelsblad  
Spreekdelict  
Staats – bewust  
STOVIA  
Studiefonds  
Sukarno  
Suluh Indonesia  
Suwardi Surjaningrat

## T

Taman Siswa  
Tanam Paksa  
Tarekat  
Tauchid  
Tebasan  
Thor  
Tiga serangkai  
Timbul  
Tirta Wilayah  
Tjahaja – Timur  
Tjipto Mangunkusumo  
Toezicht Ordonantie  
Transvaal Boer  
Tri Koro Dharmo  
Trilogi

## U

upah

Upeti

V

Vak-Centrale

Verdeel en heers

W

Wanito Hodi

Wanito Utomo

Wiesel

Wiyung

wisik

X

Fenophobia

Z

Zelfbestuur

Zending

Zuiker – baronen

## DAFTAR BACAAN

- Abdurrachman Sumomihardjo, *Budi Utomo Cabang Betawi, Yayasan Idayu*, Jakarta, 1975.
- Abubakar, *Sedjarah Hidup K.H. Wahid Hasyim dan Karangan Terlepas*, Penerbit Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A.Wahid Hasyim, Djakarta, 1957.
- Adams, Cindy, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia*, terj. Major Abdul Bar Salim, Gunung Agung, Djakarta, 1966.
- Adams, C.C., *Islam and Modernist in Egypt*, terj. Ismail Djamil, Dian Rakyat.
- Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, Mr., *Lahirnya Republik Indonesia*, P.T. Kinta, Djakarta, th. 1972.
- Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, Prof., *Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- Ali Saifullah HA., "Daarussalaam, Pondok Modern Gontor", dalam: *Pesantren dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta cet, pertama, 1974.
- Ali Sastroamidjojo, S.H. *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda tahun 1927*, Yayasan Idayu, th. 1975.
- Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto, *Hidup dan Perjuangannya*, djilid I, Bulan Bintang, Djakarta, 1952.
- Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaruan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, U.P. Ken Mutia, tjet. ke-3, 1968.
- Amir Hamzah NST, *Sedjarah Kebangsaan*, Pustaka Antara, th. 1952.
- Armijn Pane, R.A. Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Balai Pustaka, Djakarta, 1962.
- Balfas, M., *Dr. Tjiptomangoenkoesoemo Demokrat Sedjati*, Djambatan, tjet. ke-2, Djakarta, 1957.
- Biro Pemuda Departemen P.D.&.K., *Sedjarah Perjuangan Pcmuda Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1965.
- Blumberger, J.Th.Petrus, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*, Haarlem - H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. 1931.

- Dahm, Bernhard, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, Pall Mall Press, London, 1970.
- Deliar Noer, *The Modern Muslim Movement in Indonesia*, Oxford University Press, Singapore, London, and New York, 1973.
- , "Hubungan Tiga Golongan, 1900 – 1942, dalam: *Buletin Yaperna*, No.14 Th. III, Juni 1976.
- Departement of Information Republic of Indonesia, *The Indonesian Women Movement*, 1968.
- Djumbur, I dan Drs. H. Donosuparto, *Sejarah Pendidikan*, C.V. Ilmu Bandung, th. 1974.
- Gibb, H.A.R., *Mohammadanisme*, Oxford University Press, London New York-Toronto, 1954.
- Hall, D.G.E., *A History of South East Asia*, London Macmillan & Co LTD. New York-St Martin's Press th. 1960.
- Hidajat. Z.M., Drs., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Penerbit "Tarsito", Bandung, 1977.
- Indema, H.J. *Parlementaire Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, Martinus Nijhoff th. 1924.
- I Djumhur & Drs. H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, cet. ke-5 Penerbit CV Ilmu, Bandung, 1974.
- Imam Supardi, *Swargi Dr. Sutomo*, Panjebar Semangat, Surabaya, cet. ke-3 1959.
- I Njoman Dekker, Drs., *Sedjarah Indonesia Baru, 1900–1945*, Lembaga Penerbit IKIP, Malang, 1969.
- I Njoman Dekker SH., Drs., *Sejarah Indonesia Dalam Abad XIX, 1800 – 1900*, Lembaga Penerbitan "Almamater", YPTP IKIP, Malang, 1975.
- Iwa Kusuma Sumantri SH., Prof., *Sedjarah Revolusi Indonesia*, djilid I, Djakarta, 1966.
- Kansil, Drs. C.S.T.S.H., Drs. Julianto S.A., *Sedjarah Perdjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Erlangga, Djakarta th. 1972.
- Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur*, Surabaya, th. 1953.

- K.P.P.K., Balai Pendidikan Guru, *Sedjarah Nasional, djilid IIIB*, Bandung.
- Kielstra, E.B., *De Vestiging van het Nederlandsche Gezag in den Indischen Archipel*, F. Bohn Haarden, th. 1920.
- Koch, D.M.G., *Menudju Kemerdekaan*, terdj. Abdoel Moeis, Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951.
- Kuntjoro Purbopranoto SH., Prof. "Pengaruh Sumpah Pemuda 1928 Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", *Majalah: Gema Angkatan 45*, Dewan Harian Nasional Angkatan 45, Jakarta, No.14, Februari 1977.
- Laporan Team Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jatim., *Sejarah Daerah*, Balai Penelitian Pendidikan IKIP Surabaya, 1976.
- Leirissa, Richard Z., *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1975.
- Machie, J.A.C., *Sedjarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia modern*, P.T. Pembangunan Djakarta, th. 1961.
- Majelis Luhur Taman Siswa, *Pendidikan dan Pembangunan, 50 Tahun Taman Siswa*, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta, 1976.
- Margono Djojohadikusumo, Dr. E.F.E., Douwes Dekker (*Dr. Da-noedirdjo Setia Boedi*), Bulan, Bintang, Jakarta, 1975.
- Moelia, Dr. T.S.G., *India, Sedjarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, Balai Pustaka, Djakarta, 1949.
- Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Mohammad Hatta, Dr., *Permulaan Pergerakan Nasional*, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- Muhammad Tauchid, *Perjuangan dan Adjaran Ki Hadjar Dewantara*, Majelis Taman Siswa, Jogjakarta, 1963.
- Muller Kruger, Th., *Sejarah Gereja Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, th. 1966.
- Multatuli, *Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda*, Djembatan th. 1973.

- Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, P.P. Muhammadiyah, Djogjakarta, 1971.
- Natsir, M., *Islam dan Kristen di Indonesia*, Peladjar Bulan Sabit, th. 1969.
- Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan Peta Blitar*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.
- Panitia Pameran Pekan Raya Jakarta, *Coklat*, Surabaya, th. 1975.
- Panitia Peringatan Hadji A. Salim, *Djedjak Langkah Hadji A. Salim*, Tintamas, Djakarta, 1954.
- Panitia Penggali Sedjarah Kabupaten Sidoardjo, *Sedjarah Kabupaten Sidoardjo*, 1970.
- Pedoman Besar Jong-Java, *Gedenkboek Jong-Java*, 1915–1930, Jakarta, 1930.
- Pengoeroes, *Congres Indonesia Raya ke-I*, Soerabaja, th. 1932.
- Pidato toean Mr. Singgih pada pemboekaan gedoeng Studieclub di Soerabaja pada tgl. 21–22 Februari 1925”, dalam harian: *Kemadjoean-Hindia*, No.24, 23 Februari 1925.
- Pluvier, Dr.J.M., *Overzicht van den Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesia, in de jaren 1930 tot 1942*, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve-'s-Gravenhage, Bandung, 1953.
- Polak, Drs. T.B.F. Major, *”Tentang Cultuurstelsel dan Penggantinya”*, majalah: *Penelitian Sedjarah*, No.4, Th. Ke-II, Jajasan ”Lembaga Ilmiah Indonesia untuk Penjelidikan Sedjarah, Djakarta, 1961.
- Pranoto SSP., *Ki Hadjar Dewantara, Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1959.
- Pringgodigdo SH., A.K., *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, tjet. ke-7, Dian Rakyat, Djakarta, 1970.
- Pringgodigdo, SH., Prof. A.G. *Capita Selecta Sedjarah Nasional/Pantjasila*, Djurusan Sedjarah FKIS-IKIP, Surabaya, 1972.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Jawa Timur*, th. 1976.
- Redaksi Prisma, *”Gerakan Mesianis dan Aspirasi Petani: Sebuah Pengantar”*, Majalah: PRISMA, no. 1, th. VI. LP3ES, Januari 1977.

- Reoslan Abdulgani, Dr., "100 Tahun HBS-Surabaya di Jalan Wijayakusuma (I-III)", *Harian: Surabaya Post*, Surabaya, 16 Agustus – Oktober 1975.
- , *Almarhum Dr. Soetomo Yang saya Kenal*, Idayu, Jakarta, 1974.
- , *Perkembangan Tjita-Tjita Sosialisme di Indonesia*, Jajasan Perguruan Tinggi Malang, th. 1960.
- Rutgers, Ir.S.J., *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, C.V. Hajam Wuruk, Surabaya, 1951.
- Sapija, M., *Sedjarah Pemberontakan di Kapal Tudjuh, (Zeven Provincien)*, Djakarta, th. 1960.
- Sagimun M.D., *Ki Hadjar Dewantara*, Bhatara, Jakarta, 1974.
- Sartono Kartodirdjo, "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad XIX-XX", *Lembaran Sedjarah*, No.1., Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1976.
- , *Protest Movements in Rural Java*, Institute of Southeast Asian Studies Oxford University Press. PT. Indira, London – New York – Melbourne, 1973.
- , "Mitos Ratu Adil dan Aspirasi Petani", majalah: *PRISMA* No.1 th. VI., LP3ES, Jakarta, Januari 1977.
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto editor 'unuun Sedjarah Nasional Indonesia, jilid V dan VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, th. 1975.
- Selo Soemardjan, "Peranan Cendekiawan Dalam Pembangunan Nasional", majalah: *PRISMA*, No.11, Jakarta, November 1976.
- Sihombing, Drs. O.D.P., *Pemuda Indonsia Menentang Fasisme Jepang*, Djakarta, th. 1962.
- Sitorus, L.M., *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, tjet. ke-2, Pustaka Rakjat, N.V., Djakarta, 1951.
- Sjamsi Sumardjo, *Pengetahuan ke-Muhammadiyah*, stc. Indah, tjet. ke-5, 1971.
- Slametmuljana, Prof. Dr., *Nasionalisme Sebagai Modal Perdjuangan Bangsa Indonesia*, djilid I dan II, P.N. Balai Pustaka, Djakarta, 1968.

- Soebagijo I.N., "Pecahnya Perang Pasific," *Surabaya Post* tgl. 6 Desember 1975.
- Soedomo Prawirodirdjo, Riwayat Cooperative Crediet Centrale Toemapel dimuat di dalam *Kitab Peringatan Windon ke I* dari Cooperative Crediet Central Toemapel, th. 1940.
- Stooddard, PH.D., Lothrop, *Dunia Baru Islam*, terj. Letdjen. H.M. Muljadi Djojomartono cs., Panitia Penerbit Menko Kesedjahteraan RI, Djakarta, 1966.
- Sugarda Purbakawatja, R., Gazali, M.A. Queljoe, D.H. de, *Sekolah dan Masjarakat*, Ganaco N.V. Bandung – Djakarta Amsterdam th. 1956.
- Sugianto, *Sedjarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas di Indonesia*, Widjaja, Djakarta, 1971.
- Sukarno, Ir., *Sarinah*, Panitia Penerbit Buku-Buku Presiden Sukarno, tjet. ke-3, 1963.
- , *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid I, tjet. ke-2, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963.
- Sutrisno Kutojo dan Drs. Mardanas Safwan, *Riwayat Hidup dan Perdjuaan Dr. Sutomo*, Angkasa, Bandung.
- , *R.A.Kartini*, Angkasa, Bandung.
- Susanto Tirtoprodjo, Mr. *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, P.T. Pembangunan, Djakarta, 1962.
- Suyoto, "Pondok Pesantren Dalam Alam Pendidikan Nasional", Dalam: *Pesantren dan Pembangunan*, LP3ES, cet.ke-I, Jakarta, 1974.
- Teem Penyusun Buku Hari Jadi kota Surabaya, *Hari Jadi Kota Surabaya*, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1975.
- Teem Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur, *Monografi Daerah Jawa Timur, Buku I*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972.
- Trimurti, Drs. Ek. S.K., *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan pergerakan Kemerdekaan Nasional*, Yayasan Idayu th. 1975.

- Van Kan H., *Unit onze Kolonien, Leiden, th. 1903.*
- Vlekke, Bernhard H.M., *Geschiedenis van den Indischen Archipel, J.J. Romen & Zonen – Uitgevers Roemond – Maseik, th. 1947.*
- Vlekke, Bernhard, H.M. *Nusantara A History of Indonesia, W. van Hoeve, The Hague, 1965.*
- Wawancara dengan Sdr. *I Putu Putra*, Ketua Yayasan Taman Siswa cabang Surabaya, di Genteng Kali, 1977.
- Wawardi, *Riwayat Hidup Kanjeng Pangeran Aris Handajaningrat*, naskah ketikan diserahkan tahun 1977.
- Wawardi, R. Peranan wanita dalam Gerakan Koperasi dimuat di dalam *30 tahun koperasi*, Surabaya, th. 1977.
- Wertheim, W.F., *Indonesian Society in Transition*, Brussel's Gravenhage, 1959.
- Wisnomo Wahono, S., "Mesianisme Dalam Perjuangan Petani: Tinjauan Dari Sisi Kekristenan", majalah: *PRISMA*, LP3ES No. 1, Januari 1977.
- Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Jakarta, 1974.
- Yayasan Kesedjahteraan Keluarga Pemuda 66, *Buku Pantja Windu Kebangkitan Perjuangan Pemuda Indonesia*, Djakarta, th. 1970.
- Yusmar Basri, *Sejarah Nasional Indonesia V, "Jaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Akhir Hindia Belanda"*, Ed. Sartono Kartodirdjo cs., edisi ke-2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Kitab Peringatan Windon ke I dari Cooperatieve Crediet Centraal Toemapel*, th. 1940.

**Tambahan:**

- Departemen Penerangan RI., *Ketetapan MPR. RI. No.IV/MPR/1971*, Djakarta.
- Departemen Penerangan RI., *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua*, 1974/1975 – 1978/1979, Buku ke III, Jakarta.
- Good Ph.D., Carten V. and Douglas E. Scates Ph.D., *Method of Research*, Appleten - Century - Grofts, inc., New York.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.

Collingwood, R.C., *The Idea of History*, Oxford University Press, London – Oxford – New York, Reprinted 1973.

Renier., G.J., *History Its Purpose and Method*, George Allen & Unwin Ltd., London, second impression, 1961.

Nugroho Notosusanto, Kolonel Drs., *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*, Departemen Pertahanan-Kemanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971.

Thomson, David, *The Aims of History*, Thames and Hudson, London, Reprinted, 1970.

Perpustakaan  
Direktorat Perlindungan dan  
Pembinaan Peninggalan  
Sejarah dan Perhalafala



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA

001716.4

G3.2